



Muhlisin, dkk.

**PENDIDIKAN AGAMA  
BERBASIS NILAI  
REFLEKSI, TEORI DAN PRAKTIK**

**STAIN Pekalongan Press  
bekerjasama dengan LKP2AI STAIN Pekalongan**

**MUHLISIN, dkk.**

**PENDIDIKAN AGAMA  
BERBASIS NILAI**

*Refleksi, Teori dan Praktik*

**Editor:  
Ahmad Ta'rifin**

**Diterbitkan Oleh:  
STAIN Pekalongan Press  
bekerjasama dengan LKP2AI STAIN Pekalongan**

**PENDIDIKAN AGAMA BERBASIS NILAI**  
*Refleksi, Teori dan Praktik*

**Penulis:**

Muhlisin  
Sofyan Sauri  
Maskhur  
Mutammam  
Agus Maemun  
Imam Hanafic al-Jauhari  
Maemonah  
Drs. Muh. Arwani  
Sopiah  
Ahmad Ta'rifin  
Umum Budi K.  
Moh. S. Untung  
Musfirotun Yusuf  
Ahmad Zaeni  
Khusniati Ningsih  
Dzakiron

**Editor:**

Ahmad Ta'rifin

**Cetakan I**

Maret 2012

ISBN : 978-602-8457-24-8

**Diterbitkan Oleh:**

STAIN Pekalongan Press bekerjasama  
dengan LKP2AI STAIN Pekalongan

## PENGANTAR PENERBIT

Buku yang berjudul "*Pendidikan Agama Berbasis Nilai: Refleksi, Teori dan Praktik*" ini diterbitkan oleh STAIN Pekalongan Press bekerjasama dengan Lembaga Kajian Pengembangan dan Pendidikan Agama Islam (LKP2AI) STAIN Pekalongan.

Buku ini berisi tentang strategi pengembangan pendidikan agama berbasis nilai di lingkungan pendidikan formal dan non formal (pesantren).

Sebagai sebuah kumpulan artikel yang mencoba menggapai pendidikan nilai dari berbagai sisi, *draft* awal buku ini sulit disusun menjadi bacaan yang sistematis. Tetapi dengan kesabaran berbagai pihak, buku ini menjadi naskah yang menarik untuk dibaca dan ditelaah oleh pemerhati dan praktisi pendidikan.

Isi buku ini dibagi menjadi dua bagian. Kajian diawali dengan tinjauan pendidikan agama dan nilai dari berbagai segi. Pendekatan ini dipakai untuk memberikan landasan teoritis bagi aksi pendidikan agama dan nilai. Bagian kedua berisi tentang langkah-langkah dan implementasi pendidikan agama dan nilai dalam dunia pendidikan.

Meski sederhana, buku ini patut diberikan apresiasi, karena disusun oleh banyak pakar dan praktisi pendidikan. Banyaknya pemikiran ini memungkinkan suatu ide berjalan tidak searah, tetapi saling timbal-balik dan melengkapi.

Penerbit STAIN Press berharap, model kerja sama seperti ini terus berlanjut dengan lembaga-lembaga lain di lingkungan STAIN Pekalongan.

Pekalongan, Maret 2012

Penerbit

# **SAMBUTAN**

## **DIREKTUR LKP2AI STAIN PEKALONGAN**

Buku yang ada di hadapan pembaca yang berjudul *“Pendidikan Agama Berbasis Nilai: Refleksi, Teori dan Praktik”* ini merupakan kumpulan tulisan dalam Seminar Nasional *“Membangun Bangsa Melalui Pendidikan Agama Berbasis Nilai”* yang diselenggarakan Lembaga Kajian dan Pengembangan Pendidikan Agama Islam (LKP2AI) STAIN Pekalongan pada tanggal 30 Juni 2008 lalu. Meski telah berlalu 4 tahun, tetapi momentumnya masih relevan, terkait tahun 2011 --oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan-- dinyatakan sebagai tahun Pendidikan Karakter.

Banyaknya tulisan yang dipresentasikan dalam Seminar tersebut menunjukkan apresiasi dan partisipasi tinggi dari *stakeholder* pendidikan tentang pentingnya pendidikan nilai dimplementasikan dalam praksis persekolahan di Indonesia.

Sesungguhnya, pelaksanaan seminar itu sendiri adalah bentuk refleksi terhadap satu dasawarsa perjalanan reformasi bangsa Indonesia, yang ditengarai dimulai dengan munculnya krisis multidimensional yang disebut-sebut bersumber pada krisis moralitas bangsa ini.

LKP2AI sendiri merupakan lembaga non struktural di lingkungan STAIN Pekalongan, yang *concern* terhadap isu-isu kritis dan kontekstual dalam dunia pendidikan Islam. Aksi kerja LKP2AI dilakukan melalui pelatihan-pelatihan, kajian-kajian, penelitian-penelitian, penerbitan-penerbitan dan seminar-seminar yang mampu menemukan titik solusi atas problem yang terjadi dalam pendidikan Islam.

Dengan demikian, ke depan, LKP2AI STAIN Pekalongan berusaha menjadi lembaga kajian yang terdepan dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan Islam, bukan hanya pada tataran ide dan teori, tapi juga pada wilayah praktis. Semoga.

Pekalongan, Maret 2012  
Direktur LKP2AI STAIN Pekalongan

## **SAMBUTAN KETUA STAIN PEKALONGAN**

Penyusunan Buku Teks Kuliah (Dasar) dan buku-buku bacaan ilmiah di lingkungan STAIN Pekalongan sedang digalakkan oleh Penerbit STAIN Pekalongan Press dalam rangka menumbuhkan-kembangkan kreativitas dan intelektualitas dosen. Di antara buku yang berhasil disusun adalah buku *"Pendidikan Agama Berbasis Nilai: Refleksi, Teori dan Praktik."*

Buku ini ditulis secara "keroyokan" oleh dosen STAIN Pekalongan, dosen Sekolah Pascasarjana UPI Bandung, dosen Universitas Cokroaminoto Surakarta, dan para guru PAI di sekolah-sekolah di wilayah eks-Karesidenan Pekalongan.

Buku ini diterbitkan dengan maksud, agar pendidikan keagamaan, moral dan nilai mendapatkan tempat semestinya dalam implementasi pembelajaran di sekolah-sekolah, sehingga krisis multidimensional yang melanda bangsa kita tahun 1998 lalu --yang bersumber pada krisis moral-- tidak terulang kembali.

Buku ini sangat menarik untuk dimiliki, dibaca, dan didiskusikan oleh para pakar dan praktisi pendidikan, mahasiswa dan pembaca pada umumnya yang tertarik dengan isu pendidikan nilai. Karena, buku ini memberikan kontribusi berharga mengenai teori dan implementasi pendidikan nilai di lembaga pendidikan.

Atas semua hal itu, saya sebagai Ketua STAIN Pekalongan menyambut baik penerbitan buku ini, semoga bermanfaat bagi pencerahan dunia pendidikan di Indonesia. Amiin.

Pekalongan, Maret 2012  
Ketua STAIN Pekalongan,



Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag.

NIP. 1971011519980311005

# DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit\_\_iii  
Sambutan Direktur LKP2AI\_\_iv  
Sambutan Ketua STAIN Pekalongan\_\_v  
Daftar Isi\_\_vi

## BAGIAN PERTAMA

### PENDIDIKAN AGAMA DAN NILAI DALAM TINJAUAN\_\_ 1

#### Bab 1

Pendidikan Nilai: Sebuah Pengantar Awal\_\_3

#### Bab 2

Pengembangan Pendidikan Agama Berbasis Nilai: Perspektif Filsafat\_\_13

#### Bab 3

Pendidikan Nilai Moral Keagamaan dalam Sistem Pendidikan Nasional\_\_23

#### Bab 4

*Quo Vadis* Pendidikan Agama di Indonesia\_\_43

#### Bab 5

Pengembangan Pendidikan Agama dalam Mengatasi Problem Kemanusiaan\_\_53

#### Bab 6

Upaya Mengembangkan Pendidikan Berbasis Moral\_\_65

#### Bab 7

Memutus Mata Rantai 'Pendidikan Berbohong' sebagai Benih Korupsi: Refleksi Terhadap Pengembangan Pendidikan Agama di Indonesia\_\_75

#### Bab 8

Spiritualisasi Pendidikan Agama: Alternatif Pendidikan Nilai di Indonesia\_\_87

## BAGIAN KEDUA

### IMPLEMENTASI PENDIDIKAN AGAMA DAN NILAI DI LEMBAGA PENDIDIKAN\_\_111

#### Bab 9

Implementasi Pendidikan Nilai dalam Pembelajaran\_\_113

#### Bab 10

Pendidikan Agama yang Mencerahkan (Strategi Menanamkan Nilai *Ilahiyah* dan *Insaniyah* Melalui Pendidikan Agama di Sekolah)\_\_133

#### Bab 11

**Kepemimpinan dan Pendidikan Agama di Lingkungan Industri Pendidikan\_\_149**

**Bab 12**

**Tantangan Pendidikan Nilai Berbasis Pluralitas\_\_161**

**Bab 13**

**Paradigma Pendidikan Agama Islam di Sekolah\_\_179**

**Bab 14**

**Guru dan Pendidikan Kejujuran\_\_192**

**Bab 15**

**Urgensi Pendidikan Moral Keagamaan bagi Peserta Didik\_\_201**

**Bab 16**

**Pesantren: Basis Pendidikan Moral dan Nilai\_\_217**

**Tentang Penulis dan Editor\_\_231**



BAGIAN PERTAMA  
**PENDIDIKAN AGAMA DAN NILAI  
DALAM TINJAUAN**

# BAB 1

## PENDIDIKAN NILAI

### (Sebuah Pengantar)

#### A. Pengantar

Fenomena sosial merupakan fenomena yang amat kompleks. Di dalam fenomena sosial terdapat tumpukan jejaring yang berlapis-lapis. Pendidikan dan norma-norma sosial merupakan salah satu tumpukan jejaring yang membentuk apa yang disebut sebagai fenomena sosial. Sebagai salah satu dimensi sosial, pendidikan berperan penting sebagai salah satu unsur dalam proses pengembangan sosial. Pendidikan memberikan siraman pemahaman tentang apapun yang dianggap terbaik bagi proses kehidupan individu dan sosial. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika kemudian tokoh pendidikan, seperti Piaget, menempatkan pendidikan sebagai salah satu sisi dari berkesinambungannya gerak sosial yang tiada henti (Joy A. Palmer, 2006: 71-71). Relasi pendidikan dan realitas sosial menempatkan pendidikan sebagai titik temu hubungan normatif antara individu-individu dan norma sosial. Oleh karena itu, pendidikan mengejawantahkan eksistensinya sebagai komponen normatif dan sekaligus sebagai *guidance* proses penanaman nilai. Menurut hemat penulis, dalam konteks itulah gagasan Naquib al-Attas yang lebih menekankan konsep *ta'dib* dari *tarbiyah* dalam konsep pendidikan Islam menunjukkan arti pentingnya. (al-Attas, 1992: 63-76)

Berangkat dari gagasan di atas, tulisan ini berusaha mendeskripsikan secara ringkas tentang pendidikan nilai. Untuk kejelasan semuanya, tulisan ini diawali dengan pembahasan tentang pendidikan dan nilai secara terpisah baru kemudian pembahasan tentang pendidikan nilai baik

makna, arti penting dan kemungkinan-kemungkinan kurikulum yang dapat diterapkan.

Secara umum, pendidikan selalu mengusulkan beberapa tawaran bahan ajar konseptual dan praksis untuk diajarkan kepada peserta didik guna memberikan peran sertanya dalam proses pencerdasan hati dan akal anak bangsa secara menyeluruh. Pada sisi lain, perlu juga dipahami bahwa pendidikan bukan ditujukan untuk menyelesaikan seluruh masalah sosial. Pendidikan hanya berusaha memproyeksikan tatanan sosial yang lebih baik dan mengantar manusia menuju kepada peradaban manusia yang lebih manusiawi. Pendidikan adalah pemanusiaan manusia muda (Driyarkara, 2006: 231). Berdasar pada pemahaman atas pendidikan di atas, pendidikan nilai sesungguhnya sudah terintegrasi dalam konsep pendidikan secara umum.

Pada saat yang sama, penulis berpendapat bahwa sekecil apapun peran yang diemban oleh pendidikan dalam problematika sosial, pendidikan tetap memiliki peran penting. Peran tersebut terutama untuk menjalankan proses transformasi pengetahuan di masyarakat. Pada saat yang sama, pendidikan nilai memiliki peran strategis untuk menjalankan proses transformasi dan proses pewacanaan atas konsep-konsep nilai dalam masyarakat baik, baik yang terkait dengan individu, sosial, kenegaraan maupun kaitannya dengan keagamaan. Oleh karena itu pendidikan nilai, dalam satu perspektif, tidak jauh berbeda dengan pendidikan moral, budi pekerti, etika/akhlak. Perbedaannya terletak pada cakupan dalam pendidikan nilai yang memang lebih luas dibandingkan pendidikan moral. Pendidikan nilai tidak sekedar pendidikan moral, budi pekerti, atau etika/akhlak. Pendidikan nilai juga merupakan proses penanaman dan perumusan nilai dalam setiap bidang kajian dalam proses pembelajaran (Metcalf, 1971: 57). Oleh karena itu, pendidikan nilai dapat dijalankan melalui berbagai pendekatan. Teuku Ramli Zakaria menjelaskan bahwa beberapa pendekatan dalam pendidikan nilai meliputi: (1) pendekatan penanaman nilai; (2) pendekatan perkembangan

kognitif; (3) pendekatan analisis nilai; (4) pendekatan klarifikasi nilai; dan (5) pendekatan pembelajaran berbuat (Teuku Ramli Zakaria, 2001:1).

## B. Apakah Pendidikan Itu?

Semenjak zaman Yunani kuno, pendidikan sejatinya telah banyak didiskusikan di kalangan para pemikir atau filosof pada waktu itu. Oleh karena itu penulis merasa menggurui pembaca jika kemudian mendeskripsikan apa itu pendidikan secara berlebihan dan bertele-tele. Untuk menghindari kesan tersebut, penulis hanya bermaksud memberi penekanan atas satu dimensi dalam pendidikan yang memang tidak jauh dan tidak lebih dari suatu proses penanaman nilai. Ketika pendidikan tidak lebih dari penanaman nilai bukan berarti pendidikan sama dengan penanaman nilai. Pendidikan merupakan forum penanaman nilai, ketika penanaman nilai tidak ada di dalam forum pendidikan, menjadikan forum pendidikan sebagai forum kosong tanpa isi. Secara harfiah, pendidikan merupakan *process of leading* (proses memimpin) (Dewey, 2004:10) Dalam Undang Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan usaha pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

## C. Apakah Nilai itu?

Telaah tentang nilai amat sangat sulit. Kesulitannya terletak pada kenyataan bahwa telaah tentang nilai baik langsung maupun tidak langsung, suka maupun tidak suka, masuk dalam wilayah kajian filsafat, khususnya bidang metafisika. Oleh karena itu, meskipun kata “nilai” sering dibicarakan tapi belum tentu pembicara paham tentang apa

yang disebut dengan “nilai”. Secara harfiah nilai dimaknai sebagai bobot atau takaran yang pasti. Nilai bisa juga dikatakan sebagai keistimewaan, kualitas atau harkat sesuatu hal. Nilai (*value*) berasal dari bahasa Latin *valere* yang bermakna mampu, berguna, berdaya, berlaku). Dalam bahasa Arab, nilai diistilahkan dengan *al-qimah* dari kata dasar *qa-ma* atau *aqama*, makna kalimat *aqimu al-shalat* adalah jadikanlah shalatmu agar bernilai, atau berikanlah nilai (berguna, memiliki daya, memiliki kualitas, memiliki bobot) pada shalatmu. Yang jelas dalam sejarahnya, konsep nilai justru lebih sering muncul di kalangan para pemikir ekonomi atau filsafat ekonomi. Gambarnya sederhana, ketika kita menukar satu gantang beras biasa dengan satu gantang beras ketan, adakah kemudian muncul persoalan nilai dalam proses transaksi tersebut? Bagi penulis, nilai transaksi (dalam bentuk saling tukar) antara dua objek adalah proses pemahaman nilai instrumental. Dikatakan sebagai proses penilaian yang instrumental karena terjadi dalam pola dimana manusia sebagai sumber atau penentu suatu nilai tidaklah berkuasa sepenuhnya karena yang paling menentukan suatu nilai dari dua objek benda yang ditukarkan itulah yang paling menentukan. Namun demikian, nilai dalam dua objek benda tersebut, sekali lagi hanya dan untuk kepentingan manusia. Untuk itu, nilai instrumental juga disitilahkan dengan nilai sebagai suatu alat bukan sebuah tujuan.

Di samping nilai instrumental, terdapat juga nilai hakiki atau dalam bahasa yang lain sering diistilahkan dengan nilai intrinsik. Nilai hakiki sifatnya vertikal, satu arah antara peran subjek dengan peran objek. Yang dimaksud dengan objek di sini tentu tidak sekedar benda, tapi seluruh realitas yang ada. Subjek baru mengenal adanya suatu nilai jika perbuatan, atau tindakannya memiliki visi. Visi atau yang sering disebut perspektif merupakan penggerak dan penumbuh suatu rasa tertentu yang menjadikan fakta empirik sebagai bukti realisasi suatu visi.

Nilai hakiki ini juga distilahkan dengan nilai sebagai suatu tujuan.

Bagi tokoh pendidikan seperti John Dewey, nilai sebagai alat dan nilai sebagai tujuan adalah dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu bagi Dewey yang terpenting justru melihat kontinuitas dalam interaksi antara alat dan tujuan. Itulah yang sesungguhnya membentuk kategorisasi suatu nilai. Dalam kapasitasnya sebagai tokoh pendidikan, Dewey menerapkan pemahaman tentang nilai di atas dalam wacana pendidikan secara moderat. Artinya, bagi Dewey, nilai dalam pendidikan dan/atau pendidikan tentang nilai selalu berada dalam realitas “*antara*”, antara dimensi nilai sebagai alat di satu sisi dan nilai sebagai suatu tujuan di sisi lain.

Nilai menurut W. Huitt diartikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari ide-ide abadi (*eternal ideas*) untuk tindakan atau perilaku (*behavioral actions*). Untuk itu, seperangkat nilai biasanya digunakan untuk menentukan suatu kriteria yang baik dan yang buruk. Nilai juga merupakan apresiasi secara afektif atas suatu objek, gagasan, atau tindakan yang menuntun suatu tingkah laku. Sementara tindakan menilai (*the act of valuing*) itu sendiri merupakan tindakan penilaian atau membuat penilaian (*value judgments*). Sebagaimana sebahagiannya diambil dari M. Rokeach dalam *The Nature of Human Values*, lebih jelas dari pandangan Huitt jadalah sebagai berikut (W.Huitt, 2004):

Values are defined in literature as everything from eternal ideas to behavioral actions. As used here values refer to criteria for determining levels of goodness, worth or beauty. Values are affectively-laden thoughts about objects, ideas, behavior, etc. that guide behavior, but do not necessarily require it (Rokeach, 1973). The act of valuing is considered an act of making value judgments, an expression of feeling, or the acquisition of and adherence to a set of principles. We are covering values as part of the affective system. However, once they are developed they provide an important filter for selecting input and connecting thoughts and feelings to action and

thus could also be included in a discussion of the regulatory system.

Pandangan Huitt di atas yang menegaskan bahwa persoalan nilai merupakan persoalan afektif juga didukung oleh Sudjana. Menurutnya, pendidikan nilai dapat juga diartikan sebagai pendidikan afektif (Sudjana, 2000). Sementara tentang pendidikan nilai itu sendiri Huitt menjelas bahwa yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha jelas dalam proses pembelajaran tentang nilai atau penilaian (*values education is an explicit attempt to teach about values and/or valuing*) (*ibid.*).

Ketika nilai selalu diorientasikan pada ranah afektif, apakah kemudian nilai jatuh pada wilayah subjektivitas? Pertanyaan ini memunculkan sekelompok intelektual yang berpandangan bahwa nilai itu sangat subjektif. Artinya, esensi suatu nilai selalu berkait -- kelindang dengan kebutuhan-kebutuhan subjektif. Sementara sekelompok intelektual lain berpandangan sebaliknya bahwa nilai selalu berkembang dalam ranah objektif. Artinya suatu nilai akan berkembang ketika keberadaan nilai tersebut didukung oleh kekuatan argumentasi dan memiliki entitasnya yang jelas di masyarakat. Di sisi lain, terdapat pula pandangan yang menyatakan bahwa nilai itu relatif. Relativisme nilai ini memahami bahwa suatu nilai dan penilaian akan jatuh pada keterbatasan-keterbatasan realitfnya.

Lepas dari persoalan tentang hakikat dan makna suatu nilai, hal penting yang harus menjadi dasar pemikiran bersama adalah bahwa persoalan tentang nilai baik dalam proses pembelajaran yang kemudian menjadi mata ajar pendidikan nilai atau dalam proses pengkajian yang kemudian menjadi wacana moralitas, etika, filsafat nilai, dan lainnya, harus ditelaah secara komprehensif.

#### D. Bagaimana Suatu Nilai Diajarkan dalam Proses Pendidikan?

Nilai tidak sekedar diwacanakan. Nilai juga perlu diterapkan. Pewacanaan dan penerapan suatu nilai

sebaiknya dilakukan dalam proses diskusi. Dalam tingkat yang paling bawah bolehlah jika kita mengatakan “Bagaimana nilai-nilai (tata cara) tentang makan kita ajarkan?” Tapi, untuk tingkat menengah, pertanyaannya adalah: “Bagaimana nilai-nilai (filosofi) tentang makan kita telaah?” Semua itu cerminan graduasi dan persoalan tentang nilai ketika diprosesalihkan dari subjek ke subjek yang lain. Jelasnya, pembelajaran tentang nilai selalu mencerminkan pola dan target atau tujuan yang ingin dicapai. Proses ini disebut dengan pendekatan dalam pembelajaran. Proses pembelajaran yang dilaksanakan dalam dunia pendidikan mengubah makna pembelajaran dengan istilah pendidikan. Di situlah muncul istilah *pendidikan nilai*.

Pendekatan pendidikan nilai adalah pola-pola pembelajaran berikut strategi, dan tujuan yang hendak dicapai dalam mentransformasikan materi pendidikan nilai kepada anak didik. Adapun pola atau varian pendekatan pendidikan nilai sebagaimana dikemukakan oleh W. Huitt (Huitt, 2004) dan Superka (Superka et.al, 1976) adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

#### TIPOLOGI PENDEKATAN DALAM PENDIDIKAN NILAI

PENDEKATAN	TUJUAN	METODE
Penanaman Nilai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu siswa untuk menerima nilai-nilai sosial tertentu.</li> <li>2. Membantu mengubah nilai-nilai siswa yang tidak sesuai dengan nilai sosial yang diinginkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keteladanan</li> <li>2. Penguatan nilai dalam bentuk simulasi dan permainan peran</li> </ol>
Perkembangan Kognitif/Afektif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu siswa dalam membuat pertimbangan moral yang lebih kompleks berdasarkan kepada nilai yang lebih tinggi.</li> <li>2. Mendorong siswa untuk mendiskusikan alasan-alasan ketika memilih nilai dan posisinya dalam suatu masalah moral.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembelajaran individu/kelompok tentang masalah-masalah sosial yang terkait dengan moral.</li> <li>2. Penyelidikan kepustakaan.</li> <li>3. Penyelidikan lapangan.</li> <li>4. Diskusi kelas berdasarkan kepada pemikiran rasional.</li> </ol>
Analisis Nilai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu siswa untuk menggunakan kemampuan berpikir logis dan penemuan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diskusi</li> </ol>



	<p>ilmiah dalam masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan nilai-nilai moral tertentu.</p> <p>2. Membantu siswa untuk menggunakan proses berpikir rasional dan analitik dalam menghubungkan dan merumuskan konsep tentang nilai-nilai mereka.</p>	
Klarifikasi Nilai	<p>1. Membantu siswa untuk menyadari dan mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri dan nilai-nilai orang lain.</p> <p>2. Membantu siswa supaya mereka mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan orang lain, berhubungan dengan nilai-nilai orang lain.</p> <p>3. Membantu siswa supaya mereka mampu menggunakan secara bersama-sama kemampuan berpikir nilai-nilai dan pola tingkah laku mereka sendiri</p>	<p>1. Dialog</p> <p>2. Menulis</p> <p>3. Diskusi</p>

Dari tabel di atas nampak jelas bahwa nilai bukan semata dogma atau ajaran yang harus diterapkan kepada anak didik. Nilai juga suatu bahan pengetahuan (*stock of knowledge*) yang dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat jika para pendidik mampu mengelola, menganalisis dan mengklarifikasi atau mengkritisi nilai. Untuk itu, bagi penulis pendidikan nilai bukanlah pendidikan budi pekerti, atau etiket. Pendidikan nilai adalah filsafat moral atau etika karena mengajarkan nilai berarti memfilsafatkan nilai.

### E. Simpulan

Dari paparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pendidikan nilai bukan sekedar persoalan bagaimana nilai diajarkan. Pendidikan nilai juga harus ditopang oleh

pemahaman mendasar tentang nilai itu sendiri, metode yang tepat untuk digunakan dalam proses pembelajaran tentang nilai, dan tujuan dari pendidikan nilai akan menentukan pola metode pembelajarannya. Dengan kalimat lain, pelajaran pendidikan nilai mengharuskan para pengampunya untuk sadar akan paradigma tentang nilai yang diajarnya. Jika tidak, yang terjadi adalah pembiasaan terhadap nilai dan menuduh anak didik bahwa mereka sudah tidak mengindahkan nilai.

Dimensi afektif manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat telah digali, dirumuskan, dan diajarkan sejak lama dengan berbagai perspektif pemahaman, seperti filsafat, agama, budaya, pendidikan, maupun perspektif pemahaman lainnya. Dengan alasan hak asasi manusia, dalam kenyataannya, moralitas, budi pekerti, etika, atau nilai selalu menjadi urusan pribadi dalam dunia pendidikan. Kenyataan ini tentu tidak sesuai dengan hakikat pendidikan itu sendiri yang meliputi dimensi kognitif, afektif, dan motorik. Oleh karena itu dalam format pendidikan nilai, pendidikan selayaknya masuk dalam wacana moralitas untuk ikut serta membangun dimensi afektif manusia. Dengan usaha membangun dimensi afektif, manusia atau anak didik pada khususnya, diharapkan mampu mengambil suatu *nilai* dalam seluruh aktivitas pada umumnya dan pendidikan, pada khususnya. Dengan demikian pendidikan nilai tidak sekedar mengajarkan moralitas tapi juga mengajarkan bagaimana merumuskan suatu tatatan moralitas.

*(Dra. Maemonah, M.Ag)*

### DAFTAR PUSTAKA

- Bagus, Lorens (2004). *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Utama Pustaka.
- Driyarakara (2006). *Karya Lengkap Driyarkara*, Jakarta: Gramedia Utama.
- Dewey, John. (2004). *Democracy and Education*, New York: Macmillan, 2004.
- Huitt, W. (2004). Values. *Educational Psychology Interactive*. Valdosta, GA: Valdosta State University. from <http://chiron.valdosta.edu/whuitt/col/affsys/values.html>.
- Maemonah. (2004). "Pendidikan Anak Menurut al-Ghazali" dalam *Forum Tarbiyah*, vol. 2, no. 1.
- Manning, Peter K. (1994). " Narrative, Content, and Semiotic Analysis" dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, London: Sage Publications.
- Mushthafa, M. "Pendidikan Nilai dan Khazanah Lokal", *Kompas* 23 April 2003.
- Nakosteen, Mehdi. (1965). *History of Islamic Origins of Western Education*, Colorado: University of Colorado Press.
- Nata, Abudin, (2006). *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Sauri, Sofyan, "Melawan Anomi dengan Pendidikan Nilai", *Pikiran Rakyat*.
- Sudjana, D. (2000). *Nisbah Ilmu Pendidikan Terhadap Kerangka Ilmu Pengetahuan*. Bandung: FJP-UPI.
- Superka et. al (1976). *Values Education Sourcebook*, Colorado: Social Science Education Sorsortium.
- Zakaria, T. Ramli (2001). Pendekatan-pendekatan Pendidikan Nilai dan Implementasinya, *Diklat Kuliah*, Jakarta.

## **BAB 2**

# **PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA BERBASIS NILAI**

### *Perspektif Filsafat*

#### **A. Pengantar**

Membahas persoalan nilai, agama dan pendidikan --termasuk pendidikan agama-- ibarat membahas sisi “segi tiga” yang saling terkait. Di satu sisi, nilai dipahami sebagai esensi atau kualitas harga atau isi pesan dari agama atau norma; agama merupakan perangkat ketentuan hukum atau norma yang berfungsi mengatur kehidupan manusia dan pendidikan merupakan wahana efektif bagi penyemaian nilai-agama dalam diri manusia itu sendiri. Ketiga sisi tersebut, tampaknya masih menjadi agenda yang belum terselesaikan sepanjang sejarah kehidupan manusia.

Di era globalisasi, eksistensi pendidikan agama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara justru menghadapi tantangan yang lebih berat dan kompleks. Kompleksitas permasalahan itu mengemuka seiring dengan munculnya berbagai isu global, seperti pemanasan global, pelanggaran HAM, tindak kekerasan yang terjadi antara kelompok masyarakat atas nama agama, tawuran antar pelajar dan mahasiswa serta berbagai tindak kriminal lainnya yang terjadi di berbagai lapisan masyarakat.

Adanya berbagai fenomena yang memprihatinkan tersebut, menurut Rohmat Mulyana<sup>1</sup>, lebih disebabkan oleh adanya pandangan yang terlalu simplistik mengenai norma agama, fenomena sosial yang terjadi dan wawasan pendidikan nilai yang terbatas, sehingga implikasi pada pemahaman yang sektarian-subjektif dan belum banyak menyentuh nilai universal-objektif.

---

1. Rohmat Mulyana, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, (Bandung: Alfabeta, 2004), h. 229.

Secara singkat dapat dikatakan, bahwa pendidikan agama masih dipahami secara parsial, sebatas sebagai pelengkap dan tercerabut dari nilai-nilai kemanusiaan universal lainnya. Padahal proses penyemaian nilai yang bersumber pada norma -- terutama agama, justru merupakan roh pendidikan itu sendiri. Apabila pendidikan kehilangan rohnya, maka dapat dipastikan ia tidak bisa lagi diharapkan dapat melahirkan sumber daya manusia (peserta didik) yang bernilai baik, yang nantinya akan melahirkan masyarakat yang bernilai baik pula.

Itulah sebabnya, tulisan ini hendak menguak sisi konsep pendidikan agama berbasis nilai dan pola pengembangannya dalam perspektif filsafat untuk dijadikan bahan masukan bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia saat ini dan waktu yang akan datang.

## B. Agama dan Pendidikan Agama

Kita sadari bersama, bahwa manusia hidup senantiasa membutuhkan adanya tata aturan atau norma tertentu untuk menjamin kelangsungan dan keteraturan kehidupan mereka. Tata aturan yang disebut norma hukum tersebut, bisa saja bersumber dari agama (kitab suci), negara (hukum positif) dan masyarakat (adat istiadat).

Dalam pandangan Islam, norma bersumber dari kitab Al-Qur'an, sebagaimana ditulis oleh Achmad Charis Zubair<sup>2</sup>, bahwa Al-Qur'an itu lebih merupakan petunjuk (*hudan*) bagi manusia, yang berarti pula sebagai "alat" untuk mencari kebenaran. Secara lebih rinci dikatakan, bahwa manusia memiliki lima "alat" untuk mencapai kebenaran, yakni: (1) indera yang berfungsi untuk menangkap kebenaran fisik tetapi parsial; (2) naluri yang berfungsi untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia; (3) akal yang berfungsi untuk melakukan penyadaran akan kausalitas tentang adanya keputusan Tuhan untuk dijadikan kontemplasi menuju pencapaian kebenaran yang lebih tinggi; (4) imajinasi yang berfungsi untuk

---

2. Achmad Zubair, *Kebebasan Manusia Menurut Konsep Islam*, (Jurnal Filsafat, Fakultas Filsafat UGM: Seri 20 Desember, 1994), h. 6.

mengungkap daya khas manusia dan berkreasi untuk menyempurnakan pengetahuannya; dan (5) hidayah (Al-Qur'an) yang berfungsi sebagai petunjuk (*hudan*) untuk mengungkap kebenaran ilahiyah yang langsung diberikan Tuhan melalui perantara Rasul Allah.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa Al-Qur'an sebagai sumber norma dari Allah melalui Rasul-Nya Muhammad SAW yang diyakini umat Islam sebagai kebenaran mutlak, *Ghoiru Qobilin Linniqosy* yang berlaku sepanjang kehidupan manusia. Sementara alat untuk mencapai kebenaran, Allah berikan kepada manusia seperti indera, akal, naluri dan imajinasi bersifat relatif atau *Qobilin Linniqosy* dan berlaku kondisional.

Pendidikan agama (baca: Islam) dalam pengertian yang lebih luas, merupakan sistem keberagaman atau *religious system* yang berfungsi untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dalam mencapai kebenaran dan menggapai kebahagiaan hidup hakiki bagi mereka yang berdasar pada norma Al-Qur'an dan instrumen akal, indera, naluri dan imajinasi itu. Optimalisasi pemberdayaan ke arah itu, tentu harus dilakukan secara dialektis, integratif dan berlaku sepanjang hayat.

Jika dihubungkan dengan pendidikan agama dalam arti yang lebih sempit yakni pendidikan formal, maka ia merupakan komponen kurikulum (mata pelajaran) di semua tingkat, jalur dan jenjang pendidikan formal yang wajib diberikan kepada peserta didik yang beragama Islam, dan bersamaan dengan itu seolah diwajibkan menciptakan lingkungan dan suasana yang kondusif bagi kepentingan pembelajaran dan praktik keagamaan secara baik. Untuk mengembangkan pendidikan agama di tingkat perguruan tinggi, misalnya di Fakultas Tarbiyah, maka pendekatan yang ditawarkan Soeroyo<sup>3</sup>, adalah: (1) sistematis, yakni sebuah pendekatan untuk melakukan perubahan secara keseluruhan dalam sistem pendidikan; (2) suplementer, yakni sebuah pendekatan untuk melakukan perubahan secara "tambal

---

3. Soeroyo, (Jurnal UNISIA, UII, Yogyakarta, Tahun 1992).

sulam” (menambah dan mengurangi) dengan cara penerapan paket pelajaran atau kegiatan pendidikan yang mengarah pada pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama Islam; dan (3) komplementer, yakni sebuah pendekatan untuk melakukan perubahan secara lebih mendasar dan radikal yang disertai dengan adanya *political will* semua pihak, terutama dalam melihat pendidikan agama di lembaga formal itu sendiri.

Dari paparan di atas dapat dipahami, pendidikan agama merupakan bagian integral dalam sistem pendidikan nasional dan sekaligus syarat mutlak untuk menyiapkan generasi penerus menuju terwujudnya cita-cita ideal pendidikan nasional yaitu: “manusia seutuhnya”. Manusia seutuhnya, sebagaimana ditulis dalam Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*<sup>4</sup> adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Kata kuncinya adalah, manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu dan beramal kebajikan serta berjiwa demokratis dan bertanggung jawab. Sebuah cita-cita yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama dan nilai-nilai universal kemanusiaan.

### C. Sistem Kehidupan dan Pendidikan Agama Berbasis Nilai

Melihat urgensi penyemaian nilai ideal yang bersumber dari norma agama dan nilai universal kemanusiaan itu, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan, bahwa pendidikan agama yang berbasis nilai itulah yang akan menjamin sistem kehidupan manusia. Dalam konteks ini, secara rinci Talcot Person dalam A.

---

4. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*

Kosasih Djahiri<sup>5</sup> menyatakan bahwa dalam sistem kehidupan bagi setiap organisme kehidupan manusia, paling tidak memiliki lima sistem: 1). Sistem Nilai (*Value System*); 2). Sistem Budaya (*Culture System*); 3). Sistem Sosial (*Social System*); 4). Sistem Personal (*Personal System*); dan 5). Sistem Organik (*Organic System*).

Dari kelima sistem tersebut tampak jelas bahwa diri dan sistem kehidupan manusia itu sarat dengan norma nilai dan moral. Artinya, manusia tidak bisa terbebas dari norma apapun atau bebas nilai (*value free*) dari apapun. Di sadari maupun tidak, setiap diri manusia dengan dirinya sendiri atau dengan orang lain senantiasa terikat dengan adanya suatu norma nilai dan moral tersebut. Mengenai potret diri dan sistem kehidupan manusia yang demikian itu, digambarkan oleh Maksudin<sup>6</sup>, bahwa manusia secara sistematis mengacu pada tiga aspek hirarkhis sistem kehidupan, yakni: (1) *Life Cycle* yang meliputi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, negara dan dunia; (2) *Life Aspect* yang meliputi adanya norma agama, budaya dan agama; (3) *Life Normative* yang meliputi adanya norma agama, budaya keagamaan, budaya adat atau tradisi, hukum positif atau negara, norma keilmuan dan norma metafisis atau sistem keyakinan tertentu.

Paparan di atas menunjukkan bahwa sistem kehidupan manusia di dunia ini, baik secara individu maupun kolektif dengan sesama manusia lainnya, senantiasa memerlukan adanya acuan norma. Norma sebagaimana disinggung di muka, merupakan perangkat ketentuan hukum yang bisa bersumber dari dua hal: *Pertama*, bersumber secara eksternal (dari luar diri manusia), seperti: Agama (Kitab Suci), Negara (Hukum Positif) dan Masyarakat Adat Istiadat), dan *Kedua*, bersumber secara internal (dari dalam diri manusia, yaitu nurani). Ketika norma yang telah menjadi bagian dari nurani itu telah

- 
5. Talcot Person dalam A. Kosasih Djahiri, *Esensi Pendidikan Nilai Moral dan PKN di Era Globalisme*, <http://ppsupi.org/sk Kosasih.html>1. Akses 20 Mei 2008.
  6. Maksudin, Disertasi "*Pendidikan Nilai Sistem Boarding School di SMP Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta*", (Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Tahun 2007), h. 28.



terpersonifikasi, maka ia dengan sendirinya telah menjadi sistem keyakinan diri atau prinsip diri dalam sistem kehidupannya yang sulit dipengaruhi oleh orang lain.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa, norma mengantarkan manusia dengan alat atau instrumen yang diberikan Tuhan kepadanya untuk memahami dan menghayati nilai-nilai di balik norma tersebut. Sedangkan nilai itu sendiri merupakan suatu esensi atau “buah” yang hendak dipetik dari pesan norma tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut catatan Cuk Ananta<sup>7</sup>, bahwa suatu nilai merupakan kualitas yang tidak riil. Dengan menggunakan pendekatan epistemologis dan metafisis, ternyata nilai itu bukanlah suatu benda, bukan bagian dari objek atau benda, melainkan sifat, kualitas atau *sui generis* yang dimiliki oleh obyek tertentu yang dikatakan “baik”. Menurutnya, bahwa ciri utama nilai adalah tidak independen, tapi selalu mengitari obyek dari sesuatu itu sendiri.

Sejalan dengan pemikiran di atas, Sinurat dalam Rohmat Mulyana<sup>8</sup> menulis bahwa nilai dan perasaan tidak bisa dipisahkan. Perasaan merupakan aktivitas psikis dimana manusia menghayati nilai. Sesuatu disebut bernilai bagi seseorang, jika ia menimbulkan perasaan positif seperti senang, simpati dan tertarik. Sebaliknya sesuatu itu disebut tidak bernilai, manakala ia menimbulkan perasaan negatif seperti benci, antipati dan jijik. Dengan demikian aktivitas perasaan positif seseorang itulah yang menjadi sesuatu itu memiliki nilai tertentu.

Kiranya agak berbeda dengan pendapat Max Scheler dalam R. Parmono<sup>9</sup>, bahwa nilai merupakan sesuatu yang dituju oleh perasaan yang mewujudkan “apriori emosi”. Dengan demikian, nilai bukanlah suatu ide atau gagasan. Nilai

- 
7. Wijaya Cuk Ananta Wijaya, “Nilai Menurut Risieri Frondizi” (Jurnal Filsafat, Fakultas Filsafat, UGM, Yogyakarta, tt.) h. 36.
  8. *Ibid.*, p. 36-37.
  9. R. Parmono, *Konsep Nilai Menurut Max Scheler*, (Jurnal Filsafat, Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta, tt), h. 43-44.

merupakan sesuatu yang konkrit yang hanya dapat dipahami dengan jiwa yang tergetar dengan emosi. Menurut Scheler, bahwa pengenalan tentang nilai mendahului pengenalan tentang benda. Sebagai misal, ketika kita melihat seseorang menilang orang lain, maka kita mengatakan bahwa ia telah berbuat baik. Dengan begitu kita telah memiliki persepsi nilai kebaikan dan secara bersamaan pula ditetapkan pada perbuatan tersebut.

Dengan pendekatan fenomenologi, Scheler mengelompokkan sifat nilai itu ke dalam empat kategori: (1) *Nilai Kesenangan* (terendah) yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat menimbulkan kesenangan; (2) *Nilai Vital* berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan; (3) *Nilai Ruhani* berkaitan dengan kehendak (baik-buruk), akal (benar-salah), rasa (indah-jelek); dan (4) *Nilai Suci* (tertinggi) berkaitan dengan hal-hal yang transendental --obyek absolut.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa nilai, baik yang bersifat kualitas tidak riil maupun apriori emosi, sesungguhnya merupakan kualifikasi harga (isi pesan) terhadap sesuatu (baca: epistemologis, fenomenologis maupun metafisis) sesuai dengan perasaan positif yang melatarinya.

Dalam konteks pengembangan pendidikan agama yang sarat dengan norma tersebut, kiranya alternatif pendekatan seperti epistemologis, fenomenologi maupun metafisis dapat diterapkan dan dikembangkan lebih lanjut lagi. Dari situlah diharapkan proses pembelajaran norma, - baik yang bersumber secara eksternal yakni dari Agama (Kitab Suci), Negara (Hukum Positif), dan Masyarakat (Adat Istiadat), maupun yang bersumber secara internal yakni dari dalam diri manusia (nurani) dapat berlangsung secara indoktriner semata. Jika hal ini terjadi, maka proses pendidikan agama akan mampu menghasilkan sumber daya manusia atau generasi yang benar-benar memahami dan menghayati nilai ruhaniah (akal, rasa dan ilahiah) yang merupakan nilai tertinggi di balik norma tersebut.

Sebagai ilustrasi, bahwa pendidikan agama secara normatif mengajarkan kepada pemeluknya tentang halal, haram, sunnah, makruh dan mubah. Kalau seseorang

mendekatinya secara fenomenologis --kontekstual tentang norma tersebut misalnya, maka akan melahirkan suatu pemahaman dan penghayatan nilai yang luar biasa tingginya, yang pada gilirannya akan diterapkan dalam kehidupan nyata secara arif dan bijaksana.

Ketika agama menggariskan tentang kezaliman yang secara normatif adalah dilarang hukumnya, maka diperlukan pendekatan tertentu dalam proses pembelajarannya, sehingga peserta didik dapat memahami dan menghayati nilai apa yang tersurat maupun yang tersirat di balik norma, kezaliman yang diharamkan itu. Begitu juga ketika norma agama mengajarkan bahwa memfitnah, menghina, dan merendahkan orang lain adalah perbuatan dosa, maka diperlukan pendekatan filosofis agar peserta didik memahami dan menghayati nilai di balik dosa tersebut.

Demikian halnya ketika agama mengajarkan tentang sedekah misalnya, maka ada nilai yang tersirat di balik ajaran tersebut. Begitulah norma mengatur kehidupan manusia, agar manusia melakukan respon positif dengan instrumen indera, naluri, akal, imajinasi dan hidayah yang Allah berikan kepadanya, sehingga dengan itu dapat memahami dan menghayati nilai tertinggi di balik norma tersebut secara baik dan benar untuk diterapkan dalam kehidupan nyata sebagai implementasi Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

#### D. Simpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa: *Pertama*, kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari sistem organisme yaitu: 1). Sistem Nilai (*Value System*); 2). Sistem Budaya (*Culture System*); 3). Sistem Sosial (*Social System*); 4). Sistem Personal (*Personal System*); dan 5). Sistem Organik (*Organic System*).

*Kedua*, sistem kehidupan tersebut mengacu pada norma agama, negara dan masyarakat yang berfungsi untuk mengantarkan kehidupan manusia mencapai kebenaran dan kebahagiaan hakiki.

*Ketiga*, manusia untuk mencapai kebenaran tersebut dibekali instrumen atau alat berupa: indera, akal, naluri, imajinasi, dan hidayah Al-Qur'an.

*Keempat*, pendidikan agama yang sarat dengan norma tersebut dibutuhkan pendekatan filosofis (seperti fenomenologi) agar manusia terutama peserta didik dapat memahami, menghayati dan menemukan nilai di balik norma tersebut sebagai bekal penyadaran dan pencerahan dalam mengamalkan agama.

*(Drs. Muh. Arwani, M.Ag)*

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Charis Zubair (1994). *Kebebasan Manusia Menurut Konsep Islam*, Jurnal Filsafat, Fakultas Filsafat UGM: Seri 20 Desember.
- Cuk Ananta Wijaya (tt.). "Nilai Menurut Risieri Frondizi", Jurnal Filsafat, Fakultas Filsafat, UGM, Yogyakarta.
- Maksudin (2007). Disertasi "Pendidikan Nilai Sistem Boarding School di SMP Islam terpadu Abu Bakar Yogyakarta", Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- R. Parmono (tt.). *Konsep Nilai Menurut Max Scheler*, Jurnal Filsafat, Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta.
- Rohmat Mulyana (2004). *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, Bandung: Alfabeta.
- Soeroyo (1992). *Jurnal UNISIA*, UII, Yogyakarta.
- Talcot Person dalam A. Kosasih Djahiri, *Esensi Pendidikan Nilai Moral dan PKN di Era Globalisme*, <http://ppsupi.org/sgkosasih.html>1. Akses 20 Mei 2008.
- UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*

# **BAB 3**

## **PENDIDIKAN NILAI**

### **DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

#### **A. Pengantar**

Lebih dari enam dasawarsa setelah kemerdekaan, bangsa Indonesia telah melaksanakan pendidikan nasional sebagai upaya berkesinambungan dari seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan tujuan bernegara dan berbangsa sebagaimana termaktub dalam dasar filosofis negara Indonesia, Pancasila. Dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 dinyatakan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung-jawab.

Realisasi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional seperti diamanatkan oleh UUSPN tersebut pada dasarnya telah termuat dalam ajaran agama kita, Islam. Oleh karena itu, pendidikan agama menjadi sebuah keniscayaan yang harus diberikan kepada anak-anak didik Indonesia sejak kecil di dalam rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Pendidikan agama seharusnya memberikan bantuan hidup beragama tidak sekedar memberikan materi-materi tentang ajaran-ajaran agama yang bersifat teoretik sebagai ilmu belaka (Daradjat, 1982: 28).

Prestasi dunia pendidikan kita dalam merealisasikan amanat UUSPN tersebut pada kenyataannya tidak terlalu menggembirakan, bahkan mengecewakan semua pihak. Salah satu indikator kegagalan pendidikan kita ditunjukkan oleh semakin rendahnya kualitas pelaksanaan kehidupan

keberagamaan masyarakat, terutama di kalangan masyarakat terdidik dan intelektual. Pendidikan Nasional kita memang menghasilkan manusia-manusia super di bidang iptek, tetapi moralitas mereka semakin rapuh. Kejahatan korupsi, pelecehan seksual, tindak kekerasan, penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan penyimpangan-penyimpangan moral lainnya justru dilakukan oleh mereka yang *notabene* berpredikat sebagai elit masyarakat *educated*.

Ironisnya tindakan amoral tersebut tidak lagi menjadi dominasi kaum laki-laki semata, bahkan sekarang kaum perempuan pun telah ikut ambil bagian dalam tindakan-tindakan sadisme. Baru-baru ini sebagaimana dilansir oleh berbagai media elektronika maupun cetak, muncul kelompok anak-anak pelajar perempuan yang membentuk geng (sebut saja Geng Nero, Geng Brenksek) yang di dalamnya mengandung aroma kekerasan (*Suara Merdeka*, 15 Juni 2008).

Meskipun tidak skeptis dan pesimis menatap masa depan pendidikan nasional, namun kita patut meninjau ulang kebijakan pendidikan selama ini. Pendidikan nasional kita seharusnya mampu membekali bangsa ini, terutama para peserta didiknya dengan piranti moral dan intelektual yang benar-benar dibutuhkan untuk memahami masa depan sehingga mampu menghadapinya dengan sikap bijaksana.

Dalam skala luas kita juga perlu mempertanyakan, pendidikan nasional yang bagaimanakah yang harus ditanamkan kepada generasi muda agar mereka tumbuh menjadi manusia yang memiliki ketahanan moral tinggi dan pada saat yang sama juga memiliki keunggulan intelektual sehingga mampu menghadapi hambatan dan tantangan yang akan mencabik-cabik tatanan nilai moral dan disintegrasi sosial? Pendidikan nilai moral keagamaan dalam konteks ini menjadi salah satu gagasan yang patut dipertimbangkan dalam mengatasi problematika krisis mutu pendidikan nasional yang sedang dihadapi bangsa kita.

## B. Wajah Pendidikan Nasional Kita Dewasa Ini

Salah satu problematika yang sedang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini adalah disintegrasi sosial. Ketahanan sosial

akan rapuh ketika terjadi disintegrasi sosial yang selanjutnya akan berpengaruh negatif pada proses pendidikan. Menurut Mochtar Buchori, masalah mendasar yang mengancam disintegrasi sosial dan ketahanan nasional adalah perubahan tata nilai yang disebabkan oleh pembaruan tata nilai pribadi (*personal value system*), tata nilai kelompok (*group value system*), dan tata nilai bangsa (*national value system*). Perubahan atau transformasi tata nilai ini mengharuskan kita meninjau ulang ketiga azas nilai tersebut secara simultan. Yang terjadi selama ini adalah adanya kesenjangan antara tata nilai sebagaimana yang tertulis dalam berbagai teks (*textual value system*) dengan tata nilai yang benar-benar kita taati dalam kehidupan sehari-hari (*actual value system*) baik dalam kehidupan pribadi, kelompok atau bangsa (Buchori, 2001: 82). Pemantapan proses transformasi tata nilai harus dilakukan untuk menegaskan identitas kita sebagai pribadi, kelompok dan bangsa.

Dalam kaitan dengan pemantapan proses transformasi tata nilai ini, pendidikan nasional mempunyai peranan yang penting. Jika proses ini dirasa berjalan lambat, hal itu disebabkan karena di lembaga pendidikan kita sangat jarang diajarkan mengenai nilai-nilai, mengenali kepribadian dan jati diri, dan tidak dididik untuk mengembangkan jiwa egaliter yang ada dalam diri kita, serta menjauhi sikap arogan. Pendidikan harus secara sadar mendidik para murid untuk menjadi manusia yang memiliki tata nilai yang mantap dan demokratis (Buchori, 2001: 84).

Dengan demikian, pendidikan harus membentuk hati dan perasaan anak didik, karena masalah nilai, jati diri, dan sikap egaliter adalah berkaitan terutama dengan masalah 'hati', masalah afeksi, dan bukan masalah pengetahuan semata. Lembaga pendidikan sekolah harus mengajari anak didiknya untuk mampu mengendalikan dirinya sendiri, menjauhi rasa sombong, dan merendahkan orang lain. Dengan kata lain sekolah harus secara sadar dapat menumbuhkan dan membina unsur cipta, rasa, dan karsa para anak didik. Sekolah harus membina



ranah kognitif, afektif, psikomotorik dan konatif secara bersama-sama.

Pendidikan pada hakikatnya merupakan bentuk alat transformasi yang efektif menuju perubahan-perubahan tertentu. Pendidikan hadir untuk membentuk manusia berhati lembut, berbudi luhur, saling mengasihi antarsesama dan memperlakukan lingkungannya secara manusiawi pula. Modernisasi yang terjadi di segala sendi kehidupan sekarang ini, tidak dapat diingkari merupakan kontribusi pemikiran yang diberikan oleh dunia pendidikan. Perkembangan peradaban manusia perlu diimbangi dengan upaya-upaya peningkatan kuantitas dan kualitas lembaga pendidikan (persekolahan).

Akan tetapi dihadapkan pada realitas sekarang, harapan terhadap dunia pendidikan tersebut sirna seiring dengan perkembangan peradaban manusia yang hidup dalam tradisi yang semakin kapitalis. Pendidikan yang ada sekarang hanyalah sebuah proses pembelajaran yang memaksa anak didik untuk menaiki jenjang pendidikan yang tak “berujung” (Susetyo, 2005: 137-8). Menurut Illich, sebagaimana dikutip oleh Benny Susetyo, pengajaran yang diwajibkan di sekolah membunuh kehendak banyak orang untuk belajar secara mandiri. Pengetahuan diperlukan ibarat komoditas, dikemas dan disajikan serta diterima sebagai jenis harta pribadi oleh yang menerimanya dan selalu langka di pasaran (Susetyo, 2005: 139).

Sebenarnya pendidikan merupakan media dalam melakukan proses belajar mengajar yang intinya adalah sebuah transformasi nilai atas murid atau masyarakat secara umum. Fungsi yang paling vital pendidikan adalah menggugah kesadaran kritis siswanya dan masyarakat pada umumnya untuk memberikan kedewasaan berpikir logis dan mampu mengkritisi perkembangan di sekitarnya. Dalam tataran yang lebih jauh, pendidikan harus mampu memerdekakan diri anak didik belenggu dirinya sendiri, adat istiadat dan struktur negara. Itulah mengapa pendidikan berfungsi sebagai instrumen yang efektif dalam mentransformasikan ide-ide bagi terbentuknya kesadaran massif di kalangan rakyat dalam melakukan gerakan perubahan sosial. Pemaknaan pendidikan seperti ini, dalam taraf

perkembangannya mengalami erosi disebabkan oleh realitas kepentingan kekuasaan yang hegemonik. Dengan pertimbangan pembangunan ekonomi, pendidikan nasional telah diabdikan untuk dalih pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mempertahankan status quo sehingga ia direduksi menjadi sangat pragmatis. Diskursus pendidikan yang mencita-citakan cinta kasih, humanistik, pembebasan, kemerdekaan, dan antikeseragaman, disederhanakan ke dalam pola yang diinginkan penguasa (Susetyo, 2005: 140).

Pada tahun 2004 pemerintah kita memberlakukan kurikulum baru yang disebut Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK, *competence based-curriculum*). Pada prinsipnya KBK memiliki realitas masyarakatnya. Anak didik yang tidak kering hati nuraninya dan mampu berempati atas penindasan secara fisik maupun non fisik. Namun demikian, dalam implementasinya di lapangan, KBK tersebut tergantung pada kreativitas dan profesionalisme pendidik untuk menyediakan silabus, termasuk mengelola sumber belajar agar penjabaran materi sesuai dengan pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Pertanyaannya adalah, apakah pendidik dan peserta didik kita selama ini sudah melaksanakan cita-cita KBK tersebut secara konsisten dan benar.

Jargon *life Skill* dan globalisasi sangat nyaring terdengar di semua tingkatan lembaga pendidikan kita berkaitan dengan pelaksanaannya KBK tersebut. Kecakapan hidup yang diharapkan dari model KBK di antaranya adalah pelajaran bahasa asing, terutama bahasa Inggris dan komputer. Dari sinilah munculnya fenomena baru dalam dunia pendidikan kita, di mana setiap siswa dari TK sampai PT diharuskan mempelajari kedua mata pelajaran tersebut. Arahnya sudah dapat dibaca, yaitu agar anak-anak Indonesia ke depan diharapkan mampu berbahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dengan bangsa lain di dunia, dan pada saat yang sama mereka juga menguasai teknologi informasi (komputer) supaya dapat berkompetisi di pasaran kerja sebagai dampak adanya globalisasi (Darmaningtyas, 2005:99). Alhasil, KBK seolah-olah diciptakan untuk merespon globalisasi semata.

Pada kenyataannya, setelah sekian tahun berjalan model KBK telah melahirkan bentuk penyeragaman sekaligus sentralisme baru melalui proses kolonisasi bahasa asing terutama bahasa Inggris dan teknologi komputer. Manusia yang multidimensi dan kehidupan berbangsa yang sedemikian kompleks disimplifikasi kebutuhannya dalam bentuk kemampuan berbahasa Inggris dan penguasaan teknologi informasi (komputer) semata. Kebutuhan menjalani kehidupan yang lebih holistik (menyeluruh) yang meliputi aspek budaya, seni, membangun relasi di tingkat lokal, melakukan kerja-kerja di sektor perairan, pertanian, kerajinan dan sebagainya, tidak pernah dipertimbangkan, apalagi diakomodasi sebagai hal yang memang perlu diajarkan di lembaga pendidikan (sekolah). Pada realitasnya, hidup ini sangat pluralis dan heterogen.

Penyebab lain dari kebopengan wajah pendidikan nasional kita adalah menyangkut sistem pendidikan yang berjalan selama ini. Kita memang mengakui bahwa sistem pendidikan kita telah menghasilkan golongan elite terpelajar (sarjana, magister dan doktor) dalam kuantitas sangat besar selama dua dekade terakhir. Pendidikan kita pandai mencetak tenaga-tenaga yang siap menjadi pemimpin/mandor, tetapi tidak siap menjadi pekerja yang terampil. Sesuatu yang sangat *impossible* jika jumlah lapangan pekerjaan terbatas, sementara calon pemimpin jumlahnya makin melimpah ruah, dengan perbandingan tenaga kerja yang sangat kecil. Pertumbuhan sekolah dan perguruan tinggi mungkin terus bertambah, namun kapasitas daya tampung mereka masih belum mampu mengakomodir para siswa/mahasiswa yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kebutuhan tenaga sarjana setiap tahun bukannya semakin meningkat, akan tetapi justru semakin berkurang. Dampak dari persoalan ini, adalah terjadinya *booming* sarjana yang menganggur. Jika hal ini dibiarkan, sangat mungkin akan menjadi 'masalah', kalau tidak dikatakan tragedi nasional bangsa kita. Barangkali sekarang kita agak sedikit merasa lega dengan adanya perluasan pendidikan yang berbasis pada kejuruan, keterampilan hidup (*life skill*) melalui sekolah-

sekolah kejuruan yang memberikan bekal keterampilan yang dibutuhkan oleh peserta didik sebagai bekal masa depannya.

Keberadaan sekolah dewasa ini sebagai lembaga pendidikan, bukannya tidak bermasalah. Lembaga pendidikan ini ternyata tidak mampu menjawab tantangan pembangunan yang memerlukan tenaga-tenaga yang berswadaya dengan watak pembangunan dan moral yang tangguh. Akibatnya, muncul skeptis terhadap sekolah yang dipandang hanya mampu memberi pelajaran-pelajaran teori dan kurang mampu memberi keterampilan yang memberi bekal hidup bagi seseorang di masa depan. Apalagi pembinaan moral/mental kurang mendapat perhatian memadai (Mangunpranoto, 2000:vii).

Sekarang kita menyadari, bahwa pendidikan nasional sudah lama tidak memberikan ruang bagi tumbuhnya manusia yang memiliki nilai-nilai dasar seperti prinsip keteguhan, konsistensi, integritas, disiplin, bertanggung jawab, rela berkorban, solidaritas sosial, dan toleran. Sebaliknya, pendidikan nasional terus-menerus menawarkan sesuatu yang sifatnya materialistik dan positivistik (Darmaningtyas, 2005:313). Segala sesuatu yang berkaitan dengan prestasi pendidikan diukur berdasarkan angka-angka, seperti nilai raport, nilai UN yang tinggi, dan jumlah lulusan yang banyak. Sangat sedikit yang menilai hasil pendidikan dari aspek-aspek nilai moral, seperti kejujuran, keadilan, tenggang rasa, kerja sama, empati, amanah (dapat dipercaya), dan nilai-nilai luhur lainnya. Padahal, nilai-nilai moral tersebut seharusnya diajarkan secara integral dalam semua mata pelajaran yang diberikan di sekolah. Sehingga pendidikan tidak hanya memenuhi otak anak didik dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan di berbagai bidang saja, tetapi juga menawarkan dan menumbuhkan nilai-nilai moral, terlebih lagi nilai-nilai moral yang bersumber pada agama.

### C. Orientasi Intelektual versus Spiritual dalam Pendidikan

Kegagalan pendidikan mencetak manusia yang 'berkepribadian' memunculkan sikap pesimis di kalangan sebagian masyarakat dengan menuduh lembaga pendidikan sekolah sebagai sumber kekerasan. Hal itu diakibatkan oleh

proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah yang *curriculum-oriented* sehingga menghilangkan eksistensi individu yang pada dasarnya memiliki kebebasan. Kurikulum mempostulatkan, bahwa proses belajar itu harus terjadi dalam suatu urutan dan harus memiliki korelasi antara berbagai urutan dalam proses belajar (Prasetyo, 2006:110). Kurikulum yang tertuang dalam satuan-satuan pelajaran kerap kali membosankan dan membuat stress anak-anak. Belum lagi beban pelajaran itu harus diujikan yang hasilnya akan dimuat dalam raport sebagai standar keberhasilan anak didik untuk meniti jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Dalam sistem pendidikan yang proses pembelajarannya hanya berorientasi kepada kurikulum yang dianggap telah memenuhi aspek perasaan, pikiran, dan harapan, maka aspek emosi cenderung dikendalikan untuk dipisahkan dari sisi intelektual. Hal ini menyebabkan hilangnya rasa ingin tahu pada diri anak didik. Mereka hanya dicekoki dengan gagasan yang *readiness* melalui otak dimana pengetahuan diperoleh, ditangkap, dan dimanifestasikan secara fisik. Sehingga pemikiran anak didik di sekolah hanyalah timbunan informasi (ilmu pengetahuan) yang tercerai-berai dan tidak tersistematisasi.

Dalam lembaga pendidikan nasional kita, anak didik diasingkan dari segala persoalan riil yang terjadi di sekitar mereka. Kehidupan akademik telah menjadikan anak didik hanya berkutat pada apa yang 'sepatutnya' mereka ketahui yang telah dikemas dalam mata pelajaran-mata pelajaran. Mereka mampu mengukir prestasi akademik yang mengagumkan dan mampu berkomunikasi secara fasih dalam bahasa asing serta mampu memanfaatkan teknologi canggih, akan tetapi perasaan mereka tidak sensitif terhadap persoalan-persoalan kemiskinan, kezaliman, penderitaan, pembodohan, arogansi dan lainnya yang secara kongkrit terjadi di sekitar mereka. Meskipun persoalan tersebut sangat meresahkan, namun anak-anak justru 'asyik' dengan rumus-rumus matematika, fisika, akuntansi, dan seabrek 'tugas' lain yang dipandang sebagai kredit poin dan investasi dari tangga 'kesuksesan' bagi masa depannya.

Jika keterasingan anak disebabkan oleh beban kurikulum, maka kekerasan di kalangan pelajar dipicu oleh model pembelajaran yang menganggap anak didik sebagai individu yang memiliki 'kelainan'. Oleh karena itu, para siswa harus diintegrasikan melalui sistem pendidikan yang bertujuan untuk membentuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang 'patut', 'sopan', dan 'pintar'. Konsep pendidikan seperti ini oleh Paulo Freire, sebagaimana dikutip Eko Prasetyo, disebut dengan pendidikan gaya bank (Prasetyo, 2006: 120). Dalam pendidikan gaya bank ini, peran pendidik ialah mengatur cara 'sesuatu masuk ke dalam' diri anak didik. Akibatnya, mereka dibelenggu dan ditekan untuk mematuhi apa yang dikehendaki oleh pendidik. Anak didik hanya diperkenankan untuk menerima apa yang dipandang 'baik', 'benar', dan 'unggul' oleh pendidik dan harus diraihinya bagaimanapun caranya. Prestasi anak diukur dari nilai-nilai itu semua, tidak dari performa moral-spiritualnya.

Pendidikan gaya bank tidak pernah memerdekakan anak didik, akan tetapi justru menempatkan mereka selalu berada di bawah kendali pendidik. Padahal, pendidik seharusnya menjadikan manusia lebih otonom (merdeka). Kebanyakan pendidik formal, tidak mampu memotivasi anak didik karena mereka tidak dilibatkan dalam pencarian aktivitas untuk menjadi 'seseorang', (sosok). Pada umumnya anak didik hanya diminta untuk menghafalkan 'jawaban' siap pakai. Pengetahuan sering disajikan kepada siswa bagai seonggok -atau bahkan seperti mayat -informasi, bukan seperti sosok kehidupan yang bergayutan dengan kenyataan. Dan setelah melewati ratusan bahkan ribuan jam dan tahun yang mubazir, pembelajaran tak ubahnya hanya mengajarkan 'paduan suara dengan lagu dan silabus resmi' (Shor & Freire, 2001: 7).

Bagi bangsa Indonesia, konsep pendidikan yang memerdekakan pada dasarnya telah dirintis oleh Ki Hadjar Dewantara. Bapak Pendidikan Nasional kita tersebut melukiskan makna pendidikan yang membebaskan dengan membuat ilustrasi bahwa seorang pemuda yang karena berpendidikan rendah lalu dengan sadar memilih menjadi penjual es dawet, jauh lebih merdeka daripada seorang sarjana yang ke mana-man

menentang stopmap berisi surat lamaran kerja, hanya karena dia malu melakukan pekerjaan lain di luar kantor. Substansi pendidikan yang memerdekakakan adalah kemandirian (*self-reliance*), tidak tergantung pada orang lain, dan memandang kehadiran orang lain sebagai individu yang saling memerlukan satu dan lainnya, bukan sebagai ordinar atau subordinat.

Ketika rezim Orde Baru berkuasa, pendidikan mengalami reduksi yang sangat hebat. Pendidikan disederhanakan ke dalam aspek-aspek ekonomis-material-teknis sebagai kebijakan pembangunan Orde Baru yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, banyak sekolah tidak memiliki kepekaan sosial yang tinggi, toleransi, empati terhadap ketidakadilan, dan kasih sayang terhadap sesama. Tak heran apabila produk pendidikan masa Orde Baru melahirkan generasi yang bertemperamen keras, lebih suka menggunakan okol daripada akal dan perasaan, memaksakan kehendak kepada siapa saja yang tidak sepaham (Darmaningtyas, 2006:314).

Pendidikan akan mengalami deviasi makna yang sesungguhnya, ketika pendidikan mem-panglima-kan capaian akademik (*academic achievement*) semata. Sungguh sangat ironi, bahwa realitas yang terjadi dalam dunia pendidikan kita lebih menekankan pentingnya nilai akademik yang dalam terma psikologis disebut kecerdasan intelektual (*Intellectual Quotient*). Mulai dari tingkat sekolah dasar sampai ke bangku kuliah, jarang sekali pendidikan yang menekankan aspek emosi yang disebut kecerdasan emosi (*Emotional Quotient*) yang mengajarkan integrasi; kejujuran, komitmen, kreativitas, visioner, ketahanan mental; kebijaksanaan, keadilan, amanah, pengendalian diri (Agustian, 2005: 38). Masih menurut Ary Ginanjar Agustian, bahwa krisis moneter yang menimpa bangsa Indonesia pada tahun 1997, pada dasarnya diawali oleh krisis moral dan krisis buta hati di mana-mana. Meskipun rakyat dan para pemimpinnya memiliki tingkat pendidikan relatif tinggi, namun pada hakikatnya mereka hanya mengandalkan logika (intelektual) *an sich* dengan mengabaikan suara hati, *emotional quotient* (Agustian, 2005: 39). Dan akibatnya terbukti, bangsa kita hingga sekarang ini masih *collapse*.

Kemampuan akademik, nilai raport, predikat kelulusan pendidikan yang tinggi tidak dapat dijadikan standar seberapa baik kualitas kerja seseorang, atau seberapa tinggi tingkat kesuksesan yang mampu dicapai. Menurut McClelland dalam *Testing for Competence Rather than Intelligence* sebagaimana dikutip Ary Ginanjar Agustian, seperangkat kecakapan khusus seperti empati, disiplin diri, dan inisiatif akan membedakan antara mereka yang sukses sebagai bintang kinerja dengan yang hanya sebatas bertahan di lapangan pekerjaan (Agustian, 2005: 42).

Orientasi dunia pendidikan yang dijalankan sekarang ini akan menghasilkan buah di masa mendatang. Jika pendidikan nasional Indonesia sekarang ini dimaksudkan untuk mengajar anak didik yang memiliki kesempurnaan secara intelektual, emosional, dan spiritual, maka akan menghasilkan pribadi-pribadi yang memiliki superioritas di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, keunggulan di bidang nilai moral, dan kekuatan iman. Oleh karena itu, terlalu na'if jika prestasi pendidikan hanya diapresiasi dengan selembar kertas yang di dalamnya tertulis angka-angka yang merefleksikan kompetensi-kompetensi intelektual belaka. Pendidikan tidak sekedar persoalan angka, tetapi pendidikan merupakan sebuah proses pewarisan nilai-nilai pendidikan yang memuat norma-norma yang telah teruji dan terseleksi oleh sejarah, yaitu berupa nilai-nilai luhur yang mesti dilestarikan oleh generasi berikutnya (Akhwan, 1997: 70). Patut disayangkan, sikap kita yang melihat hasil raport/UN anak didik sebagai ukuran kualitas keberhasilan proses pendidikan anak di semua jenjang pendidikan nasional kita dewasa ini, padahal prestasi akademik tersebut tidak lebih dari evaluasi aspek kognitif saja, sementara jangan dilupakan pula bahwa pendidikan juga memuat komponen afektif dari konatif yang harus diperhatikan.

Dunia pendidikan tidak boleh mengajarkan dikotomisasi antara unsur kebendaan dengan unsur agama, antara materialisme dengan spiritualisme (nilai-nilai ilahiah), antara dunia dengan akhirat. Sebab siapa pun yang memilih kehidupan 'vertikal', tentu akan menganggap bahwa kesuksesan dunia



dapat dinisbikan dan dimarjinalkan. Mereka unggul dalam kekhusyukan ibadah, akan tetapi gagal dalam percaturan dunia ekonomi, politik, sosila, budaya, dan ilmu pengetahuan/ eknologi. Sebaliknya, yang hanya berpijak pada kehidupan 'horisontal', kekuatan berpikirnya tidak pernah diimbangi dengan nilai spiritualitas, sehingga realitas kebendaan terus-menerus membelenggu hatinya. Pendidikan harus mampu mengintegrasikan antara rasionalitas dunia dengan spirit ketuhanan, atau dengan kata lain antara IQ/EQ dengan SQ (*Spiritual Quotient*).

#### D. Menelisis Pendidikan Nilai di Sekolah

Sebelum memasuki pembahasan tentang pendidikan nilai moral keagamaan, terlebih dahulu akan disinggung tentang peran lembaga pendidikan sekolah berkaitan dengan gagasan pendidikan yang membebaskan. Dalam salah satu dialognya dengan Ana Maria, sebagaimana dimuat dalam buku *Pendidikan Masyarakat Kota*, Paulo Freire dari Brasil menyodorkan sebuah pendidikan yang kritis dan dialogis, bukan pendidikan gaya bank (*banking pedagogy*). Menurutnya, pendidikan kritis dapat diterapkan dalam sekolah yang menekankan pemahaman ilmu pengetahuan yang bermakna secara kritis melalui komunikasi yang dialogis. Sekolah ini akan merangsang siswa untuk bertanya, mengkritik, dan berkreasi; sekolah ini akan mencari pengetahuan kolektif dengan cara mengartikulasikan pengetahuan ilmiah yang kritis melalui pengalaman-pengalaman hidup (Freire, 2006: 71).

Belajar dari pengalaman, para orang tua menyadari betapa sekolah menjadi jalan terbaik menuju dunia pendidikan, dan mereka berharap agar anak-anak mereka berpendidikan lebih tinggi. Namun pada kenyataannya, kebanyakan anggota masyarakat dewasa ini yang mengharapkan anak-anak mereka memperoleh manfaat sekolah lebih banyak dari diri mereka sendiri, merasa kecewa. Sekolah terlalu istimewa untuk merealisasi harapan ini, karena yang terjadi justru penurunan nilai akademis dan moral. Gelar perguruan tinggi dan ijazah sekolah banyak diberikan, tetapi gelar dan ijazah tersebut

kurang berarti baik dalam segi jumlah dan jenis pengajaran maupun dalam segi persyaratan kerja. Meskipun dalam skala tertentu sekolah telah mewariskan era teknologi yang dibutuhkan pada masa kini. Oleh Everett Reimer digambarkan, bahwa sekolah telah menjadi geraja universal dari suatu masyarakat teknologi yang membentuk dan mempublikasikan ideologinya ke dalam alam pikiran orang untuk menerima teknologi itu (Reimer, 2000:12). Sekolah boleh saja menghasilkan teknologi, tetapi teknologi yang dikendalikan oleh manusia, bukan sebaliknya manusia yang diperbudak oleh teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kerap kali memunculkan kekhawatiran berlebihan terhadap sosok manusia yang memiliki kekurangan ilmu pengetahuan dasar dan keterampilan, serta kehilangan sikap hidup yang patut. Lembaga pendidikan yang hanya berorientasi pada pembelajaran ilmu pengetahuan (*knowledge-based instruction*) akan menghasilkan anak didik yang tidak memiliki pandangan hidup yang dibutuhkan secara pantas. Indikatornya terlihat pada kurangnya sikap penghargaan anak didik terhadap orang-orang yang lebih tua, meningkatnya perilaku yang mementingkan diri sendiri dan keras kepala, sikap 'grusa-grusu', perilaku 'aneh', menurunnya kekuatan dan kebugaran fisik, hilangnya kepedulian terhadap persoalan-persoalan sosial, dan meningkatnya angka/kenakalan remaja, sebagaimana yang terjadi dalam dunia pendidikan di Jepang pada era 1980-an (Kanaya, 1988: 408).

Dalam konteks pedagogik, lembaga pendidikan sekolah juga merupakan lembaga yang memainkan peran indoktrinasi, meskipun nampaknya istilah ini berkonotasi agak negatif. Artinya, sekolah mengajarkan nilai dasar, di samping juga mengajarkan kecakapan-kecakapan yang bersifat kognitif. Di sekolah, anak-anak belajar untuk *mandiri, menghargai orang lain, mengambil inisiatif, berkompetisi secara wajar*. Sekolah merupakan lingkungan terlembaga yang mengajarkan nilai-nilai dengan cara-cara yang lebih efektif daripada cara-cara yang diakui secara umum dan merupakan lingkungan pertama-tama yang dihadapi oleh kebanyakan anak.

Sekolah yang menjadi harapan seluruh masyarakat tidak lain adalah sekolah untuk semua dengan manajemen partisipatoris dan demokratis, bukan sekolah tradisional yang mengasumsikan, bahwa anak hanya dapat belajar dengan hukuman dan tampan. Paulo Freire mengkritik sekolah tradisional ini disebabkan 'telah memperkeras bangku agar lebih keras dari kayu yang tumbuh secara alami', 'mendandani anak-anak yang sudah berkrah dan berdasi agar mereka mau belajar' (Freire, 2006: 83). Konversi dari sistem pendidikan tradisional menjadi pendidikan publik yang demokratis, bertanggung jawab, dan serius, merupakan cita-cita dari para pendidik yang memiliki gagasan progresif.

Pendidikan tidak boleh mempersiapkan anak didik untuk satu hal lain atau menjadi hasil sampingan dari aktivitas lain, seharusnya pendidikan merupakan suatu aktivitas yang benar-benar dimaksudkan untuk membantu manusia agar dapat memperoleh dan mempertahankan kekuasaan atas dirinya sendiri, masyarakat, dan lingkungannya. Oleh karena itu, sekolah harus memberi kesempatan kepada setiap anak didik untuk mempelajari apa yang perlu diketahuinya agar dapat bertindak secara cerdas demi kepentingan sendiri. Para pendidik harus dapat membuka kesempatan untuk belajar tidak hanya selama masa remaja, melainkan sepanjang hidup setiap orang. Meskipun salah satu hambatan terbesar ialah adanya anggapan yang hampir universal, yakni suatu anggapan merasa diri kita sebagai pendidik lebih tahu kepentingan mereka (para murid) daripada orang lain. Sekolah, misalnya hampir sepenuhnya memusatkan perhatiannya pada usaha untuk mengajar orang tentang apa yang dikehendaki orang lain agar mereka ketahu. Orang yang membuat keputusan tentang apa yang harus diajarkan di sekolah itu berpura-pura tahu dan bertindak demi kepentingan para pelajar. Maka kemungkinannya ialah mereka itu tidak tahu, atau bila mereka tahu, mereka bertindak berlawanan dengan yang mereka ketahu (Reimer, 2000: 69).

Dunia persekolahan memandang masalah pendidikan sebagai masalah mempengaruhi murid agar mempelajari apa yang seharusnya diketahuinya. Dari pendidikan model tersebut

rasanya tidak masuk akal bila kita menganggap bahwa banyak orang telah dibuat sedemikian rupa agar jangan mengetahui dan jangan belajar. Tetapi memang demikianlah keadaannya. Oleh karena itu, menurut Paulo Freire, tugas kita yang paling fundamental adalah melakukan pembebasan (*liberation*), bukan kebebasan (*liberty*) dalam dunia pendidikan. Tugas pembebasan merupakan upaya bagi pemulihan kebebasan, atau sebagai penemuan sebuah kebebasan yang masih terkekang. Para pendidik harus meyakini efektivitas praktik kependidikan sebagai sebuah elemen penting dalam proses pemulihan kebebasan (Freire, 2006: 79). Oleh sebab itu, perlu diciptakan sebuah pendidikan yang tujuan utamanya untuk reproduksi dan konstruksi ilmu pengetahuan dengan sebuah perspektif baru melalui sekolah yang progresif, parsipatoris, dan demokratis, dan dalam mewujudkan pendidikan seperti ini, model pendidikan apa pun akan gagal jika pengajarannya masih lebih mementingkan kognisi dengan mengorbankan ranah afeksi.

Kesatuan dialektis antara domain kognitif dan afektif akan menjadi bagian penting dari trend pendidikan abad 21 yang harus direalisasikan oleh pendidik progresif. Domain afektif akan menemukan sumbernya yang berlimpah ruah di dalam ajaran agama sebagai bangunan kecerdasan emosi yang berisi nilai-nilai dasar seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, empati, komitmen, toleransi, kebijaksanaan, kreativitas dan lainnya. Nilai-nilai dasar yang bersumber dari agama semacam ini sangat dibutuhkan dalam membangun kurikulum pendidikan nasional kita yang diharapkan dapat menghasilkan manusia Indonesia yang memiliki karakter baik. Penanaman dan pembinaan nilai-nilai moral keagamaan harus dilakukan terus menerus sejak anak lahir sampai mati.

Pembinaan nilai moral keagamaan hendaknya menjadi bagian integral dari bangunan sistem pendidikan nasional yang secara eksplisit tertuang dalam kurikulum nasional yang diajarkan di sekolah dari jenjang dasar sampai perguruan tinggi sebagai mata pelajaran wajib. Agama hendaknya masuk dalam pembinaan kepribadian seseorang sebagai penuntun dan pengendali moralnya. Jika agama dipisahkan dari pembinaan

kepribadian anak didik, maka pengetahuan agama yang dimilikinya hanya akan menjadi ilmu pengetahuan (*science*) belaka yang tidak mampu mengontrol dan mengendalikan sikap dan tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena yang kita saksikan di masyarakat sekarang sungguh ironis; tidak sedikit orang pandai memperbincangkan persoalan agama. Patut disadari, bahwa agama akan berfungsi sebagai pengendali nilai moral ketika agama itu dipahami dengan benar, dihayati, dan diamalkan (artinya agama berkaitan dengan aspek intelektual, emosional, dan praktik).

Akibat tereduksi menjadi instrumen politik, pendidikan agama yang seharusnya berperan menanamkan nilai-nilai kebenaran, cinta kasih, kebersamaan, toleransi, perdamaian, inovasi, dan nilai-nilai dasar lainnya menjadi mandul. Oleh karena itu, pendidikan agama jangan sekali-kali dipolitisir, sebagaimana pernah terjadi dalam dunia pendidikan nasional kita, terutama ketika Menteri Pendidikan Nasional dijabat oleh Nugroho Notosusanto (1983-1985) yang mewajibkan setiap murid baru harus menandatangani surat pernyataan yang menyebutkan tentang pelajaran jenis agama yang akan diikuti (Darmaningtyas, 2005:315).

Kecerdasan emosi yang disinari oleh nilai-nilai moral keagamaan memegang peran penting untuk mencapai kesuksesan di segala bidang, tidak saja dalam kehidupan dunia, tetapi juga untuk keselamatan akhirat. Hal demikian disebabkan karena pendidikan agama lebih banyak menggarap masalah hati. Menurut Robert K. Cooper, Ph.D., hati akan mengaktifkan nilai-nilai kita yang terdalam, mengubahnya dari sesuatu yang kita pikir menjadi sesuatu yang kita jalani. Hati mampu mengetahui hal-hal mana yang tidak boleh, atau tidak diketahui oleh pikiran kita, memimpin serta melayani (Agustian, 2005:40).

Menurut perspektif Islam, kecerdasan intelektual yang melahirkan ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari agama. Menempatkan ilmu agama hanya sebagai bagian dari ilmu humaniora dan atau istilah ilmu agama dalam jajaran ilmu pengetahuan berarti telah mendikotomisasikan antara ilmu pengetahuan dengan agama. Persoalan agama dipandang tidak

ada sangkut pautnya dengan ilmu pengetahuan alam dan sosial. Hal ini menyebabkan lahirnya orang yang berilmu tapi tidak beragama dan atau orang yang beragama tapi tidak berilmu. Dengan kata lain, banyak orang yang cerdas secara intelektual tapi dungu secara emosional, atau sebaliknya. Agama hanya menjadi entitas pribadi belaka, tidak menjadi pandangan hidup (*way of life*) yang menentukan semua orientasi dan metodologi berpikir (Achmad, 1991: 75).

Persoalan yang kita hadapi sekarang adalah, pendidikan agama yang seharusnya dapat diharapkan mampu memberikan solusi bagi permasalahan hidup dalam kaitannya dengan pembinaan nilai-nilai moral manusia, ternyata lebih dimaknai sebagai ketentuan-ketentuan “fiqh”, dan tidak dipahami secara lebih komprehensif. Agama hanya dilihat dari aspek ritual, simbol-simbol serta pemisahan antara kehidupan dunia dan akhirat. Pengajaran agama hanya sebatas hafalan yang dilakukan oleh otak kiri, tanpa pengalaman pengalaman oleh otak kanan, dan tanpa memahami esensi makna terdalam dari ajaran agama tersebut. Padahal dari ajaran-ajaran agama itulah pembentukan kecerdasan emosional dan spiritual bermula (Agustian, 2005:40).

Salah satu indikator kegagalan pendidikan nilai dapat kita lihat dari perilaku generasi muda terpelajar masa kini yang cenderung apatis, arogan, dan immoral. Bahkan pada pertengahan dekade 90-an, lahir generasi yang tidak pernah ada sebelumnya, yang disebut generasi *mall* yang selalu berfantasi tentang kehidupan serba enak dan nyaman. Mereka menghabiskan waktunya untuk *kongkow-kongkow* di *mall* sambil *mejeng* dan *ngrumpi* serta menyantap makanan siap saji. Tidak sedikit di antara para remaja itu adalah anak-anak pelajar yang dengan *pede-nya* masih mengenakan pakaian seragam sekolah lengkap dengan tasnya memadati *mall-mall*, bahkan pada jam-jam sekolah. Fenomena lain yang mewabah di kalangan remaja adalah merokok, seks pranikah, tawuran massal, pemakaian *drug* (obat-obatan terlarang), dan deviasi moral lainnya (Darmaningtyas, 2005: 189).

Kelahiran generasi *mall* kemudian disusul dengan generasi *handphone*, yaitu suatu kecenderungan remaja untuk bercanda

ria lewat sarana telekomunikasi dengan menggunakan *handphone*. Ekseks dari kehadiran generasi *mall* dan *handphone* ini adalah meningkatnya pola hidup yang konsumerisme di kalangan remaja sekaligus memunculkan gaya hidup baru yang disebut sebagai budaya *mall*; suatu budaya yang mengadopsi wacana dunia *mall*; pakaian serba ketat, seksi, mahal-mahal, trendi, gemar menyantap makanan siap saji, suka yang serba instan, dan mengembangkan bahasa gaul yang hanya dimengerti oleh kelompok mereka sendiri (Darmaningtyas, 2005: 192). Mereka menganggap, bahwa dirinya telah menjadi representasi dari kehidupan modern. Sehingga kemodernan bukan dipahami dari tataran pola pikir dan tingkah laku, tetapi simbol-simbol materialistik. Memperhatikan realitas kehidupan sekarang dan mendatang, terutama yang terjadi di kalangan kaum muda, tugas pendidik ke depan semakin berat. Oleh karenanya, secara otomatis fungsi dan peran pendidikan juga semakin tertantang, khususnya dalam membina nilai-nilai moral keagamaan mereka.

## E. Simpulan

Dewasa ini pendidikan nasional kita belum memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Hal itu disebabkan karena pendidikan nasional lebih mengutamakan potensi kognitif ketimbang potensi afektif dan konatif. Secara sistematis anak didik belum diberi keleluasaan dalam mengakses hal-hal yang sangat perlu diketahui. Sepanjang pendidikan dibatasi hanya dengan metode-metode atau teknik-teknik pengajaran bagi anak didik, yang terjadi dalam proses belajar mengajar seperti ini hanya akan membatasi orientasi pendidikan.

Di berbagai belahan dunia, keberadaan sekolah dianggap sebagai lembaga bisnis yang menjadi sumber kekerasan. Hanya sedikit dari seluruh rakyat di suatu negara yang benar-benar menikmati sekolah yang memadai, disebabkan oleh semakin mahalnya sekolah. Bahkan, sekolah yang mahal pun tidak secara otomatis memberikan garansi bagi para peserta didiknya akan sukses meniti masa depannya. Penurunan prestasi akademik ternyata bukanlah sebab utama dari kegagalan produk

pendidikan model persekolahan. Persoalannya justru terletak pada rendahnya kualitas kepribadian para lulusan pendidikan.

Dalam pendidikan persekolahan dari semua tingkatan sistem pendidikan nasional kita, yang sering dijumpai bukanlah proses pendidikan dalam pengertian sesungguhnya, tapi sekedar pengajaran. Transformasi yang terjadi hanya sebatas transformasi ilmu (ranah kognitif) dengan gaya bank. Sebuah transformasi yang melibatkan peran keilmuan guru dan kebodohan murid. Dalam konteks pengajaran, guru bertindak sebagai orang yang paling pandai/tahu di kelas, sedangkan anak didik adalah obyek yang dikenal cetak-biru menurut keinginan guru. Sementara itu, pendidikan lebih menekankan transformasi perilaku, moralitas, etika, bukan saja transformasi pola pikir.

Salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan pendidikan nasional kita sekarang, adalah mandulnya pendidikan agama sebagai media transformasi nilai moral keagamaan. Pendidikan nilai moral keagamaan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah telah gagal melahirkan manusia terdidik yang memiliki tanggung jawab melalui proses pengintegrasian nilai dengan pentahapan yang secara hirarkis memiliki muatan kognitif, afektif, dan konatif. Oleh karena itu, dalam skala nasional, para pendidik dituntut mampu memberikan perhatian yang seimbang kepada pembinaan kemampuan kognitif, kepekaan afektif, dan kemampuan konatif. Terlebih lagi dalam pendidikan nilai moral keagamaan sebagai salah satu komponen penting dari sistem Pendidikan Nasional Indonesia. Betapa pentingnya pendidikan nilai moral keagamaan bagi eksistensi suatu bangsa. Dalam sebuah tulisannya di "*Lembaga Budi*", Prof. Hamka menggambarkan signifikansi pendidikan nilai dalam se bait pantun Melayu:

*Diribut runduklah padi,  
Dicipak Datuk Temenggung,  
Hidup kalau tidak berbudi,  
Duduk tegak ke mari canggung.*

*(Drs. Moh. Slamet Untung, M.Ag)*



## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Amrullah (1991). *Kerangka Dasar Masalah Paradigma Pendidikan Islam*, dalam Muslih Usa (ed.) *Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Agustian Ary Ginanjar (2005). *ESQ Emotional Spiritual Quotient*, Arga, Jakarta.
- Akhwan, Muzhoffar (1991). *Pendidikan Moral Keagamaan Anak dalam Masyarakat*, dalam Muslih Usa dan Aden Wijaya SZ (Peny.) *Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrial*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Buchori, Mochtar (2005). *Pendidikan Antisipatoris*, Kanisius, Yogyakarta.
- Daradjat, Zakiyah (1982). *Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Darmaningtyas (2005). *Pendidikan Rusak-rusakan*, LKiS, Yogyakarta.
- Freire, Paulo (2006). *Pendidikan Masyarakat Kota*, terj. Agung Prihantono, LKiS, Yogyakarta.
- Kanaya, T (1988). *Japan*, dalam T. Neville Postlethwaite (ed.) *The Encyclopedia of Comparative Educational and National Systems of Education*, Pergamon Press, Hamburg.
- Prasetyo, Eko (2006). *Orang Miskin Dilarang Sekolah*, Resist Book, Yogyakarta.
- Reimer, Everett (2000). *Matinya Sekolah*, terj. M. Soedomo, Hanindita, Yogyakarta.
- Shor, Ira dan Freire, Paulo (2001) *Menjadi Guru Merdeka*, terj. A. Nashir Budiman, LKiS, Yogyakarta.
- Susetyo, Benny (2005). *Politik Pendidikan Penguasa*, LKiS, Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 (2006). Tentang Sisdiknas*, Citra Umbara, Bandung.

# **BAB 4**

## **QUO VADIS PENDIDIKAN AGAMA DI INDONESIA**

### **Refleksi dan Solusi Alternatif Pendidikan Berbasis Nilai**

#### **A. Pengantar**

Dalam beberapa tahun terakhir, wajah Indonesia lebih banyak diwarnai oleh kekerasan, korupsi dan perusakan lingkungan hidup. Sedemikian parahnya masalah-masalah ini berlangsung dalam kehidupan sehari-hari, sehingga secara langsung maupun tidak langsung ikut mempengaruhi kehidupan seluruh warga negara Indonesia.

Masalah kekerasan dan kriminalitas dalam kehidupan sehari-hari menghias di berbagai media seperti terbongkarnya jaringan dan timbunan narkoba dengan berbagai jenisnya, demikian juga korban yang meluas dari anak SD sampai kalangan selebriti dan pejabat tinggi; perampokan disertai pembunuhan anak dengan ayahnya sebagai tersangka, atau bapak memperkosakan dan membunuh anak gadisnya, ibu membunuh anak kandungnya; penipuan dengan modus penanaman dan penyertaan modal; penjualan anak dan perempuan; kekerasan pada para buruh dan sebagainya.

Yang tidak kalah menyita perhatian adalah kekerasan massa yang beralih kepentingan agama, seperti kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah dengan melakukan pembakaran rumah ibadah dan pengusiran warga dari tempat tinggalnya. Belum lagi kekerasan sosial yang diakibatkan kepentingan politik dan ekonomi sesaat yang melahirkan bentrok sosial antar pendukung partai, ormas, antar warga kota, warga kampung dan tawuran antara pelajar dan mahasiswa serta kekerasan yang dilakukan para anggota kelompok gang terhadap masyarakat.

Sementara itu berbagai kasus korupsi terjadi di berbagai lembaga pemerintahan dan swasta dengan berbagai modus operasinya, dan bahkan kasus ini telah melibatkan semua unsur legislatif dan yudikatif tingkat tinggi. Penyimpangan dan ketidakjujuran berbagai proyek untuk masyarakat dan rakyat, berita-berita seputar terabaikannya etika berbisnis, banyak calon TKI yang tertipu ratusan juta oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, konsumen yang merasa tertipu oleh harga-harga yang ditawarkan oleh *hypermart*, dan sebagainya. Semuanya seakan menjadi berita yang biasa di berbagai media cetak dan elektronika setiap harinya.

Dalam hal pelanggaran dan perusakan lingkungan hidup, kasus-kasus seperti kabut asap tebal karena kebakaran hutan dan lahan (yang berdampak serius terhadap terganggunya penerbangan serta kesehatan), pelanggaran di dunia pertambangan dan industri seperti genangan lumpur Sidoarjo yang tidak teratasi, perubahan kualitas dan kuantitas air dan udara karena bencana alam dan musim kemarau yang panjang, adalah contoh-contoh masalah yang sulit untuk diatasi secara tuntas. Genangan lumpur di Sidoarjo misalnya, telah menyebabkan tenggelamnya sejumlah desa sehingga ribuan jiwa kehilangan tempat tinggal dan harta benda mereka, matinya sejumlah industri dan penghasilan pekerja yang terkait, serta terganggunya tatanan infrastruktur dan fasilitas umum di wilayah setempat dan sekitarnya.

Hal ini juga terjadi pada aspek kehidupan masyarakat yang cenderung kepada praktik kehidupan yang menyimpang dari norma-norma dan nilai-nilai kesusilaan dan keagamaan. Penyimpangan tersebut berkait dengan kepribadian individual maupun berkenaan dengan sistem sosial budaya bermasyarakat dan berbangsa serta beragama. Berbagai ajaran kebijakan dan kebaikan yang selama ini diajarkan oleh agama, dan sosial baik melalui institusi kelembagaan formal maupun non formal, tidak begitu kuat mengakar dalam diri, sehingga pertimbangan sesaat lebih dominan. Inilah yang menjadikan anak berani melawan orang tua, pengkhianatan terhadap kawan dan teman, perselisihan antara anggota keluarga, pudarnya persatuan dan

kegotong-royongan, hilangnya sikap teposeliro, toleransi, hidup rukun damai dan sebagainya. Nilai-nilai tersebut seakan dengan cepat tergantikan oleh sikap hidup individual-egoistik, menghalalkan segala cara, perselisihan dan intrik-intrik yang melahirkan berbagai keresahan dan kerawanan sosial.

Maraknya berita mengenai kekerasan, korupsi dan perusakan serta berbagai penyimpangan, merupakan suatu penguatan yang positif (*positive reinforcement*) bagi orang-orang yang akan melakukan tindakan serupa, karena merasa bahwa orang lain juga melakukan atau ia tidak sendiri dalam melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Lebih jauh lagi, tindakan-tindakan tersebut seolah-olah sudah menjadi suatu hal yang sangat wajar untuk dilakukan, dibenarkan untuk terjadi, dan dianggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

#### B. Di mana Peran Pendidikan Agama?

Berkenaan dengan persoalan kekerasan, perusakan serta berbagai penyelewengan tersebut di atas, timbul pertanyaan yang patut direnungkan bersama secara mendalam. *Pertama*, kekerasan, korupsi dan berbagai penyelewengan, sesuaiakah dengan visi dan misi agama? Khususnya kekerasan, apakah ajaran agama mentolelirnya? Apakah kekerasan dapat menyelesaikan masalah? Apakah para pelaku tidak pernah mengenyam pendidikan tentang nilai-nilai hidup yang benar?

Berkenaan dengan kekerasan berbasis agama; apakah para pelakunya lebih agamis daripada korbannya? Apa sebenarnya motif di balik kekerasan, korupsi dan pelaku perusakan lingkungan itu? Apa yang sudah dilakukan oleh para pelaku di bidang pendidikan agama dalam menanggapi persoalan tersebut? Apakah pendidikan, khususnya pendidikan agama mengenai nilai-nilai kehidupan sudah menjadi bagian pokok dari kurikulum yang dikembangkan oleh berbagai lembaga pendidikan dari tingkat sekolah dasar sampai pada perguruan tinggi? Persoalan tersebut menghunjam pada masalah dasar di manakah sebenarnya peran agama dalam kehidupan ini?

Fenomena keberagaman dalam kehidupan masyarakat seringkali nampak tidak sinkron dengan fungsi serta tujuan

agama itu sendiri. Hal demikian tergambar dalam beberapa fase 'sejarah buram' agama, dimana agama dianggap tidak mampu untuk menyuarakan kekuatan spiritualnya atau dengan bahasa lain, agama telah kehilangan *elan vital*-nya dalam menghadapi tantangan zaman. Sebaliknya, agama menjadi pengabsah berbagai bentuk kekerasan. Dalam rentang sejarah pergumulan agama-agama tercatat banyak sekali 'adegan pertikaian' yang bersimbah darah antar umat beragama dengan dalih atas nama penegakan kebenaran. Misalnya, perang antara umat Katolik dengan Protestan pada abad ke-16, pembantaian kalangan Yahudi oleh NAZI di Jerman, peristiwa perang salib antara umat Islam dengan umat Kristiani hingga berbagai macam bentuk kekerasan dan permusuhan di bawah kibaran bendera agama yang banyak terjadi akhir dekade ini di Indonesia seperti peristiwa Poso, Ambon, Maluku dan lain-lain.

Mengapa hal itu terjadi? Ada salah apa dengan agama? Pertanyaan-pertanyaan semacam itulah yang seringkali dilontarkan oleh banyak kalangan. Jika kehadiran agama di muka bumi ini adalah membawa misi perdamaian, mengapa fenomena kekerasan bernuansa agama masih juga sering terjadi. Kesimpulan sementara dikatakan bahwa yang menjadi penyebab utamanya bukanlah ajaran-ajaran yang dibawa oleh setiap agama, melainkan pemahaman umat yang kadang dangkal sehingga tidak mampu menangkap pesan asasi Tuhan seperti toleransi, berbuat adil dan menegakkan keadilan, serta selalu menjunjung tinggi nilai-nilai universal kemanusiaan lainnya. Bilamana pesan-pesan asasi Tuhan tersebut dapat dipahami dengan seksama serta dapat diimplementasikan dalam tindak laku, maka niscaya agama akan selalu dalam 'ret utamanya', yakni sebagai pembawa berita kebahagiaan dan kesejahteraan bagi kehidupan umat manusia secara menyeluruh.

Dari hasil penelitian sebagaimana diungkapkan oleh Amin Abdullah bahwa guru-guru agama di sekolah yang berperan sebagai ujung tombak pendidikan agama dari tingkat yang paling bawah hingga yang paling tinggi atau dari TK sampai perguruan tinggi, nyaris kurang --untuk tidak mengatakan sama sekali-- tersentuh oleh gelombang pergumulan pemikiran dan diskursus

pemikiran keagamaan di seputar isu pluralisme dan dialog antar umat beragama. Padahal, guru-guru inilah yang menjadi mediator pertama untuk menterjemahkan nilai-nilai toleransi dan pluralisme kepada siswa, yang pada tahap selanjutnya juga ikut berperan aktif dalam mentransformasikan kesadaran secara lebih intensif dan massif.

Dalam dunia pendidikan tentunya kita akan berbenturan antara konsep (idealisme) dengan fakta di lapangan. Adanya ketidaksesuaian antara materi kurikulum agama dengan tingkat pemahaman dan pembiasaan anak didik terutama di tingkat sekolah dasar adalah merupakan fenomena kemunduran sekolah saat ini. Perilaku-perilaku yang non agamis dan non akhlakul karimah di berbagai sekolah dasar merupakan bentuk kurang berhasilnya konsep dan strategi pembelajaran pendidikan agama di tingkat sekolah dasar. Kuantitas pelajaran agama yang sangat minim, muatan materi yang banyak dan metode yang tidak variatif akan mengakibatkan kejenuhan dan degradasi ilmu dalam diri anak didik.

Dampak dari ketidaksesuaian nilai-nilai normatif kependidikan dengan strategi pembelajaran menimbulkan misorientasi guru yang lebih mengutamakan ketuntasan materi dan penyelesaian silabus dan RPP, sementara anak didik cenderung kepada pemuasan skor nilai di Raport. Pendidikan di sekolah yang berbasis agama, seperti Madrasah Ibtidaiyyah atau Madrasah Tsanawiyah menjadi polemik, manakala agama yang memiliki jam pelajaran yang sangat banyak dan melelahkan untuk dihafal bagi anak membuat anak menjadi tidak kapabel dalam satu disiplin ilmu.

Dari deskripsi ini terlihat bahwa, yang paling dominan, dan bahkan bertanggung jawab terhadap implemementasi visi dan misi agama dalam realitas sosial budaya adalah lembaga pendidikan. Dengan demikian, peran dan fungsi lembaga pendidikan agama adalah memetakan agama dalam kehidupan. Sementara itu, dalam konteks ajaran agama, hal yang paling penting harus ditemukan adalah pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai fundamental yang dikandung dalam mengarahkan kepada perikehidupan yang benar dan menghasilkan kebahagiaan

yang sebenarnya: lahir bathin dan dunia akherat. Inilah mega proyek yang harus diperankan oleh lembaga pendidikan agama.

### C. Tawaran Solusi Alternatif

Dalam peraturan perundangan disebutkan tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, taat, sehat, berimu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tujuan pendidikan nasional harus diterjemahkan ke dalam standar isi pendidikan, selanjutnya ke kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam misalnya, nilai-nilai kehidupan yang ingin ditanamkan, antara lain keyakinan terhadap kebesaran Tuhan dan meningkatkan kesadaran untuk berperan serta memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam.

Pendidikan di Indonesia baik formal, nonformal maupun informal merupakan proses yang dengan sengaja dilakukan untuk tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian yang mantap, mandiri serta bertanggung-jawab.

Tujuan-tujuan tersebut, mengandung nilai-nilai dasar kehidupan yang komprehensif yang harus dapat diimplementasikan oleh lembaga pendidikan manapun, khususnya lembaga pendidikan agama. Tidak akan tercapai tujuan-tujuan mulia itu, manakala segala aktifitas pendidikan yang dijalankan tidak menyentuh aspek nilai-nilai dasar kehidupan tersebut. Dengan demikian, lembaga pendidikan manapun tidak lain merupakan pendidikan yang berbasis nilai.

Nilai dapat dimaknai sebagai kegiatan manusia yang menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk mengambil keputusan. Menurut Kimball Young, nilai adalah asumsi abstrak dan sering tidak disadari tentang apa yang benar dan apa yang penting. Menurut A.W. Green, nilai adalah kesadaran yang secara relatif berlangsung disertai emosi

terhadap objek. Sedangkan Woods mengartikulasikan nilai sebagai petunjuk-petunjuk umum yang telah berlangsung lama yang mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari.

Sebuah nilai adalah sebuah konsepsi, eksplisit atau implisit yang menjadi milik khusus seorang atau ciri khusus suatu kesatuan sosial (masyarakat) menyangkut sesuatu yang diinginkan bersama (karena keluarga) yang mempengaruhi pemilihan sebagai cara, alat dan tujuan sebuah tindakan.

Menurut Notonegoro, macam-macam nilai terdiri dari: (1) nilai material adalah segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia; (2) nilai vital adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengandalkan kegiatan atau aktivitas; (3) nilai kerohanian adalah segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian dibagi menjadi 4 macam: (a) nilai kebenaran atau kenyataan, yakni bersumber dari unsur akal manusia (nalar, ratio, budi, cipta); (b) nilai keindahan, yakni bersumber dari unsur rasa manusia (perasaan, estetika); (c) nilai moral atau kebaikan, yakni bersumber dari unsur kehendak atau kemauan (karsa, etika); dan (d) nilai religius, yakni merupakan nilai ketuhanan, kerohanian yang tinggi, dan mutlak yang bersumber dari keyakinan atau kepercayaan manusia.

Kerangka nilai-nilai di atas merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat universal yang harus dipahami oleh setiap manusia, dan inilah yang harus dijadikan basis utama dalam setiap proses pendidikan. Hal ini karena nilai-nilai dasar yang universal adalah masalah hidup yang menentukan orientasi nilai budaya suatu masyarakat, yang terdiri dari *hakikat hidup, hakikat kerja, hakikat kehidupan manusia dalam ruang waktu, hakikat hubungan manusia dengan alam, dan hakikat hubungan manusia dengan manusia*. Dengan demikian, lembaga pendidikan harus mampu mengejawantahkan nilai-nilai dasar universal tersebut dalam sistem pendidikannya. Kegagalan lembaga pendidikan, yang berakibat pada kegagalan misi pendidikan dan bahkan misi agama dapat ditelusuri pada kegagalan peserta didik dalam memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai dasar tersebut dalam ranah kehidupan.



Tugas utama lembaga pendidikan adalah penanaman nilai-nilai kehidupan yang *holistic* universal tersebut. Penanaman nilai-nilai kehidupan kepada anak didik membutuhkan keteladanan dari guru, orang tua, dan masyarakat. Penanaman nilai-nilai tersebut tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Ketiganya harus bersinergi dan merupakan satu kesatuan.

Secara khusus, dalam konteks pendidikan, penanaman nilai dapat dilaksanakan melalui pembenahan hal-hal berikut:

- a. Konsep kurikulum akidah perlu diperbanyak, mengingat dasar akidah adalah sesuatu penting untuk anak. Konsep akidah berdasar kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits bisa kita kembangkan tentang cerita Luqman dalam Al-Qur'an dan beberapa perilaku Sahabat Nabi Muhammad SAW dalam mempertahankan akidah. Apabila sekolah merasa mata pelajaran yang dirancang secara nasional masih kurang menanamkan nilai-nilai kehidupan, sekolah berhak mengembangkan mata pelajaran muatan lokal. Misalnya, di Ambon dan Aceh telah dikembangkan pendidikan perdamaian (*peace education*).
- b. Strategi pembelajaran agama tidak lagi mementingkan tentang konsep hafalan-hafalan yang sangat banyak, makna yang terkandung dalam materi tidak dijelaskan kepada anak. Contoh, ketika anak belajar shalat, maka setiap anak harus memahami hakekat shalat itu untuk apa.
- c. Pembiasaan yang sangat penting menjadi penilaian bagi anak didik dengan memberikan pengontrolan ibadah harian di rumah yang diawasi oleh orang tua. Karena pendidikan agama di sekolah yang sangat pendek membutuhkan pengulangan dan pembiasaan di rumah. Pembiasaan ini menjadi salah satu nilai yang dapat dijadikan nilai psikomotor bagi anak dihitung dengan nilai konsep (penguasaan materi). Lembaga pendidikan agama tidak hanya sekedar tempat memahami ilmu agama, tapi juga tempat dan contoh terbaik pengalaman agama dalam kehidupan.

- d. Pendidikan agama yang *holistic* dan komprehensif merupakan bahan ajar yang sangat dibutuhkan sekarang ini. Pendidikan agama tidak bisa dipisahkan dengan ilmu lain. Guru harus mampu membuat keterkaitan makna yang ada dalam bahan ajar dengan penerapan teknologi yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Aspek-aspek pendidikan, afektif, kognitif dan psikomotorik harus dipadukan secara seimbang, sehingga mampu melahirkan kecerdasan yang integral, baik intelektual, emosi, sosial, keterampilan maupun spritual.
- e. Para guru harus memperkaya wawasan pemikiran yang universal dan mendalam tentang berbagai isu-isu kontemporer dan global sehingga mampu memberikan pengarahan kepada anak didik sesuai dengan perkembangan sosial budaya dan tantangan masyarakat. Isu-isu yang harus dikuasai antara lain masalah multikulturalisme, pluralisme, HAM, demokrasi, *civil society* (masyarakat madani), kebermaknaan hidup, humanisme dan sebagainya.
- f.

(Dr. Imam Hanafie al-Jauhari, M.Ag)

## DAFTAR PUSTAKA

Abu Hadfi Effendi, *Peranan Pendidikan Agama*, <http://re-searchengines.com>

Admin, *Nilai-Nilai Dasar*, pada <http://www.cimbuak.net/content/view>.

Danil Sparingga, *Suara Pembaruan*, 20 November 2006

Handoyo, *Nilai-Nilai Pancasila*, Error! Hyperlink reference not valid.

Muhibuddin, *Wajah Pendidikan Kita*, Error! Hyperlink reference not valid.

D. Turmudzi, *Nilai-Nilai Agama*, <http://ddturmudi.multiply.com/journal>

## **BAB 5**

# **PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA DALAM MENGATASI PROBLEM KEMANUSIAAN**

### **A. Menggugat Peran Manusia *vis a vis* Modernisasi**

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar ” (Al-Quran al-Karim).

Isyarat yang cukup serius ini telah datang dari Tuhan dan betul-betul tampak di depan mata kita. Bahkan peringatan itu tidak hadir dalam bentuk gejala alam saja namun juga menyangkut pergeseran tatanan kehidupan masyarakat yang semakin jauh dari aspek moral dan etika. Arus globalisasi yang kian hari kian deras, mengusung konsekuensi yang tidaklah ringan. Lalu muncullah berhala-berhala modern yang begitu disembah dan dijunjung tinggi oleh umat manusia. Idiom-idiom modernisasi seperti ilmu pengetahuan, teknologi, dan industrialisasi membenturkan manusia pada krisis identitas. Mereka menjadi individualis, materialis, hedonis, hipokrit, dan pada saat yang sama gersang akan nilai-nilai spiritual.

Di sinilah proses dehumanisasi itu berlangsung. Nilai-nilai kemanusiaan telah bergeser menjauh dari poros kehidupan. Manusia tidak lagi malu untuk melakukan korupsi terang-terangan bahkan berjama'ah, menimbun harta, menurunkan produktivitas kerja, memiskinkan orang lain, dan merusak lingkungan. Di mana-mana orang mudah lupa akan kepentingan bersama demi kepentingan pribadi. Ia berani mengorbankan kemakmuran orang lain demi memakmurkan dirinya sendiri. Demi menjaga nama baik, siapapun akan melakukan apapun sekalipun melanggar aturan. Supremasi hukum dengan mudah dipermainkan selagi punya kuasa. Yang kuat menindas yang

lemah, yang kaya mempersempit kesempatan yang miskin, yang pintar semakin canggih menipu yang bodoh. Orang benar dan baik dilabeli sok moralis. Benar dan salah acapkali beralih tempat.

Perkembangan zaman tidaklah linier. Lini kehidupan pun serba paradoks. Jika ini masih saja disikapi secara naif maka kesenjangan muncul di mana-mana mencakup kesenjangan antara si kaya dan si miskin, sektor industri dan pertanian, sektor formal dan informal, tradisi dan modernitas, sektor agama dengan sektor-sektor lainnya. Tak pelak, kalau ternyata bangsa ini telah lama memandang agama sebagai suplemen di mana Tuhan diposisikan sebagai sumber kekuatan yang dieksploitasi untuk memuaskan ego-ego individu<sup>1</sup>. Akibatnya masyarakat kehilangan pijakan kultural dan menghadapi ketidakjelasan arah hidup.

Pada dasarnya, kerusakan alam dan kebobrokan bangsa bertolak dari keserakahan, kemiskinan dan kebodohan manusia. Manusia mengalami distorsi kepribadian atau *split personality*. Inilah persoalan paling fundamental yang menjadi tantangan bagi dunia pendidikan kita hari ini. Maka sudah seharusnya agama tidak dimaknai sebatas doktrin melainkan hidup sebagaimana yang kita hayati. Agama juga tidak dipandang sebagai rintangan untuk kepentingan modernisasi, tetapi dapat menyediakan makna yang komprehensif akan hidup dan memberikan bingkai etik dan moral dalam mengiringi tuntutan kompetisi global yang kian ketat dan tajam.

## B. Pengembangan Pendidikan Agama sebagai Paradigma Progresif dalam Mengatasi Problem Kemanusiaan

Empat belas abad silam, seorang Muhammad menerima wahyu yang pertama kali yang berbunyi "*Iqra*". Ayat ini membawa pesan spirit intelektualitas bahwa Tuhan terlebih dahulu hendak mengajarkan pencerahan berpikir kepada manusia. Proses-proses berpikir yang mempertanyakan: 1)

---

1. Muhammad Irfan dan Mastuki HS. 2000. *Teologi Pendidikan*. Jakarta: Friska Agung Insani, 1998.

mengenal siapa Tuhannya?; 2) mengenal siapa manusia itu?; dan 3) mengenal apa alam semesta itu?

Suatu spirit transformatif yang amatlah mendalam ketika pada hari itu proses-proses dehumanisasi berlangsung semarak dan bahkan menjadi tradisi atau hal biasa. Hal ini berimplikasi pada ketidakberdayaan umat manusia untuk berpikir kritis. Oleh karena itu, tindakan meditasi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Gua Hira merupakan bentuk refleksi terhadap realitas yang dihadapi saat itu. Realitas yang menyajikan ketidakadilan (*injustice*), keacuhan (*ignorance*), pembedaan dan hal-hal jahiliah lainnya.

Bidikan pertama Al-Qur'an adalah pemberdayaan sekaligus penyadaran manusia agar manusia betul-betul menjadi manusia dan mampu menemukan jati dirinya sendiri. Upaya ke arah kesadaran diri adalah kontribusi terbesar dalam mewujudkan transformasi seluruh jazirah Arab dari masyarakat pagan yang suka berkelahi dan menumpahkan darah ke arah terwujudnya masyarakat yang berperadaban tinggi. Di sinilah kelima ayat yang pertama turun itu secara eksplisit tidak berbicara pada dimensi kemanusiaan dan penyadaran diri. Surat Al-Alaq yang menempatkan manusia sebagai sasaran utama berbunyi :

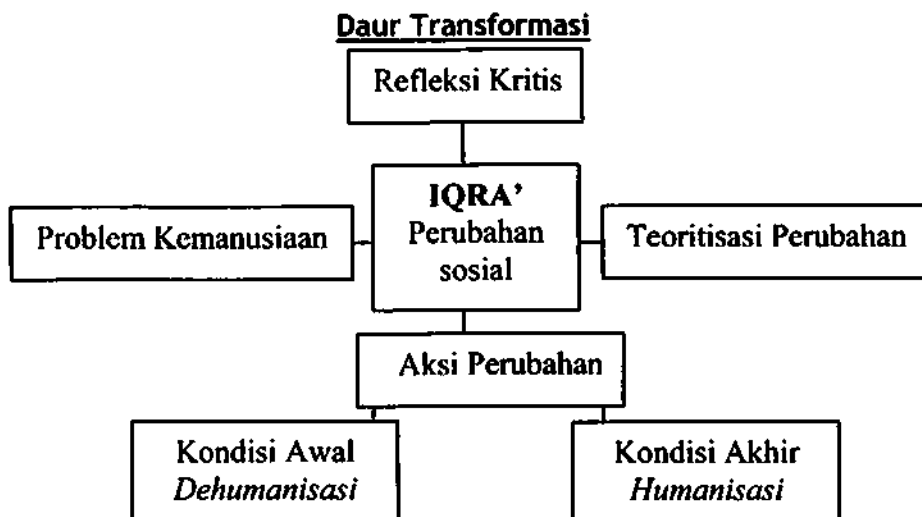
(1) Bacalah dengan nama Tuhan-mu yang menciptakan. (2) Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, (3) dan Tuhan-mu adalah yang Maha Pemurah. (4) Yang mengajari manusia dengan perantaraan *qalam*. (5) Dia mengajari manusia apa yang tidak diketahui.

Lanjutan pada ayat berikutnya (6-8) pun, manusia masih ditempatkan sebagai sasaran utama yang cukup tajam.

(6). Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar telah melampaui batas. (7) Karena dia melihat dirinya serba bisa. (8) Sesungguhnya hanya kepada Tuhan-mu (kamu semua) kembali.

Deskripsi atas pengejawantahan konsep qur'ani di atas dalam mengatasi problem-problem kemanusiaan dapat dilihat

dalam daur transformasi di bawah ini.<sup>2</sup>



Konsep naqliyah berikutnya adalah: *“Aku tidak diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak manusia”*.

Spirit transformatif yang tersurat dalam hadits ini adalah perubahan akhlak. Diakui bahwa dalam Islam, tujuan *tholabul 'ilmi* adalah menuju terbentuknya akhlak individu yang karimah. Seorang penyandang ilmu yang banyak namun tidak berbuah amal kebajikannya maka ilmu itu menjadi tak bermakna (*meaningless*).<sup>3</sup>

Selanjutnya jika ditarik ke konteks kekinian dan kedisinian, *role play* yang dituju dari gambaran di atas adalah pendidikan. Dalam perspektif kritis, pendidikan merupakan upaya mengembangkan eksistensi manusia sebagai aktor sejarah yang mampu melakukan perubahan sosial. Sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Tholchah Hasan, pendidikan sebagai fasilitator budaya. Perannya bukan sekedar kegiatan alih pengetahuan dan keterampilan (*transfer of knowledge and*

2. Abdullah Faishol, dkk. *Metode dan Teknik KKN Tranformatif untuk Aksi Perubahan Sosial*. 2006. Surakarta : P3M STAIN Surakarta, h. 41.
3. M. Kholid Fathoni. *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional*. 2005. Jakarta: Depag RI, h. 51

*skill*) melainkan juga sebagai kegiatan alih nilai-nilai dan budaya (*transfer of value and culture*). Sehingga pendidikan tidak semata upaya mempersiapkan manusia pandai (intelekt) atau manusia terampil (pekerja) saja, tetapi sekaligus manusia berkepribadian dan berbudaya.<sup>4</sup>

Bagaimanapun, manusia religius dan etis selalu menampilkan perwujudan dua dimensi besar dari manusia yaitu: (1) dimensi transendensi (pengakuan ketergantungan manusia kepada kekuasaan Tuhan); dan (2) dimensi responsibilitas sosial (perasaan tiap manusia bahwa dia bertanggung jawab terhadap nasib orang lain).<sup>5</sup>

Pangkal dari upaya ini adalah meletakkan tauhid sebagai tindakan nyata lebih dari sekedar simbol atau ritual belaka. Mengenal Allah berarti mengaktualisasikan sifat-sifat keilahiyah dalam diri manusia sebagai wakil Allah di muka bumi (*khalifatul fil ardl*). Hal ini berwujud pada pengakuan nilai-nilai kemanusiaan. Tidak sekedar memanusiaikan manusia tetapi lebih dari itu memuliakan manusia. Bertransformasi dari pemikiran yang beku dan rigid beranjak ke arah berpikir yang progresif dan dinamis, dari budaya jahiliyah ke terang benderang, dari masyarakat tak berdaya menuju beradab dan merdeka. Merdeka berarti otonom, mandiri dan tidak mudah digiring oleh kekuatan hegemonik apapun dan berhala-berhala keduniawian. Tentu saja, bahwa amanah Tuhan kepada manusia sebagai *khalifatullah* haruslah diimbangi dengan penyerahan total kepada Sang Maha Segala dalam posisi sebagai *abdullah*. Sehingga apapun yang manusia lakukan selalu berorientasi demi menciptakan kesejahteraan di muka bumi, bukan perbuatan-perbuatan merusak yang jauh dari sifat-sifat keilahiyah Tuhan sebagai Yang Maha Kasih, Maha Menjaga dan Maha Pemurah.

Sifat-sifat keilahiyah yang dimaksud, meminjam istilah yang digunakan oleh Ary Ginanjar, disebut "suara hati Tuhan" (*God spot*). Berangkat dari sini, maka semua manusia

---

4. M. Thoichah HASAN. *Diskursus Islam dan Pendidikan (Sebuah Wacana Kritis)*. 2000. Jakarta: Bina Wirawan Insan Indonesia, h. 27.

5. *Ibid*, h. 28



sebenarnya memiliki suara hati yang sama, suara hati universal, yang selanjutnya pada tataran aktualitas akan menjadi kesadaran spiritual. *God spot* ini direpresentasikan melalui 99 *asmaul husna* yang telah Allah tiupkan ke dalam jiwa manusia sejak zaman azali. *Asmaul husna*, suara hati Tuhan yang terekam dalam jiwa manusia, adalah dasar pengenalan dan alat untuk memahami bagian terdalam dari suara hati kita sendiri, juga suara hati orang lain. *Asmaul husna* diharapkan menjadi pondasi yang fundamental dalam membangun ketangguhan pribadi dan selanjutnya ketangguhan sosial di tengah problema kemanusiaan yang ada.<sup>6</sup>

Berikutnya, konsep ketauhidan *la ilaaha illallah*, sebuah ungkapan yang memang tampak sederhana diucapkan. Padahal doktrin ini memiliki implikasi yang luar biasa dalam upaya transformasi sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain menuju peradaban yang lebih maju dan bermartabat.<sup>7</sup>

Jika konsep ini benar-benar beranjak pada dimensi empirisnya maka manusia tidak lagi mempunyai ruang untuk berbuat tidak jujur, *corrupt*, berkhianat, berlaku tidak adil, kesewenangan jabatan dan perbuatan-perbuatan lain yang bisa mengancam tatanan kehidupan yang beradab dan moralis.

- 
6. Ary Ginanjar. *ESQ: Emotional Spiritual Quotient*. 2003. Jakarta: Agra, 388. Sejenak, renungkan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut:
- Anda sedang berada di dalam suatu ruangan bersih dengan lantai marmer mengkilat. Tiba-tiba Anda melihat beberapa lembar kertas kucel di sana. Suara hati apa yang Anda rasakan?
  - Anda sedang berada di tengah kebun hijau, tiba-tiba melihat sekuntum bunga warna-warni. Apa yang Anda rasakan?
  - Tiba-tiba seorang pemuda memetik bunga itu dengan kasar. Apa yang Anda rasakan?
- Jawaban dari pertanyaan di atas adalah :
- adalah suara hati "ingin bersih" sehingga Anda merasa "perlu" memungut sampah itu.
  - adalah karunia hati yang bisa merasakan "keindahan" ketika Anda melihat bunga yang berwarna-warni.
  - adalah suara hati yang menyuruh Anda untuk "memelihara" serta "melindungi" bunga indah tadi.
- Jawaban-jawaban dari suara hati di atas "cocok" dengan sifat-sifat Allah. Tak cukup sampai di sini, alam semesta beserta isinya tercipta karena kehendak nama-nama Allah tersebut. Hukum-hukum fisika dan hukum sosial, kemajuan iptek pun terbentuk karena kehendak "suara hati Allah" itu.
7. Abdullah Faishol, dkk. 2006. *op.cit*, h. 39.

Karena jauh di ruang batinnya telah mampu menghadirkan Tuhan sebagai Yang Maha Mengawasi dan Mengetahui segalanya (sikap *muroqobatullah*). Sebuah doktrin yang revolusioner yang mampu menyingkirkan *ilah-ilah* lain selain Tuhan. Baik *ilah* berupa pangkat, kedudukan, materi, gelar dan predikat-predikat lainnya termasuk pembebasan terhadap penghambaan kepada cinta yang sempit.

Berangkat dari hal tersebut maka manusia harus memiliki keyakinan bahwa Allah semata yang benar-benar *ilah*. Manusia tidak boleh mengklaim orang lain agar taat, tunduk, dan pasrah atas berbagai persoalan hidup. Kepasrahan, ketaatan dan ketergantungan hanya kepada Allah. Inilah yang akan mengusung implikasi yang luas dan mendalam untuk mendorong terjadinya perubahan tatanan sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain-lain, dan endingnya adalah mengarah pada pencerahan dan pembebasan manusia.

Keberadaan manusia sebagai suatu "eksistensi", suatu wujud yang berkesadaran mempunyai kehendak (*political will*) memposisikan manusia ke dalam dua level sekaligus, sebagai "subyek" dan pada waktu yang sama sebagai bagian dari "struktur situasi". Kedudukan manusia sebagai pelaku dan dampak interaksinya dengan struktur situasi akan berlangsung terus-menerus pada tataran kehidupan sehari-hari<sup>8</sup>.

Kebudayaan yang kita punyai seharusnya menjadi manifestasi spiritualitas. Kemudian spiritualitas menjadi manifestasi kebebasan manusia mengatasi keterbatasan dunia terutama keterbatasan dan ketertikatan pada materi, dan orientasi individu. Dengan demikian pengejawantahan nilai-nilai spiritualitas itu akan berkembang dan muncul dalam bentuk keprihatinan pada problem-problem realitas melalui integrasi nilai-nilai etika dan moral secara aplikatif.<sup>9</sup>

Kapasitas kepribadian semacam itulah yang mampu memanifestasikan keselarasan dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia dan alam sekitarnya, serta

8. M. Tholchah Hasan. 2000. *op.cit*, h. 11

9. *Ibid*, h. 12

- memiliki kemantapan dan keseimbangan dalam kehidupan lahiriyah dan batiniah secara dinamis dan ditantang transformasi kultural. Transformasi dari realitas masyarakat yang *corrupt*, serakah, rakus dan atribut-atribut lainnya menuju masyarakat yang beradab dan bermartabat luhur.

Maka jangan sampai keberagamaan yang kita miliki justru mencerabut dan menggusur kemanusiaan kita sehingga menjadi manusia-manusia yang tamak, takut tidak kebagian, takut kehilangan status sosial dan lainnya. Inilah tantangan yang harus dijawab oleh umat beragama bahwa spiritualitas agama adalah untuk membebaskan yang tertindas, yang terbelakang, yang kelaparan, yang mengalami kejumudan dan seterusnya menuju kebebasan untuk pengembangan diri.

Betapapun rekayasa kebudayaan sepenuhnya berada pada tanggungjawab manusia dengan mendasarkan pada petunjuk-petunjuk qauniyah dan qauliyah. Inilah yang menjadi keutamaan manusia untuk melahirkan sebuah tatanan masyarakat yang egalitarian dan humanis.

Paparan di atas merupakan teologi *antroposentrisme-transendental*, sebuah teologi yang memposisikan manusia sebagai subyek utama yang mewakili sifat-sifat ketuhanan di bumi. Tidak sekedar sebagai wujud keyakinan transedental saja, bahwa "*Tiada Tuhan selain Allah*" namun mencakup pula penyingkiran-penyinkingiran ketaatan kepada semua kekuatan duniawi dan penentangan pola-pola kehidupan yang eksploitatif dan tidak manusiawi.

Pada prinsipnya, kepribadian yang berkualitas memiliki ciri-ciri antara lain religius dan etis, mandiri dalam kebersamaan, tenggang rasa bersikap, berwawasan terbuka, mempunyai kepekaan sosial, jujur dan satria, mempunyai semangat berprestasi, optimis, tangguh dan tahan terhadap kegagalan. Bukannya terbuai dalam nilai-nilai kultural sebagaimana yang dikutip oleh Tholchah Hasan berupa sikap budaya santai (*easy going society*), budaya feodal dan budaya kepura-puraan.<sup>10</sup>

Sorotan tajam tersebut tidak jauh dari realita kehidupan bangsa ini. Riil, bangsa kita membutuhkan pembangunan moral yang berangkat dari pengembangan pendidikan agama. Secara makro, pendidikan agama mempunyai makna strategis sebagai institusi agama tersebut. Dukungan pendidikan agama terutama dalam menjalankan fungsi pokoknya mensosialisasikan dan mentransformasikan nilai-nilai keagamaan dalam realitas kehidupan masyarakat.

Perkembangan kehidupan yang ditandai dengan semakin derasnya arus perubahan sosial membuat pendidikan agama menghadapi tantangan berat untuk tetap *survive* dan meningkatkan perannya. Menyadari tantangan sekaligus harapan yang besar terhadap peran-peran kemanusiaan, pendidikan agama perlu memberikan pengayaan nuansa-nuansa keagamaan yang menyentuh aspek formal agama maupun etik moral dan spiritual. Dengan pengayaan semacam ini pendidikan agama diharapkan tidak hanya sebagai lembaga konservasi yang hanya mempertahankan kamapanaan dogmatika agama tetapi pendidikan agama memiliki nilai fungsional dengan problem kemasyarakatan dan kemanusiaan.<sup>11</sup> Maka formulasi pendidikan agama harus berfungsi sebagai pengetahuan (manhaj) sekaligus moral force, disamping sebagai ritual dan aqidah.

Hal inilah yang menjadi dasar untuk membangun rumusan baru pendidikan agama sebagai berikut. *Pertama*, pendidikan agama kelak bukan lagi sebagai pengetahuan kognitif tetapi bernuansa moral yang bersifat hidup dan praktis, menjadi pengetahuan yang diamalkan dan dibiasakan (mempengaruhi perilaku). *Kedua*, pengajaran pendidikan agama di sekolah oleh guru yang seagama dan sesuai kompetensinya. *Ketiga*, pendidikan agama harus terintegrasi ke semua mata pelajaran.<sup>12</sup>

Dalam tulisan lain, penataan kembali pendidikan dapat dilakukan antara lain :

11. M. Irfan dan Mastuki HS. *op.cit*, h. 100.

12. M. Kholid Fathoni. 2005. *op.cit*, h. 57.

- Membentuk forum komunikasi pendidikan, bertujuan saling memberikan pengalaman, temuan temuan lapangan, input informatif dan kajian-kajian bersama.
- Menyiapkan "interverensi wawasan" dan " interverensi nilai-nilai" sehingga pendidikan agama mampu menginternalisasi dalam diri peserta didik (*build-in*)
- Memberikan perhatian yang besar kepada pendidikan luar sekolah (PLS) untuk mempersempit jurang kesenjangan pendidikan<sup>13</sup>

Dengan kata lain, dimensi lahiriyah dan batiniyah mesti ditempatkan secara serempak turut serta mengawal transformasi pendidikan agama dalam mengatasi problem-problem kemanusiaan. Pendidikan bertanggungjawab mempersiapkan masa depan peserta didik. Melalui contoh (*modelling*), guru di depan peserta didik, dan dalam lingkup yang lebih luas orang dewasa di depan yang lebih muda. Melalui kesalehan individu dan ketangguhan pribadi yang cerdas, yang selanjutnya melahirkan kesalehan-kesalehan sosial. Maka jangan mengaku beragama jika tidak mampu menghadirkan solusi-solusi cerdas dan solutif bagi realitas.

### C. Simpulan

Dialektika agama dengan pendidikan di tengah-tengah kompetisi global merupakan sebuah alternatif untuk memunculkan paham sosial yang mampu memberikan inspirasi kepada umat manusia dalam memaksimalkan peran-peran sosial seperti mengatasi kebodohan, ketertindasan, ketidakadilan dan bentuk-bentuk ketimpangan lainnya. Bagaimanapun, manusia adalah inti utama dari proses pendidikan. Praktik pendidikan bakal mengalami kegagalan bila dibangun di atas konsep yang tidak jelas tentang manusia. Oleh karena itu, pandangan yang benar tentang hakikat manusia akan membantu menemukan jalan mengarahkan praktik-praktik pendidikan pada pola pengembangan manusia secara utuh (*al-insan al-kamil*)<sup>14</sup>.

13. M. Tholchah Hasan. 2000. *op.cit*, 11.

14. M. Irfan dan Mastuki HS. 2000. *op.cit*, 100.

Esensinya, pendidikan diproyeksikan tanpa harus menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan peserta didik. Namun justru mampu membangun kesalahan individu sekaligus kesalahan sosial, disamping kecerdasan dan keahlian. Jadi peserta didik diharapkan mampu membawa diri dengan rendah hati dan siap belajar sehingga ia responsif terhadap problema yang setiap saat muncul.

Penting untuk dicatat bahwa setiap agama dan ideologi mempunyai komitmen masing-masing. Namun, dari komitmen yang beragam itu dirumuskan menjadi komitmen bersama untuk memfokuskan perhatian pada upaya-upaya kepentingan bersama menuju maslahat ummat, apalagi kalau bukan kemanusiaan. Pemahaman tentang adanya kesamaan di tengah-tengah perbedaan menjadi keniscayaan yang harus dipenuhi sebelum memasuki konteks kebangsaan yang ber-*bhineka tunggal ika* ini. Misalnya tentang kebodohan, kemiskinan, keadilan sosial. Semua agama dan ideologi mempunyai konsen yang sama dalam hal ini. Di sinilah komitmen keberagamaan itu diusung bersama-sama untuk kehidupan yang lebih baik, yang termanifestasikan dalam aksi-aksi kemanusiaan. Beragama adalah berbuat kebajikan. Modal sosial yang ampuh dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia dan di lain pihak agama adalah potensi untuk memajukan masyarakat dari keterbelakangan dan keterpurukan.

*(Khusniati Ningsih, SS.)*

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Faishol,dkk. 2006. *Metode dan Teknik KKG Transformatif untuk aksi Perubahan Sosial*. Surakarta : P3M Stain Surakarta.
- Ary Ginanjar Agustian. 2003. *ESQ : Emotional Spiritual Quotient*. Jakarta : Arga.
- M. Irfan dan Mastuki HS. 2000. *Teologi Pendidikan*. Jakarta : Friska Agung Insani.
- M. Kholid Fathoni. 2005. *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional*. Jakarta : Depag RI.
- M. Tholchah Hasan. 2000. *Diskursus Islam dan Pendidikan (Sebuah Wacana Kritis)*. Jakarta: Bira Wiraswasta Insan Indonesia.

## **BAB 6**

# **UPAYA MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN BERBASIS MORAL**

### **A. Pengantar**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah berjalan selama kurang lebih sembilan tahun, namun gaung dari pelaksanaan undang-undang tersebut belumlah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat pendidikan Indonesia. Pelaksanaan pendidikan di Indonesia masih tetap berkuat pada sekitar pelaksanaan kurikulum. Dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) ke Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan belum menyentuh pada esensi tujuan pendidikan nasional dalam rangka membentuk manusia paripurna. Memang ada usaha untuk meningkatkan pelaksanaan pendidikan ke arah yang lebih baik, namun karena tantangan masa kini lebih besar, maka seolah-olah pendidikan moral, pendidikan kepribadian dan pendidikan akhlak belum menyentuh sasaran yang dituju, sementara semua komponen yang berkaitan dengan pendidikan belum siap dengan pola pendidikan yang mengarah pada paradigma pendidikan moral atau nilai.

Dewasa ini pelaksanaan pendidikan moral di sekolah diberikan melalui pembelajaran mata pelajaran Pancasila, Kewarganegaraan (PPKn) dan Pendidikan Agama, akan tetapi masih kurang keterpaduan dalam model dan strategi pembelajarannya. Di samping, penyajian materi pendidikan moral di sekolah, tampaknya lebih berorientasi pada penguasaan materi yang tercantum dalam kurikulum dan buku teks dan kurang mengaitkan isu-isu moral yang terjadi dalam masyarakat. Para peserta didik kita lebih banyak dihadapkan pada ulangan atau ujian ketimbang dihadapkan pada isu moral dalam kehidupan mereka sehari-hari.



Selain itu, selama ini produk pendidikan amat kurang membantu pertumbuhan spritualitas anak sehingga mereka sulit mengagumi keramahan langit terhadap bumi, gemercik air, festival awan, kekompakkan hidup dunia semut, dan perilaku alam lain yang semua itu merupakan ayat-ayat Tuhan dan bacaan terbuka yang amat indah. Ini semua disebabkan kesalahan proses pendidikan yang kita peroleh, yang hampir melupakan dimensi akal budi dan emosi serta tidak memandang alam sebagai identitas yang hidup.<sup>1</sup>

Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan seharusnya merupakan usaha yang sistematis dan penuh kasih sayang untuk membangun bangsa agar sukses di segala bidang tidak hanya sukses secara lahiriyah saja (ekonomi dan teknologi) tetapi juga secara moralitas.

Dikatakan oleh YB Mangunwijaya<sup>2</sup>, bahwa pada saat sekarang ini manusia sudah mencapai pada kemajuan di bidang keilmuan dan teknologi. Kemajuan ini tidak saja membawa manusia ke tingkat progresivitas yang sangat tinggi, melainkan telah berkembang menjadi suatu kosmologi baru yang menjadi tantangan agama.

Padahal sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kemajuan manusia yang bertitik tumpu pada signifikansi di bidang keilmuan selamanya tidak akan memberikan kepuasan bagi kehidupan manusia. Demikian juga di balik kesuksesan ekonomi dan teknologi yang ditunjukkan negara-negara maju, semua itu semula disemangati oleh nilai-nilai kemanusiaan, agar kehidupan dapat dijalani lebih mudah, lebih produktif dan lebih bermakna.

Namun banyak masyarakat yang tidak dapat menjaga komitmen kemanusiaannya setelah sukses di bidang materi. Oleh John Naisbit dikatakan *high tech-low touch* yaitu gaya hidup yang selalu mengejar sukses materi, tetapi tidak disertai dengan pemaknaan hidup yang dalam. Akibatnya orang

- 
1. Komaruddin Hidayat, [http://www.kompas.com/kompas\\_cetak/0502/03/opini1638957.htm](http://www.kompas.com/kompas_cetak/0502/03/opini1638957.htm)
  2. A. Malik Fajar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Fajar Dunia, 1999), h. 129.

menitipkan harga dirinya pada jabatan dan materi yang menempel tetapi kepribadiannya keropos.<sup>3</sup>

## B. Dekadensi Moral dan Tujuan Pendidikan Nasional

Pendidikan merupakan suatu cara untuk mengembangkan manusia melalui aspek individual dan sosial, aspek jasmani dan rohani secara seimbang. Selain itu aspek yang dikembangkan adalah kehidupan akhlak dan kehidupan religius dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dan mereka dapat menghayati dan mengamalkan ajarannya sesuai dengan agamanya.

Hal ini sesuai dengan pengertian pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional adalah usaha secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>4</sup>

Demikian juga, tujuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab.<sup>5</sup>

Pada kenyataannya, idealisme yang tercantum dalam undang-undang tersebut belum menjelma dalam realita. Sejatinya, ketika seseorang akan memasuki jenjang pendidikan dan berproses dalam satuan pendidikan untuk kemudian lulus, seharusnya telah memiliki bekal dan modal utama untuk lahirnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil, yang duduk

- 
3. Komaruddin Hidayat, [http://www.kompas.com/kompas\\_cetak/0502/03/opini/1638957.htm](http://www.kompas.com/kompas_cetak/0502/03/opini/1638957.htm)
  4. *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Bab I Pasal 1*
  5. *Ibid.*, Bab II Pasal 3.

pada jajaran terdepan manusia yang bermoral tinggi.

Demikian juga tatkala mereka duduk dalam jajaran birokrasi pada tingkatan mana pun, komitmen moralnya pun seyogyanya makin kokoh, dengan diikat oleh sumpah jabatan. Namun sayangnya, di sekolah-sekolah kita dewasa ini telah banyak terjadi kriminalitas dan berbagai praktik penyimpangan pendidikan. Bentuk riilnya adalah munculnya ijazah *bodong* (baca: palsu), pembuatan nilai Ujian Nasional (UN) dengan nilai yang di *mark-up*, pungutan pendaftaran sekolah, dan lain-lain.<sup>6</sup>

Selain itu, kemerosotan moral yang melibatkan para peserta didik terjadi di mana-mana, seperti yang dikemukakan Koyan sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemberontakan remaja atau dekadensi etika/sopan santun pelajar.
2. Meningkatnya ketidakjujuran seperti suka bolos, nyontek, tawuran, dan suka mencari.
3. Berkurangnya rasa hormat terhadap orang tua, guru dan terhadap figur-figur yang berwenang.
4. Meningkatnya kelompok teman sebaya (geng) yang bersifat kejam dan bengis. Sebut saja Geng Nero di Pati, dan lain-lain.
5. Munculnya kejahatan yang memiliki sikap fanatik dan penuh kebencian.
6. Berbahasa tidak sopan.
7. Merosotnya etika kerja.
8. Meningkatnya sifat-sifat mementingkan diri sendiri dan kurangnya rasa tanggung jawab sebagai warga negara.
9. Timbulnya gelombang perilaku yang merusak diri sendiri seperti perilaku seksual prematur, narkoba, dan perilaku bunuh diri.
10. Timbulnya ketidaktahuan sopan santun termasuk mengabaikan pengetahuan moral sebagai dasar hidup, seperti adanya kecenderungan untuk memeras tidak menghormati peraturan-peraturan dan perilaku yang

---

6. Sudarwan Danim, *Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan*, (Pustaka Pelajar, 2003), h. 63

membahayakan terhadap diri sendiri atau orang lain, tanpa berpikir bahwa itu salah.<sup>7</sup>

Penyebab kegagalan pendidikan tersebut karena pendidikan tidak berorientasi pada pembentukan kepribadian, moral dan pembentukan karakter manusia secara optimal, maka penyajian materi pendidikan moral pada saat ini sangat diperlukan. Penyajian materi pendidikan moral kepada siswa hendaknya dilaksanakan secara terpadu, yaitu melibatkan berbagai pihak (guru, kepala sekolah, orang tua murid, tokoh-tokoh masyarakat sekitar).

Oleh karena itu, perlu untuk menerapkan kembali pembentukan kepribadian melalui mata pelajaran yang dirangkum dalam kurikulum berbasis nilai agar *character building* dapat berperan sebagai filter bagi pengaruh negatif, apalagi dalam menghadapi era globalisasi dan komunikasi seperti sekarang ini.

### C. Tingkatan Moral Manusia

Pendidikan sejati merupakan proses pembentukan moral masyarakat beradab, masyarakat yang tampil dengan wajah kemanusiaan dan pemanusiaan yang normal. Dengan kata lain, pendidikan adalah moralisasi masyarakat. Pendidikan yang dimaksud lebih dari sekedar sekolah (*education not only education as schooling*), melainkan pendidikan sebagai jaringan kemasyarakatan (*education as community networks*). Pendidikan sekolah terfokus kepada pembentukan kemampuan nalar intelektual dan keterampilan motoris.

Pembentukan nalar emosional dan afeksi ini menjadi bagian dari tugas lembaga pendidikan yang praktisnya disusun dalam kurikulum (*hidden kurikulum*). Upaya untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan pembentukan karakter bangsa sudah dilaksanakan secara serius dan melalui berbagai penelitian dan *try out* di berbagai kesempatan.

---

7. <http://re-searchengines.com/0404lewa.html>

Manusia merupakan makhluk Tuhan yang terbaik. Mereka adalah makhluk hidup yang mempunyai tujuan dan fungsi yang baik. Secara moral, manusia harus berbuat baik, karena dia berinteraksi dengan manusia lain dan sangat perkasa.

Cheppy Hericahyono, menyatakan bahwa moral terdiri dari tiga tingkatan, yaitu standar moral, aturan moral dan pertimbangan moral. Standar moral merupakan basis pijakan atau asumsi untuk menentukan apakah secara moral suatu tindakan itu diperkenankan atau tidak, baik atau tidak, diterima oleh masyarakat atau tidak, bermaslahat bagi umat atau tidak.<sup>8</sup>

Fenomena kontekstual menjadi acuan untuk menentukan standar moral, tanpa memosisikannya sebagai dalih untuk membenarkan tingkah laku individu atau masyarakat. Maraknya kasus pembunuhan yang dilakukan orang tua (baca: ibu) kepada anaknya karena alasan ekonomi; pencurian karena alasan kemiskinan, bukanlah pembenaran manusia untuk melaksanakan kebiadaban tersebut. Namun karena kebodohan dan kemalasan manusia, ketidak-terdidikan, rendahnya pemahaman terhadap makna hidup dan makin terbatasnya sumber daya alam yang dapat diakses dan dapat diperbaharui.

Di dalam menentukan tindakan, misalnya prinsip sama yang kita pegang dan kita lakukan, maka harus dibertakukan sama untuk diri kita dan orang pada situasi yang sama. Tidak adil jika suatu tindakan dipandang benar bila dilakukan oleh diri sendiri, sementara selalu salah jika dilakukan oleh orang lain. Misalnya, tatkala orang lain melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dicaci maki sebagai pelanggaran moral, sementara apabila dilakukan oleh diri sendiri dinilai sebagai sesuatu yang wajar.

Aturan moral memuat prinsip-prinsip moral yang diderivasikan dari standar moral seperti yang diuraikan di atas. Aturan moral merupakan tindakan yang dianggap benar atau salah dengan berdasarkan pada kriteria yang diformulasikan oleh standar moral.

---

8. Sudarwan Danim, *op.cit.*, h. 68.

Pertimbangan moral, merupakan evaluasi moral terhadap dimensi kepribadian sekaligus tindakan-tindakan seseorang baik yang bersifat umum maupun spesifik. Ada tiga tipe pertimbangan moral, yaitu:

1. Pertimbangan yang menunjuk kepada tindakan yang merupakan kewajiban moral atau tindakan-tindakan yang benar kalau diwujudkan dan salah kalau tidak diwujudkan.
2. Pertimbangan yang merujuk kepada tindakan-tindakan yang merupakan larangan moral, yaitu tindakan yang salah kalau diwujudkan dan benar kalau tidak diwujudkan.
3. Pertimbangan-pertimbangan yang menunjuk pada keadaan yang dapat dibenarkan secara moral, sebuah fenomena yang netral. Misalnya mendatangi undangan adalah sebuah kewajiban. Akan tetapi ketidakhadiran seseorang memenuhi undangan dapat dibenarkan dengan alasan sakit atau alasan yang lain.

#### D. Pendidikan Berbasis Moral

Pada saat ini muncul fenomena baru bahwa seseorang merasa dirinya hebat dan berharga bukan karena kualitas pribadinya, tetapi karena jabatan dan kekayaannya. Meski jabatan dan kekayaan tersebut diraih dengan cara yang tidak hormat. Pribadi semacam ini oleh Erich Fromm disebut sebagai *having oriented* bukan *being oriented*.<sup>9</sup> Pribadi yang obsesif untuk selalu mengejar harta dan status, tetapi tidak peduli pada pengembangan kualitas moral.

Ketika pendidikan tidak lagi menempatkan prinsip-prinsip moralitas agung sebagai basisnya, maka yang akan dihasilkan adalah orang yang selalu mengejar materi untuk memenuhi tuntutan *physical happiness* yang durasinya hanya sesaat dan potensial membunuh nalar sehat dan nurani. Padahal, aktualisasi nilai kemanusiaan membutuhkan perjuangan hidup sehingga seseorang akan merasa lebih berharga dan bahagia saat mampu meraih kebahagiaan non materi, yaitu *intellectual*

---

9. Komaruddin Hidayat, [http://www.kompas.com/kompas\\_cetak/0502/03/opini/1638957.htm](http://www.kompas.com/kompas_cetak/0502/03/opini/1638957.htm)

*happiness, desthetical happiness, moral happiness, dan spiritual happiness.*

Pendidikan yang sehat adalah yang secara sadar membantu anak didik bisa merasakan, menghayati, dan menghargai jenjang makna hidup dari yang moral spiritual, yang dihancurkan politisi dan teknokrat yang mabuk kekuasaan. Sebenarnya tak ada benda mati di hadapan orang yang akal budinya hidup. Terlebih di hadapan Tuhan, semuanya hidup dan bekerja atas perintah-Nya karena tercipta bukan tanpa tujuan. Pendidikan kita kurang mengajarkan bagaimana bersahabat dan berdialog dengan kehidupan secara menyeluruh.

Sebuah kasus menarik saat bencana tsunami di Aceh, hampir tidak ditemukan bangkai sapi atau kerbau dan hewan lain karena semuanya telah menyelamatkan diri. Hewan-hewan itu memiliki kepekaan dan mampu berdialog dengan sesama penghuni bumi saat bahaya akan datang. Kalaupun ada yang mati, itu lebih dikarenakan hewan-hewan itu kurang makan atau terjebak di kandang.

Pelaksanaan pendidikan moral pada saat sekarang sangat penting, karena hampir seluruh masyarakat dunia, khususnya di Indonesia, kini sedang mengalami patologi sosial yang amat kronis. Bahkan sebagian besar pelajar dan masyarakat Indonesia telah tercerabut dari peradaban Timur yang beradab, sopan santun dan beragama.

Seiring munculnya kesadaran dan tuntutan moral dalam dunia bisnis, dalam dunia pendidikan juga muncul gerakan untuk melibatkan emosi dan nurani dalam proses pembelajaran. Dipopulerkan oleh Danah Zohar, Ian Marshall, dan Daniel Golleman, literatur seputar betapa vitalnya dimensi spiritual dan emosional dalam kerja dan belajar kian diapresiasi kalangan eksekutif muda dan praktisi pendidikan. Misalnya, *Training ESQ-Leadership* yang dimotori Ary Ginanjar mendapat sambutan masyarakat.

Ada beberapa buku yang sebaiknya dibaca para guru, misalnya karya Eric Jensen, Thomas Armstrong, dan David Meier soal bagaimana menciptakan proses dan suasana pembelajaran dengan mengacu pada sifat otak dan emosi (*brain based*

*training*) sehingga suasana belajar menjadi nyaman, kreatif dan kontemplatif. Pembelajaran yang menjadikan siswa sebagai subyek, di mana anak-anak itu memiliki nurani dan potensi multi-kecerdasan, namun belum tergalai dan teraktualisasi. Dengan demikian, proses pembelajaran sebaiknya dimulai dengan melihat, mengamati, dan merasakan lingkungan sosial yang dihadapi, guru dan murid berempati menjadi bagian integral dari realita sosial dan semesta.

#### E. Simpulan

Dewasa ini pelaksanaan pendidikan moral di sekolah diberikan melalui pembelajaran Pancasila, Kewarganegaraan (PPKn) dan Pendidikan Agama, akan tetapi masih tampak kurang pada keterpaduan dalam model dan strategi pembelajarannya. Di samping penyajian materi pendidikan moral di sekolah, tampaknya lebih berorientasi pada penguasaan materi yang tercantum dalam kurikulum dan buku teks dan kurang mengaitkan isu-isu moral yang terjadi dalam masyarakat.

Pada saat ini rakyat amat merindukan pemimpin, birokrat, dan pelaku pasar yang senantiasa mempertahankan prinsip hidup terhormat, hidup yang dipimpin suara hati, meski bisa jadi harus siap hidup sederhana. Itu semua harus dimulai dari pendidikan keluarga dan sekolah yang menjunjung tinggi pendidikan karakter atau moral. Semua itu dapat dilaksanakan melalui pendekatan ruhani.

Untuk merespon gejala kemerosotan moral tersebut, maka peningkatan mutu dan intensitas pelaksanaan pendidikan moral di sekolah merupakan tugas yang sangat penting dan sangat mendesak bagi kita. Selanjutnya kecerdasan yang ada pada manusia hendaknya diberdayakan melalui peningkatan keimanan, bertakwa dengan sebenarnya, berdoa tanpa henti dan berzikir tanpa batas. Semoga anak kita khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya akan menjadi bangsa yang bermoral.

*(Musfirotun Yusuf, MM)*



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Malik Fajar. 1999. *Reorientasi Pendidikan Islam*. Jakarta: Fajar Dunia.
- Muhammad Djarot Sensa. 2004. *Quranic Quotient, Kecerdasan-Kecerdasan Bentuk al-Qur'an*. Bandung: Hikmah.
- <http://re-searchengines.com/0404lewa.html>
- Komaruddin Hidayat, [http://www.kompas.com/kompas\\_cetak/0502/03/opini1638957.htm](http://www.kompas.com/kompas_cetak/0502/03/opini1638957.htm)
- Sudarwan Danim. 2003. *Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Bab I Pasal 1

# BAB 7

## BOHONG = KORUPSI

### Refleksi Terhadap Pengembangan Pendidikan Agama di Indonesia

#### A. Pengantar

Sesuai dengan fitrahnya, setiap anak terlahir dalam keadaan suci. Dengan keluguan dan kepolosannya, ia laksana kertas putih yang akan memiliki warna dan corak sesuai dengan yang digoreskan padanya. Rasa keingintahuannya yang besar dan kemampuan analisisnya yang belum berkembang, cenderung menyebabkan anak meniru segala yang dilihat dan didengarnya. Mata si anak melihat dan merekam apa saja yang tampak olehnya. Rekaman tersebut tinggal lama dalam ingatan, sehingga ada pakar kejiwaan yang mengatakan bahwa manusia belajar lewat penglihatannya sebanyak 83%. Melalui pendengarannya, anak belajar sebanyak 11%. Sedangkan sentuhan, pencicipan, dan penciuman bersama-sama memberi pengaruh sebanyak 6%. Jadi pengaruh terbesar adalah lewat penglihatan dan pendengaran, yaitu 94%. <sup>1)</sup>

Orang tua selalu mendambakan anaknya memiliki keunggulan pribadi yang dapat dibanggakan. Bukan hanya cerdas dan pandai, tetapi juga berakhlak mulia. Sayangnya, tidak sedikit orang tua yang masih mendewakan kecerdasan intelektual (*Intelligence Quotient/IQ*) dan mengukur kemampuan anak sebatas nilai akademisnya.

Padahal, menurut penelitian *Daniel Goleman*, pemopuler kecerdasan emosional (*Emotional Intelligence/EI* atau *Emotional Quotient/EQ*), IQ hanya menentukan 20% kesuksesan anak di kemudian hari. Kesuksesan anak akan banyak ditentukan oleh kecerdasan emosinya (EQ). <sup>2)</sup>

- 
1. Zakiah Daradjat, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*, C.V. Ruhama, Jakarta: 1995, hal. 56.
  2. Sahabat Nestle, *Ajari Si Kecil Berempati*, dalam situs [www.sahabatnestle.com](http://www.sahabatnestle.com)

Empati, simpati, dan bentuk-bentuk kecerdasan emosional lainnya, bila berpadu dengan kejujuran yang tertanam kuat sejak dini, akan mempermudah anak untuk diterima di lingkungannya, disamping tentu saja akan menjadi modal dasar yang sangat berharga bagi anak untuk hidup di masyarakat. Ini berarti, selain pembawaan, lingkungan dimana anak dibesarkan, memberi pengaruh yang tidak kecil terhadap perkembangan diri dan kehidupannya. Hal ini sejalan dengan Hukum Konvergensi yang berasal dari pendapat ahli ilmu jiwa bangsa Jerman, *William Stern*, bahwa pembawaan dan lingkungan, kedua-duanya menentukan perkembangan manusia.<sup>3)</sup>

Orang tua dan saudara dalam lingkungan keluarga, guru di lingkungan sekolah, dan tetangga di lingkungan masyarakat adalah model-model yang ditiru oleh anak. Apabila model-model dalam lingkungan itu tidak menjunjung tinggi nilai kejujuran, akan mudah pula bagi anak untuk meniru perilaku mereka. Orang tua seringkali tidak menyadari bahwa perilaku mereka adalah teladan bagi anak-anaknya.

## B. Bibit Kebohongan

Dalam perjalanan menuju terminal Bus Pekalongan, pada suatu hari, di dalam bus antarkota dalam propinsi, seorang anak kecil menangis nyaring mengusik telinga, meminta dibelikan bakso. Diiringi raungan suara mesin tua yang berderak, dan obrolan para penumpang, tangisan itu menjadi irama tersendiri. Sang ibu, tentu saja, menjawabnya dengan rayuan manis bahwa ia akan dibelikan bakso nanti setibanya di terminal. Sang anak menjawabnya dengan tangisan yang semakin kuat dan semakin panjang, yang segera diringi gerutu penumpang lainnya. Semakin panjang rayuan ibunya yang mulai terlihat marah, semakin panjang pula tangisan sang anak.

Adakah keanehan pada tangisan anak itu? Tidak. Sama sekali tidak ada. Tangisannya mungkin sama dengan tangisan anak lainnya di seantero dunia. Tetapi, cobalah putar mundur

---

3. Ngilim Purwanto, *Ilmu Pendidikan: Teoritis dan Praktis*, Remaja Rosdakarya, Bandung: 1998, hal. 60

jarum jam ke titik sekian waktu ke belakang, tatkala sang anak menyatakan keinginannya untuk ikut bapak atau ibunya ke suatu tempat, seperti pasar, pesta hajatan, dan sebagainya. Untuk sekadar menyurutkan keinginan sang anak, maka, kemungkinan jawaban orang tua adalah: “Jangan, nanti ada orang gila di sana”, “Nanti disuntik pak dokter, lho”, “Kalau kamu ikut nanti ditangkap pak polisi”, atau jawaban-jawaban sejenis lainnya yang sekiranya membuat anak menjadi takut dan mengurungkan niatnya.

Memasuki bangku sekolah dasar, lambat laun ia mengetahui bahwa di pasar, atau di tempat lain yang selama ini disebut-sebut oleh orang tuanya, ternyata tidak seperti yang digambarkan oleh orang tuanya. Tidak ada pak dokter yang akan menyuntiknya secara paksa. Juga tidak ada pak polisi yang akan menangkapnya. Selain menumbuhkan ketakutan tersendiri terhadap pak dokter dan pak polisi, disadari atau tidak, orang tua telah mengajari anaknya untuk berbohong. Lebih fatal lagi apabila sang anak juga menyadari, kelak suatu saat, bahwa ia telah sekian lama dibohongi oleh orang tuanya.

Pada saat orang tuanya menyuruh anak untuk mengatakan kepada petugas penarik sumbangan atau pengemis, bahwa orang tuanya sedang tidak berada di rumah, ia mulai belajar mempraktikkan ilmu itu manakala ia ingin memiliki mainan baru atau untuk membeli jajan tambahan sementara uang sakunya tak pernah lebih. Dengan mengatakan bahwa uang untuk menabung telah hilang, ia pun bisa memenuhi keinginannya. Dan perlahan-lahan, teknik-teknik berbohong dengan cara-cara yang lebih canggih dan relatif lebih aman mulai ia pelajari dari pengalaman sehari-hari. Contoh-contoh yang diperagakan oleh orang-orang di sekelilingnya akan menjadi referensi berharga untuknya<sup>4)</sup> yang dapat berujung pada kesimpulan sederhana: ternyata, berbohong itu mudah.

---

4. Dzakiron, *Pendidikan Berbohong: Siapa yang Bertanggung Jawab?*, dalam AL-MIZAN, Pekalongan: No. X/November/2003

Maka, manakala hari itu ia menginginkan bakso dan ibunya mengatakan bahwa nanti ia akan dibelikan bakso sesampainya di terminal, ia sulit mempercayai ucapan itu. Dia mungkin pernah meminta orang tuanya untuk memenuhi keinginannya, sebagaimana keinginan wajar anak-anak seusia dia. Jawaban yang dia dengar, mungkin: “Nanti kalau Ibu pergi berjualan”, “Kalau Ibu punya uang”, “Kalau Bapakmu gajian”, atau janji-janji lainnya. Tatkala semua berlalu begitu saja, meninggalkan dia sendirian dengan keinginan-keinginannya, perlahan tertanam kuat dibenaknya bahwa orang tuanya telah (atau selalu) membohonginya. Dan ia mulai tak bisa lagi mempercayai ucapan orang tuanya, seperti pesan yang ia sampaikan melalui isak tangisnya. Orang tua tak pernah menyadari, dari titik inilah bibit kebohongan telah bersemi dan potensinya siap untuk “dibudidayakan”.

Media massa, khususnya televisi, juga menyumbang andil yang tidak kecil terhadap sosialisasi dan penyuburan bibit-bibit kebohongan tersebut. Tanpa mengabaikan tayangan televisi yang mendidik, tidak sedikit tayangan yang dengan mudah ditonton anak-anak, karena ditayangkan pada jam siar utama/*prime time*, yang mempertontonkan hal-hal yang kurang (atau bahkan tidak) mendidik. Lihatlah beberapa sinetron anak-anak, baik yang murni bertemakan anak-anak maupun yang menempatkan anak-anak sebagai bumbu penyedap dan pemanis belaka. Para pemainnya kerap kali ditampilkan sebagai anak yang dikelilingi kemewahan, kemudahan menjalani hidup, senantiasa diliputi keberuntungan, bahkan seringkali terjebak pada arogansi kekuasaan anak. Angkuh, sewenang-wenang, dan aneka tindak-tanduk lainnya, yang sangat tidak tepat dilekatkan pada anak. Betapa lalu anak menjadi sosok yang super power, yang mau dan mampu melakukan apa saja untuk kemenangan dan kepuasan diri, termasuk melakukan perbuatan-perbuatan di luar kewajaran anak seusianya. Mencelakai teman yang tidak disukai (yang selalu diplot sebagai musuh), merencanakan aneka perbuatan jahat, dan sebagainya, yang dideskripsikan

dengan sangat detil dan jelas. Bila perlu, dengan bantuan dari makhluk dunia lain, meskipun dikemas dengan bingkai humor.

Mungkin inilah potret buram dunia pendidikan kita. Di ruang-ruang kelas, dan tempat-tempat pendidikan lainnya, dengan segala keterbatasan sarana dan minimnya penghargaan atas perjuangan, para pendidik tetap setia dan tak pernah lelah mengajarkan norma-norma dan nilai-nilai moral untuk membentuk watak dan perilaku anak didik yang berbudi dan berakhlak mulia. Dan di televisi, dengan sarana melimpah dan dukungan dana yang nyaris tanpa batas, yang bertamu setiap saat dengan leluasa bahkan sampai ke kamar tidur kita, ajaran-ajaran mulia itu didoktrinkan dengan “bahasa dagang” oleh sinetron dengan kasar, dangkal, dan *profit oriented*.<sup>5)</sup>

### C. Intelektualisasi Kebohongan

Ketika waktu berjalan seiring terbentuknya watak dan kepribadian anak, apakah bibit itu itu telah mati, atau justru telah bertunas, berdaun, beranting, berdahan, dan berakar kokoh? Jawaban kedua mungkin mendekati realita. Perubahan lingkungan sosial, dari SD hingga SMU, bahkan sampai perguruan tinggi, turut mewarnai pola pikir dan perilaku anak, yang kemudian menyandang predikat baru sebagai agen pembaharuan: mahasiswa.

Tatkala sistim pendidikan kampus yang sering digambarkan dengan kebebasan berpikir dan berekspresi serta penuh dengan ajaran-ajaran mulia, bertemu dengan bibit kebohongan yang telah terpoles sedemikian rupa dan sedemikian lama, benturan pun tak terelakkan. “Perang” baru saja dimulai. Dan bendera *start* proses pembentukan jati diri yang sesungguhnya baru saja dikibarkan. Idealisme, prinsip, kejujuran, dan deretan panjang lainnya menjadi kajian hati yang mulai dipertanyakan kebenaran dan ketidakbenarannya. Modul, buku-buku tebal, makalah, studi kasus, data ilmiah, dan sejarah, menjadi sumber inspirasi serta motivasi tentang

---

5. Dzakiron, *Tayangan Sinetron Anak: Mengundang Keprihatinan dan Tidak Mendidik*, dalam Majalah Derap Guru Jawa Tengah, Semarang: No. 60 Tahun V-Januari 2005

kejujuran dan idealisme yang dalam memperjuangkannya tak pernah sunyi dari tetesan air mata dan bahkan, darah. Tentang tokoh-tokoh yang bernyali menukar idealismenya dengan terali besi, tali gantungan, dan tembakan regu eksekutor. Dan pada saat yang bersamaan juga mengajarkan bagaimana kesalahan-kesalahan terjadi serta bagaimana menyembunyikannya, kebohongan serta metode menutupinya, dan kejahatan-kejahatan sistematis lengkap dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) meloloskan diri dari jerat hukum.

Lalu, tunggulah kelahiran generasi baru yang akan membuka pintu gerbang kampus dan keluar dari kemegahan gedungnya. Apakah kerinduan mendalam akan figur-figur pemimpin yang berhati nurani dan calon-calon pelaku sejarah yang mampu mengemban amanat tanpa berkhianat akan terobati atau tidak, tunggulah episode berikutnya.

Bila kampus adalah kawah candradimuka kebenaran, maka bernafaslah dengan lega. Dan bentangkan kedua tangan untuk memeluk sosok berseragam almamater itu dengan hangat. Namun, bila kampus adalah arena berkumpulnya manusia-manusia dengan dendam kebohongan yang membara, maka buanglah impian itu. seperti halnya Lembaga Pemasyarakatan yang terkadang mempertemukan maling ayam dan maling sapi serta pencopet dan perampok bank, yang pada saat dibebaskan justru menjadi lebih berpengalaman dan profesional, kampus akan menjadi sarana pertukaran ilmu dan pengalaman bagi calon-calon pembohong intelektual. Kampus, beserta segala perangkat akademiknya, akan memperkaya khasanah pengetahuan yang kelak akan berguna untuk memanfaatkan celah-celah kelemahan sistim hukum dan berkelit dari jerat hukum.

Pembohong-pembohong intelektual itu dapat hadir, menjelma dan menyandang predikat apa saja. Pemimpin, pengusaha, pejabat, politikus, pedagang, dosen, guru, dai, dan ..... rakyat jelata, yang memiliki kesamaan: pembohong. Kesamaan inilah yang telah dan akan terus menghiasi wajah kehidupan sosial kita, yang disesaki oleh sepak terjang dan perilaku orang-orang yang lebih mengerti nilai-nilai dan norma-

norma aturan hukum serta bagaimana mensiasatinya. Dan persiapan mata untuk menikmati adegan demi adegan pengingkaran atas nilai kebenaran dan kadilan. Untuk satu dari lain tujuan (baca: kepentingan), salah dan benar tak lagi bermakna hitam dan putih. Sebab, batas di antara keduanya menjadi teramat tipis, bahkan mungkin lebih tipis dari busana superketat para artis yang bukan hanya menonjolkan tonjolan-tonjolan yang memang sudah menonjol, tetapi juga menyuguhkan ketelanjangan.

Ketelanjangan itu pula yang seringkali dipertontonkan di depan mata. Saat orang atau orang-orang yang mengerti hakikat benar dan salah, yang seharusnya memberikan teladan, namun mereka lebih asyik memainkan kisah-kisah pengingkaran atas kebenaran, yang dengan kelihaiannya membungkus kebusukan itu dengan sampul norma-norma dan dalih susila, kemasyarakatan, bahkan agama, sehingga menjadi hidangan menggugah selera yang disajikan di atas meja besar bernama masyarakat.

Bibit kebohongan, yang kemudian ditempa oleh waktu dan pengalaman, dipersubur dengan pupuk keserakahan, dan dibingkai dengan aneka cara dan taktiknya, serta dijiwai dengan semangat kebersamaan yang salah kaprah, kemudian bertunas, berdaun, beranting, berdahan, berakar kokoh, dan berbuah lebat: korupsi. Aktivitas berjamaah yang bukan hanya telah mengantarkan Indonesia menjadi negara papan atas dalam prestasi kerusakan moral yang melembaga, tetapi juga hancurnya sendi-sendi kehidupan berbangsa, terenggutnya hak-hak normatif serta timbulnya kerugian yang teramat besar, baik nominal maupun kerugian yang sulit terukur dengan sekadar angka-angka di kalkulator.

#### D. Gagalnya Pendidikan Agama?

Pendidikan agama merupakan ruh pendidikan nasional. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat



dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional ini selaras dengan tujuan pembangunan nasional, bahkan juga dengan ajaran Agama Islam itu sendiri. Sehubungan dengan itu, dalam pasal 36 dan 37 Undang-Undang tersebut ditegaskan pula bahwa kurikulum disusun antara lain dengan memperhatikan peningkatan iman, takwa dan akhlak mulia serta wajib berisi pendidikan agama, terutama untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Meskipun demikian, tampaknya pendidikan agama melalui berbagai institusi dan media belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan. Berbagai tindakan negatif, penyimpangan, dan kejahatan masih mewarnai kehidupan bangsa ini, bahkan juga dilakukan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat.<sup>6)</sup>

Belakangan, keprihatinan senada makin menyeruak manakala semakin banyak kasus asosial dan asusila generasi muda yang terangkat ke permukaan. Terlepas dari beragam penyebabnya, penulis menjumpai aneka kasus terjadinya benturan antara generasi muda dan generasi tua yang menjadi salah satu pemicu dan pemacu "pemberontakan" generasi muda, yang diawali dengan gagalnya komunikasi dakwah. Betapa lalu menjadi kenyataan yang merisaukan manakala kegiatan-kegiatan pendidikan agama, dakwah, misalnya, mengalami kesulitan dalam menyampaikan misi mulianya akibat kekeliruan mempergunakan bahasa dakwah. Tanpa mengabaikan upaya-upaya dakwah yang berhasil merangkul generasi muda dan sukses dalam menyampaikan misinya, sulit disangkal bahwa salah satu penyebab kegagalan dakwah terhadap generasi muda adalah tidak tepatnya metode dakwah yang dipergunakan.

---

6. Departemen Agama, *Pedoman Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah Umum*, Departemen Agama RI, Jakarta: 2004, hal. 1

Ketidaktepatan metode dakwah ini biasanya diawali dari penempatan posisi yang kurang sejajar. Generasi muda ditempatkan pada posisi yang lemah, harus patuh tanpa syarat, dan selalu bermasalah. Sementara tokoh-tokoh pelaku dakwah (orang tua, guru, tokoh masyarakat, dai, dan sebagainya) menempatkan diri pada posisi serba tahu, siaga dengan aturan-aturan keras, dan bahkan kadang teramat sakral untuk sekadar dikritik. Pada situasi seperti ini, yang miskin dari kehangatan dan saling pengertian, sulit diharapkan terciptanya komunikasi ideal. Pada akhirnya, tokoh-tokoh tersebut, beserta program-program dakwahnya, akan menjadi sosok-sosok asing bagi generasi muda.

Tanpa bermaksud mencari-cari kambing hitam, mestinya juga perlu disadari bahwa persoalan generasi muda tidaklah berdiri sendiri. Lingkungan di mana generasi muda tumbuh dan berkembang menyajikan sekaligus mengajarkan beragam adegan, yang disadari atau tidak, terekam dalam benak generasi muda dan perlahan-lahan mempengaruhi pola pikir dan tindakan generasi muda. Penerapan standar ganda oleh orang tua telah menyudutkan generasi muda pada posisi dilematis. Satu sisi, orang tua mengajarkan beragam aturan dan norma lengkap dengan ancaman tegas dan hukuman atas pelanggaran. Di sisi lain, kerap kali orang tua justru melakukan tindakan-tindakan yang kontraproduktif dengan ajaran-ajaran itu. Seorang teman remaja mengemukakan apa yang disebutnya dengan “Teori Kaleng”. Teori yang diangkat dari pengalaman pribadi itu menyatakan: “Bila anak meletakkan kaleng dan kaleng itu tertendang oleh orang tua, maka orang tua buru-buru memaki: sembarangan kau letakkan kaleng itu! Dan bila orang tua meletakkan kaleng lalu anak (tak sengaja) menendangnya, maka orang tua pun memaki: di mana kau letakkan matamu?!”

Dengan tetap menghormati dan menjunjung tinggi orang tua, sikap orang tua seperti itu akan mempersulit generasi muda dalam meniadani orang tua. Tatkala generasi muda memiliki sedikit keberanian untuk mempertanyakan standar ganda tersebut, orang tua terkesan berlindung di balik

**“Undang-undang Kebenaran Orang Tua”, yang berbunyi :  
 “Pasal satu: orang tua selalu benar. Pasal dua: bila orang tua salah, lihat pasal satu.”<sup>7)</sup>**

Dengan segala kekurangannya, generasi muda adalah aset berharga sekaligus sumber daya manusia yang potensial. Bagaimanapun juga, generasi ini adalah calon-calon pemimpin dan pelaku sejarah di masa yang akan datang. Proses pematangan menuju kedewasaan berpikir, bertindak dan bertanggung jawab akan menjadi upaya sia-sia belaka tanpa kesediaan dari generasi tua untuk memberi sedikit tempat bagi generasi penuh warna ini. Dalam mencoba membangun karakter pribadinya, rasa tanggung jawab terhadap diri dan masa depannya, Insya Allah akan mudah terpupuk subur dan terpelihara dalam kondisi yang komunikatif dan fleksibel terhadap kritik, gagasan dan saran konstruktif. Sedikit atau tidak adanya calon-calon pemimpin berkualitas yang lahir dari kawah candradimuka bernama dunia generasi muda ini bukan hanya akan menghambat kelangsungan kehidupan beridealisme tinggi, tetapi juga akan menjadi bukti gagalnya proses regenerasi itu sendiri, yang berarti kegagalan generasi tua dalam mempersiapkan penggantinya.

#### **E. Penutup**

Untuk teraktualisasinya potensi fitrah beragama yang dimiliki manusia sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah, maka pada dasarnya pendidikan berfungsi sebagai media yang menstimulasi bagi pertumbuhan dan perkembangan fitrah manusia ke arah penyempurnaan dirinya sebagai *‘abd* dan *khalifah Allah fi al-ardh.*<sup>8)</sup> Pendeknya, pendidikan agama semestinya bisa mendorong peserta didik sekaligus pendidiknya untuk menselaraskan kesalahan individual dengan kesalahan sosialnya. Dalam hal ini, desain antara kurikulum pendidikan formal dan non formal (baca: SD/MI dan TPQ/Madin) mesti dirancang sedemikian rupa sehingga memiliki keterikatan,

- 
7. Muhammad Usman, *Saatnya Muslimah Berbenah Diri, dalam UMMI, Jakarta: No. 03/X/1998*
  8. Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam, Kalam Mulia, Jakarta: 2002, hal. 282*

ketarkaitan, dan kesinambungan tanpa mengabaikan, bahkan saling meniadakan karakteristik masing-masing. Peningkatan kesejahteraan guru TPQ/Madin pun mesti senantiasa diupayakan melalui semua lini dengan mengoptimalkan potensi sosial, budaya, dan politik. Pada saat yang bersamaan, upaya-upaya yang selama ini telah ditempuh untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pendidikan harus lebih dimaksimalkan. Dalam lingkup pendidikan formal, peningkatan kualitas guru PAI yang menjadi pilar sekaligus ujung tombak menjadi kebutuhan yang tak terelakkan.

Patut juga untuk direnungkan bersama tentang penajaman materi akhlakul karimah dalam mata pelajaran agama, khususnya tentang pokok bahasan kejujuran. Karena, semestinya, mengajarkan kejujuran kepada peserta didik bukan hanya mendiktekan pengertian dan contoh kejujuran serta ketidakjujuran belaka, tetapi, yang lebih penting adalah menanamkan idealisme bahwa *“Orang yang menghasilkan harta tanpa peduli dari mana, ia akan dimasukkan Allah ke neraka tanpa peduli dari pintu yang mana.”* (HR. Abu Manshur Ad Dailami). Penulis meyakini bahwa konsistensi penajaman materi akhlakul karimah, khususnya kejujuran, dari tingkat dasar sampai menengah atas, bahkan sampai ke perguruan tinggi, akan semakin memperteguh keyakinan peserta didik akan nilai mulia kejujuran. Pada gilirannya, *out put* pendidikan, akan memiliki standar kejujuran lebih tinggi, yang diharapkan akan meminimalkan lahirnya koruptor-koruptor baru. Kalaupun kelak ia berpredikat guru, atau bahkan dosen, patutlah kita berharap bahwa ia tidak mengawali karier dengan memanipulasi data untuk pemberkasan CPNS, tidak korupsi waktu, menggunakan kendaraan bergincu alias berplat merah hanya untuk keperluan dinas, serta tidak mempertaruhkan idealismenya untuk meningkatkan karier, seperti mengajukan Pengajuan Angka Kredit (PAK) dan belakangan, Sertifikasi Guru; dengan piagam, sertifikat, dan dokumen-dokumen lainnya yang (di)palsu(kan).

Memutus mata rantai “pendidikan berbohong” membutuhkan lebih dari sekadar sinergi antara semua pihak

yang berkepentingan terhadap peningkatan kualitas pendidikan agama khususnya serta bebasnya Indonesia dari cengkeraman gurita korupsi pada umumnya, tetapi juga kesadaran bersama dan yang paling penting, semangat tinggi serta cadangan kesabaran yang melimpah.

Akhirnya, mudah-mudahan, firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9 yang artinya : *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar"* dapat menjadi bahan perenungan berharga untuk kita semua. Amin.

(Dzakiron, A.Ma)

#### DAFTAR PUSTAKA

- Daradjat, Zakiah. 1995. *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*. Jakarta: C.V. Ruhama.
- Departemen Agama. 2004. *Pedoman Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah Umum*. Jakarta: Departemen Agama RI
- Purwanto, Ngilim. 1998. *Ilmu Pendidikan: Teoritis dan Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Ramayulis. 2002. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an (pent). 1995. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Karya Toha Putra.
- Dzakiron. *Pendidikan Berbohong: Siapa yang Bertanggung Jawab?*, dalam AL-MIZAN, Pekalongan: No. X/November/2003
- Dzakiron. *Tayangan Sinetron Anak: Mengundang Keprihatinan dan Tidak Mendidik*, dalam Majalah Derap Guru Jawa Tengah, Semarang: No. 60 Tahun V-Januari 2005
- Sahabat Nestle. *Ajari Si Kecil Berempati*, dalam website [www.sahabatnestle.com](http://www.sahabatnestle.com)
- Usman, Muhammad. *Saatnya Muslimah Berbenah Diri*. dalam UMMI, Jakarta: No. 03/X/1998

## BAB 8

# SPIRITUALISASI PENDIDIKAN AGAMA: Alternatif Pendidikan Nilai di Indonesia

### A. Pengantar

Dalam kancah peradaban global, kondisi buram yang tercermin pada krisis moral di Indonesia semakin tidak menunjukkan kejelasan kapan akan berakhir. Perspektif global telah mengindikasikan bahwa bangsa Indonesia mulai kehilangan pamor, walaupun sikap dunia internasional belum meninggalkan Indonesia, namun nampaknya mereka mulai bersikap skeptis. Fenomena tersebut ditangkap oleh Thomas Friemen, wartawan *The New York Times*, dengan mengeluarkan statemen bahwa Indonesia telah menjadi *messy state*, negara yang amburadul.<sup>1</sup>

Krisis moral mempunyai implikasi yang signifikan terhadap lahirnya krisis kultural bangsa Indonesia. *Sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya cultural* seakan-akan telah kehilangan jati diri, dan ini mengakibatkan kerawanan masa depan karakter masyarakat Indonesia. Sebagai pihak yang bergelut dalam bidang pendidikan agama, kondisi tersebut seolah-olah merupakan tamparan tersendiri sekaligus memojokkan kinerja pendidikan agama.

Ketika pendidikan agama belum mampu menghasilkan generasi yang memiliki kompetensi intelektualitas, moralitas dan religiusitas, berarti spirit pendidikan agama mulai pudar. Berbagai inovasi pendidikan agama yang dilakukan oleh para praktisi pendidikan agama belum memberikan hasil yang signifikan, sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Dengan memotret fenomena tersebut melahirkan beragam pertanyaan, jangan-jangan

---

1. *Harian Kompas*, 20 Desember 2010

sistem pendidikan agama yang dikembangkan sekarang ini masih kurang tepat.

## B. Kerangka Dasar Spiritualisasi Pendidikan Agama

Spirit merupakan akumulasi dari konsentrasi kepentingan kemasyarakatan yang beradab, maka gagasan untuk mengembangkan spiritualisasi pendidikan agama menjadi sesuatu yang dapat dipertimbangkan secara akademis. Kita memang telah mempunyai payung regulasi pendidikan agama yang cukup memadai namun dalam implementasinya masih jauh dari spiritualisasi pendidikan agama yang sebenarnya. Dengan spiritualisasi pendidikan agama, slogan bahwa *Indonesia sebagai bangsa yang agamis* akan menjadi kenyataan. Dalam konteks wawasan kebangsaan, spiritualisasi pendidikan agama diharapkan mampu menciptakan identitas dan ruh keberagaman di Indonesia.

Spiritualisasi berasal dari kata *spirit* (artinya: semangat, jiwa/sukma/ruh), berkembang menjadi kata *spiritual* (artinya: berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan)<sup>2</sup>. Spiritualisasi adalah pembentukan jiwa atau kejiwaan. Mircea Eliade menempatkan spiritual sebagai media strategis yang mengantarkan manusia mempunyai gerakan/aktivitas menuju sosok manusia yang ideal.<sup>3</sup> Term spiritualisasi (spiritual) mempunyai implikasi makna yang cukup luas dan mendalam meliputi<sup>4</sup>:1). Immaterial tidak jasmani terdiri dari ruh; 2). Mengacu pada kemampuan yang lebih tinggi (mental, intelektual, estetika, religius dan nilai-nilai pemikiran); 3). Mengacu pada nilai-nilai manusiawi yang non material seperti keindahan, kebaikan, cinta, kebenaran, belas kasihan, kejujuran dan kesucian; 4). Mengacu pada perasaan emosi-emosi religius, estetika dan filosofis.

- 
2. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1995), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka,1995), hal. 960-961
  3. Mircea Eliade, *The Encyclopedia of Religion*, New York: MacMillan Library, 1995), p.19
  4. Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jogakarta:Kanisius,1996), hal. 1034

Dengan mengadaptasikan dari sisi epistemologi tersebut, penulis menggaris bawahi bahwa spiritualisasi pendidikan agama adalah proses kegiatan pendidikan agama yang dijiwai dengan nilai-nilai moral, nilai-nilai intelektual, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kemanusiaan secara integratif, dengan dukungan estetika, kejujuran, kebenaran, yang mengarah pada semangat terbentuknya manusia ideal. Gagasan spiritualisasi pendidikan agama di Indonesia merupakan proses otokritik terhadap sistem dan praktik pendidikan agama yang telah berjalan di Indonesia selama ini. Spiritualisasi pendidikan agama menekankan pada aspek *core values* yang berperan strategis dalam mendesain kegiatan pendidikan agama penuh dengan kebermaknaan. Melalui spiritualisasi pendidikan agama, pembelajaran agama didesain secara *integrated knowledge system*. Dengan demikian, spiritualisasi pendidikan agama sebagai alternatif pendidikan nilai yang berorientasi pada terbentuknya sosok manusia Indonesia yang paripurna sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Kajian tentang spiritualisasi pendidikan agama menjadi penting bila dikaitkan dengan pendidikan nilai yang harus dibudayakan pada sivitas pembelajar agama pada lembaga pendidikan. Spiritualisasi pendidikan merupakan bagian dari ikhtiar sadar untuk mengeliminasi pemikiran sekuler yang kadang menggerogoti kewibawaannya. Sekularisasi pemikiran sangat kontras dengan nilai-nilai dan jati diri agama. Sebagai dampak dari kapitalisme, sekularisasi menjauhkan manusia dari nilai-nilai keagamaan dalam aktivitas komunitas sosial.<sup>5</sup> Dengan mengutip pendapat C.A. Van Peursen, Harun Nasution mengingatkan bahwa sekularisasi merupakan proses penduniawian yang selalu berusaha melepaskan hidup dunia dari kontrol agama. Bila manusia dijauhkan dari ruh keagamaan, maka manusia hanya akan seperti gerakan mesin yang tidak mempunyai otoritas pilihan secara mandiri.<sup>6</sup>

- 
5. Bryan Turner, *Sosiologi Islam*, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 1994) hal. 291-295.
  6. Harun Nasution, *Islam Rasional* (Bandung: Mizan, 1996) hal. 188.



Konsep spiritualisasi dimulai dengan proses evaluasi terhadap sistem pendidikan agama yang telah dibangun oleh bangsa Indonesia selama ini. Dalam bahasa yang lebih operasional, spiritualisasi berusaha untuk mewujudkan sistem pembelajaran pendidikan agama yang berorientasi pada pembumian nilai-nilai agama (*religious values*) secara nyata. Upaya ini sejalan dengan rumusan tujuan pendidikan nasional yang menyelipkan pesan spiritual sebagai berikut: "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab" (Pasal 2 ayat (3) UU Sisdiknas).

Dalam spiritualisasi pendidikan, tidak ada aspek nilai-nilai yang mendominasi dalam proses maupun penggapaian tujuan pendidikan agama, melainkan adanya sinergi yang bersifat komplement (*complement synergies*), tidak ada yang berkedudukan sebagai suplemen. Pengembangan *nilai-nilai intelektual keagamaan, nilai-nilai estetika beragama, simbol-simbol keberagaman dan nilai-nilai moralitas berbasis agama (akhlak)* dikedepankan secara bersama-sama, berimbang dan integral secara harmonis, membentuk spirit yang menjadikan manusia memiliki manfaat dan makna dalam kehidupannya.

Ada dua basis kekuatan yang menjadi modal utama spiritualisasi pendidikan agama di Indonesia, yaitu budaya dan etika, sejalan dengan karakteristik orang Timur, di mana pendidikan tidak hanya mengisi dengan ilmu pengetahuan tapi juga harus mengembangkan moralitas dan agama.<sup>7</sup> Konsep ini sejalan dengan konsep manusia yang tersusun dari tubuh, akal dan hati nurani (unsur material dan immaterial) yang menghasilkan kesadaran manusia yang bersifat *personal*

---

7. *Ibid.*, p.289

*consciousness* dalam sebuah kepribadian yang utuh.<sup>8</sup> Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 30, Allah Swt berfirman: "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahu.".

Fitrah Allah maksudnya adalah ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Bisa jadi mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah lantaran pengaruh lingkungan yang kurang mendidik. Dalam diri manusia terdapat susunan organik dan anorganik yang dikenal dengan istilah *fitrah*, yang mencakup dua wilayah, yaitu *kawasan religiusitas* dan *kawasan produktivitas*. Konsep fitrah manusia tersebut membutuhkan adanya praktik pendidikan yang mencakup pendidikan *Aqliyah* dan pendidikan *Qolbiyah*.<sup>9</sup> Pada jembatan yang menghubungkan antara *qolbiyah* dan *aqliyah* itu ada titik sentral yang disebut nilai-nilai (*value*). Pendidikan nilai-nilai (*values education*) menjadi orientasi utama dalam spiritualisasi pendidikan.

### C. Pendidikan Nilai Melalui Pendidikan Agama

Nilai merupakan sesuatu yang berharga, yang dianggap bernilai, adil, baik dan indah serta menjadi pedoman diri. Sebagai ide atau konsep abstrak yang ada pada diri manusia, Imam Ghazali berpendapat bahwa keberadaan nilai ada dalam hati nutani (*qalbu*) serta menyatu, bersatu raga di dalam menjadi suara dan mata hati atau hati nurani (*the conscience of man*).<sup>10</sup>

Nilai-nilai (*values*) yang terdapat pada diri manusia tersebut dapat diamati dalam tiga penampilan, *pertama*, nilai

8. Jerome A. Shaffer, *Philosophy of Mind, Foundation of Philosophy Series*, (New York; Prentice Hall, Inc 1964) p.52.

9. Harun Nasution, *Op. cit.*, hal. 38.

10. Achmad Kosasih Djahari, *Konsep Nilai*, (Bandung: IKIP Bandung Press, 1990) hal.1

sebagai fakta watak, artinya dapat dijadikan satu indikasi seberapa jauh seseorang bersedia menjadikannya sebagai pegangan dalam bimbingan dan proses pengambilan keputusan. *Kedua*, nilai sebagai fakta kultural, artinya sebagai indikasi yang diterimanya, nilai tersebut dijadikan kriteria normatif dalam pengambilan keputusan oleh anggota kelompok masyarakat. *Ketiga*, nilai sebagai konteks struktural, artinya nilai yang ada, baik sebagai fakta kultural maupun fakta watak mampu memberikan dampaknya pada struktur sosial masyarakat.<sup>11</sup>

Adapun sumber nilai yang berlaku dalam pranata kehidupan manusia dapat digolongkan menjadi dua macam. *Pertama*, nilai ilahiyah, yaitu nilai yang dibuat oleh Tuhan melalui Rasul-Nya melalui wahyu. Nilai ilahiyah ini bersifat statis dan kebenarannya mutlak (lihat QS. 5:3; 6:115; 7:137; 11:119, dan QS. 2:2). Pada nilai ilahiyah ini manusia bertugas untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut. Dengan interpretasi tersebut manusia akan mampu menghadapi ajaran agama yang dianut.<sup>12</sup> Konfigurasi nilai ilahiyah mungkin dapat mengalami perubahan, namun secara instrinsiknya tidak akan pernah berubah, sebab mengubah instrinsik berarti sama juga mengubah wahyu ilahi.<sup>13</sup> *Kedua*, nilai insaniyah, yaitu nilai yang tumbuh atas kesepakatan manusia serta hidup dan berkembang di tengah-tengah peradaban manusia. Nilai insani ini bersifat dinamis (QS. 84:19; 13:11; 8:53), sedangkan kebertakuan kebenarannya adalah relatif/nisbi yang dibatasi oleh ruang dan waktu (QS. 10:36; 6:116). Pada nilai insani, fungsi tafsir adalah lebih memperkaya isi konsep atau juga untuk memodifikasi bahkan mengganti dengan konsep baru.<sup>14</sup>

Pendidikan nilai diartikan sebagai upaya membantu subjek-objek pendidikan (guru-murid) dalam mengalami, menghayati, merefleksi, memitih dan menginternalisasikan

- 
11. Ahmad Daudy, *Kuliah Filsafat Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang,1989) hal. 58-59.
  12. Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial*, (Jogjakarta:Rake Sarasin, 1987) hal.14.
  13. M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta, Bina Aksara,1987) hal.121.
  14. Noeng Muhadjir, *Op-Cit.* hal. 144

nilai-nilai sehingga terintegrasikan dalam akal pikir, pribadi dan perilakunya. Mengapa nilai-nilai moral perlu dikembangkan? Perlunya penanaman nilai-nilai moral karena moral/akhlak merupakan alat yang menuntun hidup manusia untuk mencapai tujuan bersama dan hidup secara lebih baik<sup>15</sup> dan menjadi indikasi tingkat kesempurnaan manusia secara kodrati.<sup>16</sup> Moral juga menjadi tolak ukur perbedaan antara manusia dengan makhluk lainnya, dimana misi manusia yang berakhlak mulia, sebagaimana misi yang dibawa oleh Nabi Muhammad.

Dalam pembinaan nilai-nilai suci yang terkandung dalam agama, pendidikan berusaha menjadikan agama sebagai referensi nilai karena aspek agama merupakan sesuatu yang asasi bagi manusia, dimana manusia pasti membutuhkan sesuatu yang transenden. Sesuatu yang transenden tersebut hanya ada jawabannya melalui agama. Pendidikan nilai-nilai agama lebih mengarah pada seluruh domain secara integral dengan penekanan pada proses penghayatan agama untuk menghasilkan perilaku yang religius. Pendidikan nilai-nilai agama merujuk pada sumber ajaran agama yang merupakan inti dari masing-masing agama dalam rangka tercapainya nilai-nilai ideal yang bersumber dari agama dalam diri pribadi pelaku (subjek-objek) pendidikan. Nilai-nilai pendidikan akan memberikan manfaat yang besar bagi semua kalangan (kaya-miskin) dalam mengimplementasikan kegiatan pendidikan. Walaupun kadang-kadang agama masih sering diragukan kontribusinya, sebagaimana dikemukakan oleh Russel<sup>17</sup> bahwa nilai-nilai agama (terutama agama Kristen) hanya dapat diimplementasikan dalam pendidikan oleh kalangan hartawan dan kurang dapat menyentuh pendidikan kalangan orang miskin. Tapi secara general, agama mampu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat berbagai

---

15. WH.Killpatrick, *Philosophy of Education*, (New York: The Macmillan Company, 1951. 1986) p.22.

16. Driyarkara, *Percikan Filsafat*, (Jakarta : PT. Pembangunan, 1978) hal. 24.

17. Bertrand Russel, *Education and Social Order*, (Aylesbury:Hazell Weston & Viney Ltd., 1977) hal. 80.

kalangan untuk meningkatkan kualifikasi diri melalui pendidikan.

Mengapa aspek intelektual harus dikembangkan sejalan dengan aspek moral dan agama? Nilai-nilai intelektual lebih menekankan pada fungsionalisasi akal/pikiran manusia secara maksimal, yang menghasilkan proses belajar, penalaran berpikir menuju suatu pemahaman. Semua ajaran agama mengisyaratkan adanya perintah untuk menggunakan akal/pikiran secara optimal, baik dalam bentuk kata *ya'qilu* (memakai akal), *tafakkara* (berpikir), *faqih* (faham), *tadzakkara* (memperhatikan/ mempelajari), *tadabbara* (merenung), *ulu al-albab* (orang berpikir), *ulu al-abshar* (orang yang berpandangan), *ulu al-'ilm* (orang yang berilmu), *ulu al-nuha* (orang yang bijaksana). Dalam kitab suci (al-Qur'an-rujukan Islam) terdapat kata-kata *ya'qilu* sebanyak 48 ayat dalam berbagai bentuk kata, kata *tafakkara* yang terkandung dalam 19 ayat, kata-kata *faqih* sebanyak 16 ayat dan kata *tadzakkara* sebanyak 40 ayat.

Luhurnya posisi akal mempunyai implementasi nilai-nilai intelektual, dimana hakikat agama adalah optimalisasi akal, tidak dianggap maksimal tingkat religiusitas seseorang bila ia tidak menggunakan akal. Melalui penggunaan akal manusia dapat penemuan sesuatu (*discovery & invention*) dan dapat menyelesaikan persoalan kehidupannya (*problem solver*) secara relatif. Akal yang akan melahirkan potensi intelektual<sup>18</sup> telah menjembatani manusia dalam mengadakan riset terhadap ayat-ayat *kauniyah* (fenomena alam) maupun *qawliyah* (wahyu). Untuk menempatkan akal pada proporsi fungsionalnya, maka manusia perlu mengimbangnya dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral.

Sinergisitas dalam pemetaan nilai-nilai logika, nilai-nilai etika dan nilai-nilai estetika merupakan *training spiritual* dalam usaha membina manusia agar tidak kehilangan keseimbangan hidup dan memproduksi manusia-manusia yang berakhlak mulia. Ketercapaian dalam keseimbangan tersebut

---

18. Harun Nasution, *Op. Cit.*, p.55

akan menempatkan manusia mengetahui posisi kemanusiaannya, baik sebagai khalifah maupun sebagai hamba. Rasa superioritasnya dan inferioritas akan tereleminasi dan diganti dengan perilaku kesantunan, keberadaban, *ketawadlu'an*, dan kearifan dalam hidup.

Integrasi nilai-nilai logika, nilai-nilai etika dan nilai-nilai estetika secara langsung maupun tidak langsung akan mengintegrasikan dengan kebudayaan nasional. Perpaduan yang harmonis tersebut akan melahirkan kebudayaan yang agamis, kebudayaan yang bermoral dan kebudayaan yang menjunjung tinggi intelektualisme. Harmonisasi ideal tersebut sejalan dengan nafas dan karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kaya kultur dan berbasis masyarakat yang agamis.

Dalam konteks globalisasi, pendidikan yang dijalankan dengan semangat nilai-nilai spiritual paling tidak akan mampu mengantarkan manusia sebagai pelaku kehidupan, secara eksis dapat berkiprah secara produktif dan mampu mematahkan berbagai mitos globalisasi yang sering mengabaikan sisi humanitas manusia. John Micklethwait dan Adrian Wooldridge berpendapat<sup>19</sup> bahwa masyarakat dunia modern akan dihinggapai oleh 5 mitos globalisasi yang gersang nilai moral, yaitu: (1) Globalisasi mengantarkan pada kejayaan perusahaan-perusahaan besar (perusahaan kecil tidak mampu berkiprah); (2) Globalisasi akan mengantar pada era kejayaan produk-produk kelas tinggi yang mengglobal (produk kelas menengah ke bawah tidak dapat bersaing); (3) Globalisasi merupakan akhir dari siklus bisnis tradisional; (4) Globalisasi adalah sebuah *zero-sum game* (dimana sebagian orang harus kalah supaya pihak lain dapat menang); dan (5) globalisasi berarti tidak ada lagi batas secara geografis.

Untuk mengimplementasikan spiritualisasi pendidikan agama, pendidikan nilai sebagai *further learning* dan *to be a good citizen* perlu mendapatkan porsi yang ideal dan proporsional. Pendidikan nilai sebagai *integrated-knowledge*

---

19. Micklethwait, John & Adrian Wooldridge, *A Future Perfect the Challenge and Hidden Promise of Globalization*, (New York: Crown Bussines, 2000) p. 97-118.

*system* yang menghasilkan *comprehensive decision making process* mempunyai kedudukan dalam membangun karakter manusia yang optimis dalam menghadapi kompetisi peradaban global.

Spiritualisasi pendidikan agama berusaha memposisikan bidang studi agama didesain dan diajarkan secara *integrated knowledge system* (mengkonvergensi antara fenomena kehidupan nyata yang empiris dengan teori-teori/kaidah keagamaan yang normatif-ideal). Pembelajaran agama dikemas secara lebih holistik (yang mencerminkan etika, logika, dan estetika). Dalam konteks standar kompetensi misalnya, akan membentuk peserta didik yang memahami, menghayati, menafsirkan, dan mampu mengimplementasikan kaidah agama dalam kehidupan yang harmonis.

Spiritualisasi pendidikan agama menempatkan *pendidikan agama* sebagai poros yang mewarnai denyut jantung manusia, sehingga akan menjadi pribadi yang mampu menempatkan posisinya untuk menjembatani dua kepentingan, yaitu kepentingan kehidupan sesama manusia dan kepentingan dengan Tuhannya. Kondisi tersebut dapat berhasil dibangun apabila dalam mengadakan sinergi antara *grand norm* dengan *intracaptive knowledge* didukung dengan metode yang tepat. Di sinilah ilmu pengetahuan (bidang studi) sebagai kekuatan (*knowledge is power*) difasilitasi oleh pendidikan sebagai kekuatan (*education is power*), melahirkan sifat komprehensif dan berdaya makna. Jadi masing-masing kekuatan saling melengkapi dan integral dalam implementasinya. Gagasan tentang spiritualisasi pendidikan dapat diapresiasi dalam bentuk gambar sebagai berikut:



#### D. Pendidikan sebagai Roh Peradaban

Bangsa yang beradab identik dengan penghormatan suatu bangsa terhadap nilai-nilai kesopanan, kebudayaan, akhlak, dan nilai-nilai estetika lainnya. Suatu bangsa mencapai peradaban tinggi manakala bangsa mampu mencapai kemajuan (kecerdasan, kebudayaan dan berbagai aspek kehidupan secara lahir batin) yang dibarengi dengan representasi moral dan kehalusan budi bahasa. Di tengah gemerlapnya peradaban global, kemampuan adaptasi dan kompetisi suatu negara akan ditentukan oleh kesiapan kualitas sumber daya manusianya. Indikator kualifikasi SDM sering diidentikkan dengan kemampuan pendidikan suatu negara dalam menghasilkan *output* yang *marketable* di tingkat global. Dalam konteks inilah pendidikan menjadi kekuatan utama yang mampu memberikan kontribusi dalam kompetisi peradaban global, dengan kata lain *education is power*.

Bagaimana mempraktikkan pendidikan yang mampu menjawab dan menjadi kekuatan utama pendukung peradaban? Pendidikan yang berposisi sebagai proses humanisasi menuju optimalisasi fitrah manusia mempunyai kausalitas terhadap terbentuknya nilai-nilai standar yang digunakan dalam kehidupan. Penjelmaan dari struktur nilai-nilai universal yang dikembangkan tersebut akan melahirkan kebudayaan. Sebagai *logical construct* yang universal, kebudayaan yang diekspresikan oleh masyarakat itulah mencerminkan kualifikasi bangunan peradaban manusia di eranya.

Komplektisitas nilai-nilai (*complex fields of values*) yang menghasilkan standarisasi baik-buruk, nilai-nilai intelektual, nilai-nilai agama, filsafat, dan nilai-nilai moral merupakan bagian dari kebudayaan yang hanya dihasilkan oleh proses pendidikan yang mengedepankan spiritualisme. Spiritualisasi dalam pendidikan mempunyai tanggung jawab untuk mengantarkan manusia mencerminkan lingkungannya dengan tepat melalui pengetahuan yang diperoleh kecerdasannya, mampu melibatkan emosi manusia dengan cintanya, menciptakan keadilan dan keramahan terhadap sesamanya.



Standar peradaban membutuhkan adanya fungsionalisasi aktivitas manusia secara signifikan. Secara fungsional, pendidikan yang merupakan aktivitas sadar manusia akan dapat mempercepat pertumbuhan sains dan industri, dimana proses-proses teknologis menurut adanya pengetahuan ilmiah dan kondisi tersebut akan mendatangkan kreativitas yang akan menjadi sumber kemakmuran dan kejayaan bangsa. Bahkan apabila pendidikan dapat dikelola dengan berbagai pertimbangan fungsional, maka progresivitas sains dan teknologi yang menjadi ciri khas masyarakat industri akan bertambah maju pesat. Secara rasional dapat dipahami bahwa motif pendidikan universal -dengan membebaskan manusia dari kebodohan- adalah meningkatkan produktivitas masyarakat, dan akan berimplikasi positif terhadap perkembangan intelektual dan riset itu sendiri.<sup>20</sup> Dengan kata lain, instrumentasi ekonomi yang merupakan salah satu tolak ukur kualitas peradaban-akan mengalami grafik peningkatan yang memberikan andil dalam distribusi kekayaan pada masyarakat.

Keharusan pengembangan pendidikan yang syarat nuansa spiritualisme akan membukakan pintu manusia menuju dunia baru (peradaban) yang lebih baik. Dengan pendidikan manusia dapat melakukan perubahan sosial budaya, yakni pengembangan nilai-nilai ilmu pengetahuan, penyesuaian diri terhadap nilai-nilai moral dan agama yang mendukung proses percepatan pembangunan. Memang harus diakui bahwa pendidikan representatif tentu memerlukan biaya yang besar dan hasilnya tergantung pada ketepatan memilih isi dan cara serta jenis pendidikan. Pendidikan memang meningkatkan pengetahuan, mengubah nilai-nilai dan sikap menuju lebih baik, dan meningkatkan *skill*, tetapi bersamaan dengan itu juga meningkatkan tuntutan-tuntutan dan harapan. Oleh karenanya pendidikan ada yang bersifat fungsional dan disfungsional.<sup>21</sup> Pendidikan yang bersifat fungsional hanya dapat dihasilkan oleh proses pendidikan yang memperhatikan spiritualisasi.

---

20. Bertrand Russel, *Op. Cit.*, p.162.

21. Imran Hanan, *Dasar-dasar Sosial Budaya Pendidikan*, (Jakarta : Dirjen Dikti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989) hal. 61.

Sedangkan pendidikan yang disfungsi merupakan perwujudan proses pendidikan yang tidak memperhatikan aspek spiritualisasi, dengan kata lain pendidikan yang gersang nilai.

Paradigma apapun yang dikembangkan dalam peradaban suatu bangsa, maka kunci keberhasilan peradaban tersebut adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, didukung dengan teguhnya nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat. Adapun untuk menuju penguasaan nilai-nilai iptek dan menanamkan nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama hanya akan dapat ditemukan melalui proses pendidikan. Penguasaan nilai-nilai iptek, nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama merupakan indikasi untuk menentukan tingkat kualitas manusia.

Dalam konteks integrasi bangsa, pendidikan juga memegang peranan kunci yang sangat strategis. Pluralitas sumber daya masyarakat (pluralitas agama, suku, budaya, bahasa, adat-istiadat dan status sosial) yang tercermin dalam bangsa (*nation building*) atau integrasi nasional merupakan bagian integral dari proses peradaban (termasuk modernisasi dan developmentasi). Dalam integrasi bangsa terkandung komponen material dan ideologi, yakni bahwa usaha-usaha yang tidak hanya diarahkan pada mobilisasi ekonomi, tapi juga ada pencapaian konsensus ideologi (baca: Pancasila di Indonesia) yang akan mengantarkan masyarakat menjadi satu kesatuan dalam bentuk nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang disepakati bersama. Dengan kata lain, komponen ideologi bangsa tersebut akan menjadi identitas bangsa yang mampu mengintegrasikan berbagai komponen yang majemuk. Pendidikan dapat digunakan sebagai media strategis dalam menjaga kelanggengan ideologi bangsa yang mengarah pada terciptanya integrasi bangsa yang kokoh, karena secara teoritis peserta didik dari berbagai kalangan akan mengalami proses belajar mengajar di lembaga pendidikan dalam waktu yang telah ditentukan. Selama waktu itulah ideologi nasional dapat ditanamkan dan dikembangkan, sehingga akan mempengaruhi cara berpikir, cara bertindak dan ujung-ujungnya

menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Proses tersebut akan mencapai hasil yang signifikan jika ditopang dengan suasana pendidikan yang penuh dengan spiritualitas. Dengan demikian praktik spiritualisasi pendidikan akan mampu mendorong terwujudnya integrasi multi komponen dalam suatu bangsa menuju bangsa yang besar dan berjati-diri.

#### D. Konfigurasi Spiritualisasi Pendidikan Agama sebagai Pendidikan Nilai

Secara filosofis, Indonesia telah memiliki modal spiritual yang dapat dijadikan referensi dalam pengembangan pendidikan agama, yaitu Pancasila. Pancasila dapat menjadi spirit, karena keberadaannya berbasis pada semangat perjuangan bangsa yang pluralis. Pancasila merupakan pernyataan bangsa bahwa masyarakat mau bersatu dengan komponen manapun, baik antara yang kuat atau lemah, mayoritas atau minoritas, menerima semua komunitas dalam cakupan bangsa sebagai manusia dan warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dalam hal ini Pancasila berposisi sebagai sebuah janji dan perjanjian. Atas janji dan perjanjian itulah Indonesia sebagai bangsa berdasar. Mengubah pancasila berarti menarik kembali janji dengan melanggar perjanjian yang menjadi syarat perjanjiannya. Dengan mengubah Pancasila, secara otomatis pluralisme sosial yang merupakan identitas bangsa Indonesia dan pihak-pihak yang mendukung negara RI sebagai rumahnya akan merasakan kehilangan wujud keindonesiaannya.<sup>22</sup>

Bila dihubungkan dengan upaya spiritualisasi pendidikan agama, Pancasila tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan agama. Khusus mengenai hubungan antara Pancasila (sebagai falsafah lokal) dan agama (yang merupakan filsafat universal), mempunyai nilai kedekatan nilai-nilai yang akan dikembangkan. Dengan kata

---

22. Franz Magnis Suseno, dalam *Harian Kompas* tanggal 26 Desember 2000.

lain, nilai-nilai yang dikehendaki dalam substansi Pancasila merupakan bagian dari nilai-nilai yang dikehendaki oleh agama.

Dalam konteks penyiapan diri menuju Indonesia baru, spiritualisasi pendidikan agama tidak hanya berbicara idealisme kualifikasi pendidikan dalam berbagai kognisi, melainkan ada semangat untuk mendemokratisasikan pendidikan agama sebagai suatu kebutuhan masyarakat yang asasi.

Pendidikan agama yang memiliki spirit berarti pendidikan agama yang memberikan suatu kebahagiaan (suasana senang) pada peserta didik, dengan berbagai koridor kebahagiaan (secara fisik, psikologis, dan intelektual). Berbagai model intruksional yang mendominasi dalam dunia pendidikan agama di Indonesia kurang memberikan sikap motivasional sehingga menyebabkan pembelajaran agama cenderung menghasilkan murid yang kurang agamis.

Dalam implementasi pendidikan berskala mikro, spiritualisasi pendidikan agama akan mampu menciptakan harmonisasi relasional antara lembaga pendidikan (sekolah), pengajar dan orang tua dalam rangka menciptakan motivasi pendidikan agama di kalangan peserta didik. Dengan kata lain spiritualisasi pendidikan agama mengarahkan adanya perubahan paradigma pembelajaran, dari paradigma *intruksional* menuju paradigma *motivasional*. Sekurang-kurangnya ada lima tuntutan pada orang tua dan sekolah agar motivasi anak berkembang.<sup>23</sup> *Pertama*, anak merasakan bahwa dicintai oleh orang tua dan lingkungan. Artinya orang tua harus benar-benar mengenali anaknya dengan melihat lingkungan sebagai basisnya. *Kedua*, anak merasa aman dan kerassan, baik di lingkungan rumah maupun di sekolah. Dalam konteks ini, antara guru dan orang tua saling mengembangkan sikap *khusnudzan* pada anak didik. *Ketiga*, terpenuhinya bimbingan anak, terbebas dari suasana tertekan. Untuk memenuhinya perlu ada kemampuan untuk menelaah bahwa masing-masing

---

23. S.J. Drost, *Sekolah; Mengajar atau Mendidik*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998) hal. 256.

anak mempunyai perbedaan individual baik dalam dataran fisik psikologis dan intelektual. *Keempat*, adanya pengakuan terhadap kebutuhan anak didik, dengan berasumsi bahwa anak mempunyai hak asasi yang harus dihormati dan dikembangkan secara produktif. *Kelima*, melatih dan membiasakan anak didik mempunyai kebutuhan untuk bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan spiritualisasi pendidikan agama, perlu dikembangkan model pembelajaran yang holistik, dengan sasaran sebagai berikut:

1. Pendidikan agama merupakan suatu keutuhan dalam berbagai dimensi yang terkait dan dilaksanakan secara terpadu mulai dari sekolah, keluarga dan masyarakat luas. Strategi yang diterapkan merupakan keutuhan-keutuhan yang terpadu antara strategi kurikuler, intraksi, pengembangan pribadi, dan dukungan sistem.
2. Fokus dan sasaran pendidikan agama diarahkan pada pemberdayaan pribadi sebagai sumber kekuatan daya manusiawi. Keberdayaan di sini meliputi aspek intelektual, sosial, emosional dan keterampilan dalam menjalankan praktik keberagamaan. Disinilah pendidikan akhlak ataupun budi pekerti sangat dibutuhkan oleh peserta didik.
3. Pendidikan agama yang berpusat pada keluarga merupakan awal dari perjalanan hidup individu dan masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan agama dalam keluarga merupakan inti dari upaya pendidikan holistik. Inti pendidikan dalam keluarga adalah pendidikan agama, inti pendidikan keagamaan adalah keimanan, inti keimanan adalah ketauhidan. Keluarga harus dibangun dengan landasan agama yang kokoh sehingga terwujud keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.
4. Pendidikan agama dalam suasana harmoni budaya bangsa. Kebudayaan hendaknya dijadikan sebagai satu pendekatan dalam pelaksanaan pendidikan. Pembelajaran pendidikan agama harus mampu mengusahakan agar generasi bangsa mampu beradaptasi dengan tuntutan budaya tanpa kehilangan jati diri nilai dasar agama.

Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional telah memberikan ruang yang memadai, agar peserta didik mendapatkan layanan pembelajaran pendidikan agama yang dilakukan oleh pendidik yang seagama. Oleh karena itu, pendidikan agama yang tepat disampaikan oleh orang yang tepat (guru yang seiman) merupakan *conditio sine qua non*. Hal ini karena: *Pertama*, pendidikan agama bukanlah masalah penyampaian pesan-pesan verbal semata, yang cukup disampaikan pada aspek kognitif, tetapi lebih pada dimensi yang lebih mendasar dan hakiki, yaitu *transfer of values*, tertanamnya nilai ajaran keimanan agama dalam diri peserta didik. *Kedua*, adanya kompetensi dan keteladanan bagi pendidik agama bila ia juga pemeluk agama tersebut. Pendidik seiman ini terutama ditujukan pada pendidikan dasar dan menengah. Beda halnya di kalangan perguruan tinggi, seperti jurusan teologi, yang mempelajari perbandingan agama, disampaikan oleh orang yang beda agama tetapi memiliki otoritas di bidangnya.

Pendidikan agama sebagai bagian dari dunia pendidikan harus dilepaskan dari kaitannya dengan kepentingan politik aliran, kedaerahan, dan keagamaan. Dunia pendidikan harus dibebaskan dari semua kepentingan yang sempit dan dijauhkan dari indoktrinasi ideologi politik dan keagamaan yang sempit agar pendidikan dapat menjadi praktik hidup yang membebaskan, mencerdaskan dan mencerahkan bangsa. Dengan demikian, pendidikan agama yang diselenggarakan di sekolah di samping merupakan transformasi doktrin akidah, diharapkan juga dapat mencerdaskan peserta didik. Mengingat dalam pendidikan agama terintegrasi adanya aneka kecerdasan, di antaranya kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, kecerdasan fisik, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan lain-lain

Bagaimana strategi untuk mewujudkan spiritualisasi pendidikan agama dalam pembelajaran? Paling tidak, ada empat hal yang dapat dikembangkan dalam pembaharuan paradigma menuju spiritualisasi pendidikan agama. *Pertama*, pendidikan agama harus mampu memberikan wawasan tentang

kehidupan secara utuh; *Kedua*, pendidikan agama harus mampu memfasilitasi tumbuhnya kesadaran bahwa ilmu harus diamalkan tanpa pamrih; *Ketiga*, pendidikan agama harus mampu memberikan kontribusi dalam membangun karakter (*character building*); *Keempat*, pendidikan agama harus mengedepankan aspek universalisme dari agama.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, pembelajaran pendidikan agama di sekolah diharapkan mampu menyuguhkan ajaran agama yang menekankan inklusivitas dalam kancah keberagaman di muka bumi. Beragama secara inklusif adalah pandangan yang mengatakan bahwa agama yang dianutnya adalah agama yang benar. Pada waktu yang bersamaan mereka mau menerima pandangan, boleh jadi kebenaran yang terdapat dalam agamanya itu, dijumpai pada agama lain tanpa harus berpindah kepada agama lain. Dalam kaitan ini, pendidik perlu menekankan budaya pemahaman beragama yang inklusif<sup>24</sup> pada peserta didik. Pandangan keagamaan yang inklusif-pluralis ini dapat diterapkan di Indonesia, bila masing-masing umat beragama memiliki komitmen yang kokoh terhadap agama masing-masing, tanpa menyalahkan antar agama yang satu dengan yang lain.

Paradigma inklusivitas dalam pembelajaran pendidikan agama adalah sebagai suatu cara pandang terbuka, yang cara pandang itu merupakan kelanjutan logis dari adanya suatu keyakinan bahwa tiap manusia tidak ada yang sempurna. Sedangkan paradigma pluralistik dalam pembelajaran agama merupakan konsekuensi logis dari adanya paradigma inklusivitas. Yakni beragamanya pendapat dan pemikiran adalah kenyataan yang tak terhindarkan. Hanya dengan sikap yang demikian kita dapat menghindari rivalitas umat beragama secara membabi buta yang tidak sejalan dengan semangat Bhineka Tunggal Ika.

Selain itu, pembelajaran agama di sekolah hingga saat ini harus sudah menyentuh titik sentral pada pemecahan masalah moralitas peserta didik di Indonesia. Sudah saatnya

---

24. Aiwi Shihab.1998. *Islam Inklusif*, (Bandung: Mizan, 1998), hal.97

pembelajaran pendidikan agama menekankan pada nilai-nilai akhlak dan budi pekerti, sebagaimana disyariatkan oleh agama-agama yang ada. Sejalan dengan itu, pembelajaran agama yang diidealkan dapat mengorganisir moral perlu memperhatikan perkembangan peserta didik, karena moralitas juga mengalami pergeseran dan perkembangan yang linear dengan perubahan peradaban manusia. Perkembangan moral merupakan suatu hasil kemampuan yang semakin berkembang untuk memahami kenyataan sosial atau untuk menyusun dan mengintegrasikan pengalaman sosial.<sup>25</sup> Pembelajaran pendidikan agama berbasis nilai-nilai spiritualitas mesti dijadikan paradigma alternatif menyelesaikan problem moralitas generasi bangsa. Artinya, pembelajaran agama mengutamakan pada kemampuan-kemampuan mengamalkan ajaran dan tidak lagi terlalu menekankan pada aspek-aspek kognisinya secara sepihak. Pendidikan agama tidak diajarkan sebagai teori-teori yang berdiri sendiri, melainkan sebagai proses pembentukan kepribadian peserta didik siswa secara utuh.

Di samping membangun pondasi akhlak siswa, pembelajaran pendidikan agama memberikan modal siswa memiliki wawasan keagamaan yang luas dan terbuka. Kepemilikan kompetensi keberagamaan ini tidak lain dalam rangka mengukuhkan keimanan yang kuat bagi siswa terhadap agama yang diyakininya secara utuh dan kritis. Untuk mengkondisikan siswa memiliki pengetahuan dan pemahaman agama secara kritis, pembelajaran agama dapat menggunakan pendekatan multikultural. Selain penguasaan tentang ajaran dan ritual, siswa mengetahui *background* sosiologis tentang ajaran dan ritual tersebut, sehingga mereka memahami alur dan rasionalitas pemberlakuan ritual dan tradisi dalam sebuah agama. Peserta didik perlu ditunjukkan bagian-bagian mana yang termasuk esensi ajaran agama yang berdimensi doktrin dan bagian-bagian yang termasuk tradisi keagamaan berdimensi ritual dan budaya agama. Apabila peserta didik telah

---

25. Asri Budiningsih. *Pembelajaran Moral, Berpijak pada Karakteristik Siswa dan Budayanya*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) hal. 82.



memahami garis demarkasi antara keyakinan dan pengamalan agama, maka penguatan Pendidikan Agama diharapkan dapat menjawab dua dimensi hidup, yaitu penanaman rasa taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pengembangan rasa kemanusiaan sesama manusia.<sup>26</sup>

Sudah tidak zamannya, pendidikan agama diajarkan hanya berorientasi pada formalitas implementasi kurikulum yang telah diberlakukan. Pendidikan Agama mesti dimaknai sebagai perpaduan antara keunggulan spiritual dan kultural, yang menghasilkan kesadaran beragama yang memancarkan nilai-nilai keberagamaan. Pembelajaran agama yang berhasil mengintegrasikan dua variabel tersebut pada gilirannya dapat memposisikan budaya berkembang berdasarkan nilai-nilai agama, melahirkan hasil cipta, karya, karsa dan karya manusia yang sadar akan nilai-nilai ilahiyah.<sup>27</sup> Bahkan desain pembelajaran yang berhasil memadukan secara harmonis antara nilai-nilai agama dengan budaya lokal akan merangsang peserta didik memiliki kepekaan sosial kemasyarakatan.<sup>28</sup> Konfigurasi keberagamaan yang dibalut dengan penghayatan budaya lokal akan melahirkan stabilitas komunitas yang cenderung tertib hukum serta memberikan rasa nyaman dan aman bagi para anggotanya.

## E. Kesimpulan

Bidang pembangunan yang sulit untuk mendapatkan hasil yang dapat diukur secara pragmatis adalah pendidikan, terutama pendidikan agama. Eksistensi pendidikan agama dalam peradaban yang semakin mengglobal mengalami berbagai tantangan dan dijadikan kambing hitam bila ia tidak mampu memberikan solusi alternatif dalam pemecahan problem kemanusiaan. Kebutuhan terhadap adanya eksistensi pendidikan agama yang berwibawa, diperlukan pemikiran

- 
26. Madjid, Nurcholish. 2001. *Pendidikan, langkah strategis mempersiapkan SDM berkualitas*, Jakarta; Paramadina, hal.13
  27. Rohmat Mulyana, *Artikulasi Pendidikan Nilai*, 2004, Alfabeta, Bandung, hal.199
  28. Abdurrahman Masud. 2003. *Menuju paradigma Islam Humanis*, Yogyakarta: Gama Media, 2003, hal.213-214

matang dengan menempatkan spiritualisasi sebagai paradigma yang harus dikembangkan dalam pembelajaran pendidikan agama. Spiritualisasi pendidikan agama akan mampu memberikan kepuasan secara komprehensif, yang meliputi nilai-nilai etika, nilai-nilai logika dan nilai-nilai estetika yang dinaungi oleh eksistensi wahyu. Ketiga sumbu kekuatan nilai-nilai itulah yang tidak akan lapuk dimakan oleh derasnya peradaban. Relasi antara hati, akal dan wahyu menggambarkan adanya proses pendidikan agama yang menempatkan manusia pada kualifikasi khalifah Allah di muka bumi secara fungsional dengan tidak melupakan sisi-sisi ketuhanan/keterbatasan manusia sebagai *'abd/hamba Allah Swt.*

Bila kita mencermati secara komprehensif tugas-tugas kekhilafahan dan tugas-tugas kemanusiaan, maka konsep *spiritualisasi pendidikan agama* merupakan alternatif jawaban yang apabila diterapkan secara konsisten akan mampu menyiapkan manusia yang sempurna (*insan kamil*), baik pada sisi hakikat kemakhlukannya maupun dari sisi kreativitas kekhilifahannya.

Dengan mengikhtiarkan bentuk *spiritual pendidikan agama*, masyarakat Indonesia diharapkan memiliki logika, etika dan estetika yang bernafaskan pada nilai luhur agama. Pencapaian kondisi tersebut akan memberikan kontribusi positif dan konstruktif terhadap peradaban dunia dan merupakan wujud partisipasi masyarakat Indonesia dalam menciptakan suasana dunia yang penuh dengan nuansa *Rahmatan li al-Alamin*, sebagaimana pesan spiritual yang tercantum secara eksplisit pada falsafah agama dan falsafah Pancasila. *Wa Allahu A'lam Bi al-Shawab.*

(Muhtisin, M.Ag)

### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Kosasih Djahari. 1990. *Konsep Nilai*. Bandung: IKIP Bandung Press.
- Ahmad Daudy. 1989. *Kuliah Filsafat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Alisyahbana, S.T.A. 1975. *Perkembangan Sejarah Kebudayaan Indonesia*. Jakarta: Idayu.
- Arifin, HM. 1987. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bina Aksara.
- Compbell, Tom. 1981. *Seven Theories of Human society*. Oxford: Oxford University Press.
- Dep. Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dep.Agama RI. 2003. *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Ditjen Bagais.
- Diyarkaya. 1978. *Percikan Filsafat*. Jakarta: PT. Pembangunan.
- Drost, S.J. 1998. *Sekolah; Mengajar atau Mendidik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Eliade, Mircea. 1995. *The Encyclopedia of Religion*. New York: MacMillan Library.
- Fazlurrahman. 1996. *Islam dan Modernitas, Tentang Transformasi Intelektual*. Bandung: Pustaka.
- Frenckel, James. 1997. *How To Teach About Values*. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- Freire, Paulo. 2000. *Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan dan Kebebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harian Media Indonesia*, tanggal 19 desember 2000.
- Harian Kompas*, tanggal 20 Desember 2000, Jakarta.
- Harian Pikiran Rakyat*, tanggal 20 Desember 2000, Bandung.
- Harun Nasution. 1996. *Islam Rasional*. Bandung: Mizan.
- Harrison, Lawrence E., & Samuel Hantington (ed). 2000. *Culture Matters, How Values Shape Human Progress*. New York: Basic Book.
- Imran Hanan. 1989. *Dasar-dasar Sosial Budaya Pendidikan*. Jakarta: Dirjen Dikti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- IMA-PU PPS IKIP Bandung. 1999. *Cakrawala Pendidikan Umum, Suatu Upaya Mempertegas Body of Knowledge*. Bandung: IMA-PU PPS IKIP Bandung.

- Kilpatrick, W.H. 1951. *Philosophy of Education*. New York: The Macmillan Company.
- Kneller, George K. 1971. *Foundations of Education*. London: John Wiles & Sons. Inc.
- Micklethwait, John & Adrian Wooldridge. 2000. *A Future Perfect the Challenge and Hidden Promise of Globalization*. New York: Crown Bussines.
- Mas'ud, Abdurrahman. 2003. *Menuju Paradigma Islam Humanis*. Jogjakarta: Gama Media.
- Muhadjir, Noeng. 1987. *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial*. Jogjakarta: Rake Sarasin.
- Mulyana, Rohmat. 2004. *Artikulasi Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta.
- Nilsen, E. Anker. 1980. *Religion and Personality Integration*. New York: Upsalla.
- Pai, Young. 1990. *Cultural Foundations of Education*. New York: Macmillan Publishing Company.
- Parson, Talcot. 1951. *The Social System*. Gleneo: The Free Press.
- Phenix, Philip H. 1964. *Realms of Meaning, A Philosophy of the Curriculum for General Education*. New York: Mc Graw Hill Book Company.
- Russel, Bertrand. 1977. *Education and Social Order*. Aylesbury: Hazell Waston & Viney Ltd.
- Sadli, Saparinah. 1976. *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdikbud.
- Shaffer, Jerome A. 1995. *Philosophy of Mind, Foundation of Philosophy Series*. New York: Prentice Hall, Inc.
- Turner, Bryan. 1994. *Sosiologi Islam*. Bandung: Raja Grafindo Persada.

BAGIAN KEDUA  
**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN AGAMA  
DAN NILAI DI LEMBAGA PENDIDIKAN**

# BAB 9

## IMPLEMENTASI PENDIDIKAN NILAI DALAM PEMBELAJARAN

### A. Pengantar

*“Sesungguhnya Aku telah menciptakan hamba-hamba Ku dalam keadaan lurus, suci, dan bersih. Kemudian datanglah setan yang menggelincirkan mereka dan menyesatkannya dari kebenaran agama mereka” (Al Hadits). Dalam konteks lain diungkapkan pula bahwa “Sebenarnya sifat-sifat buruk yang timbul dari diri anak bukanlah lahir dari fitrah mereka. Sifat-sifat tersebut terutama timbul karena kurangnya peringatan sejak dini dari orang tua dan para pendidik. Semakin dewasa usia anak, semakin sulit pula baginya untuk meninggalkan sifat-sifat buruk. Banyak sekali orang dewasa yang menyadari sifat-sifat buruknya, tetapi tidak mampu mengubahnya, karena sifat-sifat buruk yang sudah kuat mengakar di dalam dirinya, dan menjadi kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan. Maka berbahagialah para orang tua yang selalu memperingati dan mencegah anaknya dari sifat-sifat buruk sejak dini, karena dengan demikian, mereka telah menyiapkan dasar kuat bagi kehidupan anak dimasa datang.”*

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

### B. Sejarah Perkembangan Pendidikan Nilai

Historis perkembangan pendidikan nilai tidak lepas dari lahirnya konsep pendidikan umum (*general education*). Fenomena spesialisasi dan fragmentasi kurikulum yang

berlebihan, studi-studi liberal yang cenderung sangat teknis, dan kekurangpedulian pada persoalan-persoalan kemanusiaan yang lebih mendasar telah memicu pemikiran ke arah pengembangan pendidikan umum. Pendidikan umum merupakan suatu istilah yang dimulai diperkenalkan di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 dan lebih berkembang lagi setelah memasuki abad ke-20, sebagai reaksi terhadap munculnya spesialisasi yang berlebihan. T.R McConnel (1952:2) dalam Sumariah (2004:54) menyatakan:

*"General education was a reaction against overspecialization, against imbalance between the pursuit of special interest and the attainment of the broad cultivation that the liberally educated man was traditionally expected to possess. It was a reaction, too, against the fragmentation of the curriculum and the disunity in the student's educational experience that were the inevitable concomitants of the vast increase in specialized knowledge.....general education was and is reaction against formalism in liberal education."*

Timbulnya spesialisasi yang berlebihan (*overspecialization*) seperti dikemukakan di atas antara lain telah mengakibatkan masalah-masalah teknis sering mengalahkan pertimbangan-pertimbangan manusia, dan pendidikan yang lebih bersifat teknis kurang relevan dengan masalah-masalah kemanusiaan yang fundamental. Pendidikan menjadi lepas kontak dengan spirit kemanusiaan. Pelaksanaan pendidikan yang asal saja, sangat baku, dan sangat teknis telah mengakibatkan timbulnya berbagai masalah dalam kehidupan umat manusia. Masalah ideologi, sosial, politik, ekonomi, keamanan, dan sebagainya terus berkembang semakin rumit dan tak kunjung dapat diatasi. Arogansi disipliner sebagai akibat overspesialisasi dan formalisme, dengan pendekatan monodisiplinernya dalam mengatasi berbagai masalah, tidak hanya kurang mampu mengatasi berbagai masalah melainkan seringkali malah menambah masalah-masalah baru. Padahal, pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi edukatif yang berlandaskan

kemanusiaan. Oleh karena itu proses kemajuan ilmu dan teknologi secanggih apapun, peranan pendidik sebagai sumber daya manusia pendidikan tetap memegang kunci yang strategis.

Akibat pendidikan spesialisik yang tidak dilandasi oleh pendidikan yang baik akan membuat para lulusannya mudah sekali kehilangan orientasinya dalam kehidupan nyata. Mereka tidak dapat menangkap makna yang terkandung dalam realita kehidupan nyata. Kepemilikan pengetahuan yang tidak bermakna (*meaningless knowledge*) tak bermanfaat dan hanya akan menjadi beban hidup, tetapi sebaliknya, pengetahuan yang bermakna (*meaningfull knowledge*) memiliki fungsi dalam kehidupan yang penuh dengan berbagai ketimpangan, pertentangan dan kemajuan yang cenderung menjadikan manusia kehilangan makna hidupnya. Pendidikan umum menurut McConnel (dalam Henry, 1952:4) adalah pendidikan yang berfungsi mempersiapkan generasi muda untuk memasuki kehidupan secara memuaskan, terutama dalam menghadapi masalah-masalah yang bersifat pribadi dan sosial agar dapat hidup layak pada waktunya.

Pada lingkup yang lebih sempit banyak lulusan yang kurang mampu menghadapi (berbagai tantangan dan tentangan), hidup damai (*survive*), dan menghidupi (berperan dan mempengaruhi) dunia yang mereka huni. Indikatornya adalah tidak sedikit lulusan yang berkepribadian lemah, kurang matang, kurang mandiri, bermasalah, dan sakit.

Kekurangmampuan lulusan dalam menghadapi hidup dan menghidupi dunia yang mereka huni itu karena kepribadian mereka tidak utuh lagi sebagai akibat adanya kekurangtepatan dalam mendidik --jika tidak dikatakan kesalahan dalam mendidik. Kekurangtepatan dan kesalahan mendidik terjadi karena kekurangtepatan dalam memilih dan menerapkan teori pendidikan. Apalagi teori-teori pendidikan yang mendominasi praktik pendidikan di dunia banyak yang dibangun dari hasil uji coba pada binatang, yang belum tentu sesuai untuk dijadikan landasan pendidikan sebagai upaya memanusiaawikan manusia.

Pendidikan umum mempersiapkan generasi terdidik agar dapat hidup aktif dan bermanfaat, baik sebagai anggota



keluarga, angkatan kerja yang dapat melakukan kegiatan dalam bermacam-macam pekerjaan, maupun sebagai warga negara yang dapat melakukan pengembangan individu untuk berdaya cipta, penuh dengan kebahagiaan atau kepuasan serta terintegrasi sebagai tujuan hidup manusia. Dalam pendidikan umum setidaknya terdapat empat hal yang interdependensi dalam mengantarkan manusia yang manusiawi, yaitu agama, filsafat, nilai, dan sosiologi.

Dalam kajian filsafat, nilai merupakan tema baru dalam filsafat aksiologi. Cabang filsafat yang mempelajarinya, muncul untuk pertama kalinya pada paruh kedua abad ke-19 (Frondizi, 2001:1). Semenjak zaman Yunani purba, para filosof telah menulis teori tentang problema nilai. Pada dasarnya dalam perspektif Islam, pendidikan nilai lahir 14 abad yang silam, bersamaan dengan lahirnya Islam yang dibawakan oleh Rasulullah saw. Walaupun waktu itu namanya tidak populer dengan istilah "nilai". Bahkan jauh sebelum itu, pendidikan nilai lahir bersamaan dengan risalah kenabian yang dimulai dari Nabi Adam. Pada tataran praksisnya, dari masa ke masa pendidikan nilai di berbagai belahan dunia dan negara mengalami pasang surut.

Isu tentang nilai muncul kembali di panggung peradaban manusia pada masa perang dingin (1945-1989). Menurut Supriadi (Mulyana, 2004:ii) selama perang dingin, isu-isu tentang nilai, moral, etika, kehidupan, juga kelestarian lingkungan sangat menonjol. Pada era ini pula, studi tentang *polemologi* (yang mengkhususkan diri pada asal-usul hakikat) dan dimensi perdamaian serta cara-cara menciptakannya sangat populer. Orang pun menjadi sangat sensitif terhadap isu-isu apapun yang bermuatan nilai.

Sekarang penyelidikan tentang apa yang dinilai manusia dan apa yang harus dinilai, telah menimbulkan perhatian baru. Penyelidikan mengenai teori umum tentang nilai tersebut; asal, watak, klasifikasi dan tempat nilai, di dunia terbit secara teratur, dalam surat kabar umum, dan penerbitan ilmiah. *Etik* (penyelidikan tentang nilai dalam tingkah laku manusia) dan *estetik* (penyelidikan tentang nilai dalam seni) merupakan dua

bidang besar yang berhubungan dengan nilai (Titus, Smith, Nolan, 1984:120).

Di Indonesia sendiri, lahirnya pendidikan nilai akhir-akhir ini dibidani oleh kegagalan pola pendidikan modern yang tidak membawa kedamaian dan perbaikan terhadap peradaban manusia. Hegemoni peradaban Barat yang didominasi oleh pandangan hidup saintifik (*scientific world view*) selain mengakibatkan dampak positif (di bidang sains dan teknologi), juga mengakibatkan dampak negatif terhadap manusia. Dampak negatif tersebut menjalar juga terhadap bidang ilmiah dengan hebat, khususnya dalam bidang epistemologi. Hal itu berawal dari para pemikir raksasa yang mencoba mengubah peradaban manusia. Salah satunya, Rene Descartes (1650 M) sebagai *icon* Barat, yang menyandang gelar “bapak filsafat modern” dengan prinsip “Aku berpikir, maka Aku ada” (*cogito ergo sum*), berhasil menggiring peradaban manusia sebagai ‘pemuja’ rasio.

Pendidikan era modern tersebut, yang lebih menitik-beratkan pada pendidikan bebas nilai (*value free*) telah memporak-porandakan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Perubahan masyarakat akibat perkembangan IPTEK membawa dampak yang besar pada budaya, nilai dan agama (Susanto, 1998:109). Derasnya gelombang globalisasi mengakibatkan terjadinya pergeseran nilai dan terjadinya degradasi moral pada peserta didik. Keluarga dan sekolah akhir-akhir ini kebanyakan tidak dapat berperan sepenuhnya dalam pembinaan moral, sehingga pembinaan moral saat ini (di lembaga formal non-formal, dan in-formal) merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Nilai paling dasarnya adalah nilai yang membuat kita hidup, dan itu disebut nilai kehidupan (*living values*). Dalam filsafat aksiologi, nilai memiliki dua aliran utama: *pertama*, objektivisme; *kedua*, subjektivisme. Aliran objektivisme memandang bahwa nilai ada dengan sendirinya, tanpa manusia menilainya sekali pun. Nilai ada dan melekat pada benda, atau materi. Sedangkan aliran subjektivisme memandang bahwa nilai ada karena manusia menilainya.

Secara yuridis, pendidikan nilai di Indonesia didasarkan pada: 1) Pasal 1 ayat 2 UUSPN 2003; "Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman"; 2) Pasal 3 UUSPN 2003, "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab"; dan 3) Pasal 4 ayat 3 UUSPN 2003), "Pendidikan adalah proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat".

Berdasarkan aspek yuridis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan nilai adalah nilai pendidikan, dengan nilai kehidupan lebih bermakna. Maka pendidikan nilai di Indonesia meliputi: 1) *Pembinaan watak kepribadian WNI dan kehidupan bangsa*; 2) *Kecerdasan intelektual-emosional-spiritual dan sosial*; dan 3) *Kemampuan partisipatif praksis-fungsional*.

### C. Relevansi Pendidikan Nilai terhadap Pengembangan SDM Peserta Didik yang Berkualitas

Bagaimana relevansi pendidikan nilai terhadap pengembangan SDM peserta didik yang berkualitas? Berbicara sumber daya manusia (SDM) peserta didik, sesungguhnya berbicara tentang pendidikan, karena di mana ada manusia, di situlah ada pendidikan. Secara etimologi pendidikan berasal dari kata "didik" yang berarti "pemeliharaan" atau "latihan". Dalam bahasa Inggris, *education* (pendidikan) berasal dari kata *educate* (mendidik), artinya memberi peningkatan (*to elicit, to give rise to*) dan mengembangkan (*to evolve, to develop*). Dalam pengertian yang sempit, *education* atau pendidikan berarti perbuatan atau proses perbuatan untuk memperoleh pengetahuan (MC Loed, dalam Syah, 2004:10).

Pendidikan pada dasarnya sebagai usaha untuk mempertahankan eksistensi kemanusiaannya (memanusiakan manusia). Secara terminologi, pendidikan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (1991:232) ialah proses perubahan sikap dan tata-laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Definisi tersebut merupakan definisi pendidikan dalam arti sempit, sebab hanya dibatasi pada pengajaran dan pelatihan. Artinya, proses pendidikan terjadi dari orang dewasa terhadap orang muda yang belum dewasa.

Adapun pendidikan dalam arti luas tidak hanya mencakup antara hubungan pendidik (guru) dan peserta didik (murid), tetapi mencakup dalam wilayah yang luas, seperti peserta didik dengan dirinya sendiri, lingkungan, kebudayaan dan seluruh komponen yang ikut membelajarkan dirinya. Secara konstitusional, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa:

*Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UUSPN No. 20 Tahun 2003).*

Berdasarkan definisi tersebut, tersirat bahwa setiap manusia memiliki potensi yang mengandung nilai-nilai kebaikan, dan pendidikan merupakan upaya untuk mengaktifkan potensi-potensi tersebut. Dengan demikian, pendidikan merupakan alat untuk melestarikan/memelihara dan mengembangkan nilai-nilai dasar kemanusiaan.

Dalam *Encyclopedia Britannica* dikatakan bahwa: *value is determination or quality of an object which involves any sort or appreciation or interest.* Artinya: "Nilai adalah suatu penetapan, atau suatu kualitas objek yang menyangkut segala jenis apresiasi atau minat" (Muhaimin, 1993:190). Mulyana (2004:11) mendefinisikan nilai adalah keyakinan dalam menentukan pilihan.

Phenix (1964:45) memandang bahwa pendidikan nilai adalah suatu program pendidikan yang diselenggarakan secara sistematis dan programatis untuk membina makna-makna esensial pada diri manusia. Sehingga, manusia (*anak didik*) dapat menghayati esensi dari suatu materi yang diterimanya, bukan hanya sebatas menangkap informasi.

Definisi di atas memiliki kesamaan dengan konsep pendidikan umum. Albery and Albery (1965:205) memahami bahwa pendidikan umum lebih menekankan kepada persoalan nilai, sikap, pemahaman, dan keterampilan yang perlu dimiliki oleh setiap warga negara yang menjunjung demokrasi.

Adanya kecenderungan saintisme dan teknologisme, yang makin besar dalam dunia pendidikan Indonesia, saat ini mulai dirasakan sebagai suatu keadaan yang kurang menguntungkan. Orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan mulai menyadari bahwa dunia pendidikan di Indonesia selama ini lebih merupakan suatu 'pabrik' yang memproduksi orang-orang yang hanya tahu akan sains dan teknologi semata-mata, kurang melahirkan orang yang 'berbudaya' dan 'berwatak' (Sardy, 1985:1).

Orang yang 'berbudaya' dan 'berwatak' itu adalah orang yang tertanam dalam dirinya nilai-nilai kemanusiaan luhur dan integratif. Nilai-nilai luhur manusia yang tercecceh pada beberapa aspek kehidupan sebaiknya diintegrasikan melalui strategi tertentu yang sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah pendidikan.

Dari hasil penelitian *The International Bacheloreate Organization (IBO)*, badan administarasi internasional yang berpusat di Switzerland, berkesimpulan bahwa pada tahun 2005, di negara Indonesia sangat sedikit sekali sekolah yang diakui mutunya. Untuk kategori *the Primary Years Program (3-12 th)*, yakni dari 169.147 SD dan MI hanya 8 sekolah yang masuk daftar IBO, *The Middle Years (12-16 th)* dari 32.322 SMP dan MTs hanya ada 7 sekolah yang masuk data IBO, *The Diploma Program (16-19 th)* yang diakui dari 2.396 SMA dan MA hanya 1 yang terdaftar di IBO.

Berdasarkan data tersebut, bisa disimpulkan bahwa pendidikan Indonesia tertinggal jauh dalam kompetisi global. Di samping itu, berdasarkan analisis sejumlah ahli pendidikan bahwa kegagalan pendidikan di Indonesia disebabkan karena pendidikan Indonesia tidak seimbang, pendidikan di Indonesia hanya menonjolkan aspek kecerdasan intelektual, aspek kognitif yang kering akan nilai, dan menghiraukan aspek emosional-spiritual. Untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu "memanusiawikan manusia" pada dasarnya diperlukan keseimbangan perkembangan pendidikan, yang meliputi aspek kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual.

Pada diri manusia terdapat empat unsur/lapisan yang merupakan satu kesatuan yang berinterdependensi, yaitu: fisik (bagian terluar yang bisa dindra/rupe/badan); emosional; mental/pikiran; dan hati nurani (unsur terdalam dan terpenting yang harus menjadi sasaran pendidikan). Mayoritas manusia hidup dalam tataran hewaniah yaitu dikendalikan oleh unsur yang pertama dan kedua yaitu fisik dan emosional. Kita dapat menyaksikan berbagai kejadian yang menimpa bangsa ini (demonstrasi, penjarahan, tawuran, kekerasan, pembunuhan, perkelaian, korupsi, rekayasa hukum, rekayasa politik, dsb.) yang dilakukan oleh bangsa kita sendiri, ini merupakan dorongan hewaniah yang tidak boleh dibiarkan.

Maka pendidikan nilai sangat relevan untuk mengantarkan manusia agar dapat hidup dalam tataran insaniah, dimana perilakunya selalu diorganisasikan dengan kendali mental/pikiran dan hati nurani. Pendidikan nilai-nilai nurani (*values of being*), sebagai upaya pembinaan terhadap nilai yang ada pada diri manusia kemudian berkembang menjadi perilaku serta cara kita memperlakukan orang lain. Nilai nurani meliputi: kejujuran, keberanian, cinta damai, keandalan diri, potensi, disiplin, tahu batas, kemurnian, dan kesesuaian.

Dengan demikian pendidikan nilai harus menjadi *core* (intisari) dari pendidikan itu sendiri, bahkan Phillips Combs menyatakan: *value education or not all*, tidak perlu ada

pendidikan kalau tidak ada pendidikan nilai. Dengan pendidikan nilai diharapkan lahir SDM peserta didik yang berkualitas, yaitu manusia yang berakhlak mulia, yang memiliki ketajaman hati nurani, yang hidupnya dikendalikan oleh kekuatan hati nurani dalam mengendalikan unsur mental/pikiran, emosional, dan fisikalnya.

#### D. Arah, Program, dan Tujuan Pendidikan Nilai di Sekolah

Ke mana arah, apa tujuan, dan bagaimana program pendidikan nilai di sekolah? Arah pendidikan nilai adalah sesuai dengan sasaran pendidikan umum pada umumnya, yaitu untuk membentuk manusia utuh mulai dari bayi, balita, usia anak sekolah, remaja, sampai dewasa. Pembentukan kepribadian, idealnya pribadi yang manusiawi harus bertahap mulai dari bayi sampai dewasa dan berkesinambungan sepanjang hayat (Sumaatmadja, 2002:121). Dengan kata lain, pendidikan nilai juga harus bisa diterapkan dalam berbagai wilayah pendidikan yaitu pendidikan keluarga, persekolahan, dan masyarakat. Di era globalisasi, moral manusia semakin rusak, perilaku manusia tidak beradab, dan kondisi masyarakat mencekam dan menakutkan. Dari kondisi tersebut timbul kekhawatiran terhadap generasi manusia, khususnya dalam pembentukan kepribadian anak, maka pendidikan nilai menjadi *win win solution* bagi pembentukan generasi masa mendatang yang lebih baik.

Tujuan pendidikan nilai adalah *human being* sejalan dengan hakikat tujuan pendidikan, yaitu memanusiakan manusia muda (N. Driyarkara). Pendidikan nilai bertujuan membantu peserta didik untuk bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang lebih manusiawi (semakin "penuh" sebagai manusia), berguna dan berpengaruh di dalam masyarakatnya, yang bertanggung-jawab dan bersifat proaktif dan kooperatif, pribadi cerdas, berkeahlian, tapi tetap humanis.

Bagaimana program pendidikan nilai di sekolah? Dewasa ini, program pendidikan nilai seolah tercerai dari induknya. Program pendidikan nilai dianggap mata-pelajaran khusus

(*special matter*) yang bersinggungan dengan agama, sosial, filsafat atau humaniora. Padahal dalam pandangan Islam, nilai itu merupakan *core* (inti) dari setiap materi pelajaran, dan nilai harus bisa mewarnai terhadap seluruh komponen, lingkungan, program, atau aktivitas persekolahan. Hal ini sejalan dengan konsep Islam yang *kaffah*, *universal*, dan menjadi rahmat bagi kehidupan dunia (*rahmatan lilalamin*).

Konferensi Dunia Pertama tentang Pendidikan Islam tahun 1977 menghasilkan rumusan bahwa pendidikan Islam tidak lagi berarti pengajaran teologik atau Al-Quran, hadis, fiqih, tetapi memberi arti pendidikan di semua cabang ilmu pengetahuan yang diajarkan dari sudut pandangan Islam (Asyraf, 1989:85-86). Hal itu didasarkan pada pengertian Islam itu sendiri yang bersifat universal. H.AR. Gibb (Djumransjah, 2005:15) mendefinisikan *Islam is indeed much more than a system of theology, it is a complete civilization* (Islam tidak hanya sekedar sistem teologi, tetapi juga mencakup semua peradaban manusia). Di sinilah letak keeluasaan pendidikan nilai (Islam) yang wilayahnya tidak hanya mencakup unsur materi dan duniawi tetapi juga unsur *imateri* dan *ukhrowi*.

Pada kenyataannya, sering dijumpai kerancuan dalam penggunaan istilah "Pendidikan Islam". Bila kita menyebut Pendidikan Islam, konotasinya sering dibatasi pada "Pendidikan Agama Islam". Padahal, bila dikaitkan pada lembaga formal atau non-formal, Pendidikan Agama Islam hanya terbatas pada bidang-bidang studi agama, seperti: Tauhid, Fiqih, Tarikh Nabi, Al-Quran, Hadits (Achmadi, 2005:28).

Pada tataran praksisnya, transformasi nilai-nilai moral dari pendidik kepada peserta didik harus berdasarkan rujukan yang jelas, teruji, dan bisa dipertanggungjawabkan. Rujukan nilai moral tersebut tidak cukup berdasarkan pada nilai-nilai moral kemasyarakatan (nilai-nilai insaniyah), tetapi harus memperhatikan pula nilai-nilai dunia metafisika, atau nilai-nilai transendental, yang dalam istilah Imanuel Kant dikenal dengan istilah "ilusi transenden" (*a transcendental illution*). Nilai-nilai transendental tersebut dalam konteks agama kita, yakni sumber ajaran Islam berupa nilai-nilai *ilahiyah*.



Perpaduan dua rujukan moral antara nilai-nilai *insaniyah* (berwujud ilmu) dengan nilai-nilai *ilahiyyah* (berwujud agama), akan menghasilkan kekuatan besar (*high explosive*) dalam membangun kualitas pembinaan moral manusia. Kedua rujukan tersebut memiliki perbandingan sebagai berikut:

#### FUNGSI DAN PERAN AGAMA (PERBANDINGAN DENGAN ILMU)

ILMU (NILAI <i>INSANIYAH</i> )	AGAMA (NILAI <i>ILAHIIYAH</i> )
1. Mempercepat kita sampai ke tujuan	1. Menentukan arah yang dituju
2. Menyesuaikan manusia dengan lingkungannya	Menyesuaikan dengan jati dirinya
3. Hiasan lahir	3. Hiasan batin
4. Memberikan kekuatan dan menerangi jalan	4. Memberi harapan dan dorongan bagi Jiwa
5. Menjawab pertanyaan yang dimulai dengan bagaimana	5. Menjawab pertanyaan yang dimulai dengan mengapa
6. Tidak jarang mengeruhkan pikiran pemiliknya	6. Selalu menenangkan jiwa pemiliknya yang tulus.

Pendidikan nilai, memiliki tujuan untuk menjadikan peserta didik sebagai manusia utuh, manusia sempurna (*insan kamil*). Tercapainya kesempurnaan ditunjukkan oleh terbentuknya pribadi yang *berakhlak al-karimah*. Pribadi yang berakhlak adalah pribadi yang memiliki kemampuan untuk mengelola hidupnya sesuai dengan nilai-nilai (baik ilahiyyah maupun insaniyyah). Kemampuan seperti itu ada pada kekuatan pribadi dalam melaksanakan ikhtiar *tazkiyat al-nafs* melalui *riyadhah* dan *mujahadah*, sehingga terjadi internalisasi nilai. Segala usaha yang bertujuan untuk membina pribadi mesti diarahkan, agar peserta didik mempunyai kepekaan dan penghayatan atas nilai-nilai. Usaha-usaha seperti ini disebut pendidikan nilai.

Pendidikan nilai tidak semata-mata menempatkan sistem nilai sebagai bahan konsultasi dalam merumuskan tujuan pendidikan, tetapi juga menjadi acuan dalam sistem,

dan strategi pendidikan. Selanjutnya, pada tataran operasional, pendidikan nilai perlu dilaksanakan dengan format-format yang baru (inovatif), walaupun tidak selalu bersifat formal dan kurikuler. Nilai bukan hanya sebatas mendorong kerja intelektual dalam menentukan sikap, atau hasrat untuk memenuhi kebutuhan. Jauh dari itu, nilai berfungsi membimbing serta membina manusia agar memiliki budi pekerti yang luhur, dan mampu menemukan eksistensi diri untuk mewujudkan tujuan hidup yang sesungguhnya.

#### E. Pendekatan, Metode, Strategi dan Teknik Pembelajaran Nilai di Sekolah yang Efektif

Bagaimana pendekatan, metode, strategi dan teknik pembelajaran nilai di sekolah yang efektif? Ada beberapa pendekatan dalam proses pengalihan nilai (*transfer of values*) dari pendidik kepada peserta didik, antara lain:

1. Melalui pendekatan emosional; pendidik berusaha mengaktifkan ranah afektif peserta didik, karena setiap anak yang lahir ke dunia membawa sifat-sifat positif (Tuhan). Setelah ranah afektif peserta didik aktif, pendidik baru menyampaikan ajaran-ajaran moral. Dalam kondisi ini peserta didik siap mencerna materi dan akan berbekas pada jiwanya.
2. Membina perilaku positif siswa yang dilakukan secara berulang-ulang. Perilaku yang diulang-ulang (*repetition*), makin lama makin tertanam secara dalam, menjadi kebiasaan, menjadi sifat/karakter dan akhirnya menjadi bagian dari kepribadian. Agustian (*Pikiran rakyat*, 17/4/2008) mengatakan, sesuatu yang terus-menerus diulang-ulang akan menghasilkan perubahan karakter yang luar biasa. Hal ini seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Jepang, dengan budaya *Taisho* dan membacakan nilai-nilai perusahaan setiap apel pagi. Metode seperti ini juga diterapkan di lingkungan TNI lewat Sumpah Prajurit atau Sapta Marga.

Transformasi dan penanaman nilai disampaikan kepada peserta didik secara pasti, kontinyu, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, dalam nuansa kebersamaan dan kekeluargaan. Daisaku Ikeda (Presiden Ikeda Jepang) pernah bertutur "mulailah dari sesuatu yang sederhana, mudah dipahami, dan membumi"; *"Event just a little, because everything determinant by that"*. Transformasi nilai tersebut akan membentuk sifat, kebiasaan dan kepribadian.

Dewasa ini sumber kegelisahan dan penyakit orang modern berawal dari pengetahuan yang satu tercerai dari pengetahuan yang lain. Ilmu tercerai dari moral, ilmu tercerai dari seni, moral tercerai dari seni dan seterusnya. Sebab, pengetahuan yang tidak utuh, akan menghasilkan manusia yang tidak utuh pula. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan metode khusus agar tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Secara garis besar, pembelajaran nilai di persekolahan dapat diaktualisasikan melalui metode berikut:

1. **Metode Dogmatik;** metode untuk mengajarkan nilai kepada peserta didik dengan jalan menyajikan keseluruhan nilai-nilai yang harus diterima oleh peserta didik apa adanya, tanpa mempersoalkan hakikatnya.
2. **Metode Deduktif;** adalah proses berpikir dari yang umum ke yang khusus. Dengan kata lain, nilai diajarkan dan diuraikan berangkat dari seperangkat kode etik nilai untuk dipahami oleh peserta didik.
3. **Metode Induktif:** adalah proses berpikir dari yang khusus ke yang umum. Artinya, nilai diajarkan kepada siswa bermula dari sejumlah kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, kemudian ditarik dan diambil kesimpulannya.
4. **Penggabungan metode induktif dan deduktif.** Perolehan ilmu pengetahuan, tidak akan terlepas dari proses berpikir deduktif dan induktif. Penggabungan metode berpikir deduktif dan induktif akan membentuk proses berpikir yang kuat, dan berusaha agar kebenaran dapat dicapai seoptimal mungkin. Penggabungan kedua metode ini memiliki kesamaan dengan metode subjektivisme dan objektivisme. Dalam hal ini subjektivisme dapat lahir dari pemikiran

filosof (segudang konsep, teori), sedangkan objektivisme ditempuh melalui ilmu pengetahuan (realitas). Edmund Husserl (Sumaryono, 1994) sebagai pendiri aliran fenomenologi modern mengatakan "kebenaran hakiki akan tercapai melalui kombinasi subjektivisme total dan objektivisme total". Dengan kata lain, kebenaran dapat ditempuh melalui unifikasi pemikiran para filosof dan ilmuwan.

Pada tataran praksisnya, pembinaan moral peserta didik harus memiliki rujukan yang jelas, teruji, dan bisa dipertanggung jawabkan. Rujukan moral tersebut tidak cukup berdasarkan pada nilai-nilai moral kemasyarakatan (nilai-nilai insaniyah), tetapi harus memperhatikan pula nilai-nilai dunia metafisika, atau nilai-nilai transendental, yang dalam istilah Imanuel Kant dikenal dengan istilah "ilusi transenden" (*a transcendental illution*). Nilai-nilai transendental tersebut dalam konteks agama kita, yakni sumber ajaran Islam berupa nilai-nilai ilahiyah.

Strategi dan teknik pendidikan nilai di sekolah yang efektif dapat dilakukan para pendidik (guru) dengan langkah-langkah berikut:

1. Penataan fisik sekolah dan kelas yang kondusif untuk keberlangsungan belajar-mengajar.
2. Adanya pembinaan keagamaan bagi guru/pendidik yang terpola dan terprogram, ada pelatihan bagi guru tentang metode memasukkan nilai melalui bidang studi.
3. Penataan dan peningkatan kualitas kegiatan ekstra kurikuler keagamaan di sekolah.
4. Meningkatkan rasa tanggung jawab, disiplin, kebersamaan, persatuan dan kerjasama dalam menjalankan aktivitas persekolahan, serta menjalin hubungan harmonis dengan sekolah atau lembaga lain.
5. Guru tampil sebagai sosok yang cerdas secara Intelektual (IQ), Emosional (EQ) dan Spriritual (SQ).
6. Di antara guru lahirnya kebiasaan untuk berdiskusi, peningkatan wawasan (*insight*), informasi tentang ilmu umum dan agama di lingkungan tempat guru bekerja.

7. Istiqomah untuk beramal saleh, dan memberikan keteladanan kepada para siswa.
8. Membudayakan ucapan salam di lingkungan sekolah, dan lantunan ayat-ayat Al-Quran melalui radio atau pengeras suara sebelum pelajaran dimulai.
9. Adanya program BP/BK yang berbasis nilai-nilai keimanan dan ketakwaan.

Di samping itu, untuk mewujudkan masyarakat sekolah yang beradab, berbudi, menjunjung tinggi nilai, harus didukung oleh budaya lingkungan (sekolah) yang berbasis nilai.

Adapun teknik untuk mewujudkan budaya sekolah berbasis nilai melalui tahapan berikut:

1. Adanya kesadaran bersama akan pentingnya nilai (kesadaran bersama itu mencakup semua pihak; kepala sekolah, guru, karyawan, peserta didik, orang tua, dan masyarakat sekitar).
2. Adanya komitmen, penghayatan, dan aktualisasi nilai yang dilakukan secara bersama-sama di lingkungan sekolah.
3. Memiliki sistem evaluasi yang dapat diandalkan (bisa berupa mingguan, bulanan, dan tahunan) untuk meningkatkan kualitas budaya sekolah berbasis nilai. Di samping itu, evaluasi juga sebagai sarana untuk melahirkan ide-ide inovatif dengan menggali teknik baru yang sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah.

Adapun langkah-langkah membangun sekolah yang kondusif sebagai berikut:

1. Memahami kondisi permasalahan sekolah dan masyarakat, mengetahui penyebabnya, dan menciptakan solusi untuk membangun budaya sekolah.
2. Untuk membangun sekolah diperlukan: (1) adanya pembekalan untuk meningkatkan kualitas guru, adanya kesamaan visi misi dalam merealisasikan pendidikan; (2) pada tataran praksisnya, harus ada komitmen bersama yang terumuskan secara jelas, sederhana dan operasional. Di samping itu, bentuk komitmen juga bisa dievaluasi untuk

melahirkan komitmen baru yang lebih sesuai dengan lingkungan sekolah.

3. Memiliki orientasi khusus, yakni: terbentuknya budaya sekolah berbasis nilai, setiap orang yang ada di lingkungan sekolah mampu meresapi dan menghayati nilai-nilai kehidupan, terciptanya pola kehidupan di lingkungan sekolah yang berkualitas.
4. Adanya tindak lanjut sebagai langkah untuk: (1) menciptakan pembaharuan dan peneguhan; (2) menjangkir keterlibatan orang tua dan masyarakat, agar orang yang berada di luar sekolah sekalipun ada rasa memiliki (*sense of belonging*); (3) terbentuknya bimbingan yang berkelanjutan; (4) terjalin komunikasi yang positif; (5) terbentuknya *up date soft skill* dan keterampilan hidup.

#### **F. Model dan Pola Evaluasi/Penilaian Pendidikan Nilai di Sekolah**

Bagaimanakah model dan pola evaluasi/penilaian pendidikan nilai di sekolah? Model dan pola evaluasi terhadap pendidikan nilai di sekolah mencakup tiga ranah:

##### **a. Ranah Kognitif**

Evaluasi pada ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari pengetahuan atau ingatan, pemahaman, serta analisis. Dalam hal ini, pendidik mengevaluasi peserta didiknya yang mencakup; pengetahuan, pemahaman, dan analisis mereka terhadap materi pelajaran.

##### **b. Ranah Afektif**

Evaluasi pada ranah afektif berkenaan dengan penerimaan (*receiving/attending: emoting & feeling*), jawaban atau respon siswa terhadap situasi dan kondisi ketika proses pembelajaran dan pengajaran berlangsung (*responding:minding*), *valuing: spiritualizing/taking role, dan organizing:taking position*.

### c. Ranah Psikomotorik

Sedangkan evaluasi dalam bentuk ranah psikomotor yakni mencakup gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, dan kemampuan perseptual.

Secara faktual, bentuk penilaian pendidikan hari ini masih pincang dalam pola mengembangkan potensi peserta didik. Penilaian terhadap peserta didik hanya ditinjau dari satu aspek saja yaitu aspek kognitif. Hal itu terbukti dengan adanya standar kelulusan yang diberlakukan pada Ujian Nasional (UN) yang hanya tertuju pada aspek kognitif semata.

Format sederhana tentang penilaian pendidikan nilai yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor misalnya pada materi pelajaran agama tentang zakat. Format penilaiannya sebagai berikut:

No	Perilaku Siswa di Sekolah		
1	Pengetahuan, pemahaman, dan analisis siswa (kognitif)	Penerimaan dan respon siswa (afektif)	Sikap, perilaku, dan keterampilan siswa (psikomotor)
2	Siswa mengetahui definisi zakat	Siswa menerima/menolak / mengkritisi konsep zakat & pembagiannya	Mampu membedakan, mengklasifikasikan konsep zakat berikut pembagiannya.
3	Siswa memahami manfaat zakat	Sadar/ tidak sadar akan arti persaudaraan, tolong menolong	Mengeluarkan/tidak mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya

(Dr. Sofyan Sauri, M.Pd)

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahannya*. 1989. Departemen Agama Republik Indonesia.
- Alberty, HB & Alberty EJ. 1965. *Recognizing the High School Curriculum*, Third Eddition. New York: The Macmillan Company.
- Driyarkara, SJ. 1966. *Filsafat Manusia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Dahlan, M,D. 1982. *Ciri-ciri Kepribadian Siswa SPG Negeri I di Jawa Barat, Dikaitkan Dengan Sikapnya Terhadap Jabatan Guru*. Disertasi. Bandung: PPS IKIP.
- Dahlan, M,D. 1983. *Sumbangan Pikiran Tentang Pewujudan Tujuan Pendidikan Nasional*. Bandung: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- Dahlan, M,D. 1992. *Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam dalam Keluarga, di Sekolah dan di Masyarakat*. Bandung: Diponegoro.
- Dahlan, M,D, dan Syihabuddin. 1995. *Terjemahan Tafsir Ruhul Bayan*. Juz I. Bandung: Diponegoro.
- Dahlan, M,D. 2001. *Pengembangan Kepribadian Mahasiswa melalui Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian*. (Makalah 30 Juli 2001).
- Darajat, Z. 1975. *Fungsi Rumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Fraenkel, J,R. 1977. *How To Teach About Values*. New Jersey: Englewood Cliffs.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1999. Jakarta: Balai Pustaka.
- McConnell. 1952. *General Education An Analysis*. Dalam Henri,N,B. (1952). *The Fifty-First Yearbook*. Chicago: The Univesity Chicago Press.
- Phenix, Philip, H. 1964. *Realms of Meaning (A Philosophi Of The Curriculum for General Education*. New York: Mc-Graw-Hill Book Company.
- Mulyana, R, dkk. 1999. *Cakrawala Pendidikan Umum*, Bandung: Ikatan Mahasiswa dan Alumni Pendidikan Umum-PPS IKIP Bandung.



Henry, NB. 1952. *The Fifty-First Year Book* (General Education). University Of Chicago Press.

Sumaatmadja, N. 1980. *Perspektif Studi Sosial*. Bandung : Alumni.

Sauri, S. 1996. *Komunikasi Orang Tua Anak dalam Membina Nilai-nilai Agama Pada Keluarga*. Tesis. Bandung: PPS IKIP.

Titus, H. 1959. *Living Issues in Philosophy*. New York: American Book Company.

# **BAB 10**

## **PENDIDIKAN AGAMA YANG MENCERAHKAN**

**(Peran GPAI Menanamkan Nilai *Ilahiyah* dan *Insaniyah* Melalui Pendidikan Agama di Sekolah)**

### **A. Pengantar**

Dengan melihat realitas, kita akan menyaksikan betapa runyamnya pelanggaran nilai-nilai agama di belahan muka bumi ini. Misalnya perampasan hak, perkosaan, perampasan kebebasan, pencurian, penggunaan obat terlarang, minuman keras, perkelahian, dan sebagainya. Ditambah lagi dengan adanya berbagai tindakan yang tidak etis yang dipertontonkan oleh para pejabat dan tokoh masyarakat yang hampir merajalela di berbagai sektor kehidupan, mengakibatkan runtuhnya martabat bangsa ini.

Kondisi tersebut menunjukkan indikasi bahwa pendidikan agama yang berlangsung selama ini belum memberikan hasil yang optimal dan sesuai sasaran. Ternyata ilmu dan teknologi tidak mampu memberikan makna peningkatan kecerdasan yang sebenarnya, kalau tidak disertai dengan pendidikan agama yang kokoh. Untuk itu, di sinilah pentingnya pendidikan dan pembelajaran agama diberikan sejak dini di keluarga dan sekolah, agar mereka mempunyai kesadaran nilai-nilai agama yang tinggi, yang pada gilirannya diharapkan dapat memotivasi mereka untuk berperilaku yang baik sesuai dengan kerangka normatif agama.

Di samping itu, perlu disadari bahwa pendidikan dan pembelajaran agama bukan sesuatu yang hanya ditambahkan, melainkan justru merupakan sesuatu yang hakiki dalam seluruh proses pendidikan. Terlebih lagi bila diingat bahwa, arus materialisme dan konsumerisme secara global terus mengikis nilai-nilai luhur dari kehidupan manusia, tidak hanya yang tinggal di kota-kota besar, bahkan sudah menyentuh desa-desa yang terpelosok sekalipun. Oleh sebab itu, pendidikan

dewasa ini sungguh-sungguh menghadapi tantangan yang luar biasa berat, terutama dalam membangun kehidupan bersama yang damai dan aman.

Pendidikan dan pembelajaran agama bertujuan mengembangkan dan menanamkan watak berakhlak sesuai dengan kerangka normatif agama dan berusaha mengubah perilaku seseorang dalam arti luas dan jangka waktu yang lama. Untuk itu, pendidikan dan pembelajaran agama dapat berhasil jika siswa ada disposisi batin yang benar (*syahadah*) untuk menghayati sekaligus melaksanakan akan makna kehidupan yang disinari nilai-nilai *ilahiyah* berdasarkan pendidikan agama yang diterima.

Dalam penghayatan dan pelaksanaannya, nilai-nilai tersebut tidak dapat dipaksa dari luar, melainkan masuk ke dalam hati siswa secara lembut ketika hatinya secara bebas membuka diri (*self awareness*). Dengan demikian, pendidikan dan pembelajaran agama akan bermakna kalau dapat menginternalisasi atau mempribadi pada diri siswa. Di sinilah pentingnya penanaman nilai-nilai agama yang kokoh. Dengan nilai-nilai yang kokoh, maka agama akan mempribadi pada diri siswa, yang pada akhirnya akan menjadi kekuatan penggerak untuk melakukan *amal shalih* dan *akhlak al-karimah*.

## B. Tantangan Eksternal (Global) Pendidikan Agama

Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa pada awal perkembangan sains modern (sekitar abad 16/17 M) pernah terjadi perpecahan antara kaum agamawan dan ilmuwan, yang ditandai dengan sikap keras kaum agamawan Eropa (penganut *geosentris*) kepada penganut paham *heliosentris*, seperti Copernicus, Bruno, Kepler, Galileo, dan lain-lainnya. Metodologi yang dikembangkan oleh mereka mengandalkan kemampuan inderawi (empiris), sehingga kajian-kajian keagamaan yang bersifat non-inderawi dianggap tidak ilmiah (Muhaimin, 1999).

Pengalaman sejarah juga menunjukkan bahwa di negara yang sudah memasuki era industri, di mana masyarakatnya sangat mendambakan rasionalitas, efisiensi, teknikalitas,

individualitas, mekanistik, materialistik, ternyata semua yang berbau *sacred* (suci) nyaris tidak mendapat tempat pada masyarakat itu. Ellul (1964) dalam Muhaimin (1999), telah mengidentifikasi 5 alasan sosiologis berdasarkan tradisi Nasrani, tentang mengapa orang semakin sedikit dan ogah dalam menjalankan sembahyang. Kelima alasan itu adalah: (1) sekularisasi; (2) iklim penalaran dan skeptisisme; (3) ketidakpraktisan sembahyang; (4) kerancuan sembahyang dan moralitas; dan 5) keterbatasan bahasa atau berbelit-belitnya bahasa sembahyang.

Namun demikian, kalau kita mengamati fenomena yang terjadi pada akhir abad ke-20 ini (di mana kemajuan IPTEK sudah begitu *sophisticated*), ternyata justru terjadi sebaliknya. Dalam arti, terjadi hubungan yang harmonis antara ilmuwan dan agamawan. Temuan-temuan dalam bidang IPTEK yang kasatmata membuat ilmuwan percaya pada banyak hal yang tidak terjangkau oleh indera. Hal ini muncul terutama ketika disadari bahwa isi alam semesta ini terdiri atas atom-atom yang dapat diteliti lagi menjadi sub-sub atom. Karena itu para ilmuwan terperangah bahwa banyak hal yang harus dipercaya "ada"-nya tanpa harus ditangkap oleh indera, termasuk elektron, gelombang radio, dan sebagainya.

Di Indonesia, perpecahan antara ilmuwan dan agamawan ternyata tak tercatat dalam sejarah perkembangan IPTEK, malahan himbauan agar ilmuwan dan agamawan saling mendukung sangat terdengar gemanya di Indonesia. Misalnya, Baiquni menyatakan bahwa IPTEK terus menerus memerlukan bantuan agama; dan Mangunwijaya (dalam Muhaimin: 1999) juga mengajak kita untuk menarik hikmah dari Galileo-Galilei. Munculnya ICMI juga merupakan kasus yang menarik untuk mengharmoniskan hubungan antara ilmuwan dan agamawan. Oleh karena itu, pengalaman sejarah dari negara industri tersebut setidaknya-tidaknya akan sulit muncul di Indonesia, bilamana benar-benar tercipta keserasian antara ilmu pengetahuan dan agama. Dalam arti keyakinan beragama (sebagai hasil pendidikan agama) diharapkan mampu memperkuat upaya penguasaan dan pengembangan IPTEK, dan

sebaliknya pengembangan IPTEK memperkuat keyakinan beragama. Ilmu pengetahuan berbicara *know what* dan *know why*, dan teknologi berbicara *know how*. Sedangkan agamalah yang bisa menuntun manusia untuk memilih mana yang patut, bisa, benar dan baik untuk dijalankan dan dikembangkan.

Di sinilah letak peranan pendidikan agama (Islam) dan sekaligus pendidiknya (Guru Pendidikan Agama Islam/GPAI di sekolah) dalam mengantisipasi perkembangan kemajuan IPTEK. Dalam arti, mampukah GPAI menegakkan landasan, yang menjadi tiang utama ajaran agama, tatkala dominasi temuan IPTEK sudah demikian hebat dan menguasai segala perbuatan dan pikiran umat manusia.

Temuan IPTEK telah menyebarkan hasil yang membawa kemajuan, dan dampaknya terasa bagi kehidupan seluruh umat manusia. Semua hasil temuan IPTEK di satu sisi harus diakui telah secara nyata mempengaruhi bahkan memperbaiki taraf dan mutu hidup manusia. Di sisi lain produk temuan dan kemajuan IPTEK itu telah mempengaruhi bangunan kebudayaan dan gaya hidup manusia.

Dalam era kemajuan IPTEK ini perubahan global semakin cepat terjadi dengan adanya kemajuan-kemajuan dari negara maju di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan IPTEK ini mendorong semakin lajunya proses globalisasi. Teknologi komputer misalnya, membanjiri setiap negara, bangsa dan budaya tanpa mengenal batas bangsa, negara dan budaya. Faksimili adalah teknologi cetak jarak jauh yang dapat mengirimkan pesan untuk siapa pun, di mana pun, negara mana pun, dan bangsa apapun, serta bisnis dan institusi apapun. Faksimili adalah teknologi global yang membantu terciptanya globalisasi dalam pengiriman pesan dalam waktu yang cepat dan akurat. Televisi dengan antena parabola merupakan media global yang mendorong terciptanya globalisasi penyiaran berita, budaya dan sebagainya secara internasional yang tidak mengenal batas ruang dan waktu.

Kenyataan semacam itu akan mempengaruhi nilai, sikap atau tingkah laku kehidupan individu dan masyarakatnya. Hasil studi yang dilakukan oleh Naissbit dan Aburdene dalam

Megatrends 2000, menunjukkan bahwa ada beberapa nilai, sikap dan tingkah laku individu dan masyarakat modern yang kongruen (sejalan) dengan ajaran agama Islam dan mendukung keberhasilan pembangunan. Ada pula nilai dan sikap modernitas yang tidak kongruen (berlawanan) dengan ajaran Islam sekaligus tidak mendukung keberhasilan pembangunan, misalnya: lemahnya keyakinan keagamaan, sikap individualistis, materialistis, hedonistis dan sebagainya. Nilai-nilai dan sikap yang negatif itu akan muncul bersamaan dengan nilai dan sikap positif lainnya, yang sudah barang tentu merupakan ancaman bagi terwujudnya cita-cita pembangunan bangsa. Karena itu masalah yang perlu segera mendapatkan jawaban, terutama dari para GPAI adalah "mampukah kegiatan pendidikan agama (Islam) itu berdialog dan berinteraksi dengan perkembangan zaman modern yang ditandai dengan kemajuan IPTEK dan informasi, dan mampukah mengatasi dampak negatif dari kemajuan tersebut?"

### C. Tantangan Internal

Sebagaimana uraian terdahulu, bahwa selama ini terdapat berbagai kritik dan sekaligus solusi terhadap pelaksanaan pendidikan agama yang sedang berlangsung di sekolah (Buchori, 1992). Secara konseptual-teorititis, kritik dan solusi tersebut telah dijadikan pertimbangan dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama di sekolah. Untuk itu, dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) -yang dikembangkan menjadi KTSP-- salah satu rekomendasinya dinyatakan bahwa, pendidikan agama harus dilaksanakan secara terpadu, yakni keterpaduan pembinaan antara tiga lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta keterpaduan antara pendidikan agama dengan perkembangan IPTEK. Karena itu, pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah harus mampu memenuhi tuntutan tersebut.

Di samping itu, Rasdianah (1995: 4-7) mengemukakan beberapa kelemahan lainnya dari pendidikan agama Islam di sekolah, baik dalam pemahaman materi pendidikan agama

Islam maupun dalam pelaksanaannya, yaitu: 1) dalam bidang teologi, ada kecenderungan mengarah pada faham fatalistik; (2) bidang akhlak berorientasi pada urusan sopan santun dan belum dipahami sebagai keseluruhan pribadi manusia beragama; (3) bidang ibadah diajarkan sebagai kegiatan rutin agama dan kurang ditekankan sebagai proses pembentukan kepribadian; (4) dalam bidang hukum (fikih) cenderung dipelajari sebagai tata aturan yang tidak akan berubah sepanjang masa, dan kurang memahami dinamika dan jiwa hukum Islam; (5) agama Islam cenderung diajarkan sebagai dogma dan kurang mengembangkan rasionalitas serta kecintaan pada kemajuan ilmu pengetahuan; (6) orientasi mempelajari Al-Qur'an masih cenderung pada kemampuan membaca teks, belum mengarah pada pemahaman arti dan penggalan makna.

Thowaf (1996) juga telah mengamati adanya kelemahan-kelemahan pendidikan agama Islam di sekolah, antara lain:

1. Pendekatan masih cenderung normatif, dalam arti pendidikan agama menyajikan norma-norma yang seringkali tanpa ilustrasi konteks sosial budaya, sehingga siswa kurang menghayati nilai-nilai agama sebagai nilai yang hidup dalam keseharian.
2. Kurikulum pendidikan agama Islam yang dirancang di sekolah sebenarnya lebih menawarkan minimum kompetensi atau minimum informasi, tetapi pihak GPAI seringkali terpaksa padanya, sehingga semangat untuk memperkaya kurikulum dengan pengalaman belajar yang bervariasi kurang tumbuh.
3. Sebagai dampak yang menyertai situasi tersebut di atas, maka GPAI kurang berupaya menggali berbagai metode yang mungkin bisa dipakai untuk pendidikan agama, sehingga pelaksanaan pembelajaran cenderung monoton.
4. Keterbatasan sarana/prasarana, sehingga pengelolaan cenderung seadanya. Pendidikan agama yang diklaim sebagai aspek yang penting seringkali kurang diberi prioritas dalam urusan fasilitas. Tantangan pendidikan agama Islam juga terkait dengan tantangan dunia

pendidikan di Indonesia pada umumnya, terutama dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia, yaitu : (1) era kompetitif yang disebabkan oleh meningkatnya standard dunia kerja; (2) jika kualitas pendidikan menurun, maka kualitas sumberdaya manusia juga menurun dan lemah pula dalam hal keimanan dan ketaqwaan serta penguasaan IPTEK; (3) kemajuan teknologi informasi menyebabkan banjirnya informasi yang tidak terakses dengan baik oleh para guru dan pada gilirannya berpengaruh pada hasil pendidikan; (4) dunia pendidikan tertinggal dalam hal metodologi; (5) kesenjangan antara kualitas pendidikan dengan kenyataan empirik perkembangan masyarakat (Muhaimin, 1999).

Tantangan pendidikan agama tersebut bukanlah permasalahan yang berdiri sendiri, tetapi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perkembangan IPTEK dan aspek kehidupan yang lain, baik ekonomi, politik maupun sosial budaya. Berbagai tantangan yang dihadapi dunia pendidikan pada umumnya juga berpengaruh dan dihadapi oleh pendidikan agama sebagai bagian dari pendidikan bangsa. Kalau dunia pendidikan di Indonesia proses pembelajaran di sekolah memerlukan berbagai inovasi agar tetap berfungsi optimal di tengah arus perubahan, maka pendidikan agama juga memerlukan berbagai upaya inovasi agar eksistensinya tetap bermakna bagi kehidupan bangsa.

Dari uraian tersebut dapat difahami bahwa, tantangan pendidikan agama Islam yang begitu kompleks pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua macam, yaitu tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan internal menyangkut sisi pendidikan agama sebagai program pendidikan baik dari segi pemahaman terhadap materi, perancangan, maupun pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan agama Islam itu sendiri. Sedangkan tantangan eksternal berupa berbagai kemajuan IPTEK, era globalisasi di bidang informasi, perubahan sosial ekonomi dan budaya dengan segala dampaknya. Berbagai macam tantangan pendidikan agama



Islam tersebut sebenarnya dihadapi oleh semua pihak, baik keluarga, pemerintah, maupun masyarakat, baik yang terkait langsung ataupun tidak langsung dengan kegiatan pendidikan agama Islam.

Namun demikian, GPAI di sekolah yang terkait langsung dengan pelaksanaan pendidikan Islam dituntut untuk mampu menjawab dan mengantisipasi berbagai tantangan tersebut. Untuk mengantisipasinya, diperlukan adanya profil GPAI di sekolah yang mampu menampilkan sosok kualitas personal dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Dengan ini diharapkan, *performance*-nya dalam membelajarkan pendidikan agama Islam betul-betul dapat dipertanggungjawabkan, baik secara intelektual, moral maupun spiritual, sehingga kepribadiannya dapat menjadi kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*) bagi siswa.

#### D. GPAI dan Realitas Sosial

Suatu keprihatinan kita adalah, ternyata di belahan muka bumi ini banyak sekali pelanggaran nilai-nilai agama yang dilakukan oleh anak-anak "terpelajar". Misalnya pelanggaran yang terjadi di Amerika Serikat. Sebagaimana penelitian Murphy (1998), bahwa para siswa di sekolah Amerika sering melakukan tindakan negatif, seperti: kekerasan dan perusakan (*violence dan vandalism*), pencurian (*stealing*), penipuan (*cheating*), ketidaksopanan pada kewibawaan (*disrespect for authority*), kekejaman kelompok (*peer cruelty*), keras kepala (*bigotry*), bahasa yang jelek atau ucapan kotor (*bad language*), penyimpangan seksual dan minuman keras (*sexual precocity and abuse*), peningkatan pemusatan diri dan kurangnya tanggung jawab sebagai warga Negara (*increasing self-centeredness and declining civic responsibility*), dan tingkah laku merusak diri (*self-destructive behavior*). Tindakan-tindakan tersebut, kalau kalau kita cermati, ternyata sudah hadir di sekitar kita dan menjadi persoalan sosial tersendiri.

Bahkan pada anak-anak Sekolah Dasar (SD) fenomena kekerasan dan kenakalan sering terjadi, yang hal tersebut seharusnya belum patut dilakukan oleh anak seusia itu. Kasus

di Malang Jawa Timur pada tahun 2004 lalu misalnya, ada seorang anak SD yang membunuh temannya sendiri gara-gara masalah sepele yang bermula dari saling ejek-mengejek. Bahkan di beberapa tempat, ada juga anak SD yang sudah minum-minuman keras, memakai narkoba, dan juga melakukan hubungan seks bebas dengan wanita tuna susila.

Dalam skala mikro di sekolah, sering terjadi pula kenakalan siswa yang cukup membuat prihatin dan perlu mendapat perhatian para guru. Misalnya, mengganggu teman, bertengkar yang keterlaluan, memukul-mukul/mencoret benda di sekitarnya, mengabaikan guru, mengeluh, berpindah-pindah tempat duduk, ramai, gelisah dalam ruangan, mencuri, dan merusak benda-benda dalam ruangan. Kondisi tersebut mempertegas bahwa, pendidikan agama yang dibelajarkan di sekolah belum menjadi pengendali dari perbuatan negatif.

Kenakalan atau pelanggaran tersebut, semakin lama bukan semakin berkurang, tetapi justru semakin menunjukkan intensitas yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh arus globalisasi dan informasi yang semakin menguat, yang ditunjukkan dengan kemajuan di bidang teknologi informasi, elektronika dan komunikasi. Akibatnya, nilai dan norma dunia cepat menyebar. Kondisi ini menyebabkan tumbuhnya sikap konsumerisme dan materialisme. Keberhasilan hanya akan diukur berdasarkan ukuran-ukuran ekonomi dan kebendaan serta kebenaran hanya diukur dengan kepentingan dan hak-hak individu, tanpa mempertimbangkan kepentingan dan hak orang lain.

Sikap tersebut secara perlahan dan terus-menerus mengikis nilai-nilai luhur bangsa, tidak hanya yang tinggal di kota-kota besar, bahkan sudah menyentuh desa-desa yang terpelosok sekalipun. Oleh sebab itu, pendidikan agama dewasa ini sungguh-sungguh menghadapi tantangan yang luar biasa berat, terutama dalam membangun kehidupan bersama yang damai dan aman yang bersendikan nilai-nilai religius.

Arus globalisasi tidak mungkin dibendung, karena merupakan keharusan sejarah, yang mesti akan hadir dalam relung kehidupan setiap bangsa dan negara. Untuk itu, upaya membangun filter untuk menyaring berbagai informasi negatif

merupakan kebutuhan vital. Di sinilah pentingnya para GPAI menghayati peran dan fungsinya, agar pendidikan agama yang dibelajarkan mampu menghadapi realitas sosial tersebut.

#### E. GPAI dan Peran Pendidikan

GPAI masa kini, bukan hanya berperan sebagai pengajar dalam arti yang sempit (*transfer of knowledge*), tetapi juga sebagai pendidik (*transfer of values*). Di samping itu, ia harus juga memainkan peranan sebagai pemimpin, pengelola, pembimbing dan pembantu guna memudahkan proses pembelajaran pendidikan agama, atau diistilahkan sebagai *leader of learning*, *director of learning*, *manager of learning*, dan sekaligus *facilitator of learning*. Dengan peranan tersebut, GPAI diharapkan mampu membangkitkan sikap religius siswa. Siswa diharapkan mampu merespon perubahan zaman yang terjadi, tetapi tidak terbawa arus perubahan dunia yang semakin global (Arifin, 1993).

Namun dalam kenyataannya, GPAI dalam membelajarkan pendidikan agama di sekolah belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. GPAI belum mampu membentuk kepribadian siswa secara utuh. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya kasus kenakalan siswa dalam berbagai bentuknya, baik di sekolah maupun luar sekolah. Meskipun kenakalan remaja tidak semata-mata disebabkan oleh pendidikan agama yang gagal, tetapi sering kali GPAI menjadi “tumpuan harapan” terbentuknya *akhlakul karimah*, sehingga apabila terjadi kenakalan siswa, GPAI sering menjadi sasaran. Persepsi ini tidak selamanya benar, dan juga tidak semuanya salah. Karena GPAI dianggap sebagai “penjaga moral” di lingkungan sekolah, sehingga baik buruknya akhlak siswa sering dialamatkan kepada GPAI.

Dalam perspektif pembelajaran, persoalan ini kalau ditelusuri secara seksama, sebenarnya merupakan salah satu indikasi bahwa, GPAI dalam membelajarkan pendidikan agama selama ini masih dianggap kurang berhasil dan belum memenuhi logika zamannya. Pendidikan agama yang diberikan telah jatuh ke dalam sekedar “pengajaran agama” yang

indoktrinatif-normatif, yang hanya singgah di kepala sebentar menjelang dan saat-saat ujian dan sesudah itu terlupakan, tidak pernah masuk ke hati para siswa, dan tidak pernah dilaksanakan dalam kehidupan. Akibatnya, kenakalan-kenakalan siswa terjadi di mana-mana.

Persoalan lain dari kegagalan pendidikan agama adalah pengaruh media massa. Setiap hari, GPAl dalam membelajarkan pendidikan agama harus menghadapi tantangan berat yang hadir di ruang pikiran siswa, yaitu berbagai tayangan atau program acara yang ada pada media massa. Terlepas dari kelebihanannya, banyak tayangan atau acara pada media massa yang sebenarnya merupakan "kampanye" berbagai paham komoderenan, yang kadang-kadang itu bertentangan dengan budaya kita. Misalnya, budaya konsumerisme, hedonisme, liberalisme, dan sebagainya, yang masuk lewat berbagai film atau mungkin sinetron atau berbagai acara lainnya, yang dapat membangun opini, bahwa itulah yang paling relevan dengan kemoderenan.

Melihat kondisi demikian, nampak bahwa tugas GPAl di sekolah sangatlah berat, belum lagi ditambah oleh beban-beban administratif yang dapat mengganggu konsentrasi mereka dalam membelajarkan siswa. Akibatnya, konsentrasi untuk mencari format baru dalam pembelajaran agama yang relevan dengan kemoderenan, semakin terabaikan. Untuk itu, GPAl harus mampu membagi waktu dan tugas, di mana yang strategis-fungsional harus diutamakan ketimbang yang administratif-formal, agar mampu melakukan refleksi-refleksi cerdas dalam membelajarkan pendidikan agama, sehingga agama akan fungsional dalam kehidupan diri siswa.

#### **F. Strategi Pendidikan Agama dalam Menanamkan Nilai kepada Siswa**

Dalam menghadapi realitas sosial yang semakin kompleks ini, maka kegiatan pendidikan dan pembelajaran agama tidak hanya sekedar melakukan transformasi pengetahuan, tetapi juga melakukan transaksional dan transinternalisasi. Karena pembelajaran agama selama ini

masih lebih banyak bersifat transformatif dengan dukungan profesionalisme, maka hasilnya adalah siswa yang pandai tetapi komitmen (*syahadah*) akan nilai *insaniyah* dan *ilahiyyah*-nya relatif rendah. Untuk itu, agar tercipta siswa yang berbudi pekerti luhur (*akhlakul karimah*), maka pendidikan agama harus diberikan secara rekreatif, kontekstual, dan problematis melalui penyadaran dan pembebasan. Dengan ini diharapkan nilai-nilai agama menginternalisasi pada diri siswa. Pemikiran ini dapat digambarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 1:**  
**Tiga Strategi Pendidikan Agama**

	PEWARISAN	PENYADARAN	PEMBEBASAN
Tujuan	Mewariskan nilai-nilai akidah, syariah, dan akhlak	Penyadaran akan kualitas keimanan dan ketakwaan	Mengubah Realita: Menyadarkan manusia akan pentingnya agama dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya
Materi	Nilai-nilai <i>Ilahiyyah</i> dan <i>Insaniyyah</i> yang praktis-pragmatis	Sejarah dan Perkembangan Agama serta implikasinya bagi kehidupan masa kini	Realitas Pelanggaran Agama dan alternatif solusinya
Metode	Gaya Bank	Partisipatori	Dialogis

Dari gambar dan tabel tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pewarisan nilai-nilai aqidah, syariah, dan akhlak melalui metode gaya bank (meyakinkan, menghargai dan memerankan secara optimal siswa) akan lebih tepat diberikan pada anak usia Sekolah Dasar, agar mereka dapat mewarisi dan tumbuh rasa empati akan nilai-nilai *ilahiyyah* dan *insaniyyah*. Nilai *ilahiyyah* dimaksud, misalnya: ikhlas, *ridlo*, *iffah*, *sajaah*, *qonaah*, *zuhud*, *tawakkal*, sabar, jujur, dsb. Sedang nilai-nilai *insaniyyah*, misalnya:

cinta kasih terhadap sesama, integritas, rasa tanggung awab terhadap tugas, disiplin diri, kepedulian dan empati, bekerjasama, mandiri dan percaya diri, suka menolong sesama, komitmen dan keteguhan hati, berperilaku adil, keberanian dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan, toleransi, rasa bangga dan percaya diri, perilaku humor dalam berinteraksi dengan orang lain, loyal, respek/menghormati orang lain, dan kreatif atau banyak akal

2. Penyadaran akan kualitas keimanan dan ketakwaan melalui sejarah dan perkembangan agama dengan metode partisipatoris (terlibat langsung dalam tataran *amal shalih*) akan lebih tepat diberikan pada anak usia SLTP dan SLTA, agar anak dapat memahami dan tumbuh kesadaran akan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan.
3. Pembebasan untuk merubah realita dan menyadarkan manusia akan pentingnya agama dan melalui penyampaian informasi realita pelanggaran agama secara dialogis akan lebih tepat diberikan pada mahasiswa pendidikan tinggi, agar mereka dapat melakukan analisis-kritis dan mampu melakukan pembebasan akan nilai-nilai *ilahiyyah* dan *insaniyyah* berdasarkan kerangka normatif agama yang diyakininya, sehingga akan terbentuk jiwa sikap sabar, *tawadhu'*, *istiqomah*, *ikhlas*, dan *ridlo* dalam berjuang menegakkan ajaran agama.

Pemikiran tersebut relevan dengan apa yang telah diintrodusir oleh Al-Maududi (1983), yang menulis, pendidikan agama yang mengandung nilai-nilai *ilahiyyah* dan *insaniyyah* yang patut diajarkan di sekolah yang diambil dari sumber ajaran agama Islam antara lain adalah:

- a. Penghayatan akan makna iman dan takwa, agar anak mempunyai komitmen akan ajaran agamanya
- b. Sikap tolong-menolong dalam berbuat kebajikan, agar anak peka akan realitas sosial yang terjadi di sekelilingnya
- c. Sikap *khusnudhon* (baik sangka), agar nilai-nilai *ukhuwwah* tetap terjaga

- d. Menghargai diri dan orang lain, agar nilai-nilai *insaniyah* dapat bersemayam pada diri setiap anak
- e. Menerima tanggung jawab bagi perbuatan yang dilakukan sendiri, agar tumbuh kesadaran bahwa segala amal perbuatan selalu mempunyai efek dan *impact* dalam kehidupan
- f. Sikap positif terhadap guru dan teman sekelas, agar tumbuh sikap *tawadhu'* kepada orang yang lebih tua dan toleran kepada sesama
- g. Menjaga milik sendiri dan menjaga milik teman lain, agar tumbuh jiwa amanah pada diri anak
- h. Ketepatan waktu mengerjakan tugas pelajaran, agar tumbuh dan terbiasa sikap disiplin dalam menjalankan segala aktivitas kehidupan
- i. Bersikap jujur, adil, dan bijaksana kepada diri sendiri dan orang lain, agar tumbuh rasa *muruh*, *iffah*, dan *sajaah* pada diri anak.

Sikap-sikap tersebut hendaknya sudah ditanamkan kepada siswa sejak dini. Dengan ini diharapkan siswa dapat mempersepsi dunia berdasarkan kerangka normatif agama yang diyakininya.

## G. Penutup

Karena tantangan global sering menyebabkan budaya negatif di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat, maka GPAI harus membekali diri dengan seperangkap kemampuan agar mampu memberikan filter yang dapat digunakan untuk menyaring berbagai budaya tersebut. Keunggulan guru agama bukan terletak semata-mata pada pendidikan yang tinggi, tetapi pada keikhlasan, keridlaan dan komitmen dalam mengabdikan yang ditopang dengan profesionalisme dan wawasan yang luas. Apabila GPAI mampu memenuhi hal tersebut, saya yakin akan mampu melaksanakan panggilan suci dalam menyiapkan siswa menjadi unggul dalam intelektual, moral, dan spiritual. Untuk itu, semua tugas dan tanggung jawab yang diemban, meskipun dianggap gagal, janganlah dijadikan beban,

tetapi harus dinikmati sebagai panggilan suci semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT.

(Agus Maemun, M.Ag)

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. 1995. *Islam Transformatif*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al-Maududi, A.A.1983. *Islam sebagai Pandangan Hidup*. Terj. Iqbal, M.S. Bandung: Sinar Baru.
- Arifin, H.M. 1993. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ariyanto, T. 2002. *Mengakhiri Hipokrisi Pendidikan Agama*. Kompas. Senin, 12 Agustus 2002.
- Buchori, M. 1992. *Posisi dan Fungsi Pendidikan agama Islam dalam Kurikulum Perguruan Tinggi Umum*. Makalah Disajikan pada seminar Nasional di IKIP Malang, Tanggal 24 April 1992.
- Dimiyati, M. *Difusi Unsur Kebudayaan dan Problematika Pembelajaran Agama di Indonesia Dalam Era Teknologi Informasi*. Makalah Seminar HAB Depag RI ke 50, Tanggal 30 Desember 1995, di Fakultas Tarbiyah Malang IAIN Sunan Ampel.
- Gazalba, S. 1970. *Pendidikan Umat Islam, Masalah Terbesar Kurun Kini Menentukan Naib Umat*. Jakarta: Bharata.
- Kartono, ST. 2001. *Menabur Benih Keteladanan, Kumpulan Esei Seorang Pendidik*. Yogyakarta: KEPEL Press.
- Mudzhar, M.A. *Tantangan Pendidik dan Pemuka Agama di Masa Depan (Agama dalam Perubahan Sosial)*. Makalah Seminar HAB Depag Ke 47, Tanggal 26 Desember 1992, di Fakultas Tarbiyah Malang IAIN Sunan Ampel.
- Muhaimin. *Profil GPAI di Masa Depan*. Makalah Seminar HAB Depag Ke 47, Tanggal 26 Desember 1992, di Fakultas Tarbiyah Malang IAIN Sunan Ampel.



- Muhaimin, dkk. 1996. *Strategi Belajar Mengajar: Penerapannya dalam Pendidikan dan Pembelajaran Agama*, Surabaya: Citra Media.
- Muhaimin. 1999. *Etos Kerja GPAl di Sekolah*. Tulisan tidak diterbitkan. Malang: STAIN.
- Murphy, J.J. 1998. *A Critical, Philosophical Examination of Moral Reasoning and Moral Education in Current Educational Models and A Porposition for A New, Alternative, Comprehensive Moral Education Model in Elemntery Grades 4-6*. Ann Arbor: UMI Company.
- Neisbitt, J. & Aburdene, P. 1990. *Megatrens 2000*. London: Sidgwick.
- Rasdianah, A. Butir-butir Pengarahan Dirjen Binbaga Islam Pada Acara Pelatihan Peningkatan Wawasan Ilmu Pengetahuan dan Kependidikan Bagi Dosen Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum, Tanggal 11 September 1995, di Bandung.
- Sukron, M. *Pendidikan Budi Pekerti dalam Pengajaran Bahasa*. Dalam *Mimbar Pembangunan Agama*. No. 181/Rajab-Sya'ban 1422 H/Oktober 2001/Th. XVI. P. 38.
- Thowaf, S.M.. *Strategi Pendidikan Agama Pada Abad XXI. Makalah Diskusi FORKIP*. (Malang: FT IAIN Sunan Ampel, 1996).
- Tilaar, H.A.R. 1998. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21*. Magelang: Tera Indonesia.
- Zuraiq, M. 2001. *Pedoman Mendidik Anak Menjadi Shalih dan Shaliha*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang.

# BAB 11

## KEPEMIMPINAN DAN PENDIDIKAN AGAMA DI LINGKUNGAN INDUSTRI PENDIDIKAN

### A. Pendahuluan

Dalam kitab *Ihya* yang telah ditulis ratusan tahun lalu, Imam al-Ghazali menyatakan bahwa pergerakan perkembangan masyarakat dari kondisinya yang sangat primitif menjadi maju disebabkan oleh fakta bahwa spesies manusia pada dasarnya tidak siap untuk hidup di dunia secara apa adanya sebagaimana binatang. Berbeda dari hewan yang bisa hidup tanpa baju buatan, manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dirinya dari serangan udara dingin dan hawa panas yang sangat. Lebih dari sekadar hajat kepada pakaian, spesies manusia, berbeda dari spesies binatang, juga membutuhkan rumah tinggal. Lagi-lagi berbeda dari spesies binatang, manusia sebagai spesies juga tidak siap untuk mengkonsumsi secara mentah bahan-bahan makanan yang disediakan alam, kecuali soal buah-buahan.

Dari kebutuhan-kebutuhan manusia terhadap hal-hal di sekitar pakaian, perumahan dan konsumsi makanan, berkembanglah masyarakat manusia dari kondisinya yang primitif menjadi masyarakat yang maju. Kebutuhan terhadap pakaian pada faktanya telah melahirkan teknologi pertekstilan; dari yang paling sederhana berupa alat-alat tenun sampai dengan mesin-mesin super canggih di pabrik-pabrik tekstil modern. Industri tekstil diteruskan oleh industri pakaian jadi, industri *fashion*, industri periklanan, dan sebagainya. Keempat industri tekstil, pakaian jadi, *fashion* dan periklanan sendiri didahului oleh perkembangan-perkembangan di bidang perkebunan kapas; peternakan ulat sutra; industri alat-alat tenun dan mesin tekstil; industri obat-obat pewarna kain; dan industri pendidikan bagi tenaga-tenaga perkebunan, tenaga

peternakan, tenaga pabrik alat-alat tenun dan mesin tekstil, tenaga industri pakaian, tenaga desainer, tenaga peraga, tenaga periklanan dan sebagainya karena profesi-profesi tersebut membutuhkan pendidikan dan pelatihan.

Seperti halnya efek dari hajat manusia terhadap pakaian telah memungkinkan dunia menjadi berkembang sedemikian rupa, kebutuhan-kebutuhan manusia terhadap perumahan dan makanan juga telah melahirkan berbagai jenis industri yang perkembangannya tidak akan pernah lagi bisa dikendalikan apalagi dihentikan. Dalam ungkapan *Ihya* (Juz III, 222) disebutkan, *la yuftahu bab min abwab al-dunya illa wayanfatih bi sababih abwab akhar*. Hal demikian menjadi lebih ekstrem terutama setelah dunia dimenangi oleh kapitalisme global dan telah melewati revolusi teknologi di bidang informasi/komunikasi dan transportasi.

Dalam masyarakat industri dewasa ini, Daniel Bell (1973) bahkan menyebut masyarakat pasca industri, bisa dikatakan manusia menjadi sedemikian sibuk oleh urusan-urusan duniawinya sampai sering merasa kekurangan waktu. Kesibukan-kesibukan tersebut—pada satu sisi telah membuat dunia menjadi berkembang sedemikian maju, namun pada sisi lain—telah menyebabkan kebanyakan manusia menjadi lalai terhadap dirinya dan lalai terhadap Allah sebagai Tuhannya (*ansathum anfusahum wa khaliqahum*). Kelalaian manusia terhadap tujuan hidupnya yang hakiki dan terhadap Allah sebagai Tuhannya merangsang manusia melakukan tindakan negatif, kemungkar-kemungkar, baik dalam skala individu, kelompok, maupun sosial dan publik. Masyarakat dan negara menjadi rusak alias berada dalam suasana *jahiliyah* karena banyaknya manusia yang menampakkan sifat-sifat setan dan binatang buas, yaitu saling menjegal, saling melenyapkan, dan mencintai segala bentuk maksiat. Dalam situasi demikian, sebuah diskusi serius mengenai pendidikan agama untuk membangun bangsa menjadi menemukan kebermaknaannya.

## B. Pendidikan yang Terindustrikan

Tradisi pendidikan persekolahan (*the tradition of schooling*) di Indonesia bermula sejak bangsa-bangsa Eropa kolonialis seperti Spanyol, Portugis, dan Belanda memapankan pengaruh sosio-politik mereka di tanah jajahan yang sekarang disebut Indonesia. Sebelum itu, pendidikan di nusantara yang sekarang disebut Indonesia dilaksanakan sebagai pendidikan agama dan filsafat hidup di bawah asuhan para pemimpin agama seperti begawan, kiai, pendeta dan sebagainya (Soedijarto *et al.*, 1980). Kenyataan ini tidak mengherankan karena pendidikan persekolahan merupakan fenomena modern yang berasal usul di negara-negara Barat yang memiliki pengalaman revolusi industri.

Dewasa ini pendidikan dalam arti persekolahan bisa dibaca sebagai industri pendidikan. Disebut industri karena: (1) produksinya bersifat massal; (2) dikelola oleh satuan organisasi (3) menggunakan standar yang dibakukan; dan (4) diproses melalui mekanisme produksi yang menuntut adanya pembagian kerja berdasar spesialisasi, yang semuanya mengabdikan kepada dua esensi sistem industri, yakni efektivitas dan efisiensi dalam proses produksi. Pada dasarnya industrialisasi pendidikan di Indonesia dilakukan karena paling kurang dua hal.

*Pertama*, dalam kaitan dengan negara, pendidikan adalah termasuk *public goods* atau hak publik. Dalam arti ini, pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara untuk bisa menikmatinya. Di sini, negara berkewajiban menyediakan layanan pendidikan kepada seluruh warganya yang berbeda-beda secara etnis, agama, kultur dan wilayah geografis. Dengan jaringan birokrasi yang menggurita ke seluruh jengkal wilayah kekuasaannya, ditambah dengan daya dukung finansial dan otoritas hukum yang dimilikinya, negara adalah satu-satunya organisasi yang mampu mengemban amanat menyediakan layanan pendidikan yang menjadi hak setiap warga negara untuk menikmatinya. Di luar negara, maka tidak ada organisasi yang bisa memenuhi tuntutan amanah ini secara sempurna dan berkelanjutan.

*Kedua*, jika bagi warga negara pendidikan adalah *public goods*, maka bagi negara pendidikan adalah investasi. Yakni investasi di bidang pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing internasional dalam kancah pergaulan antar bangsa.

Karena dua hal ini, maka pendidikan nasional harus satu visi dan dilaksanakan secara massal (serempak secara nasional). Sifat massal pendidikan persekolahan menuntut adanya organisasi pelaksana yang otoritatif, maka berdirilah Departemen Diknas (dan Depag) dengan semua agen dan cabang organisasinya—di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan tingkat sekolah/madrasah dan perguruan tinggi. Selanjutnya karena pengelolannya yang sangat terorganisir tersebut, maka pendidikan persekolahan menjadi sangat terstandarisasi; mulai dari standar kurikulum, standar pelayanan, standar kualifikasi guru dan kepala sekolah/madrasah, standar jumlah siswa, standar besaran ruang kelas, dan sebagainya. Selanjutnya, standarisasi yang ketat menyebabkan terjadinya keharusan pembagian kerja yang berbasis spesialisasi. Misalnya, seorang guru hanya kualifaid untuk mengajar matematika, guru lain hanya kualifaid untuk mengajar bahasa Inggris, guru lainnya lagi hanya kualifaid untuk mengajar agama Islam, dan sebagainya dan seterusnya. Akhirnya, sifat terorganisir, standarisasi dan spesialisasi dalam pendidikan persekolahan ditegakkan untuk mengabdikan kepada dua esensi sistem industri, yaitu efektifitas dan efisiensi dalam proses produksi.

### ***Dari Industri Sentralistik Menuju KTSP***

Didorong oleh perasaan tanggung jawab untuk: (1) pemeratakan layanan pendidikan kepada setiap warga negara yang (a) secara geografis tersebar di banyak pulau besar dan kecil, (b) secara kultur berbeda adat istiadat, (c) secara etnis terdiri dari banyak suku, (d) secara agama menjadi penganut agama dan sistem kepercayaan yang tidak sama; dan (2) mengontrol mutu pendidikan sebagai investasi masa depan bangsa dan negara, pemerintah selama puluhan tahun melakukan sentralisasi industri pendidikan nasional.

Sentralisasi industri pendidikan nasional yang sangat ketat pada masa Orba telah menyebabkan semua kebijakan pendidikan lahir di Jakarta.

Dalam situasi seperti ini sekolah dan madrasah hanya menjadi implementator kebijakan dan operator mesin birokrasi pendidikan semata. Kreativitas sekolah dan madrasah menjadi tumpul karena tidak ada ruang kosong yang cukup, yang secara sengaja disediakan bagi sekolah dan madrasah untuk melakukan improvisasi dan kreativitas. Kalau toh ada sejumlah sekolah dan madrasah yang berhasil melakukan improvisasi dan kreativitas, maka hal itu terjadi karena keberanian dan kemampuan orang-orang yang ada di dalam sekolah dan madrasah tersebut untuk melakukan terobosan, bukan karena ketersediaan ruang untuk berimprovisasi dan berkreativitas. Dan itu biasanya terjadi pada sekolah dan madrasah partikelir atau swasta. Akibatnya, bisa dikatakan semua sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia menjadi dibuat sama dan seragam.

Wajah yang seragam dari sekolah/madrasah memudahkan pemerintah—yang dengan dalih pendidikan sebagai investasi—untuk merelevansikan pendidikan sekolah dengan rumusan masa depan nasional. Ketika wajah masa depan nasional, sesuai teori pembangunan Rostowrian, dideskripsikan sebagai bangsa modern yang sejahtera, ditandai dengan kemampuan konsumsi yang tinggi dan serba kecukupan, pendidikan sekolah kemudian menjadi instrumen pembangunanisme. Pendidikan pun menjadi tidak otonom, ia dipaksa mengabdikan kepada pembangunan ekonomi dan prasyarat tunggalnya yaitu penciptaan stabilitas politik.

Sejalan dengan pemikiran ini, dalam UU Sisdiknas pada saat itu, UU Nomor 2 tahun 1989, sekolah/madrasah ditugasi menghasilkan sumberdaya manusia terampil dan berilmu dalam pengertian sumber daya manusia ekonomi, berdedikasi dan loyal dalam pengertian politik. Dalam hal tugas pertama, menghasilkan SDM ekonomi, para perencana di BAPPENAS mengembangkan dua skenario. Pertama lembaga *think tank* tersebut memprediksi jenis dan jumlah tenaga kerja yang

dibutuhkan untuk mengawal pembangunan dan sistem ekonomi yang divisikan untuk masa mendatang. Setelah itu para perencana ini menentukan jenis pekerja yang dibutuhkan yang harus dihasilkan melalui pendidikan (Thomas & Postlethwaite, 1980). Di sini peran Departemen Pendidikan Nasional adalah bertanggungjawab menformulasi kurikulum nasional yang kondusif bagi menghasilkan sumber daya manusia ekonomi yang dibutuhkan pembangunan. Di samping itu, Departemen ini juga mengembangkan jalur pendidikan non-formal untuk menyediakan bagi para pekerja aktual pendidikan profesi dan keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan. Dalam cara ini, sekolah-sekolah di Indonesia dan lembaga-lembaga pendidikan non-formal melaksanakan kewajiban mereka memproduksi sumber daya manusia dalam pengertian ekonomi (Mutammam, 2003).

Dalam urusan menghasilkan warga negara yang berdedikasi dan loyal, baik bagi kesatuan dan persatuan nasional maupun bagi alasan-alasan ekonomi, sekolah-sekolah di Indonesia diminta untuk membekali para peserta didiknya dengan keterampilan berkomunikasi secara umum dan dengan komitmen yang kuat terhadap pemerintah (Thomas & Postlethwaite, 1980). Sekolah/madrasah kemudian ditugasi menyiapkan para peserta didiknya dengan: (1) keterampilan berkomunikasi, yakni komunikasi menggunakan bahasa nasional, bahasa Indonesia dan (2) kesetiaan pada pemerintah pusat bukan kesetiaan kepada kelompok etnis, agama dan kelas sosial tertentu dari masyarakat. Mengenai tugas pendidikan persekolahan di bidang ini, Departemen Pendidikan Nasional merumuskan kurikulum pendidikan sosial yang sangat nasionalistik. Arus utama industri pendidikan nasional kemudian berporos pada pendidikan sosial dan pendidikan eksakta. Konsekuensinya, pendidikan agama dikikis secara sangat drastis kalau tidak dihilangkan sama sekali dari industri pendidikan kita. Madrasah diubah menjadi sekolah (berciri khas agama Islam) dan kandungan pendidikan agama di sekolah mengecil menjadi hanya dua jam per minggu.

Desentralisasi pengelolaan pendidikan nasional memang tidak menghilangkan karakter industrialisasi dari sistem pendidikan nasional. Namun perubahan menjadi desentralisasi industri pendidikan nasional dibarengi oleh sejumlah perubahan. Sebut saja, standarisasi kurikulum yang menjadi lebih sederhana seperti terlihat dari mengerucutnya jumlah mata pelajaran yang diujikan nasional dan dari peng-KTSP-an. Perubahan juga terlihat dari penganggaran pendidikan yang dipatok menjadi 20% dari APBN dan APBD. Di sini, sekolah/madrasah memiliki ruang untuk berimprovisasi dan berkreasi.

Mengingat industri pendidikan kita selama ini, yang lebih berfokus pada pendidikan untuk kepentingan ekonomi, telah gagal menghasilkan manusia Indonesia yang memiliki integritas moral dan spiritual yang tinggi, maka sekolah/madrasah disarankan memanfaatkan ruang improvisasi dan kreasi pengelolaan institusinya dengan memperkuat pendidikan agama. Merebaknya tindak dan perilaku tidak bermoral, bahkan jahat, baik dalam level individu maupun kelompok dan lembaga, bila dirunut ke akar masalahnya, akan ditemukan bahwa penyebab dominannya adalah kegagalan pendidikan persekolahan yang selama ini meminggirkan pendidikan agama. Dalam konteks improvisasi penguatan kembali pendidikan agama di lingkungan pendidikan persekolahan, peran kepala sekolah sangat penting.

### C. Jebakan Institusionalisme

Karena pendidikan persekolahan bersifat sistemik, maka tiada satu pun sekolah/madrasah yang ada, yang bereksistensi di ruang hampa. Semua institusi pendidikan modern (sekolah/madrasah) melekat pada kancah organisasi (*organization field*), yakni sejumlah organisasi yang hidup berdampingan membentuk jaringan antar organisasi, saling mengambil dan memberi *resources*, dan kemudian membentuk komunitas organisasi. Hubungan antar organisasi dalam bentuk interaksi eksternal tersebut selanjutnya melahirkan apa yang oleh para teoritis organisasi seperti Kondra dan Hinings (1998)



disebut sebagai norma-norma institusional (*institutional norms*).

Norma-norma institusional biasanya berupa regulasi, standar-standar, sistem nilai dan kepercayaan, serta kultur dan harapan-harapan yang ditetapkan oleh pelbagai organisasi lain dalam kancah organisasi tadi. Karena norma-norma institusional tersebut dikembangkan bersama oleh para *external stakeholders* dalam suatu kancah organisasi, maka norma-norma institusional tersebut bagi individu organisasi adalah faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi proses-proses internal. Karena kuatnya pengaruh norma-norma institusional terhadap proses-proses internal individu organisasi, setiap individu organisasi akan selalu berupaya menyesuaikan diri dengan *institutional norms* tadi agar mendapat legitimasi dan dukungan (*legitimacy and support*) dari organisasi lain di dalam kancah organisasi yang sama.

*Legitimacy and support* kemudian menjadi tema utama setiap individu organisasi dalam mengembangkan pergaulan antar organisasi dalam suatu kancah organisasi. Suatu individu organisasi yang tidak *legitimate*, akan sangat sulit baginya untuk mengambil *resources* yang diperlukannya yang berada di organisasi lain sebagai *external stakeholders*. Organisasi semacam ini pun akan sangat sulit menawarkan *resources* yang dimilikinya. Intinya, suatu organisasi yang tidak *legitimate* akan kesulitan untuk mendapatkan *support* atau dukungan dari *stakeholders* luar.

Anggota kancah organisasi sekolah/madrasah kantor Diknas/Depag, Perguruan Tinggi, Sekolah/Madrasah di atasnya, Sekolah/Madrasah di bawahnya, Badan Akreditasi, Lembaga Sertifikasi, Bank-bank Negeri dan Swasta, Kantor Kas Negara, Pemkot/Pemda dan sebagainya. Sebagai bagian dari suatu kancah organisasi, sekolah/madrasah tidak bisa berlaku menyendiri baik pada tingkat praksis maupun pada tingkat preskriptif. Secara praksis sekolah/madrasah tidak bisa mengisolir diri, setiap gerak dan langkahnya, meski langkah-langkah internal organisasi sekalipun, tetap tidak bisa melepaskan diri dari regulasi, standar proses dan standar

produk, sistem kepercayaan dan sistem nilai serta harapan-harapan yang ditetapkan organisasi-organisasi lain yang berperan sebagai *external stakeholders* bagi sekolah/madrasah tersebut. Pada tingkat preskriptif, setiap sekolah/madrasah harus secara sadar, terstruktur dan terencana melekatkan diri dalam jejaring relasi kelembagaan karena ia membutuhkan legitimasi dan dukungan.

Karena sampai sekarang sekolah/madrasah meyakini bahwa dalam kancah organisasinya, "Jakarta" (baca: Diknas/Depag) adalah *the only focal organization* alias satu-satunya organisasi paling berkuasa dalam kancah organisasi, maka sekolah/madrasah meyakini bahwa hidup matinya ditentukan oleh *support* dari "Jakarta". Sebagai konsekuensi dari keimanan ini, selanjutnya semua pikiran, energi dan gerak langkah sekolah/madrasah senantiasa difokuskan sedemikian rupa agar terhitung *legitimate* di mata "Jakarta." Legitimasi tersebut diperlukan untuk mendapat *support* dalam segala bentuknya. Inilah jebakan institusional yang mematikan kreativitas dan memadamkan spirit untuk berimprovisasi. Maka tidak heran jika sekolah/madrasah selalu mengedepankan pikiran bagaimana mendapat status akreditasi A atau mendapat ISO Award, dan tidak pernah bersungguh-sungguh melakukan relasi sinergis dengan organisasi-organisasi lain di lingkungan kancah organisasinya.

Padahal melalui pengembangan relasi sinergis demikian, suatu sekolah/madrasah bakal mendapatkan dukungan luas dan kuat dalam beroperasi mengembangkan pendidikan. Dukungan luas dan kuat dari organisasi-organisasi yang ada dalam kancah organisasinya sesungguhnya merupakan (*intellectual, social, cultural, political, financial*) *capitals* bagi sekolah/madrasah berimprovisasi dan berkreasi mengembangkan institusinya menjadi institusi bermutu. Termasuk dalam hal ini adalah mutu yang ditandai dengan kuatnya pendidikan agama. Kembali, di sini ditekankan pentingnya faktor kepemimpinan kepala sekolah/madrasah.

#### D. *The Strong, Visionary, Servant Leadership*

Relasi sinergis antar-kelembagaan oleh sekolah/madrasah untuk berimprovisasi memperkuat pendidikan agama membutuhkan suatu jenis kepemimpinan PTAI yang handal (*strong leadership*). Kepemimpinan yang kuat adalah suatu jenis kepemimpinan yang secara internal *legitimate* dan karenanya *fully supported* sehingga mampu membangun individu sekolah/madrasah menjadi suatu entitas institusi pendidikan yang utuh dan kokoh. Sementara itu secara eksternal kepemimpinan yang demikian akan melahirkan pengakuan, penghormatan dan, sampai derajat tertentu, pengikutan. Untuk itu, perlu dikembangkan dalam kepemimpinan kepala sekolah/madrasah dengan karakteristik *the strong, visionary, servant leadership*.

Konsep *servant leadership* atau kepemimpinan yang melayani untuk pertama kali dikenalkan oleh Robert K Greenleaf (1977). Dalam tradisi fiqh siasah sesungguhnya telah lebih dahulu dikenal *al-imam huwa khadimul ummah*. Corak kepemimpinan yang melayani yang dikembangkan oleh sekolah/madrasah diyakini akan mampu menciptakan kohesivitas dan koherensi internal sekolah/madrasah dan memperkembangkan kultur kolaborasi di antara anggota masyarakat internal organisasinya. Sementara itu, konsep *visionary leadership* diperlukan agar kepala sekolah/madrasah mampu memimpin transformasi institusinya menjadi institusi yang kuat pendidikan agamanya, dan dalam pergaulan eksternal kelembagaan mampu mengkomunikasikan ide dan gagasan pentingnya sekolah/madrasah mengembangkan pendidikan agama. Mereka akan mampu menjabarkan kepada pemerintah, kalangan dunia usaha, dewan pendidikan, LSM pendidikan dan kalangan masyarakat luas lainnya bagaimana pendidikan agama harus dikembangkan.

#### E. Penutup

Pendidikan persekolahan (sekolah/madrasah) yang bersifat industri, secara umum telah gagal menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang memiliki integritas moral dan

spiritual yang tinggi. Hal ini terbaca dari berbagai kasus yang merusak bangsa dan negara, baik berskala individu, kelompok maupun ketembagaan. Kasus-kasus korupsi yang dilakukan orang-orang berpendidikan tinggi, misalnya, adalah contoh dari kenyataan ini. Sebab dominannya adalah gagalnya pendidikan sekolah mengembangkan pendidikan agama. Karena industri pendidikan bersifat sistemik, maka agar bisa menerobos jebakan instutusional, peran kepala sekolah/madrasah yang kuat, visioner dan melayani, menjadi penting untuk dikembangkan. Dengan demikian, menghidupkan kembali pendidikan agama yang kokoh di lingkungan pendidikan persekolahan menjadi mungkin untuk berhasil.

*(Mutammam, M.Ed.)*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hamid Al-Ghazali. t.t. *Ihya Ulumiddin* (Juz III). Dar Ihya al-Kutub Indunisia.
- Bell, Daniel. 1973. *The coming of post-industrial society: A venture in social forecasting*. New York: Basic Books.
- Greenleaf, R.K., The servant leadership. Dalam J. Thomas Wren 1995. *The Leader's Companion*. New York: The Free Press.
- Kondra, A. Z., & Hinings, C. R. 1998. Organizational Diversity and Change in Institutional Theory. *Organization Studies*. Diakses dari [http://www.findarticles.com/cf\\_0/m4339/19/65379676/p1/article.jhtml?term=institutional+theory](http://www.findarticles.com/cf_0/m4339/19/65379676/p1/article.jhtml?term=institutional+theory)
- Mutammam. 2003. *Leading School Transformation into Learning School*. Unpublished Thesis. Saskatchewan, Canada: The University of Saskatchewan.
- Soedijarto., Moeloe, L., Suryadi, Al., Machmud, D., Pangemanan, F., Tangyong, A.F., Nasoetion, N., & Thomas, R.M. 1980. Indonesia. Dalam T.N. Postlethwaite and R. M. Thomas (Eds.). *Schooling in the ASEAN Region: Indonesia, Malaysia, The Philippines, Singapore, and Thailand*. Oxford: Pergamon Press.
- Thomas, R. M., & Postlethwaite, T. N. 1980. Ways to vie schooling in ASEAN countries. Dalam T. N. Postlethwaite and R. M. Thomas, *Schooling in the ASEAN Region: Indonesia, Malaysia, The Philippines, Singapore and Thailand*. Oxford: Pergamon Press.

## **BAB 12**

# **TANTANGAN PENDIDIKAN NILAI BERBASIS PLURALITAS**

### **A. Pengantar**

Pada dasarnya, tanggung jawab pendidikan agama itu ada di pundak keluarga atau orang tua. Orang tua tidak boleh berpangku tangan. Memang ada kecenderungan orang tua melepas anaknya begitu saja karena orang tua tersebut sibuk atau alasan karier, lalu menyerahkannya pada sekolah. Mestinya pendidikan yang berkait langsung dengan masalah nilai-nilai dalam hidup, agama termasuk di sini, menjadi tanggung jawab keluarga atau orang tua.

Lingkup keluarga yang bertanggungjawab terhadap pendidikan agama, termasuk pendidikan nilai, bisa saja maknanya diperluas, bukan hanya sebatas keluarga kecil, tapi meliputi komunitas non-sekolah formal, seperti masjid, surau, majlis ta'lim, gereja, dan lain-lain. Dan memang pendidikan nilai biasanya lebih banyak bisa ditempa pada komunitas termasuk tradisi masyarakat, tradisi keluarga, tradisi keberagamaan seperti shalat bersama di dalam keluarga dan lain-lain.

Namun demikian, UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 pasal 37 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi harus memuat pendidikan agama.<sup>1</sup> Maka seakan pendidikan agama itu lalu menjadi kewajiban negara, dalam hal ini lembaga pendidikan sekolah formal, bukan lagi kewajiban keluarga. Namun yang harus difahami bersama adalah bahwa pendidikan, termasuk di dalamnya adalah pendidikan agama, adalah tanggung jawab bersama. Dalam konsep Rencana Pembangunan Lima Tahun

---

1. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Delphi Publishing House, 2003), hal. 28.

(REPELITA) yang lalu juga ditegaskan bahwa pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian keluarga tidak boleh melepas kewajibannya begitu saja, karena pendidikan keluargalah yang akan menjadi pondasi bagi pendidikan-pendidikan kelanjutannya.<sup>2</sup>

Namun realita juga menunjukkan bahwa tidak semua orang tua atau keluarga mampu mendidik anaknya dalam hal pendidikan agama, baik karena waktu, kesempatan maupun karena kemampuannya sehingga mereka lebih memilih menyerahkan secara total pendidikan agama anaknya kepada sekolah formal. Tapi masalahnya, di beberapa sekolah tidak tersedia fasilitas dan sumber daya pendidik yang cukup untuk melaksanakan secara benar dan tepat pendidikan agama itu. Di luar itu, beberapa sekolah juga hanya melaksanakan pendidikan agama tertentu saja, sehingga sekolah tersebut biasanya memberi pendidikan alternatif berupa pelajaran etika, nilai atau budi pekerti.

Selain masalah minimalnya fasilitas pendidikan agama dan sumber daya pendidik yang kapabel dan handal yang dapat melakukan transformasi dan internalisasi misi pendidikan nilai melalui pendidikan agama, secara khusus Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah-sekolah formal juga masih terjebak pada tiga masalah besar, yakni: 1) pendidikan agama Islam bersifat formalis; 2) ritualis dan eksklusif; dan 3) masih jauh dari misi pendidikan nilai.

Tulisan ini dengan menggunakan pendekatan sosiologis akan mengurai tiga problem Pendidikan Agama Islam (PAI) tersebut di atas, baik dari segi isi maupun metode pembelajarannya.

## B. Problem Materi PAI di Sekolah

Pendidikan agama selama ini direduksi sekadar penguasaan teknis ritual (*ibadah mahdhah*) dan aspek kognitif

---

2. Fuad Hasan, *Dasar-dasar Kependidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal. 570.

agama. Hal ini nampak sekali pada pelajaran fikih, dimana dalam proses pembelajarannya jarang sekali dikaitkan antara nilai substansi peribadatan transendental dan kemanusiaan. Pendidikan agama juga sering mengabaikan desain utama agama itu sendiri, yakni kepasrahan dan ketundukan sebagai modal awal pluralisme beragama.<sup>3</sup>

Realitas selama ini menunjukkan, pendidikan agama cenderung berlebihan pada sisi formalisme, ritualisme dan eksklusivisme. Kecenderungan ini berdampak kurang bagus bagi kehidupan beragama itu sendiri. Bukti kecenderungan eksklusivistik dalam pendidikan agama adalah adanya pengajaran agama yang meninggikan satu pihak atas pihak lain. Pembelajaran agama juga hanya dilakukan untuk pemenuhan standar formal pencapaian materi pokok yang telah dirancang. Ini juga yang menjadi kecenderungan para guru agama. Hal ini disebabkan karena mereka tidak terlatih memahami persoalan pluralisme.

Jika buku-buku tentang Pendidikan Agama Islam (PAI) dicermati, di dalamnya terdapat empat komponen materi, yakni: 1) Al-Qur'an-Hadits; 2) Fikih; 3) Sejarah Kebudayaan Islam; dan 4) Aqidah-Akhlak. Materi Fikih kelas VII berisi tentang tata cara bersuci (*thoharoh*), shalat wajib, tata cara shalat wajib berjamaah dan sendirian, shalat jamak dan qoshor. Materi Fikih kelas VIII mencakup macam dan tata cara shalat sunah, zakat fitrah dan zakat harta, macam-macam binatang yang halal dan yang haram. Materi Fikih kelas IX mencakup aqiqah dan qurban, haji dan umroh.<sup>4</sup> Materi-materi fikih di kelas XI juga masih terlihat ritualis, misalnya saja hanya menekankan pada teknik perawatan jenazah, rukun khutbah, perbedaan khutbah jumah dengan dakwah.<sup>5</sup> Jelas sekali,

- 
3. Ullil Abshor Abdallah dan Budi Munawar Rahman, *Dialog Pendidikan Pluralisme*, [http://. Islamlib.com](http://Islamlib.com)
  4. Muttahim,dkk, *Pendidikan Agama Islam kelas VII, VIII, IX* (Jakarta:Yudhistira,2007), hal. 1-167
  5. Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam kelas XI* (Jakarta:Ertangga, 2006), hal. 152-171



sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa materi fikih masih cenderung ritualis.

Materi Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) di kelas VII mencakup sejarah kelahiran dan kehidupan Nabi Muhammad SAW, misi dan perjuangan beliau. Materi SKI kelas VIII juga masih menjelaskan kelanjutan dari sejarah Nabi Muhammad SAW dan perjuangannya. Sedangkan pada bagian akhir, menjelaskan sejarah ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abasiyah (masa Islam) tanpa melihat sejarah keilmuan dari awal hingga sampainya pada masa Daulah Abasiyah. Sedangkan materi SKI di kelas IX lebih menekankan pada sejarah Islam di Indonesia. Isinya juga hanya fakta tempat, tanggal dan tahun serta nama-nama orang dan lain sebagainya, belum nampak nilai penyadaran pluralitasnya. Kajian sejarah pada satuan pendidikan formal tersebut juga masih kelihatan sekali bersifat eksklusif. Artinya, pengajaran sejarah juga tidak secara jelas keterkaitannya dengan sejarah kebudayaan sebelum Islam datang yang di dalamnya kaya mengenai makna pluralitas.

Karena pendidikan agama di sekolah formal yang demikian, maka pada gilirannya karakter para siswa ketika hidup di masyarakat juga menjadi eksklusif, formalis dan ritualis. Atau dalam bahasa yang sederhana mereka menjadi orang yang shalih ritual tetapi kurang shalih sosial. Padahal mestinya keshalihan ritual itu juga harus disandingkan dengan keshalihan sosial sejalan dengan nilai-nilai universal kemanusiaan.

Demikian juga untuk materi PAI bidang akhlak belum mencapai target pendidikan nilai. Pendidikan nilai/budi pekerti, selain menyangkut tata pergaulan, mestinya juga berkaitan dengan nilai-nilai universal kemanusiaan. Pengajaran agama yang sudah diberikan kepada peserta didik sejak dari SD sampai SMU bahkan sampai Perguruan Tinggi mestinya juga harus erat kaitannya dengan realitas dan nilai universal kemanusiaan. Pendidikan bukan hanya sebagai ajang *transfer of knowledge*, akan tetapi bagaimana ilmu pengetahuan

dijadikan sebagai sarana untuk mendidik manusia agar mampu membaca realitas sosial.<sup>6</sup>

Materi akhlak, yang merupakan bagian dari Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah formal, mestinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti rasa aman dan nyaman. Dalam bahasa yang berbeda, Cott menyatakan bahwa agama, termasuk di dalamnya pendidikan agama, mesti bisa beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bervariasi.<sup>7</sup> Tetapi proses pendidikan di lembaga pendidikan formal selama ini (termasuk di dalamnya adalah pendidikan agama Islam) masih juga membuahakan siswa-siswa yang hobinya tawuran, kurang menghargai tatanan nilai dan lain-lain. Dalam hal ini pasti ada sesuatu yang salah dengan pendidikan, termasuk pendidikan agama. Hal ini mutlak membutuhkan perbaikan agar pendidikan agama menjadi efektif dan menghasilkan perubahan sikap pada anak didik, sehingga menjadi manusia yang toleran dan berbudi pekerti baik. Dan pada gilirannya, budi pekerti inheren dalam pendidikan agama itu sendiri.

Pendidikan akhlak/akidah akhlak yang merupakan bagian dari pendidikan agama Islam (PAI) masih juga mengalami krisis pendidikan nilai. Memang ada pengajaran akhlak, tapi lebih bersifat kognitif saja. Dalam bahasa yang lebih sederhana, pembelajaran akhlak lebih menekankan kepada “ilmu akhlak” bukan akhlaknya. Soal bagaimana merangsang dan mendorong siswa untuk terlibat dalam pemahaman agama, dan secara afektif membuahakan transformasi diri dalam tataran nilai, rasanya sangat kurang dan sedikit sekali ditemukan di sekolah formal. Sebagaimana jika kita cermati isi buku PAI kelas VII bab 2, bab 3, bab 4, bab 10, bab 11, dan bab 14 misalnya, di sana masih menekankan pada ilmu akhlaknya.<sup>8</sup>

- 
6. Beni Setiawan, *Agenda Pendidikan Nasional*, (Jogjakarta: Arruzz Media, 2008)
  7. Ahmad Fedyani (terj), *Agama dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*, (Jakarta: Prenada Media, 1995)
  8. Multahim, dkk, *Pendidikan Agama Islam kelas VII*, (Jakarta: Yudhistira, 2007), hal. 11-197

Mestinya, pembelajaran akhlak bukan hanya terjebak pada penguasaan materi ilmu akhlak. Hal ini akan sangat terkait dengan strategi dan metode pembelajarannya. Salah satu dari metode pembelajaran akhlak untuk dapat merasuk nilai akhlak tersebut adalah dengan cara mawas diri atau *muhasabah* dan mengkaitkan nilai-nilai akhlak dengan diri peserta didik.

Salah satu contoh yang penulis sampaikan dalam tulisan ini adalah tentang bagaimana cara menginternalisasi nilai tentang adanya Allah (iman kepada Allah) dan mengkaitkannya dengan struktur anggota badan peserta didik. Contoh: murid diminta untuk memperhatikan telapak tangan kanannya lalu tunjukkan tulisan arab *Allah*. Suruh anak mencermati bahwa jari kelingking mengisyaratkan huruf *Alif*, jari manis mengisyaratkan huruf *Lam*, jari tengah mengisyaratkan huruf *Lam*, jari telunjuk dan ibu jari mengisyaratkan huruf *Ha'*. Setelah itu lalu guru menjelaskan bahwa sesungguhnya anggota badan kita rindu kepada Allah dan menyatu dengan Allah. Kenapa hati kita malah tidak rindu kepadaNya? Kalau kita tidak mendekat dengan-Nya sesungguhnya kita adalah orang yang membohongi diri kita sendiri dan berbuat dzalim kepada badan kita sendiri. Oleh karena itu, marilah kita dekatkan diri kita kepada Allah dalam segala gerak kita dengan melakukan perbuatan yang diridloi-Nya.

Contoh lain adalah bagaimana cara mempraktikkan pembelajaran yang mampu menginternalisasikan nilai-nilai *Asmaul Husna* kepada para murid. Misalnya, murid diminta untuk memperhatikan telapak tangan kiri, lalu tunjukkan bahwa garis telapaknya menggambarkan angka 81, sedangkan garis telapak tangan kanan mengisyaratkan angka arab 18. Jika keduanya dijumlahkan  $81+18=99$ . Maknanya, sembilan puluh sembilan adalah nama-nama Allah yang disebut *Asmaul Husna*. Pelajaran yang harus dipahami oleh siswa adalah bahwa telapak tangan kita ini harus digunakan untuk hal-hal yang baik sebagaimana sifat-sifat Allah yang baik juga. Kalau kita menggunakan tangan kita untuk hal-hal yang tidak baik, sesungguhnya kita telah mengotori nama-nama Allah yang

terukir pada telapak tangan kita, dan tentu Allah akan murka kepada kita. Metode yang demikian ini adalah fasional sekaligus berfungsi untuk membangun peningkatan nilai-nilai moral.<sup>9</sup>

Belakangan ini ada fenomena yang menarik, dimana sekolah-sekolah alternatif sudah mulai lebih menekankan sisi nilai agama itu sendiri. Sekolah-sekolah yang berorientasi menjadi Sekolah Berstandar Internasional (SBI) biasanya menekankan pada pendidikan budi pekerti maupun peningkatan akhlak mulia. Dalam pendidikan budi pekerti, nilai-nilai yang ditekankan seperti masalah integritas, *the law of giving*, perasaan memberi yang berdampak pada kehidupan. Pendidikan ini lebih menekankan pada nilai-nilai kehidupan itu sendiri, bukan sisi formalistik keagamaan.

Penulis perlu menyebutkan sekedar sebagai contoh, SMP Negeri 2 Pekalongan misalnya, yang sedang dalam rintisan menuju sekolah berstandar internasional juga menekankan peningkatan budi pekerti. Secara khusus Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah tersebut juga tidak menyamakan diri dalam melakukan inovasi kurikulumnya. Guru PAI tidak menyusun kurikulum PAI yang berstandar internasional, tetapi penekanan PAI di sekolah tersebut adalah peningkatan budi pekerti bagi peserta didiknya.<sup>10</sup>

### C. Problem Pendekatan dan Metodologi PAI serta Alternatif Solusinya

Implementasi pendekatan dan strategi pembelajaran pendidikan agama dalam kaitannya pendidikan nilai yang dilakukan selama ini, mungkin perlu ditinjau kembali. Perlu inovasi-inovasi baru dalam pendekatan dan metode pembelajaran agama. Sekedar menyebut contoh, apa yang dilakukan di sekolah-sekolah Madania (TK, SD, SMP dan SMU

- 
9. Arif Arya Setyaki, *Aritmatika Jari, Metode Asmaul Husna Aritmatik (AHA)* (Jakarta: Khalifa, 2008), hal. 70-71
  10. Khoirun Nisa', *Posisi PAI pada Sekolah Berstandar Internasional, Skripsi Sarjana Pendidikan Islam* (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan, 2009) hal. 49.

milik Paramadina) adalah sebuah upaya baru model pembelajaran agama yang disandingkan dengan konsep pendidikan nilai berbasis pluralisme. Metode yang digunakan di sekolah-sekolah tersebut adalah metode belajar aktif (*active learning*) sejak SD hingga SMA.

Setiap anak biasanya mendapatkan pendidikan agama sesuai agamanya masing-masing. Model pembelajarannya juga ada sistem *moving class*: ketika pelajaran agama, mereka pindah ke kelas agama masing-masing. Ada bermacam-macam kelas agama terpisah-pisah seperti *Christian class*, *Catholic class*, *Islamic class*, dan lain-lain. Pelaksanaan pendidikan yang demikian ini sebenarnya adalah implementasi dari UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 pasal 12 ayat (1) a.

Sekolah Madania juga mengadakan "*Spiritual Fair*" atau "*Religion Fair*" atau pekan raya agama. Setiap kelas-kelas agama akan berhias diri, simbol-simbol agama juga ditampilkan, dan setiap anak akan datang berkunjung, melihat, dan mungkin akan saling bertanya kepada sesama siswa atau bertanya pada guru agama tentang apa sih arti simbol pohon Natal, atau apa arti *tarawih*, *witir*, *ta'jil* kurma, *zakat fitrah* dan lain-lain. Di sana juga dijumpai Budha yang sedang melakukan meditasi, tampilan Ka'bah dan lain-lain. Semua anak bisa melihat simbol-simbol keagamaan yang sangat ekspresif dan penuh nilai kesakralan. Semua itu akan menjadi pengalaman tersendiri bagi anak-anak.

Sikap yang lahir dari anak didik sebagai hasil dari implementasi metode pembelajaran dan penggunaan media tersebut adalah munculnya sikap anak yang terbuka dan saling menghargai satu sama lain, antara pemeluk agama satu dengan pemeluk agama lain. Sikap toleransi terhadap sesama teman untuk melakukan praktik-praktik ibadah sesuai dengan agama masing-masing juga tumbuh dari model pendidikan seperti itu.

Kalau dilihat dari akar sejarah, toleransi dalam pendidikan itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw. Rasulullah juga pernah memanfaatkan para tawanan perang Badar yang mampu dalam hal baca tulis untuk mengajari baca tulis sepuluh orang Islam yang belum bisa baca tulis sebagai

syarat untuk pembebasan dirinya.<sup>11</sup> Tindakan Rasulullah tersebut juga tidak dikritik oleh para sahabat atau siapa pun, sekalipun tawanan perang tersebut bukan muslim. Artinya ada toleransi pada waktu itu.

Sikap toleransi itu harus ditanamkan sejak sedini mungkin, sejak usia SD/MI atau bahkan sejak PAUD. Apalagi siswa-siswa pada jenjang pendidikan tersebut dalam ujudnya adalah anak-anak yang masih *fresh* pikirannya dan belum dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang suka mengklaim orang lain sebagai kafir, musyrik, bi'dah, dan lain-lain, maka mereka akan bisa menerima temannya dan bergaul bersamanya dengan baik, sekalipun di antara mereka terdapat perbedaan agama dan keyakinan. Strategi pembelajaran agama yang tidak eksklusif sebenarnya dapat dimulai dari hal yang sederhana, misalnya dimulai, dengan menghormati orang yang berbeda agama dan tidak menghina mereka. Dari situlah dimulai langkah pertama untuk bisa menerima *friendship* dan *partnership* dalam suatu kenyataan bernama sekolah.

Model pembelajaran yang demikian, sangat penting dilakukan, terlebih lagi terkait dengan keragaman yang ada di Indonesia, termasuk di dalamnya keragaman agama. Keragaman tersebut akan menjadi masalah jika tidak diikat oleh penyatuan. Oleh karena itu, konvergensi nasional merupakan langkah yang tepat dalam hal ini dan harus mulai ditanam suburkan lewat proses pendidikan. Konvergensi yang dimaksud adalah penyatuan keanekaragaman kebudayaan dalam sebuah kebudayaan nasional dan penyatuan keanekaragaman agama dalam sebuah ikatan toleransi antar umat beragama.

Pendidikan harus menyadari bahwa agama merupakan masalah yang sangat sensitif bagi masyarakat bangsa, karena agama merupakan identitas suci dibandingkan identitas sosial lainnya. Ketika terjadi krisis, maka agama akan menjadi simbol pemersatu di satu sisi, sekalipun di sisi lain kadang agama

---

11. Musyriyah Sunanto, *Sejarah Islam Klasik*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 16. Baca pula: Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam*, (Cairo: Maktabah Annahdah al Missriyah, 1979), hal. 506.

menjadi faktor pemecah belah. Kerusuhan sosial di Poso, Sulawesi Tengah pada tahun 2000 sangat bernuansa agama meskipun tidak semua kasus tersebut dipicu oleh persoalan yang berhubungan dengan agama.<sup>12</sup>

Hanya saja, kebanyakan lembaga pendidikan formal yang bernama sekolah/madrasah belum melangkah untuk melakukan strategi dan langkah pembelajaran sebagaimana yang dilakukan di Madania. Ada berbagai ragam alasan, seperti seakan mencampur-adukkan ajaran agama satu dengan yang lain, kekhawatiran bagi anak didik kaitannya dengan agama yang dipegangnya hingga fanatisme simbol atau bahkan pengharaman terhadap simbol lain yang tidak sejalan dengan agama yang dianutnya. Kebanyakan sekolah belum dapat memandang bahwa *Islamic Symbol, Cristian Symbol, Catholic Symbol* hanyalah sekedar media untuk menggugah kesadaran toleransi yang semestinya menjangkau lintas agama dalam realitas plural yang mesti ditemui dalam kenyataan.

Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang pluralis, mestinya juga harus mau dan mencoba untuk melakukan kerja sama dengan guru pendidikan agama non Islam untuk mengaplikasikan teknik-teknik pembelajaran agama dalam kerangka pluralitas, sehingga tidak terkesan eksklusif. Hal itu penting dalam rangka menanamkan jiwa yang demokratis, toleran dan saling menghargai antar siswa yang berbeda agama dan keyakinannya. Semua itu harus diupayakan lewat jalur pendidikan.

Demokrasi tidak hanya memerlukan hukum, lembaga atau peraturan yang mantap, tetapi tak kalah pentingnya adalah memiliki kebesaran hati, mau bekerjasama dengan kelompok lain untuk mencapai tujuan demi kesejahteraan bersama. Dalam bahasa yang lain adalah mampu mengombinasikan semangat untuk menegakkan pendiriannya

---

12. Ahmad Syaf'i Mufid, *Dialog Agama dan Kebangsaan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2001), hal. 27). Baca pula: Harsja W. Bachtiar, *Integrasi Nasional Indonesia dalam Wawasan Kebangsaan Indonesia* (Jakarta: Bakom PKB Pusat, 1987), hal. 10

dengan suatu kesadaran bersama demi kepentingan bersama.<sup>13</sup> Untuk mendidik warga masyarakat yang baik, demokratis, toleran dan berwawasan plural, perlu pendidikan yang demokratis juga dalam rangka menciptakan warga negara yang kritis, toleran dan berwawasan kebangsaan yang plural.<sup>14</sup>

Metodologi pembelajaran akhlak di sekolah-sekolah formal juga masih terjebak pada penggunaan metode-metode yang mengarah pada penguasaan kognitif agama. Hal ini menyebabkan posisi akhlak sekedar sebagai ilmu yang dikuasai oleh peserta didik secara kognitif. Padahal semestinya, esensi dari pendidikan akhlak adalah bagaimana internalisasi nilai-nilai akhlak tersebut mampu merasuk pada diri anak dan bagaimana siswa bermoral dalam berperilaku. Memang dibutuhkan inovasi pendekatan-pendekatan dan metode-metode pembelajaran akhlak kaitannya dengan pendidikan nilai. Mengacu pada apa yang disampaikan oleh Teuku Ramli, terdapat lima pendekatan dalam pendidikan nilai. Kelima pendekatan tersebut adalah:

1. Pendekatan penanaman nilai
2. Pendekatan perkembangan kognitif
3. Pendekatan analisis nilai
4. Pendekatan klarifikasi nilai
5. Pendekatan pembelajaran berbuat.<sup>15</sup>

Dalam tulisan ini, penulis hanya akan memaparkan satu pendekatan saja, yakni pendekatan pembelajaran berbuat (*Action Learning Approach*). Menurut Teuku Zakaria, mengutip Elias (1989), Hersh, (1980) dan Superka (1976), mengatakan bahwa pendekatan pembelajaran berbuat diprakarsai Newmann, dengan memberikan perhatian mendalam pada usaha melibatkan siswa untuk melakukan perubahan-perubahan sosial dalam realita kehidupannya. Pendekatan pembelajaran berbuat (*Action Learning Approach*) memberi penekanan pada

- 
13. Firdaus M . Yunus dan YB. Mangun Wijaya, *Pendidikan Berbasis Realitas Sosial -Paulo Freire-*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2007), h. 92.
  14. Zamroni, *Pendidikan Untuk Demokrasi*, (Yogyakarta: Bigraf Publising: 2001), h. 17.
  15. Teuku Ramli Zakaria, *Pendekatan-Pendekatan Dalam Pendidikan Nilai*, [www.Pdk.go.id/balitbang](http://www.Pdk.go.id/balitbang)



usaha memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan perbuatan-perbuatan moral, baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama dalam suatu kelompok.

Teuku Ramli Zakaria, dengan mengutip Superka, mengatakan bahwa ada dua tujuan utama pendidikan nilai berdasarkan kepada pendekatan ini.

*Pertama*, memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan perbuatan moral, baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama, berdasarkan nilai-nilai mereka sendiri. Jika dikaitkan dengan materi Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah formal (SMP), khususnya dalam bidang akhlak, mungkin secara praktis dapat dibimbing untuk melakukan aktivitas yang di dalamnya akan tercermin sifat *qonaah*. Hal ini perlu dilakukan secara implementatif. Namun sayangnya, pembelajaran sifat *qonaah* terbut juga masih lebih menekankan sisi kognitif, seperti siswa diminta hafal contoh-contoh perilaku *qonaah*, menjawab pertanyaan/soal bagaimana sikap kamu jika kamu berada di tengah kerumunan teman-temanmu yang lebih kaya, dan lain-lain. Secara praktis-metodologis dalam pembelajaran tema tersebut tidak dipraktikkan oleh siswa, sehingga tidak bisa tertanam nilai *qonaah*-nya dan tidak tercermin adanya pendekatan pembelajaran berbuat (*Action Learning Approach*).

*Kedua*, mendorong siswa untuk melihat diri mereka sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam pergaulan dengan sesama, yang memiliki kebebasan sepenuhnya, melainkan sebagai warga dari suatu masyarakat, yang harus mengambil bagian dalam suatu proses demokrasi. Kesadaran siswa untuk melihat dirinya bahwa dirinya adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial ini adalah langkah penting untuk menanamkan nilai-nilai hormat kepada orang lain dan toleran kepada orang lain dalam bingkai demokrasi serta dalam realita pluralis. Metode-metode lain yang dapat digunakan juga adalah proyek-proyek tertentu untuk dilakukan di sekolah atau dalam masyarakat, dan praktik-praktik kerja sama, tolong-menolong (*ta'awun*) dalam berorganisasi atau berhubungan antara sesama.

Sedangkan Tatik Rejeki menyatakan bahwa termasuk di dalam ranah pendidikan nilai adalah nilai-nilai yang memberi (*Values of Giving*) yang meliputi kesetiaan, sifat dapat dipercaya, sikap menghormati hak orang lain, memiliki sifat empati dan simpati, kasih sayang, ramah, dan perlakuan yang adil. Agar pembelajaran semua itu dapat berhasil, dibutuhkan beberapa metode pembelajaran yang tepat. Hal yang paling utama adalah bahwa guru harus menjadi pelaku utama pada nilai, atau dalam bahasa lain guru harus menjadi teladan baik nilai-nilai nurani (*Values of Being*) maupun nilai-nilai memberi (*Values of Giving*).

Guru harus menunjukkan kepada peserta didiknya bahwa bapak dan ibu guru menjunjung tinggi nilai-nilai itu. Sebetulnya ini termasuk teknik keteladanan dan pembiasaan sebagaimana disebut oleh Ramayulis.<sup>16</sup> Ramayulis menyebutnya sebagai teknik karena sifatnya yang lebih spesifik. Sedangkan Ali Ahmad Madkur menyebutnya sbagai metode (*thoriqoh*). Dan metode keteladanan ini dipandang sebagai metode yang paling efektif menurutnya.<sup>17</sup> Selanjutnya sekolah sebagai sub kontraktor pendidikan nilai mempunyai tanggung jawab secara sistemik untuk melanjutkan penanaman pendidikan nilai.

Tatik Rejeki juga menyatakan bahwa kegagalan guru dalam menanamkan pendidikan nilai bisa jadi karena metode yang kita gunakan kurang efisien atau membosankan. Untuk itu sudah saatnya mereka melakukan inovasi metode pembelajaran nilai agar tujuan akan tercapai. Terkait penggunaan metode pembelajaran yang membosankan, tatik mencoba menyodorkan beberapa metode pembelajaran nilai seabagai berikut:

1. Metode diskusi atau *problem solving* dimana anak kita dilibatkan untuk mengemukakan ide dalam mencari solusi masalah yang sering mereka alami. Sementara guru membantu mereka mengembangkan minat dan kemampuan mereka sendiri untuk berbicara. Nilai-nilai yang kita

16. Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Padang: Kalam Mulia, 1999), hal. 170

17. Ali Ahmad Madkur, *Manhaj al-Tarbiyah Fi al \_Tashowwur al-Islam*, (Kairo: Dar al Fikr, 2002), hal. 323

ajarkan perlahan-lahan namun pasti akan menular kepada mereka apabila kita sering berinteraksi.

2. Metode permainan (*game*) skenario, kita betul-betul menempatkan diri anak dalam situasi yang memperlihatkan konsekuensi serta hubungan sebab akibat dalam berbagai pilihan atau perilaku. Tampilan *game* tersebut harus permainan-permainan yang mengandung nilai-nilai yang dapat diresapi anak hingga anak akan menentukan sikapnya terkait dengan tampilan tersebut. Sebetulnya metode ini sangat terkait dengan metode analisis nilai sebagaimana disebut oleh T. Ramli Zakaria.
3. Metode penghargaan dan pujian yang positif, perhatian positif yang kita berikan saat seorang anak menunjukkan citra diri (*self-image*) dan individualitasnya dapat membangun rasa percaya dirinya dan hal ini diperlukan untuk mendapatkan keandalan diri (*self-Reliance*). Pujilah mereka saat menunjukkan tindakan pengembangan nilai karena akan membuat mereka bangga dan merasa dapat diandalkan.
4. Metode pembiasaan pengucapan pepatah-pepatah atau kata-kata bijak, untuk menanamkan nilai moral yang kuat ke dalam benak peserta didik.
5. Metode *out bond*. kegiatan *out bond* sangat menyenangkan bagi siswa, karena *out bond* bisa menumbuhkan keberanian dalam menghadapi tantangan, menentukan keputusan, dan juga melatih kerja sama.<sup>18</sup>

Perlu digarisbawahi bahwa metode-metode alternatif tersebut dalam implementasinya juga harus didekatkan dengan tema pluralitas. Dengan demikian, metode diskusi misalnya, dalam mendiskusikan persoalan nilai-nilai kehidupan juga bukan tema-tema yang eksklusif saja yang di angkat, tetapi temanya juga inklusif. Begitu juga metode penggunaan pepatah atau kata-kata bijak juga bukan pepatah yang diskriminatif, rasis, fanatik atau apapun yang jauh dari nilai pluralitas.

---

18. Tatik Rejeki, *Konsep Pendidikan Nilai yang Menyenangkan*, makalah dipresentasikan pada Fak. Pendidikan UIN Malang, 26 Februari 2008

Dengan demikian pencapaian tujuan dari pendidikan nilai yang termasuk dalam *Values of Giving* juga tidak diskriminatif. Munculnya sikap menghormati hak orang lain juga termasuk di dalamnya hak dalam bingkai pluralitas agama, budaya dan lain-lain. Begitu juga munculnya sikap empati tidak tersekat hanya sebatas kepada orang yang segolongan, satu ras, satu aliran, satu agama dan lain-lain, tetapi lebih jauh dari itu adalah sikap empati yang tanpa batas dan mengedepankan realitas pluralitas.

#### D. Problem Guru dan Sistem Pendidikan

Memang sudah cukup banyak dialog soal pluralisme agama yang kita lakukan, tapi guru-guru agama tidak dilibatkan secara langsung dan tidak dibidik sebagai target langsung, padahal mereka adalah agen utama sebagai ujung tombak penyampai ide-ide pluralisme kepada siswanya. Kondisi semacam ini, selain disebabkan oleh guru agama itu sendiri, juga karena kebijakan sistem yang berjalan pada lembaga pendidikan juga belum mendukung kepada isu-isu pluralis. Oleh karena itu, guru-guru agama sekarang harus membaca buku tentang pluralisme sebelum buku ajar ada di sekolah bagi muridnya. Itu adalah prasyarat dasar sebelum buku ajar ada. Karena itu, guru-guru harus mulai terlibat dalam *meng-up date* pikirannya sendiri.

Guru agama juga harus menyadari bahwa pengajaran agama jangan hanya menekankan sisi-sisi formalistik seperti ibadah misalnya, tetapi harus mengkorelasikan engan penanaman nilai-nilai kemanusiaan dan pluralitas. Sudah menjadi sebuah keharusan bahwa keduanya harus seimbang.

Kalau mengambil analogi dalam Islam, simbolnya dapat ditarik dari peristiwa *takbirat al-ihram* ketika shalat, dan salam di bagian akhir. Artinya, *takbirat al-ihram* menjadi simbol bahwa manusia muslim akan mengalami perjumpaan dengan Allah. Sementara menoleh ke kanan dan ke kiri dalam salam melambangkan bahwa manusia muslim berkata pada Allah, "sekarang saya akan kembali ke kehidupan nyata,

bergaul dengan semua manusia dan erat dengan nilai kemanusiaan.”

Guru pada gilirannya harus mengajarkan pada murid tentang kesadaran ketuhanan yang merupakan inti beragama itu sendiri, sekaligus sisi-sisi kemanusiaan universal. Atau dalam istilah kita, bagaimana menjaga keseimbangan antara *hablun min Allah wa hablun min al-nas* (hubungan dengan Allah dan manusia). Terkait dengan tuntutan guru yang harus berpikir, berperilaku dan menanamkan jiwa pluralis pada peserta didiknya, maka kebijakan kepala sekolah, termasuk dalam kebijakan pengembangan kurikulumnya harus mendukung terhadap tuntutan tersebut. Pengembangan diri bidang agama Islam, termasuk pengembangan metodologi, pendekatan, strategi bahkan samapi dukungan pembiayaan juga mutlak harus mendapatkan dukungan dari penentu kebijakan di lembaga pendidikan.

#### E. Problem Orang Tua dan Komite Sekolah

Komunitas orang tua/wali murid dan komite sekolah/madrasah penting untuk tahu ide-ide dan visi pendidikan yang menuju pada penghargaan atas realitas dan pluralis. Orang tua/wali dan komite sekolah/madrasah hendaknya jangan hanya diajak *rembugan* masalah yang kaitannya dengan masalah perbaikan sekolah, penarikan uang tambahan les dan persiapan menghadapi ujian Negara (UN) saja, tetapi juga harus diisi lebih jauh dan dikenalkan dengan program-program pendidikan yang terkait dengan ide-ide pluralisme dalam agama agar terjadi kesepahaman.

Mereka harus diajak dialog, karena dengan dialog dengan komunitas orang tua dan komite inilah dapat diketahui pikiran mereka. Mereka perlu diajak *sharing* dulu mengenai ide-ide tentang kemajuan sekolah/madrasah lalu ide-ide kegiatan sekolah/madrasah yang terkait dengan pluralitas. Mereka harus disadarkan bahwa pluralisme itu penting untuk peradaban karena peradaban tanpa pluralisme adalah mustahil, dan hal itu harus disadari bersama bahwa pluralisme agama

juga harus menjadi bagian dari kurikulum yang harus diajarkan kepada putera-puterinya di sekolah.

(Maskhur, M.Ag)

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdala, Ulil Abshor, dan Munawar, Budi, Dialog Pendidikan Pluralisme, [http:// islamlib.id. com](http://islamlib.id.com).
- Arya Setyaki, Arif Arya. 2008. *Aritmatika Jari, Metode Asmaul Husna Aritmatik (AHA)*. Jakarta: Khalifa.
- Fedyani, Ahmad, Agama Dalam analisa Dan interpretasi Sosiologis, (Jakarta; Predada Media, 1995)
- Hasan, Fuad. 1996. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasja W. Bachtiar. 1987. *Integrasi Nasional Indonesia dalam Wawasan Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Bakom PKB Pusat.
- Ibrahim Hasan, Hasan. 1979. *Tarikh al Islam*. Cairo: Maktabah Annahdah al Missriyah.
- M . Yunus, Firdaus dan Wijaya, YB. Mangun. 2003. *Pendidikan Berbasis Realitas Sosial -Paulo Freire*.
- Madkur, Ali Ahmad. 2002. *Manhaj al-Tarbiyah Fi al \_Tashowwur al-Islam*. Kairo: Dar al Fikr.
- Multahim, dkk. 2007. *Pendidikan Agama Islam kelas VII, VIII, IX*. Jakarta: Yudhistira.
- Nisa', Khoirun. 2009. *Posisi PAI pada Sekolah Berstandar Internasional, Skripsi Sarjana Pendidikan Islam*. Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan.
- Ramayulis. 1992. *Ilmu Pendidikan Islam*. Padang: Kalam Mulia.
- Rejeki, Tatik, *Konsep Pendidikan Nilai yang Menyenangkan*, makalah diseminarkan di UIN Malang 26 Februari 2008.
- Setiawan, Beni. 2008. *Agenda Pendidikan Nasional*. Jogjakarta: Arruzz media.
- Sunanto, Musyriyah. 2003. *Sejarah Islam Klasik*. Jakarta: Prenada Media.
- Syafi'i Mufid, Ahmad. 2001. *Agama dalam Pandangan Realitas Sosial*. Jakarta: Zikrul Hakim.

Syamsuri. 2006. *Pendidikan Agama Islam kelas XI*. Jakarta: Erlangga.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

Zakaria, Teuku Ramli. *Pendekatan-pendekatan dalam Pendidikan Nilai*, [www.pdk.go.id/balitbang](http://www.pdk.go.id/balitbang).

Zamroni. 2001. *Pendidikan untuk Demokrasi*. Yogyakarta: Bigraf Publising.

# **BAB 13**

## **PARADIGMA**

### **PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

#### **DI SEKOLAH**

#### **A. Pengantar**

Eksistensi Pendidikan Agama Islam di sekolah pada akhir-akhir ini semakin banyak dipertanyakan orang. Banyak hal yang menunjukkan eksistensi pendidikan agama Islam di sekolah semakin melemah. Bukan tidak ada arti sama sekali, tapi semakin banyak fenomena yang berlawanan dengan kebermaknaan pendidikan agama Islam itu sendiri. Belakangan semakin banyak terjadi kenakalan para pelajar berupa tawuran, penyalahgunaan obat terlarang, perilaku seksual menyimpang dan perilaku tidak terpuji lainnya, semua menunjuk kepada kekurangberhasilan pendidikan, terutama pendidikan agama Islam di sekolah.

Sesungguhnya telah banyak upaya yang dilakukan pendidikan, menyangkut perubahan kurikulum, perbaikan mutu dan profesionalitas para pendidik, perubahan pendekatan, metode dan strategi pembelajaran bahkan perbaikan fasilitas dan media pembelajaran, tetapi semuanya seakan-akan tidak berkaitan langsung dengan peningkatan mutu pendidikan agama Islam. Apa yang keliru? Apa yang salah dengan sistem pendidikan (sekolah) di Indonesia?

Tulisan ini mencoba merefleksikan pendidikan agama Islam di sekolah. Bahasan dimulai dari pengertian pendidikan Islam, PAI di sekolah, subjek didik, profil pendidik, proses pembelajaran PAI dan diakhiri sebuah refleksi.

#### **B. Pengertian Pendidikan Islam**

Banyak pengertian pendidikan Islam yang dirumuskan oleh para ahli pendidikan. Di antara pengertian tersebut ada



yang menitikberatkan pada aspek moral dan budi pekerti, seperti rumusan pengertian dari M. Athiyah al-Abrasyi bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang berjiwa budi pekerti dan akhlak yang bertujuan mencapai suatu akhlak yang sempurna.<sup>1</sup> Menurut M. Athiyah al-Abrasyi istilah “*tarbiyah*” mencakup keseluruhan aktivitas pendidikan. Di dalam istilah ini tercakup upaya mempersiapkan individu untuk kehidupan yang lebih sempurna, mencapai kebahagiaan hidup, cinta tanah air, memperkuat fisik, menyempurnakan etika, sistematika logika berpikir, mempertajam intuisi, giat dalam berkreasi, memiliki toleransi, fasih berbahasa dan mempertinggi ketrampilan.<sup>2</sup>

Ada juga pendapat yang menitikberatkan pada aspek tauhid. Menurut Muhammad Natsir, pendidikan Islam itu pada intinya berpusat pada konsep tauhid.<sup>3</sup> Hal ini hampir satu tujuan dengan pendidikan Islam yang dirumuskan oleh Syed Muhammad an-Naquib al-Attas sebagai “*ta’dib*”, yaitu sebagai proses pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur ditanamkan kepada manusia, tentang tempat segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan, yang membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan keberadaan.<sup>4</sup> Menurut Syed Muhammad an-Naquib al-Attas, konsep *ta’dib* mencerminkan tujuan esensial pendidikan Islam yang diajarkan Rasulullah saw.<sup>5</sup>

Pengertian pendidikan Islam yang berbeda-beda tersebut saling melengkapi. Kalau dikaitkan dengan visi dan misi pendidikan Islam maka semuanya bisa tercover dalam kalimat *Insan al-Kamil*. Menurut H.A.R Tilaar Pendidikan Islam di Indonesia merupakan sub sistem dari pendidikan nasional, visi pendidikan Islam akan sejalan dengan visi pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional adalah mewujudkan manusia

- 
1. M.Athiyah al-Abrasyi, *Ruh al-Tarbiyah wa al-Ta’lim*, (Saudi Arabiya: Dar al-Ahya, (t.t)), hal.1
  2. *Ibid.*, hal.7
  3. Dawam Rahardjo, *Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa*, (Bandung: Mizan, 1993), hal.431
  4. Abdul Munir Mul Khan, *Paradigma Intelektual Muslim – Pengantar Filsafat Pendidikan Islam Dan Dakwah*, (Yogyakarta: Sipress, 1993), hal. 219
  5. Syed Muhammad An-Naquib al-Attas, *Konsep Pendidikan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 1988), hal. 61

Indonesia yang takwa dan produktif sebagai anggota masyarakat yang bhineka.<sup>6</sup> Misi adalah perwujudan dari visi, misi pendidikan Islam adalah mewujudkan nilai-nilai keislaman di dalam pembentukan manusia Indonesia yang sholeh dan produktif.<sup>7</sup>

Pendidikan Islam dapat dirumuskan sebagai proses transinternalisasi pengetahuan dan nilai Islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan dan pengembangan potensi guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu pendidikan Islam memiliki 5 unsur pokok:<sup>8</sup>

- a. Proses transinternalisasi, pendidikan dilakukan secara bertahap, berjenjang, terencana, terstruktur, sistemik dan terus menerus dengan cara transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai Islam pada peserta didik.
- b. Pengetahuan dan nilai Islam, dalam hal ini materi pendidikan Islam terdiri dari pengetahuan dan nilai Islam yang diturunkan Allah.
- c. Peserta didik, dalam hal ini peserta didik diposisikan sebagai subyek sekaligus obyek pendidikan.
- d. Upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan dan pengembangan potensi.
- e. Tujuan akhir pendidikan adalah mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup di dunia dan di akhirat atau sebagai *insan al-kamil*.

Menurut Syafi'i Maarif, visi pendidikan Islam adalah "manusia yang unggul secara intelektual, kaya dalam amal serta anggun dalam moral dan kebijakan".<sup>9</sup> Dengan kata lain, visi dan misi pendidikan Islam pada prinsipnya tidak terlepas dari paradigma pendidikan Islam yang dilaksanakan dalam

---

6. H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal.149  
7. *Ibid.*, hal.150  
8. Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal.28-29  
9. A. Syafi Maarif, *Pendidikan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hal.155

rangka mewujudkan *insan al-kamil*, manusia yang sesungguhnya, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt serta berakhlak mulia, baik kepada Allah swt maupun kepada sesama manusia dan makhluk lainnya.

Dengan demikian hakikat dari tujuan pendidikan Islam adalah pengembangan potensi-potensi yang ada pada manusia dalam rangka mewujudkan manusia muslim yang berkualitas, yang seimbang antara jasmani dan rohani, individual dan sosialnya. Sehingga bisa berperan secara optimal sebagai hamba Allah dan sebagai Khalifah-Nya.

Menurut Noeng Muhadjir, tugas manusia sebagai khalifah bukan hanya untuk mendengar, berpikir, dan memahami, tetapi juga mengajak berbuat kebajikan dan mencegah kemungkaran. Salah satu tugas pendidikan berperspektif qur'ani adalah menyiapkan pemimpin-pemimpin yang bukan hanya mampu menangkap kebenaran dan logik, tetapi lebih-lebih perlu menjunjung tinggi nilai-nilai, memiliki *al-akhlak al-karimah*.<sup>10</sup> Betapa pentingnya tugas rasulullah untuk menyempurnakan akhlak manusia, sehingga tugas pendidikan tidaklah semestinya hanya sampai memberikan pengetahuan kognitif saja. Pendidikan harus menjangkau sifat *ihسان*, menjangkau dimilikinya *al-akhlak al-karimah*.<sup>11</sup>

Sejalan dengan tujuan pendidikan Islam tersebut, menurut Noeng Muhadjir ada beberapa tugas pendidikan Islam, yaitu: memelihara keimanan, membina keislaman, melaksanakan tugas *ubudiyah* dan *muamalah* kepada Allah Swt secara sempurna dan mengembangkan muamalah antar manusia yang integratif antara yang sensual, logik dan etik atau dunia dan akhirat, dengan tampilan perilaku yang ikhlas berlandaskan *al-akhlak al-karimah*.<sup>12</sup>

---

10. Noeng Muhadjir, "Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an: Tinjauan Mikro" dalam *Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an*, editor Yunahar Ilyas dan Muhammad Azhar (Yogyakarta: LPPI UMY, 1999), hal. 88

11. *Ibid.*

12. Noeng Muhadjir, "Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an: Tinjauan Mikro" dalam *Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an*, editor Yunahar Ilyas dan Muhammad Azhar (Yogyakarta: LPPI UMY, 1999), hal. 92

Dari uraian di atas sangat jelas bahwa pendidikan Islam sesungguhnya pendidikan yang berbasis nilai, baik ditinjau dari pengertian, tujuan, visi maupun misinya.

### C. Mempertanyakan PAI di Sekolah: Antara Kognitif, Makna dan Nilai

PAI sebagai bagian dari pendidikan Islam dilaksanakan di rumah, di sekolah dan di masyarakat pada umumnya. PAI merupakan bagian penting dari seluruh pendidikan yang dilaksanakan di negara kita, karena PAI berisi tentang pendidikan nilai-nilai dan ajaran agama Islam yang harus diketahui, diyakini, dan diamalkan. Dengan PAI, diharapkan akan terwujud tumbuh-kembang anak bangsa sebagai cerminan *insan kamil*.

Pendidikan Agama Islam merupakan upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertakwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya Al-Qur'an dan al-Sunnah. Kegiatan yang dilalui berupa bimbingan, pengajaran, latihan serta penggunaan pengalaman dibarengi tuntutan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.<sup>13</sup> Dalam sistem pendidikan nasional, Pendidikan Agama Islam (PAI) berkedudukan sebagai muatan kurikulum yang wajib diberikan kepada seluruh peserta didik pada semua jalur dan jenjang pendidikan.<sup>14</sup>

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) keseluruhannya tercakup dalam lingkup Al-Qur'an, Akidah, Akhlak, Syari'ah dan Tarikh. Hal ini menggambarkan bahwa ruang lingkup PAI mencakup perwujudan keserasian, keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah

- 
13. Depdiknas, *Kurikulum 2004 Standar Kompetensi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah*, (Jakarta: Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas, 2003), hal. 7
  14. Undang Undang No.20 tahun 2003 tentang *Sisdiknas*, Bab X, pasal 37 ayat 1

Swi, diri sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya maupun lingkungannya.

Selama ini ada pendapat bahwa Pendidikan Agama Islam (PAI) dirasakan kurang berhasil mengubah sikap dan perilaku keberagamaan peserta didik dalam membangun moral dan etika bangsa.<sup>15</sup> Hal ini antara lain karena:

1. PAI kurang bisa mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi makna dan nilai. PAI kurang mendorong penjiwaan terhadap nilai-nilai keagamaan yang perlu di internalisasikan dalam diri peserta didik. Dengan kata lain, selama ini, PAI lebih menekankan pada aspek *knowing* dan *doing* belum mengarah kepada aspek *being*, yakni bagaimana peserta didik bisa menjalani hidup sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai yang diketahui (*knowing*).
2. PAI kurang dapat berjalan bersama dan bekerjasama dengan program-program pendidikan non agama.
3. PAI kurang memiliki relevansi terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, kurang dapat melakukan replikasi terhadap konteks sosial dan terkesan lepas dari sejarah, sehingga peserta didik kurang menghayati nilai-nilai agama dalam hidup keseharian.

Menurut Amin Abdullah, pendidikan agama lebih banyak terkonsentrasi pada persoalan-persoalan teoritis keagamaan yang bersifat kognitif dan kurang *concern* terhadap persoalan bagaimana mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi makna dan nilai yang perlu terinternalisasikan dalam diri peserta didik lewat berbagai cara, media dan forum<sup>16</sup>. Senada dengan pendapat di atas adalah Komarudin Hidayat, menurutnya, pendidikan agama lebih berorientasi pada belajar tentang agama, sehingga hasilnya banyak orang yang mengetahui ajaran agama, tetapi perilakunya tidak relevan dengan nilai-nilai ajaran agama yang diketahuinya.<sup>17</sup>

- 
15. A.Tafsir, *Epistimologi untuk Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995), hal. 207
  16. M.Amin Abdullah, *Filsafat Kalam di Era Postmodernisme*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal.. 170
  17. Komarudin Hidayat, *Tuhan Begitu Dekat*, (Jakarta: Paramadina, 2002), hal. 201

Pendapat lain bahwa krisis multi dimensi yang melanda bangsa ini adalah merupakan bagian dari kegagalan pendidikan agama di Indonesia, termasuk PAI.<sup>18</sup>

Tidak semua orang setuju dengan pendapat tersebut, Azyumardi misalnya, tidak sependapat. Menurut mantan Rektor UIN Jakarta ini, tidaklah adil bila kita secara simplitis mengkambinghitamkan agama (termasuk pendidikan agama). Tinggi-rendahnya tindak kriminal tidak terkait dengan agama, tetapi justru lebih disebabkan:

1. Lemahnya penegakan hukum atau *soft state* (negara lembek dalam penegakan hukum), semua hal bisa diatur dengan sogok menyogok (*money politic*).
2. Mewabahnya gaya hidup hedonistik.
3. Kurang adanya *political will* dan keteladanan dari para pejabat publik untuk memberantas korupsi dan penyakit sosial lainnya.<sup>19</sup>

Menurut Muhtar Bukhori, kegiatan pendidikan agama yang berlangsung selama ini lebih banyak bersikap menyendiri, kurang berinteraksi dengan kegiatan-kegiatan pendidikan lainnya. Cara kerja semacam ini kurang efektif untuk keperluan penanaman suatu perangkat nilai.<sup>20</sup>

Sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam dan mengeliminasi kekurangan-kekurangan yang ada, paradigma yang harus dikembangkan bahwa PAI di sekolah bukan hanya menjadi tugas para guru agama saja, tapi merupakan tugas bersama antara kepala sekolah, seluruh guru dan tenaga kependidikan lain di sekolah, juga orang tua di rumah, sehingga pendidikan agama harus selalu dikembangkan sebagai tanggung jawab bersama, di sisi lain proses PAI di sekolah harus sebagai proses internalisasi bukan proses belajar tentang pengetahuan agama saja.

- 
18. Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 203
  19. Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003), hal.102
  20. Mochtar Bukhari, *Posisi dan Fungsi PAI dalam Kurikulum Perguruan Tinggi Umum*, Malang: IKIP Malang, 1992), hal.159

Pendidikan Agama Islam di Sekolah di Indonesia dibatasi dengan hanya dua jam pelajaran tiap minggunya, itu pun disinyalir hanya sebagai pengajaran dan pemberian pengetahuan tentang agama Islam yang bersifat kognitif bahkan lebih ekstrimnya hanya hafalan tentang bagian-bagian tertentu dari pengetahuan tentang agama saja, bukan pendidikan agama Islam itu sendiri dan belum merupakan pendidikan keberagamaan siswa. Menurut M.I Soelaeman, pendidikan religi (agama) lebih sebagai pendidikan tentang religi, sehingga tidak direalisasikan dalam perilaku kehidupan sehari-hari dan menjadi sekedar hiasan intelektual belaka.<sup>21</sup>

Selain itu, pendidikan agama belum mampu mendapatkan peran yang proporsional dalam percaturan kurikulum pendidikan secara nasional. Masyarakat dan para pendidik masih memandang dan lebih mementingkan penguasaan ilmu-ilmu dasar seperti matematika, fisika, biologi, kimia, dan sebagainya. Pendidikan agama ibarat hiasan yang hanya cukup untuk memperindah ruangan, tetapi tidak bisa dikembangkan secara optimal dan kontekstual sesuai dengan tantangan global. Banyak di antara pendidik yang lebih suka melihat pelajaran agama sebagai ilmu, bukan sebagai standar nilai-nilai yang harus diaplikasikan secara kontekstual dan aktual bagi kehidupan siswa. Pembelajaran agama saat ini lebih menekankan aspek kognitif dari yang seharusnya, yaitu afektif.<sup>22</sup> Jika aspek afektif menjadi pusat perhatian Pendidikan Agama Islam, maka untuk melakukan revitalisasi pendidikan agama Islam di sekolah seperti SMA dan SMK, guru perlu mengetahui faktor-faktor yang terkandung dalam aspek afektif. Menurut Krathwohl unsur-unsur afektif adalah minat (*interest*), sikap (*attitude*), nilai (*value*), apresiasi (*appreciation*), dan penyesuaian (*adjustment*).<sup>23</sup>

- 
21. M.I Soelaeman, *Suatu Telaah Tentang Manusia, Religi, Pendidikan*, (Jakarta: Dirjen Dikti, PPLPTK, 1988), hal.100
  22. Suyanto dan Djihad Hisyam, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2000), hal.71
  23. *Ibid.*, hal.72

Pendidikan Agama Islam di sekolah yang dilaksanakan dengan sesungguhnya tentu akan bisa menumbuhkembangkan dan membentuk pribadi-pribadi yang beriman, bertaqwa dan berbudi luhur dalam sikap dan perilaku sehari-hari.

#### D. Subjek Didik dalam Pendidikan Islam

Ada beberapa aliran yang membahas tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia, di antaranya: Nativisme, Empirisme dan Konvergensi.<sup>24</sup>

1. Aliran Nativisme; aliran ini berpendapat bahwa perkembangan manusia sangat bergantung dan dipengaruhi oleh pembawaan dan asal manusia. Lingkungan, termasuk pendidikan di dalamnya, tidak turut campur dalam perkembangan manusia. Pendapat ini dikenal sebagai pesimisme pedagogis, pendapat yang tidak percaya terhadap pengaruh lingkungan, termasuk pendidikan, dalam merubah diri seseorang dan mempengaruhi perkembangan manusia.
2. Aliran Empirisme; aliran ini berpendapat bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh lingkungan, termasuk pendidikan. Pendapat ini dikenal sebagai optimisme pedagogis, aliran yang banyak memberi peluang bagi pendidikan untuk bisa mengoptimalkan potensi-potensi yang ada pada manusia, dalam mempengaruhi perkembangan manusia.
3. Aliran konvergensi; aliran yang berpendapat bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh dasar pembawaan dan ajar (dari lingkungan). Aliran ini mengakui bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh pembawaan juga oleh lingkungan, termasuk lembaga pendidikan.

Dari tiga aliran utama ini, secara umum dapat dinyatakan bahwa paling tidak perkembangan manusia itu dipengaruhi unsur "native" atau pembawaan dan unsur

---

24. M. Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 1990), hal.14-15



lingkungan, termasuk lingkungan pendidikan yang dialami seseorang. Pada perkembangan selanjutnya, dari teori-teori ini muncul teori-teori lain tentang perkembangan manusia.

Ajaran dalam Al-Qur'an berbeda dengan jalan pikiran tiga aliran perkembangan di atas. Ajaran Al-Qur'an tidak menganut aliran nativisme/teori biologisme), bukan pula penganut aliran empirisme dan bukan penganut aliran konvergensi. Aliran perkembangan subjek didik dalam ajaran Islam adalah "teori fitrah", yaitu bahwa anak lahir pada hakikatnya baik dan Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan yang baik atau jalan yang buruk.<sup>25</sup> Manusia dengan perangkat psikobiologik dan sosiokultural serta hidayah dari Allah memiliki kemampuan menangkap dan mengartikan wahyu Allah, baik yang berupa kata-kata maupun yang berwujud ciptaan-ciptaan. Penggunaan perangkat tersebut dapat memilih jalan yang keliru dan memilih jalan yang benar. Jalan yang pertama akan menghasilkan pengetahuan dan pemikiran yang menyesatkan, sedangkan jalan yang kedua akan mendekatkan manusia ke cita insan bertaqwa yang cerdas, tangkas dan berwatak mulia.<sup>26</sup> Dengan demikian subyek didik, baik secara individual maupun secara kolektif perlu dipahami secara benar agar proses pendidikan dalam dimensi mikro dalam berbagai tingkat analisis dapat berhasil.<sup>27</sup>

#### E. Faktor Pendidik dan Proses Pembelajaran PAI

Para pendidik, khususnya tenaga pendidik PAI harus memiliki kompetensi akademik, kompetensi profesional, kompetensi metodologik dan kompetensi individual dan sosial yang memadai. Untuk memenuhi syarat kompetensi ini bisa

- 
25. Noeng Muhadjir, "Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an: Tinjauan Mikro" dalam *Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an*, editor Yunahar Ilyas dan Muhammad Azhar (Yogyakarta: LPPI UMY, 1999), hal. 84
  26. Suyata, "Upaya Pembenahan Pendidikan Islam lewat penataan Kembali Pemikiran dan penerapannya" dalam *Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an*, editor Yunahar Ilyas dan Muhammad Azhar, (Yogyakarta: LPPI UMY, 1999), hal. 95
  27. *Ibid.*, hal. 96

dilakukan dengan mengikuti seminar kependidikan, pelatihan multi media, training pembelajaran aktif dan pemberdayaan MGMP PAI. Dengan beberapa usaha tadi diharapkan para tenaga pendidik PAI lebih "gaul", lebih PD, lebih canggih dan lebih menarik, sehingga pembelajaran PAI akan lebih semarak dan bermakna.

Kalau PAI itu sendiri sudah berbasis nilai, kenapa kebermaknaan PAI masih banyak dipertanyakan? Mungkinkah faktor pendidik, pendekatan dan metode pembelajaran yang dilakukan para pendidik belum begitu tepat? Mari kita berefleksi mulai dari kita sendiri sebagai para pendidik (guru) PAI. Selama ini apa yang kita lakukan: Mengajar? Menyampaikan materi? Atau mengajar sekaligus mendidik? Sudah seberapa jauh pendekatan dan metode pembelajaran kita kembangkan? Atau selama ini kita hanya jalan di tempat mengajar dengan pendekatan dan metode itu-itu saja, yang penting materi dapat disampaikan.

Tujuan PAI di sekolah pada dasarnya adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan peserta didik sehingga menjadi manusia muslim yang berkembang keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt serta berakhlak mulia.

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, pada proses pembelajaran PAI di sekolah harus tercakup:

1. Materi yang sesuai dengan tujuan,
2. Strategi, metode dan penggunaan media yang mendukung
3. Evaluasi yang memadai.

Secara garis besar materi PAI di sekolah mencakup ilmu tauhid, ilmu fikih, Al-Qur'an, al-Hadits, Akhlak dan tarikh Islam. Meskipun ruang lingkup materi dan kompetensi pembelajaran PAI sudah ditentukan secara standar minimal, namun para pendidik bisa mengembangkan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Terlebih lagi dari segi strategi, metode dan media. Para pendidik bisa melakukan pengembangan secara maksimal sesuai dengan kemampuan. Selama ini kurang maksimalnya penggunaan strategi, metode dan media merupakan salah satu kekurangan dari para pendidik yang cukup "merata" sehingga

PAI di sekolah tidak terlalu menarik untuk para peserta didik. Biasanya keterbatasan waktu dan media menjadi salah satu alasan para pendidik.

Evaluasi PAI masih banyak dilaksanakan dengan evaluasi tertulis dan lebih banyak terarah untuk pengukuran kemampuan kognitif peserta didik, meskipun sudah ada upaya para pendidik mengembangkan evaluasi kemampuan psikomotorik dan afektif. Selain test tertulis sebagai alat evaluasi, para pendidik seyogyanya lebih mengembangkan alat evaluasi non test seperti observasi, skala sikap dan pembiasaan, praktek pengamalan ibadah dan muamalah. Dengan demikian evaluasi berupa test dan non test lebih seimbang dalam mengembangkan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik.

Supaya materi sesuai dengan tujuan, strategi, pendekatan dan metode mendukung serta evaluasi memadai maka para pendidik perlu memiliki persiapan tertulis yang baik. Persiapan tertulis meliputi program tahunan, program semester dan rencana pelaksanaan pembelajaran serta catatan kemajuan belajar peserta didik. Dengan persiapan yang baik, maka proses pembelajaran akan lebih terarah. Ada kebiasaan buruk yang dilakukan sebagian pendidik (guru), dimana RPP di buat hanya karena tuntutan kewajiban, hanya karena administrasi bahkan ada yang dirapel pembuatannya menjelang satu pemeriksaan atau supervisi dilaksanakan. Dalam hal ini urgensi perencanaan yang baik yang berimplikasi terhadap satu proses pembelajaran belum disadari dengan sepenuhnya oleh sebagian pendidik.

Uraian tentang bagaimana PAI di sekolah memberi gambaran secara sederhana dan cukup gamblang bagi kita bahwa PAI di sekolah secara konsep sangat mulus dan sudah berbasis nilai, tetapi pada dataran implementasi masih menyisakan banyak pertanyaan, terutama mengenai kebermaknaannya bagi peserta didik dan lingkungan di mana sekolah itu berada. PAI di sekolah seakan-akan tidak cukup "berefek" pada perilaku dan budi pekerti peserta didik.

Implementasi PAI di sekolah harus dimulai dengan satu perencanaan tertulis yang baik, mengarah kepada proses pembelajaran yang baik. Pada saat pembelajaran terjadi maka beberapa komponen sistem pembelajaran PAI berinteraksi dalam rangka tercapainya tujuan. Di sinilah pentingnya pemilihan pendekatan, metode dan media pembelajaran sehingga pembelajaran PAI merupakan penanaman nilai-nilai ajaran agama Islam yang cukup bermakna bagi kehidupan peserta didik sekarang dan mendatang.

Apa yang kurang dari kita sebagai pendidik (terutama PAI)? Apakah kompetensi akademik, kompetensi sosial, profesionalitas atau metodologi? Mungkin salah satu bagian kekurangan itu ada pada kita, maka yang bijaksana kita harus selalu berintrospeksi, refleksi diri untuk meningkatkan kualitas diri kita sebagai pendidik yang selalu siap menanamkan nilai-nilai ajaran Islam pada generasi muda Indonesia.

(Dr. Sopiiah, M.Ag)

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. Syafii Maarif. 1991. *Pendidikan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- A..Tafsir. 1995. *Epistimologi untuk Ilmu Pendidikan Islam*. (Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir. 2006. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Abdul Munir Mul Khan. 1993. *Paradigma Intelektual Muslim - Pengantar Filsafat Pendidikan Islam dan Dakwah*. Yogyakarta: Sypress.
- Azyumardi Azra. 2003. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*. Jakarta: Logos.
- Dawam Rahardjo. 1993. *Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa*. Bandung: Mizan.
- Depdiknas. 2003. *Kurikulum 2004 Standar Kompetensi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Atas*

- dan Madrasah Aliyah*. Jakarta: Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas.
- H.A.R. Tilaar. 2000. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Komarudin Hidayat. 2002. *Tuhan Begitu Dekat*. Jakarta: Paramadina.
- M. Ngalm Purwanto. 1990. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- M.Amin Abdullah. 1998. *Filsafat Kalam di Era Postmodernisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M.Athiyah al-Abrasyi. t.t. *Ruh al-Tarbiyah wa al-Ta'lim*. Saudi Arabiya: Dar al-Ahya.
- M.I Soelaiman. 1988. *Suatu Telaah Tentang Manusia, Religi, Pendidikan*. Jakarta: Dirjen Dikti, PPLPTK.
- Mochtar Bukhari. 1992. *Posisi dan fungsi PAI dalam Kurikulum Perguruan Tinggi Umum*. Malang: IKIP Malang.
- Muhaimin. 2003. *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Noeng Muhadjir. 1999. "Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an: Tinjauan Mikro" dalam *Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an*, editor Yunahar Ilyas dan Muhammad Azhar. Yogyakarta: LPPI UMY.
- Suyanto dan Djihad Hisyam. 2000. *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Suyata. 1999. "Upaya Pembenahan Pendidikan Islam lewat penataan Kembali Pemikiran dan penerapannya" dalam *Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an*, editor Yunahar Ilyas dan Muhammad Azhar. Yogyakarta: LPPI UMY.
- Syed Muhammad An-Naquib al-Attas. 1988. *Konsep Pendidikan Dalam Islam*. Bandung: Mizan.
- Undang Undang No.20 tahun 2003 tentang *Sisdiknas*, Bab X, pasal 37 ayat 1.

# BAB 14

## GURU DAN PENDIDIKAN KEJUJURAN

### A. Pengantar

Jepang, negara yang pada tahun lalu porak-poranda akibat gempa, tsunami dan kebocoran reaktor nuklir, merupakan contoh terbaik sebuah bangsa yang tegar menghadapi kehancuran. Ketegaran yang sama pernah dimunculkan negara matahari terbit ini ketika diluluhlantakkan Amerika dan sekutunya pada PD II setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom atom.

Dalam konteks pendidikan, ketegaran bangsa Jepang pada masa lalu berkaitan erat dengan penghargaan mereka terhadap profesi guru. Ketika itu, Kaisar Hirohito bertanya: "Berapa banyakkah guru yang masih hidup di negeri kita?" Pertanyaan Kaisar tadi didasarkan asumsi bahwa melalui guru inilah Jepang akan cepat bangkit kembali. Kaisar melanjutkan, "Kita harus mulai membangun negeri ini dari nol, dan hanya melalui guru lah kita dapat membangun kembali negeri ini... Melalui kerja keras kita, terutama guru-guru, saya yakin Jepang akan bangkit kembali, bahkan akan lebih hebat dari kemampuan kita sebelum perang terjadi." Sesudah itu, Jepang menerapkan kebijakan peningkatan mutu guru, baik kompetensi maupun kesejahteraannya. Gaji guru di Jepang 2,4 kali pendapatan perkapitanya. Kenyataannya, sejak tahun 1960-an, Jepang menjadi penguasa utama industri elektronika dan otomotif dunia.

Bagaimana dengan bangsa kita? Indonesia adalah negara yang "amat menghargai" profesi guru. Bahkan dari namanya saja "guru" diartikan sebagai yang *digugu* dan *ditiru*. Maka, ketika reformasi pendidikan menghendaki penghargaan terhadap profesi guru, Pemerintah menyikapinya dengan mengesahkan Undang-undang Guru dan Dosen yang mengatur pola pemberian penghargaan akademis maupun kesejahteraan

guru. Bank Dunia pun menegaskan pentingnya penghargaan ini dengan merekomendasikan bahwa apa pun usaha yang diluncurkan untuk meningkatkan mutu guru guna memacu mutu pendidikan tidak akan berpengaruh maksimal jika kesejahteraan tidak terpecahkan. Meski demikian, imbal jasa guru di negara kita tetap saja masih rendah.

## B. Korupsi: Dilema Guru

Tanggung jawab akademis dan moral guru sangat besar, berbanding balik dengan imbal jasa yang mereka terima. Hal ini berdampak terhadap maraknya korupsi di sekolah. Apalagi, kebanyakan korupsi yang dipraktikkan guru umumnya didorong faktor kebutuhan (*corruption by need*). Untuk menyiasati kecilnya gaji, mereka memungut berbagai biaya ekstra dari murid, seperti mengadakan kegiatan ekstrakurikuler, menjual buku pelajaran/LKS, soal ujian dan lain-lain. Maka, kesejahteraan guru sangat wajar dinaikkan, karena bisa berdampak positif pada usaha pemberantasan korupsi di sekolah.

Berkaitan dengan korupsi, muncul ambiguitas masyarakat terhadap posisi guru. Satu sisi, mereka menempatkan guru sebagai aktor utama di balik mahalny biaya sekolah. Namun, di sisi lain, guru kerap "dikerjai" pejabat di atasnya, seperti gaji atau honor kegiatan dipotong tanpa alasan. Gambaran tersebut memberikan penjelasan bahwa sebenarnya guru merupakan pelaku (subjek) sekaligus korban (objek) korupsi. Namun, dua posisi tersebut tidak berdiri sendiri karena yang menjadi penyebab guru melakukan korupsi adalah korupsi atau perlakuan tidak adil pejabat di atasnya.

Kondisi ini setidaknya disebabkan oleh tiga hal. *Pertama* adalah kenyataan bahwa pendapatan yang diterima guru tidak lebih besar dibanding pengeluaran untuk kebutuhan sandang, papan, pangan. Belum lagi kebutuhan yang harus dikeluarkan dari *kocek*-nya sendiri untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Di Pekalongan dewasa ini, gaji guru honorer/kontrak di MI perbulannya berkisar antara 150 ribu hingga 200 ribu, sementara pengeluaran per bulan antara 500 ribu hingga 800

ribu (UMK Kota Pekalongan tahun 2011 sebesar 900 ribu/perbulan). Alternatif menutup defisit dan kebutuhan hidup adalah mencari dana ekstra dari siswa atau *ngobyek* di tempat lain; bisa di sekolah, bisa juga di pangkalan ojek.

*Kedua*, guru bukan penentu kebijakan di sekolah. Umumnya guru diposisikan hanya sebagai pengajar yang bertugas "mentransfer" pengetahuan kepada murid, sedangkan dalam penentuan kebijakan akademis apalagi finansial seringkali mereka diabaikan. Hasil penelitian *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada beberapa kota di Indonesia secara umum menunjukkan bahwa guru tidak mengetahui kebijakan apa saja yang digulirkan sekolah. Bahkan banyak yang mengaku belum pernah melihat bentuk anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) di sekolahnya. Padahal keuangan sekolah, baik bersumber pada pemerintah, orang tua murid, maupun pihak lain, dicantumkan dalam APBS. Karena itu, agar bisa melakukan korupsi, terlebih dulu mesti mengetahui APBS. Dengan demikian, guru, yang umumnya tidak ikut merencanakan dan mengelola keuangan, kecil kemungkinan menjadi aktor di balik maraknya korupsi di sekolah.

*Ketiga*, guru merupakan "mata rantai" terlemah di antara penyelenggara pendidikan lain sehingga selalu menjadi korban "mata rantai" yang lebih kuat, seperti kepala sekolah dan pejabat dinas pendidikan. Selain guru menjadi korban "obyekan" atasan, porsi anggaran atau pendapatan yang diperoleh pun biasanya kecil. Penelitian *Indonesia Corruption Watch* pada APBS beberapa sekolah di Jakarta dan Tangerang memperlihatkan bahwa alokasi anggaran untuk guru tidak mencapai setengah porsi untuk kepala sekolah.

Dengan pertimbangan di atas, sesungguhnya secara ekonomi, penikmat hasil korupsi bukanlah guru. Meski kenyataannya demikian, tetapi nasibnya seperti istilah "orang lain yang makan nangka, tapi guru yang terkena getahnya". Stigma biang keladi korupsi di sekolah membuat citra guru jatuh di hadapan orang tua dan murid. Padahal tuntutan profesinya bukan hanya kemahiran dalam menyampaikan



materi pelajaran, tapi juga keterampilan untuk menjadi contoh dan teladan. Konklusinya: "Guru korup adalah guru buruk dan guru buruk tidak bisa dijadikan teladan."

Karena itu, guru sebenarnya memiliki kepentingan ikut memberantas korupsi, khususnya di sektor pendidikan. Sebab, selain dapat mengembalikan citra, apa yang mereka lakukan akan menjadi pembelajaran yang sangat efektif, tidak hanya bagi murid, tapi juga bagi masyarakat umum. Usaha memberantas korupsi di sekolah bisa dilakukan dengan adanya *political will* pemerintah melalui perbaikan kesejahteraan guru dalam undang-undang. Paling tidak, disahkannya UU Nomor 14 tahun 2007 tentang Guru dan Dosen memberikan harapan besar terhadap peningkatan kemakmuran guru. Kemudian dilanjutkan dengan implementasi pembelajaran nilai-nilai dasar pendidikan anti korupsi dalam kurikulum di sekolah yang meliputi: kejujuran, disiplin, sederhana, berani, peduli, kerja keras, tanggung jawab, adil kerja sama, dan lain-lain.

Dalam implementasinya, guru-lah yang menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di sekolah. Untuk itu, sebagai figur yang *digugu* dan *ditiru* sejatinya guru harus memiliki nilai-nilai tersebut agar bisa menjadi contoh bagi murid-muridnya. Salah satu nilai anti korupsi yang paling penting dimiliki seorang guru adalah kejujuran. Nilai kejujuran, secara epistemologis dilandasi oleh sabda Rasulullah: "*qulil haqqa walau kaana murrn*" (Katakanlah yang benar meskipun terasa pahit).

### C. Tidak Jujur = Korupsi

Dalam lembaga persekolahan, nilai kejujuran dahulu dipegang kuat oleh para siswa dan tenaga kependidikan. Sekarang, nilai kejujuran telah terlibas dan diganti dengan nilai yang lebih praktis dan efisien. Indikasinya, *pertama*, untuk mendapatkan hasil ulangan/UN yang baik, para siswa tidak perlu belajar keras, cukup dengan mencontek. Jika teman-teman yang mencontek saja memperoleh nilai baik dan lulus, sedangkan murid yang jujur malah tidak lulus, mengapa ia tidak mengikutinya? Tuntutan sosial dan keinginan

mempertahankan harga diri di mata teman-temannya mendorong kegiatan mencontek menjadi hal yang biasa dan wajib dilakukan. Nilai kejujuran telah tergeser dengan nilai efektivitas.

Demikian juga bagi guru. Buat apa susah-susah mengajar anak didik tentang mata pelajaran tertentu, toh pada akhirnya dalam Ujian Nasional (UN) selalu ada tim sukses yang membantu siswa. Kalau perlu, sekolah mendatangkan lembaga bimbingan belajar agar anak-anak lulus UN. Maka semua untung. Guru untung sebab tidak dianggap gagal mendidik anak. Dengan usaha ini selalu siswa lulus. Kepala sekolah dan sekolah mendapat nama. Ini tentu berguna bagi promosi sekolah di mata masyarakat, sedangkan kepala dinas kabupaten mendapat nama karena di daerahnya seluruh siswa lulus UN. Nilai profesionalisme guru telah tergeser oleh kepentingan praktis berbau bisnis.

Di Indonesia, praksis kecurangan selama UN telah berlangsung lama dan menjadi cara bertindak umum di kalangan pendidik dan siswa. Situasi ini tidak terjadi begitu saja. Ada proses yang mengawalinya. Di dalam ulangan harian di kelas, kegiatan mencontek sudah menjadi cara bertindak umum di kalangan siswa. Siswa sendiri menjadi saksi bahwa kegiatan contek-mencontek merupakan sesuatu yang wajar. Bahkan dalam arti tertentu, karena sudah terbiasanya maka tidak dirasakan lagi ada yang tidak beres dalam kegiatan contek mencontek ini. Dalam tingkat lebih tinggi, misalnya, sekolah, demi tujuan praktis menaikkan mutu sekolah, kecurangan itu telah terlembaga melalui pembentukan panitia khusus sebagai tim sukses UN.

*Kedua*, maraknya praktik-praktik di sekolah seperti pengucuran dana tidak sesuai kebutuhan sekolah, keterlambatan pencairan, penyimpangan cara penyaluran, potongan tidak wajar, belanja tidak sesuai peruntukannya, rendahnya transparansi dalam APBS, kebocoran dalam alokasi, penggunaan, dan audit dana, *mark up* buku pelajaran, termasuk guru mangkir mengajar merupakan praktik-praktik

korupsi yang bermuara pada ketidakjujuran yang telah berakar-urat dalam dunia pendidikan.

#### D. Guru dan Pendidikan Kejujuran

Untuk itu, pendidikan kejujuran itu penting diimplementasikan di sekolah. Pembelajaran di sekolah itu sifatnya *laten*. Maka, cara pemberantasan korupsi pun hendaknya dimulai dari lembaga yang sifatnya *laten* pula. Pendidikan kejujuran yang diberikan di sekolah-sekolah diasumsikan lebih efektif dalam upaya pemberantasan korupsi di negara kita ketimbang di lembaga-lembaga lain. Apalagi, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama - dua lembaga yang paling bertanggung jawab atas pendidikan anak bangsa—terkenal sebagai lembaga terkorup di negara kita.

Sebagai figur teladan dalam proses pembelajaran, dengan nilai kejujuran yang dimilikinya, guru dianggap orang saleh yang bisa dicontoh para siswanya. Tetapi bahwa, kesalehan saja tidak cukup tanpa didukung oleh sistem yang memihak pada kejujuran. Sistem yang ada di kebanyakan lembaga pendidikan kita, nyata-nyata belum memihak kepada kejujuran.

Aristoteles mengingatkan pada kita bahwa pendidikan itu bukanlah mengisi air dalam bejana, tapi menyalakan cahaya api dalam gulita. Patut kita internalisasi ini dalam kehidupan kita. Karena kejujuran itu cahaya maka kita bisa menyalakan api pengetahuan dengan kejujuran mulai dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling menyangkut hajat hidup orang banyak. Kejujuran dibangkitkan mulai dari alam pikiran, niat, sampai ke perbuatan. Sebelum menjadi guru atau kepala sekolah, seseorang harus zero toleransi terhadap ketidakjujuran atau yang mendekati ketidakjujuran.

Jika kejujuran sudah menjadi orientasi dan tujuan pendidikan, tentu peradaban akan tumbuh berkembang. Sekolah menjadi tempat penyemaian budaya toleransi terhadap sesama, saling menghormati, dan saling menginspirasi untuk kemajuan sekolah. Nilai ketidakjujuran, saling menelikung, berbohong, menyuap, dan pungutan liar berangsur dieliminasi.

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan guru dalam mengimplementasikan pendidikan kejujuran di lembaga persekolahan. *Pertama*, guru perlu mengajarkan kepada para siswa pentingnya kejujuran. Bahwa untuk berpikir, berkata, dan berbuat jujur tidak perlu biaya tinggi, siapa pun civitas akademika dapat melakukannya. Tetapi seperti di kemukakan di atas, semua itu harus dimulai dari figur guru. Adalah sulit menerapkan budaya jujur di sekolah jika "hulu sungai" nya keruh. Oleh karena itu, guru sebagai hulu sungai pengetahuan harus dijernihkan terlebih dahulu kemudian semua aliran sungai sampai ke muara ikut menjadi jernih. Artinya, perlu keteladanan dari guru dalam upaya pendidikan kejujuran di sekolah. Jika mereka bisa menjaga kejujuran dan akhlak mulia maka dengan mudah bisa menanamkannya kepada siswa, kemudian siswa bisa meneladaninya. Keteladanan adalah metode pendidikan yang paling baik dan utama. Pengaruh perbuatan dan tingkah laku yang langsung terlihat akan selalu lebih besar daripada ucapan. Tidaklah salah jika Ki Hajar Dewantara menempatkan *Ing Ngarso Son Tulodo* (keteladanan) sebagai poin pertama dalam prinsip pendidikan di Taman Siswa.

*Kedua*, pembelajaran, yakni guru memberikan materi anti korupsi dalam proses pembelajarannya. Mempelajari seluk-beluk tentang bahaya korupsi tidaklah cukup untuk mempengaruhi sikap para peserta didik. Materi pembelajaran anti korupsi juga harus memuat tentang akhlak mulia yang bisa menghindarkan generasi dari perilaku korup seperti kejujuran, hidup sederhana, pelayanan yang ikhlas, bertanggungjawab dan sabar.

*Ketiga*, pembiasaan, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik menerapkan materi pelajaran anti korupsi dan kejujuran yang telah mereka terima melalui proses pembelajaran. Sebaik-baiknya teori tentang berenang, sepintar-pintarnya guru mengajar tentang berenang, kalau siswa tidak dibiasakan ke kolam renang maka mustahil murid bisa pintar berenang. Untuk mendukung hal ini, guru perlu didukung laboratorium pembiasaan. Misalnya, Kantin Kejujuran

-yang diprakarsai oleh Kejaksaan Agung-- telah menjadi laboratorium kejujuran di sekolah-sekolah. Dengan mekanisme transaksi swalayan dan swabayar (ambil sendiri bayar sendiri) akan tertanam sikap jujur karena para siswa mengambil dan membayar barang yang dibeli tanpa ada yang melayani transaksinya. Tentu saja, adanya kantin kejujuran tidak otomatis membuat mereka jujur. Tetap perlu dibarengi proses penanaman nilai-nilai kejujuran melalui kegiatan keagamaan, gerakan moral, dan ikrar kejujuran di sekolah.

*(Ahmad Ta'rifin, MA)*

# BAB 15

## URGENSI PENDIDIKAN MORAL KEAGAMAAN BAGI PESERTA DIDIK

### A. Pengantar

Masa remaja adalah periode di mana seseorang mulai bertanya-tanya mengenai berbagai fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya sebagai dasar bagi pembentukan nilai diri mereka. Para remaja membuat penilaian tersendiri dalam menghadapi masalah-masalah aktual yang berkenaan dengan lingkungan mereka, seperti: politik, kemanusiaan, perang, keadaan sosial, dan hal-hal yang menarik bagi mereka. Remaja tidak lagi menerima hasil pemikiran yang kaku, sederhana, dan absolut yang diberikan pada mereka selama ini tanpa bantahan. Remaja mulai mempertanyakan keabsahan pemikiran yang ada dan mempertimbangkan lebih banyak alternatif lainnya. Secara kritis, remaja akan lebih banyak melakukan pengamatan keluar dan membandingkannya dengan hal-hal yang selama ini diajarkan dan ditanamkan kepadanya. Sebagian besar para remaja mulai melihat adanya “kenyataan” lain di luar dari yang selama ini diketahui dan dipercayainya. Ia akan melihat bahwa ada banyak aspek dalam melihat hidup dan beragam jenis pemikiran yang lain. Baginya, dunia menjadi lebih luas dan seringkali membingungkan, terutama jika ia terbiasa dididik dalam suatu lingkungan tertentu saja selama masa kanak-kanak.

Kemampuan berpikir dalam dimensi moral (*moral reasoning*) pada remaja berkembang karena mereka mulai melihat adanya kejanggalan dan ketidakseimbangan antara yang mereka percayai dahulu dengan kenyataan yang ada di sekitarnya. Mereka lalu merasa perlu mempertanyakan dan merekonstruksi pola pikir dengan “kenyataan” yang baru. Perubahan inilah yang seringkali mendasari sikap

"pemberontakan" remaja terhadap peraturan atau otoritas yang selama ini diterima bulat-bulat. Misalnya, jika sejak kecil seorang anak diterapkan sebuah nilai moral yang mengatakan bahwa korupsi itu tidak baik, pada masa remaja ia akan mempertanyakan mengapa dunia sekelilingnya membiarkan korupsi itu tumbuh subur. Hal ini tentu saja akan menimbulkan konflik nilai bagi sang remaja. Konflik nilai dalam diri remaja ini lambat laun akan menjadi sebuah masalah besar jika remaja tidak menemukan jalan keluarnya. Kemungkinan remaja untuk tidak lagi memercayai nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua atau pendidik sejak masa kanak-kanak akan sangat besar jika orang tua atau pendidik tidak mampu memberikan penjelasan yang logis, apalagi jika lingkungan sekitarnya tidak mendukung penerapan nilai-nilai tersebut.

Peranan orang tua atau pendidik amatlah besar dalam memberikan alternatif jawaban dari hal-hal yang dipertanyakan oleh putra-putri remajanya. Orang tua yang bijak akan memberikan lebih dari satu jawaban dan alternatif supaya remaja itu bisa berpikir lebih jauh dan memilih yang terbaik. Orang tua yang tidak mampu memberikan penjelasan dengan bijak dan bersikap kaku akan membuat sang remaja tambah bingung. Remaja tersebut akan mencari jawaban di luar lingkaran orang tua dan nilai yang dianutnya. Ini bisa menjadi berbahaya jika "lingkungan baru" memberi jawaban yang tidak diinginkan atau bertentangan dengan yang diberikan oleh orang tua. Konflik dengan orang tua mungkin akan mulai menajam.

Harus diakui bahwa persoalan dekadensi moral tidak cukup dengan diseminasi regulasi-regulasi baru, tetapi setidaknya hal itu menjadi ikhtiar untuk mengurangi gejala dekadensi moral dalam masyarakat yang sedang berubah. Kita menyadari masalah dekadensi moral yang terjadi pada kalangan remaja, khususnya mahasiswa sudah kian menggurita sehingga membutuhkan penanganan yang khusus.

Indikasi kemerosotan moral, antara lain ditandai dengan adanya penyalahgunaan obat-obat terlarang, pergaulan bebas, kebebasan dalam berpakaian, kriminalitas, kekerasan baik

terhadap sesama jenis maupun lawan jenis. Kekerasan terhadap sesama jenis ditandai dengan sering terjadinya tawuran antarpelajar, sedangkan kekerasan terhadap lawan jenis biasanya ditandai dengan adanya kekerasan seksual baik yang dilakukan oleh suami terhadap istri maupun seorang pacar terhadap pasangannya.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa tidak sedikit dari masyarakat kita yang gagal menampilkan perilaku terpuji. Padahal, kesopanan, sifat tenggang rasa dan ramah-tamah, serta sikap suka saling menolong dan solidaritas sosial merupakan jati diri bangsa yang telah berabad-abad melekat dalam diri kita.

Ironisnya, perhatian yang diberikan oleh dunia pendidikan nasional terhadap pendidikan budi pekerti masih kurang. Bahkan, dapat dikatakan penanganan pendidikan budi pekerti masih terbelengkal akibat orientasi pendidikan kita yang lebih condong ke arah arah dimensi pengetahuan (Suyanto, 2000:153). Hal senada sebagaimana yang diungkapkan oleh Iwaman (dalam Wawasan, 15 Februari 1994) yang menyatakan bahwa ada pelajaran yang dilupakan oleh kita, yakni pelajaran budi pekerti. Pada sekitar tahun 60-an mata pelajaran budi pekerti masuk dalam kurikulum pendidikan dasar. Akan tetapi, pada awal 1970-an, pelajaran itu lenyap dari kurikulum sekolah pada saat kita mulai melaksanakan modernisasi.

Sebagai suatu konsep yang lahir dari dunia barat, modernisasi menghadirkan tingkat ketergantungan pada materi yang demikian tinggi. Ibarat air bah, kalau tidak dikontrol, sifat materialisme ini sanggup memrakporandakan apa saja, termasuk nilai-nilai dasar kehidupan masyarakat Indonesia. Bila nilai-nilai dasar itu larut terbawa oleh nilai-nilai materialisme yang universal, identitas kita sebagai bangsa juga akan lenyap.

Salah satu imbas dari modernisasi adalah munculnya fenomena-fenomena berpakaian ala barat yang merambah baik di kalangan masyarakat secara umum maupun masyarakat di lingkungan kampus. Fenomena pakaian seksi yang merambah dunia kampus adalah wujud dari kebudayaan fisik yang hasilnya



sangat konkret dan bisa memengaruhi pola berpikir lingkungan sekitarnya. Fenomena penggemar baju ketat alias *press body* atau “baju adek” terlalu banyak bertebaran di dalam kampus. Kampus yang seharusnya melahirkan pemuda-pemudi yang memiliki pengetahuan dan intelektual, justru sekarang berganti peran menjadi ajang *fesyen* bagi banyak mahasiswi.

Fenomena ini, tampaknya tidak hanya menjamur di perguruan tinggi umum, tetapi juga merambah sampai ke perguruan tinggi agama Islam (PTAI). Mahasiswi perguruan tinggi agama Islam, seperti UIN, IAIN, dan STAIN walaupun secara hukum kampus mereka diwajibkan berjilbab—dalam konteks ini adalah untuk menutup aurat—tetapi pada dataran realitas, jilbab sudah bergeser pemaknaannya. Realitas menunjukkan bahwa walaupun mereka (mahasiswi) berjilbab, tetapi bajunya masih tampak “kekecilan”, lengan terbuka bebas, bahkan ada yang dadanya sedikit terbuka. Mungkin terlalu dini untuk menyimpulkan, tetapi demikianlah realitas sosial yang terjadi pada mahasiswi sekarang. Fenomena semacam ini juga merambah hingga ke sekolah-sekolah. Baju-baju seragam sekolah anak SMP dan SMU di kota-kota besar pun semakin lama semakin jauh dari aturan yang sebenarnya. Roknya semakin pendek, bajunya semakin kecil dan ketat. Cocok untuk pepatah “ke atas tampak lutut, ke bawah tampak pusar”.

Dari fenomena di atas, jelaslah bahwa pendidikan budi pekerti sebagai “rem mental” justru dilupakan di saat kita membutuhkannya. Pendidikan budi pekerti harus dirancang dengan sungguh-sungguh sebab pendidikan budi pekerti yang tidak dirancang dengan sungguh-sungguh, hasilnya akan mengecewakan. Pada hakikatnya, pendidikan budi pekerti (akhlak) seharusnya menjadi sebuah komitmen mengenai langkah-langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pendidik untuk mengarahkan generasi muda kepada pemahaman dan internalisasi nilai-nilai dan kebajikan yang akan membentuknya menjadi manusia yang baik. Melalui pendidikan budi pekerti, generasi muda akan dibimbing ke arah norma-norma atau nilai-nilai mengikat diri mereka.

Inti utama pendidikan budi pekerti adalah mengembangkan potensi kreatif subjek didik agar menjadi manusia yang baik, baik dalam pandangan manusia maupun baik dalam pandangan Tuhan. Persoalan manusia yang baik merupakan persoalan nilai karena menyangkut penghayatan dan pemaknaan yang bersifat afektif daripada kognitif (Thoha, 1990:6). Krathwohl (1973:20) mengemukakan bahwa perilaku afektif akan berkembang secepat perkembangan kognitif jika pengalaman pembelajaran afektif diberikan sama banyaknya dengan pengalaman pembelajaran kognitif.

Dengan praktik keagamaan yang dilakukan, keinginan untuk melakukan hal-hal yang semata-mata bersifat duniawi diharapkan lebih dapat dikontrol. Visi dan hidupnya di dunia diletakkan dalam perspektif yang lebih luas dalam keberimanan kepada Allah dan antisipasi terhadap dunia yang akan datang. Inilah dasar harapan orang terhadap mereka yang beragama bahwa mereka mendapatkan motivasi untuk menghayati hidup bermoral tidak saja dari prinsip-prinsip moral yang berlaku universal bagi semua manusia, tetapi juga dari agama yang dianutnya. Harus disadari bahwa dekadensi moral terhadap orang yang beragama akan berdampak lebih luas dan menimbulkan skandal besar.

Efektivitas paradigma pendidikan moral yang berlangsung di jenjang pendidikan formal hingga kini memang masih sering diperdebatkan. Sekolah bukanlah tempat paling utama sebagai sarana transfer nilai-nilai moral. Apalagi, pendidikan moral di sekolah baru menyentuh pada ranah kognitif, belum menyentuh pada aspek afektif dan psikomotorik. Jadi, kunci pendidikan moral pada hakikatnya terletak pada peran keluarga dan masyarakat sekitar.

## **B. Perkembangan Moral**

Ketika individu mulai menyadari bahwa ia merupakan bagian dari lingkungan sosial dimana ia berada, bersamaan itu pula individu mulai menyadari bahwa dalam lingkungan sosialnya terdapat aturan-aturan, norma-norma/nilai-nilai sebagai dasar atau patokan dalam berperilaku. Keputusan

untuk melakukan sesuatu berdasarkan pertimbangan norma yang berlaku dan nilai yang dianutnya itu disebut moralitas. Perkataan moral dikaitkan dengan ajaran kesusilaan, tabiat, atau kelakuan. Dengan demikian, *moral* dapat diartikan ajaran kesusilaan. Moralitas berarti hal mengenai kesusilaan, sedangkan etika merupakan suatu ilmu yang membicarakan tentang perilaku manusia, perbuatan manusia yang baik dan yang buruk. (*Ethics the study and phylosophy of human conduct with emphasis on the determination of right and wrong one of the normative sciences*).

Hurlock (1989:79) menyatakan bahwa perkembangan moral bergantung dari perkembangan kecerdasan. Ia terjadi dalam tahapan yang diramalkan yang berkaitan dengan tahapan dalam perkembangan kecerdasan. Dengan berubahnya kemampuan menangkap dan mengerti, anak-anak bergerak ke tingkat perkembangan moral yang lebih tinggi.

Dalam bukunya *The Moral Judgement of the Child*, Piaget (dalam Burhanuddin, 1997) menyatakan bahwa kesadaran moral anak mengalami perkembangan dari satu tahap yang lebih tinggi. Pertanyaan yang melatarbelakangi pengamatan Piaget adalah bagaimana pikiran manusia menjadi semakin hormat pada peraturan. Ia mendekati pertanyaan itu dari dua sudut. *Pertama*, kesadaran akan peraturan (sejauh mana peraturan itu dianggap sebagai pembatasan). *Kedua*, pelaksanaan dari peraturan itu. Piaget mengamati anak-anak bermain kelereng, suatu permainan yang lazim dilakukan oleh anak-anak di seluruh dunia dan permainan itu jarang diajarkan secara formal oleh orang dewasa. Dengan demikian, permainan itu mempunyai peraturan yang jarang atau malah tidak sama sekali ada campur tangan orang dewasa.

Melalui perkembangan umur, maka orientasi perkembangan itu pun berkembang dari sikap heteronom (bahwasannya peraturan itu berasal dari diri orang lain) menjadi otonom dari dalam diri sendiri. Pada tahap heteronom, anak-anak menganggap bahwa peraturan yang diberlakukan dan berasal dari bukan dirinya merupakan sesuatu yang patut dipatuhi, dihormati, diikuti, dan ditaati oleh

pemain. Pada tahap otonom, anak-anak beranggapan bahwa peraturan-peraturan merupakan hasil kesepakatan bersama antarpemain. Anak-anak pada usia paling muda hingga umur 2 tahun melakukan aktivitas bermain dengan apa adanya, tanpa aturan dan tanpa ada hal yang patut untuk mereka patuhi. Mereka adalah *motor activity* tanpa dipimpin oleh pikiran. Pada tahap ini, mereka belum menyadari adanya peraturan yang *koersif*, atau bersifat memaksa dan harus ditaati. Dalam pelaksanaannya, peraturan kegiatan anak-anak pada umur itu merupakan *motor activity*.

Anak-anak pada umur antara 2 sampai 6 tahun mereka telah mulai memerhatikan dan bahkan meniru cara bermain anak-anak yang lebih besar dari mereka. Pada tahap ini, anak-anak telah mulai menyadari adanya peraturan dan ketaatan yang telah dibuat dari luar dirinya dan harus ditaati dan tidak boleh diganggu gugat. Pada tahap ini, anak-anak cenderung bersikap *egosentris*, mereka akan memandang "sangat salah" apabila aturan yang telah ada diubah dan dilanggar. Ia meniru apa yang dilihatnya semata-mata demi untuk dirinya sendiri, ia tidak tahu bahwa bermain adalah aktivitas yang dilakukan dengan anak-anak lainnya sehingga meskipun bermain dilakukan secara bersama-sama, tetapi sebenarnya mereka bermain secara individu, sendiri-sendiri dengan melakukan pola dan cara yang mereka yakini sendiri. Pelaksanaan yang bersifat *egosentris* merupakan tahap peralihan dari tahap yang individualistis murni ke tahap permainan yang bersifat sosial.

Anak pada usia 7-10 tahun beralih dari kesenangan yang semata-mata psikomotor kepada kesenangan yang didapatkan dari persaingan dengan kawan main dengan mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku dan disetujui bersama. Walaupun sebenarnya tidak paham akan peraturan sampai hal yang paling kecil namun keinginan untuk bekerja sama dengan kawan bermain amatlah besar. Anak ingin memahami peraturan dan bermain dengan setiap mengikuti peraturan itu. Pada tahap ini sifat *heteronom* berangsur menjadi *otonom*.

Pada usia 11 sampai 12 tahun kemampuan anak untuk berpikir abstrak mulai berkembang. Pada umur itu, kodifikasi

(penentuan) peraturan sudah dianggap perlu. Kadang-kadang mereka lebih asyik tertarik pada soal-soal peraturan daripada menjalankan permainannya sendiri. Teori Piaget kemudian menjadi inspirasi bagi Kohlberg. Hal yang menjadi kajian Kohlberg adalah tertumpu pada argumentasi anak dan perkembangan argumentasi itu sendiri. Berikut ini akan diajukan tahap-tahap perkembangan moral sesuai pendapat Kohlberg. Secara garis besar, Kohlberg, melalui penelitian yang dilakukannya selama 14 tahun, membagi tahap perkembangan moral dalam tiga kelompok, yakni *preconventional level* (0-9), *conventional level* (9-15), dan *postconventional level* (>15) (diambil tanggal 2 Mei 2008 dari <http://sylvie.edublog.org/2006/09/19/teori-perkembangan-moral/>).

Dalam hal perkembangan moral, Kohlberg mengemukakan tahapan perkembangan moralitas individu, sebagaimana tampak dalam tabel berikut.

Tingkat	Tahap
<i>Preconventional</i> (0 - 9)	Orientasi terhadap kepatuhan dan hukuman
	Relativistik hedonism
<i>Conventional</i> (9 - 15)	Orientasi mengenai anak yang baik
	Mempertahankan norma-norma sosial dan otoritas
<i>Postconventional</i> ( > 15 )	Orientasi terhadap perjanjian antara dirinya dengan lingkungan sosial
	Prinsip etis universal

### 1. *Preconventional Level* (Taraf Prakonvensional)

Pada taraf ini, anak telah memiliki sifat *responsif* terhadap peraturan dan cap baik dan buruk, hanya cap tersebut ditafsirkan secara *fisis* dan *hedonistis* (berdasarkan dengan enak dan tidak enak, suka dan tidak suka). Anak pada usia ini juga menafsirkan baik buruk dari segi kekuasaan dari asal peraturan itu diberi, orang tua, guru, dan orang dewasa

lainnya. Pada taraf ini terdiri dari dua tahapan yaitu: 1) *punishment and obedience orientation* (orientasi hukuman dan kepatuhan) dan 2) *Instrument-relativist orientation* (orientasi relativis instrumental).

Pada tahap orientasi hukuman dan kepatuhan, anak memandang bahwa perbuatan baik dan buruk terletak pada akibat-akibat fisik, yakni hukuman atau hadiah yang akan diterima atas tindakan yang dilakukannya. Pada fase ini, tindakan yang dilakukannya tersebut semata-mata untuk menghindari hukuman dan ia taat secara buta pada yang berkuasa dan dianggap bernilai pada dirinya sendiri.

Pada tahap orientasi relativis instrumental, anak beranggapan bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang dapat menjadi alat untuk memuaskan kebutuhannya sendiri dan kadang-kadang juga kebutuhan orang lain. Hubungan antarmanusia dianggap sebagai hubungan jual-beli di pasar. Engkau menjual saya membeli, saya menyenangkan kamu, maka kamu harus menyenangkan saya.

## 2. *Conventional Level* ( Taraf Konvensional)

Pada taraf ini, anak mengusahakan terwujudnya harapan-harapan keluarga atau bangsa yang bernilai pada dirinya sendiri. Anak tidak hanya mau berkompromi, tetapi setia kepadanya, berusaha mewujudkan secara aktif, menunjukkan ketertiban dan berusaha mewujudkan secara aktif, menunjang ketertiban dan berusaha mengidentifikasi diri mereka yang mengusahakan ketertiban sosial. Dalam taraf ini ada dua tahap sebagai kelanjutan dari tahap sebelumnya, yakni 3) *interpersonal corcodance* atau “*good boy-nice girl*” *orientation* (orientasi kesepakatan antara pribadi atau orientasi anak manis) dan 4) *law and order orientation* (orientasi hukum dan ketertiban).

Pada tahap *interpersonal corcodance* atau “*good boy-nice girl*” *orientation*, anak memahami bahwa tingkah laku yang lebih baik adalah tingkah laku yang membuat senang orang lain atau yang menolong orang lain dan yang mendapat persetujuan mereka. Supaya diterima dan disetujui orang lain

seseorang harus berlaku “manis”. Orang berusaha membuat dirinya wajar seperti pada umumnya orang lain bertingkah laku. Intensi tingkah laku walaupun kadang-kadang berbeda dari pelaksanaannya sudah diperhitungkan, misalnya orang-orang yang mencuri buat anaknya yang hampir mati dianggap berintensi baik.

Pada tahap *law and order orientation*, anak memandang bahwa perilaku yang baik adalah semata-mata melakukan kewajiban sendiri. Otoritas peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan dan pemeliharaan ketertiban sosial dijunjung tinggi dalam tahap ini. Tingkah laku disebut benar, bila orang melakukan kewajibannya, menghormati otoritas dan memelihara ketertiban social.

### 3. *Postconventional Level* (Taraf Pascakonvensional)

Pada taraf ini, seorang individu berusaha mendapatkan perumusan nilai-nilai moral dan berusaha merumuskan prinsip-prinsip yang sah (valid) yang dapat diterapkan, terlepas prinsip itu berasal dari otoritas orang atau kelompok yang mana. Pada taraf yang ketiga ini ada dua tahapan sebagai tindak lanjut dari tahapan sebelumnya. Tahapan tersebut adalah 5) *social contract orientation* (orientasi kontrak sosial legalitas) dan 6) *the universal ethical principle orientation* (orientasi prinsip etika universal).

Dalam tahap orientasi kontrak sosial legalitas, orang mengartikan benar-salahnya suatu tindakan dirumuskan atas hak-hak individu dan norma-norma yang sudah teruji di masyarakat. Disadari karena nilai-nilai yang bersifat relatif, maka perlu ada usaha untuk mencapai suatu konsensus bersama.

Pada tahap *the universal ethical principle orientation*, orang menganggap bahwa benar salahnya tindakan ditentukan oleh keputusan suara nurani hati. Sesuai dengan prinsip-prinsip etis yang dianut oleh orang yang bersangkutan, prinsip-prinsip etis itu bersifat abstrak. Pada intinya, prinsip etis itu adalah prinsip keadilan, kesamaan hak, hak asasi, dan hormat pada harkat (nilai) manusia sebagai pribadi.

Dalam proses perkembangan *moral reasoning* dengan enam tahapannya seperti itu, berlakulah dalil-dalil sebagai berikut.

1. Perkembangan moral terjadi secara berurutan dari satu tahap ke tahap berikutnya.
2. Dalam perkembangan moral orang tidak memahami cara berpikir dari tahap yang lebih dari dua tahap di atasnya.
3. Dalam perkembangan moral, seseorang secara kognitif tertarik pada cara berpikir dari satu tahap di atas tahapnya sendiri. Anak dari tahap 2 merasa tertarik kepada tahap 3. Berdasarkan rumusan inilah, Kohlberg percaya bahwa *moral reasoning* dapat dan mungkin diperkembangkan.
4. Dalam perkembangan moral, perkembangan hanya akan terjadi apabila diciptakan suatu *diequilibrium cognitive* pada diri si anak didik. Seseorang yang sudah mapan dalam satu tahap tertentu harus diusik secara kognitif sehingga ia terangsang untuk memikirkan kembali prinsip yang sudah dipegangnya. Kalau ia tetap tenteram dan tetap dalam tahapannya sendiri, ia tidak akan mungkin mengalami perkembangan.

### C. Standardisasi Pendidikan Moral Keagamaan

Kumoro (dalam Bertens, 1999:84) menyatakan bahwa nilai-nilai moral mempunyai karakteristik, antara lain riil, primer, biasa bersifat positif maupun negatif, arsiteknik, absolut, dan terbuka. Riil yang dimaksud di sini berarti nilai moral bukan sekadar semu. Orang berwatak hipofrit sesungguhnya tidak memercayai nilai moral yang bersangkutan. Selanjutnya, moral melibatkan suatu komitmen untuk bertindak dan merupakan landasan yang paling utama sehingga dalam hal ini termasuk dalam nilai primer.

Dalam karakteristik arsiteknik, nilai yang ordenya rendah tidak memiliki ciri intrinsik yang mengatur nilai-nilai yang lain, baik berupa ketetapan maupun pedoman spiritual, sedangkan pada sifat absolut moralitas pada manusia bebas dari sifat-sifat mementingkan diri sendiri yang terdapat pada kehendak-kehendak relatif. Sementara itu, ciri universal moral



mengharuskan adanya lingkup yang terbuka karena sekali nilai moral tertutup, maka akan kehilangan nilai universalitasnya.

Pada tahap selanjutnya, karakteristik nilai yang terkandung dalam moralitas akan memengaruhi aspek kognitif, afektif, dan perilaku manusia. Adapun prosesnya dibagi menjadi empat komponen utama yang akan dijabarkan sebagai berikut.

1. Manusia mampu menafsirkan situasi dan mengidentifikasi suatu masalah moral. Maksudnya, kemampuan individu untuk memprediksi arah tindakan yang mungkin dalam situasi serta memperkirakan konsekuensi-konsekuensinya.
2. Manusia diharapkan untuk menentukan arah tindakan terbaik yang akan memenuhi suatu ide moral yang semestinya dilakukan dalam situasi yang ada.
3. Manusia diharapkan mampu untuk memutuskan tentang apa yang benar-benar dituju dan jangan membuat pilihan atas nilai yang berbeda.
4. Manusia diharapkan mampu melaksanakan suatu rencana tindakan dalam suatu tata urutan yang konkret serta mampu mengatasi rintangan dan persoalan-persoalan yang tidak terduga.

#### **D. Urgensi Pendidikan Moral Keagamaan bagi Peserta Didik**

Pendidikan agama berkaitan erat dengan pendidikan moral atau nilai sebab pendidikan agama mengajarkan yang baik adalah sesuatu yang dianggap baik oleh agama dan yang buruk adalah sesuatu yang buruk dianggap oleh agama. Islam memandang pendidikan moral keagamaan (budi pekerti) sangat urgen dalam kehidupan, bahkan Islam menegaskan bahwa pendidikan moral keagamaan merupakan misi yang utama. Rasulullah saw. menyatakan bahwa dirinya diutus Allah Swt. salah satunya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia.

Dalam kehidupan manusia, agama memiliki peranan yang sangat penting karena padasarnya manusia memiliki keinginan yang sangat esensial dalam jiwa, berupa keinginan untuk mencari sesuatu yang berbeda di luar dirinya. Agama adalah suatu pandangan yang mencakup berbagai kepercayaan

yang lahir melalui ide, pikiran, atau gagasan manusia baik dalam bentuk budaya maupun agama. Agama yang paling mendasar adalah keyakinan akan adanya sesuatu kekuatan supernatural, zat yang Mahamutlak di luar kehidupan manusia.

Sistem ajaran Islam adalah totalitas. Oleh karena itu, untuk dapat meraih optimalisasi manfaat dari agama tersebut, umat Islam harus meyakini agamanya secara baik dan benar dengan bertekad masuk ke dalam agama Islam secara menyeluruh (Qs. 2:208): *"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara total (kaffah)."* Artinya, dalam ajaran-ajaran Al-Qur'an tersimpul berbagai hal yang menyangkut segala segi kehidupan manusia, seperti ekonomi, peradaban/kebudayaan, kemasyarakatan, hukum, pemerintahan, dan termasuk di dalamnya adalah pendidikan. Oleh karena itu, seluruh kaum muslimin seharusnya mengikuti jalur pendidikan yang bernuansa Islami secara tekun. Pendidikan formal, informal, dan nonformal adalah salah satu tahapan yang mau tidak mau akan dilalui oleh seluruh generasi muslim.

Seorang mukmin yang masuk ke dalam agama Islam secara menyeluruh mengandung makna bahwa mukmin tersebut seluruh hidup dan kehidupannya tunduk dan patuh kepada ajaran agama Islam. Sikap dan perilaku kehidupannya harus sesuai dengan tuntunan agama Islam sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah saw. Beliau memperoleh pujian Allah Swt. sebagai manusia yang memiliki budi pekerti yang luhur (QS. 68:4): *"Sesungguhnya engkau (Muhammad) mempunyai budi pekerti yang luhur."* Sikap dan perilaku yang sesuai dengan tuntunan agama Islam dalam pembahasan ini disebut dengan moral keagamaan.

Pendidikan Islam memiliki peranan yang sangat urgen dalam upaya mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Pembinaan etika, moral, dan akhlak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan agama Islam bisa menjadi sarana yang ampuh dalam menangkal pengaruh-pengaruh negatif baik pengaruh yang datang dari dalam maupun dari luar negeri.

Sejalan dengan derap laju pembangunan dan laju perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta arus reformasi yang terus bergulir, pembinaan etika, moral, dan akhlak semakin dirasa begitu esensi sebagai salah satu alat pengendali bagi tercapainya tujuan pendidikan nasional secara utuh. Pada saat sekarang ini, tampak ada gejala di kalangan anak muda yang menunjukkan bahwa mereka mengabaikan etika, moral, dan akhlak dalam tata krama pergaulan yang sangat diperlukan dalam sebuah masyarakat yang beradab (*civilized society*).

Pada saat sekarang ini bangsa Indonesia sedang mengalami pendangkalan nilai. Nilai-nilai itu kini bergeser dari kedudukan dan fungsinya. Imbas dari bergesernya kedudukan dan fungsi nilai itu salah satunya adalah dekadensi moral yang tercermin dalam sikap dan tingkah laku masyarakat yang tidak dapat menghargai orang lain. Padahal, moral dan nilai-nilai moral menempatkan hak asasi manusia sebagai alat ukur pencegahan terjadi pelanggaran-pelanggaran, seperti pemerkosaan, pembunuhan, tawuran, korupsi, dan sebagainya.

Kurniawan (dalam *Suara Merdeka*. 20 Desember 1999:6) memberikan alternatif bagi pembentukan kepribadian masyarakat yang bermoral, mandiri, berperadaban, dan berwawasan pengetahuan luas, yakni membangun pendidikan berbasis religi. Menurutnya, seseorang dalam kondisi apa pun akan lebih bermakna, jika semua perilaku yang muncul dari dirinya searah dengan pribadinya. Dengan kata lain, tiap perilaku seyogianya dilandasi komitmen diri yang teguh sehingga terhindar dari sikap hipokrit. Dengan demikian, tiap perilakunya lebih mudah untuk dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, pendidikan Islam diharapkan mampu mengantarkan peserta didik menjadi individu yang sanggup mandiri serta siap mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan Tuhan serta menjadikan individu yang lebih bermartabat, yakni individu yang produktif, kreatif, dan inovatif.

## **E. Penutup**

Pendidikan moral keagamaan memiliki peranan yang positif dan signifikan dalam membentuk akhlak peserta didik sebab pendidikan ini senantiasa bertujuan agar siswa memahami, menghayati, meyakini, dan mengamalkan ajaran Islam sehingga menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah Swt., dan berakhlak mulia.

Pendidikan moral keagamaan juga memiliki peranan yang positif dan signifikan dalam pendidikan nasional. Oleh karena itu, peserta didik perlu memperoleh pendidikan dan bimbingan tersebut agar kelak memiliki pengetahuan dan keterampilan serta mampu mengamalkan ajaran Islam dengan disertai perilaku, budi pekerti, dan, akhlak yang mulia.

*(Umum Budi Karyanto, M.Hum)*

## DAFTAR PUSTAKA

- Bertens, K. 1999. *Etika*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Burhanuddin. 1997. *Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hurlock, Elizabeth B. 1989. *Perkembangan Anak*, (edisi terjemahan oleh Meitasari Tjandrasa). Jakarta: Erlangga.
- Imawan, Riswandha. 1994. "Pelajaran yang Dilupakan". Dalam *Wawasan*. 15 Februari 1994. Semarang.
- Kohlberg, L. 1971. *Stages of Moral Development*. Diambil tanggal 2 Mei 2008 dari <http://sylvie.edublog.org/2006/09/19/teori-perkembangan-moral/>).
- Krathwohl, David R. 1973. *Taxonomy of Educational Objectives*: New York: Longman Groups.
- Kurniawan, Khaerudin. 1999. "Membangun Pendidikan Berbasis Religi". Dalam *Suara Merdeka*. 20 Desember 1999. Semarang.
- Soemardi, H. 2000. "Kekerasan terhadap Perempuan: Banyak Dilakukan Suami dan Pacar". Dalam *Suara Merdeka*. 19 Maret 2000. Semarang.
- Suyanto. 2000. *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium Ketiga*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Toha, M. Habib. 1990. "Pendidikan Nilai: Suatu Tinjauan Teoretis dan Metodologis". Dalam *Jurnal Walisongo*. (Mei, XXX dan XXXI). Semarang.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, Departemen Agama RI. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Toha Putra.

# BAB 16

## PESANTREN:

### BASIS PENDIDIKAN MORAL DAN NILAI

#### A. Pengantar

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* tidak diragukan lagi esensi ajarannya, yang mencakup semua dimensi kemanusiaan. Mohammad Abdus Salam, seorang muslim yang memperoleh hadiah nobel dalam bidang fisika tahun 1979 mengungkapkan bahwa: *"The Moslem have scientific past in a accordance with the commandments of the Holy Book and the prophet of Allah it is their religions duty to strive for scientific future..., that modern science is not a creation only of the western"*. Sedangkan, H.A.R Gibb dalam bukunya, *"Whiter Islam"* mengungkapkan bahwa Islam sesungguhnya lebih dari sekedar agama, ia adalah suatu perbedaan yang sempurna.<sup>1</sup>

Dewasa ini kita memasuki abad XXI yang ditandai dengan pesatnya laju perkembangan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), terutama teknologi informasi, komputer dan komunikasi. Perkembangan tersebut sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, bukan hanya dalam bidang materi tetapi juga dalam spiritual (immateri).

Pada awal abad XX umat manusia mendewakan IPTEK, namun tatkala memasuki abad XXI justeru umat manusia mengalami guncangan dahsyat karena tidak sanggup mengikuti kemajuan IPTEK yang berkembang sedemikian cepat dan spektakuler. Sayangnya IPTEK yang berkembang adalah IPTEK Barat (sekuler) dan materialistik, tidak mengenal nilai, moral, etika dan agama sebagai pijakan pengembangannya, sehingga berbagai krisis moral seperti ketidakpuasan, ketidakbahagiaan,

---

1. Edi Kusnanda, *Pesantren Sebagai Partner Pendidikan Tinggi Islam*, (Brebos: Indah Madani, LP3I, 2008), hal. 26.

kerakusan, niat jahat, kecemasan, berbagai penyimpangan dan kehilangan pengendalian diri tidak dapat dipertanggulangi, oleh karena itu perkembangan IPTEK memerlukan nilai-nilai yang menjadi landasan moral agar dampak negatif IPTEK dapat ditangkal, kalau tidak maka IPTEK akan menghancurkan tatanan nilai kehidupan manusia.

Melihat kenyataan demikian, ungkapan Allah dalam Surat Al Mulq ayat 2 yang artinya: "*Dia (Allah) yang menciptakan adanya kematian dan kehidupan bagi manusia, pada hakekatnya sebagai ujian, mampukah berbuat baik untuk kehidupan? ....*" (QS. Al Mulq: 2) memberi isyarat bahwa peradaban manusia adakalanya berdampak positif juga adakalanya berdampak negatif. Jika perkembangan peradaban tidak disertai moral, niscaya berdampak negatif bagi kehidupan manusia, karena bersifat *material oriented*; tidak menyadari di balik kebutuhan materi terdapat kebutuhan immateri. Di sinilah letak perbedaan Islam dengan agama lain: mengajarkan keseimbangan (*balance*) antara duniawi dan ukhrowi.

Dalam konteks pendidikan, pentingnya keseimbangan ini ditunjukkan dengan perlunya pendidikan agama dan nilai melalui proses pembelajaran di lembaga pesekolahan. Selain sistem persekolahan, terdapat lembaga asli (*indigenous*) bangsa Indonesia yaitu pesantren<sup>2</sup> yang telah teruji dan berpengalaman mencetak peserta didik (santri) berakhlakul karimah, mandiri, bergotong royong, sederhana dan tawadlu, sehingga sering terungkap pesantren adalah bengkel moral dan lumbung ilmu pengetahuan agama. Namun seiring dengan perkembangan zaman, *out put* pesantren dipertanyakan, karena satu sisi tetap mempertahankan tradisi keilmuan pesantren, tetapi di sisi lain tidak mampu menghadapi tantangan teknologi yang begitu canggih.

---

2. Al Malik Fajar, *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam*, (Jakarta: LP3NI, 1998), hal. 9.

## B. Tantangan Pesantren di Era Globalisasi

Era globalisasi adalah era keterbukaan. Di antara karakteristiknya adalah pasar bebas, kembangnya nilai-nilai demokrasi dan terbukanya budaya global. Pasar bebas menuntut penyelenggaraan satuan pendidikan bermutu agar dapat menyikapi, mengemas kurikulum dan strategi pembelajaran yang mengarah pada standar mutu yang diterapkan pada dunia kerja (industri) dan pasar bebas.

Dalam bidang politik muncul nilai-nilai demokrasi yang mampu menjadi pilar kehidupan masyarakat bermartabat. Untuk mewujudkan masyarakat demokrasi perlu pemahaman arti kehidupan bersama yang disadari perindividu, untuk mencapai kemaslahatan bagi sesama dan menjauhkan perilaku yang merugikan kehidupan bersama. Dalam konteks ini, produk pendidikan (*out put* atau *out come*) yang diharapkan adalah insan yang mampu hidup bersanding penuh kemesraan tanpa memandang ras, agama, suku, etnis, warna kulit dan bahasa. Kehidupan demokratis lebih mengutamakan pendekatan rasional (akal dan naluri) bukan menggunakan pendekatan emosional yang mengedepankan kekuatan otot, siapa yang kuat menggerakkan masa lebih banyak maka menang tanpa alasan rasio dan naluri. Pembentukan demokrasi dapat dibentuk lewat dunia pendidikan. Semakin profesional penyelenggaraan satuan pendidikan, diasumsikan akan menghasilkan insan demokrat sejati. Dengan demikian, pendidikan memiliki peran strategis dalam mencetak insan demokrasi.

Ciri lain era globalisasi adalah budaya global; dunia tanpa sekat atau batas (*border less world*), kampung global berbentuk miniatur. Dalam budaya global, apa yang terjadi di belahan dunia lain dapat dilihat, dirasa dan dipahami secara cepat tanpa harus datang ke tempat kejadian; tetapi cukup menggunakan alat yang sederhana hasil produk budaya alat komunikasi dan elektronika, sehingga yang menjadi keprihatinan kehidupan di era globalisasi adalah mudarnya budaya lokal, yang sebenarnya masih memiliki nilai-nilai kebangsaan tinggi berbeda dengan bangsa lain, dimana budaya bangsa lain belum tentu diterima pada bangsa tertentu. Oleh



karena itu, untuk menghadapi budaya global, peranan pendidikan sangat strategis guna membentuk budaya lokal (negara) sendiri, memberi pemahaman dan sikap menghargai budaya milik sendiri.<sup>3</sup>

Transformasi sosial global tersebut tidak berjalan mulus sehingga muncul paradoks, seperti yang dikemukakan John Naisbitt. Dalam istilah UNESCO (badan PBB yang menangani pendidikan dan kebudayaan tingkat dunia) paradoks abad ke-21 akan muncul ketegangan-ketegangan sebagai berikut:

1. Ketegangan antara global dan lokal
2. Ketegangan antara universal dan individu
3. Ketegangan antara tradisional dan modern
4. Ketegangan antara program jangka panjang dan program jangka pendek
5. Ketegangan antara kompetitif dan kesempatan bagi semua
6. Ketegangan antara spiritual dan material
7. Pesatnya ilmu pengetahuan menimbulkan ketegangan kemampuan manusia untuk menyerap kemajuan.

Ketegangan-ketegangan tersebut dapat teratasi dengan siapnya SDM yang unggul, karena hanya SDM yang berkualitas kita akan mampu menghadapi pasar bebas dan persaingan kerja (industri). Sumber Daya Alam (SDA) bangsa Indonesia yang melimpah ruah menjadi rebutan bangsa lain yang memiliki SDM unggul, jika kita tidak dapat mengolah dan memproduksi hasil yang berkualitas untuk memenuhi pangsa (kebutuhan) pasar dunia.

Kekuatan global dunia sedang dan akan terjadi di dunia sekarang dan masa depan, jika dapat dipahami, diantisipasi dan dipersiapkan SDM yang tangguh, niscaya dapat tertanggulangi dan dihadapi dengan mudah. Di sinilah terjadi interaksi antara globalisasi dan pendidikan. Globalisasi akan mempengaruhi pembangunan pendidikan kini dan masa datang atau menuntut paradigma pendidikan nasional yang baru yang berorientasi pada:

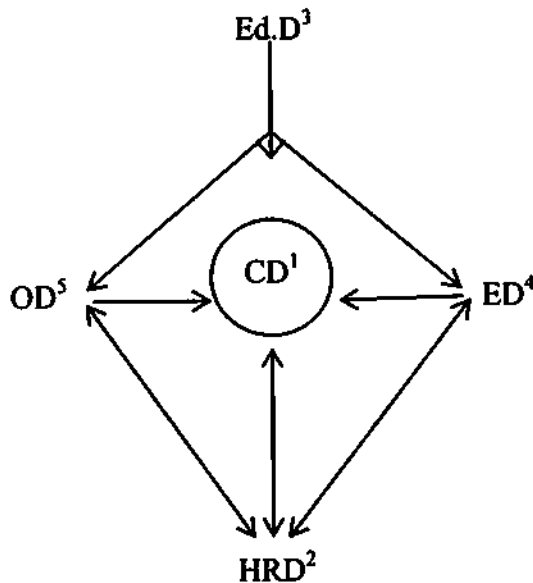
---

3. H.A Tilaar, *Agenda Reformasi Pendidikan Nasional*, (Magelang: Terra Indonesia, 1998), hal. 314.

1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kawasan regional maupun global. Tujuan ini mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang langsung stabil, dan tidak berombang-ambing oleh pengaruh ekonomi dunia luar, sehingga taraf kehidupan bangsa Indonesia dapat ditingkatkan.
2. Keanggotaan individu masyarakat Indonesia yang demokratis. Masyarakat yang demokratis bisa terwujud jika individu masyarakat terdidik secara bermutu, sehingga mampu memahami perbedaan dan menghormati kelebihan suatu individu masyarakat, pendek kata muncul suatu persaingan yang sehat. Untuk mewujudkan masyarakat terdidik diperlukan institusi pendidikan yang bermutu dan mampu menghasilkan *out come* demokratis, sehingga hubungan antara proses demokratisasi bangsa Indonesia berhubungan erat dengan dunia pendidikan.
3. Di dalam masyarakat masa depan harus ada hubungan antara masyarakat lokal dan dunia. Tanpa masyarakat lokal yang bermutu tidak mungkin diciptakan masyarakat dunia yang bermutu. Oleh sebab itu, masyarakat lokal yang aman, adil dan makmur menjadi suatu tumpuan program pembangunan bangsa Indonesia, memiliki jaringan mendunia melalui penguasaan bahasa yang mendunia (*asing*) agar dapat berinteraksi komunikatif dalam segala persoalan yang dapat mewujudkan derajat bangsa Indonesia sejajar dengan masyarakat di dunia. Pendidikan menjadi kunci utama terwujudnya manusia yang kreatif, produktif dan berkualitas yang dapat bersandingan, berhubungan dan berkompetitif di tingkat global.

Sudjana memberi formulasi pengembangan SDM yang tangguh dalam menghadapi era global dibuat melalui bagan sbb:

Gambar pengembangan SDM menurut Sudjana:<sup>4</sup>



Keterangan :

1. CD : *Community Development* (Pengembangan Masyarakat)
2. HRD : *Human Resources Development* (Sumber Daya Manusia)
3. Ed.D : *Education Development* (Pengembangan Pendidikan)
4. ED : *Economic Development* (Pengembangan Ekonomi)
5. OD : *Organization Development* (Pengembangan Organisasi)

Dari bagan di atas dapat ditafsirkan bahwa terbentuknya Masyarakat Madani (*Civil Society*) yang menjadi ciri khas masyarakat modern karena pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh. Pengembangan SDM yang tangguh akan terwujud jika terdapat proses pendidikan bermutu (*quality education*). Dari pendidikan bermutu maka akan menghasilkan *out put* yang terampil, mandiri dan bertanggungjawab dalam menghadapi pasar bebas serta tangguh dalam bidang ekonomi,

4. Sudjana, *Manajemen Program Pendidikan*, (Bandung: Falah Production, 2004), hal. 2003.

bahkan tidak sebatas mampu memasuki dunia kerja tetapi juga membangun lapangan kerja baru sehingga tumbuh perekonomian yang tangguh.

Kemampuan dan ketangguhan SDM dalam bidang ekonomi dapat berimbas pada tatanan kehidupan demokrasi sebagai ciri khas masyarakat modern dimana perwujudan hak asasi dijunjung tinggi tanpa adanya tegangan-tegangan emosi, tetapi semua persoalan dapat diselesaikan dengan seksama dan bersama tanpa eksekusi negatif yang berkepanjangan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat demokrasi diperlukan pengembangan organisasi masyarakat yang rasional dan terdidik.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan (Islam) selalu merespon perkembangan masyarakat sesuai zamannya (eranya). Pada tahun 1967, pesantren berhasil dalam mengambil alih posisi pelajaran budi pekerti yang diajarkan di sekolah-sekolah,<sup>5</sup> diganti dengan pendidikan agama (Islam) dengan menekankan pada pendidikan akhlak. Ketika muncul krisis multidimensional, salah satunya adalah krisis moral, masyarakat berpandangan, ukuran kebahagiaan adalah materi, tetapi paradigma ini menuntun masyarakat terjebak pada gaya hidup yang berujung pada keputus-asaan, bunuh diri, pelampiasan pada hal-hal yang dilarang oleh agama dan norma, seperti narkoba, seks bebas, *broken home*, stress dan lain-lain.

Dalam kondisi demikian, orang tua/wali murid sangat berhati-hati dalam menitipkan putra-putrinya di lembaga pendidikan, di antara mereka, melirik keberadaan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan alternatif untuk pembinaan mental spiritual dalam menghadapi krisis multidimensional bangsa kita.

Memang diakui adanya *image* masyarakat bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan yang sebatas berkuat pada nilai *ukhrowi* belaka, namun tidak semua pesantren menutup diri pada hal-hal yang sifatnya keduniawian. Seiring tuntutan dan

---

5. Arief Furchan, *Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia*, (Gama Media, 2004), hal. 4.

harapan masyarakat modern, pesantren telah melakukan inovasi dalam berbagai hal, di antaranya: inovasi kelembagaan, proses belajar mengajar (PMB) dan inovasi sarana prasarana dan banyak ditemukan pesantren yang melampaui habitatnya dalam perkembangan bahkan mampu bersaing dengan pendidikan persekolahan karena pengelolaannya tidak hanya sebagai pendidikan non formal saja tetapi pendidikan pesantren integral antara pendidikan formal dan non-formal.<sup>6</sup>

Dengan realita demikian, maka pemenuhan kebutuhan peserta didik sebagai unsur jasa pendidikan dapat dilayani oleh pesantren, begitu pula kemungkinan orang tua/wali murid memiliki anak yang sholih dan sholihah akan terwujud, sehingga siap untuk menghadapi era globalisasi yang kompetitif ini.

### C. Pesantren dan Pembentukan Tradisi Nilai Keagamaan

Ada beberapa ungkapan yang memiliki kesamaan namun berbeda pijakan dalam memaknai istilah moral dan nilai. Istilah moral berasal dari bahasa latin *Mores* berarti naluri baik untuk keteraturan tingkah laku.<sup>7</sup> Sedangkan nilai dalam bahasa asing dari kata *value* (nilai) berarti ukuran yang bersumber dari etika, dimana *ethika* berasal dari kata *Ethos* yang berarti suatu kehendak baik yang tetap.<sup>8</sup>

Adapun dalam bahasa Agama (Islam) moral dan nilai disebut dengan menggunakan istilah *akhlak*. Akhlak berasal dari kata *kholqun* berarti perangai, budi pekerti, tabiat dan adab yang melekat pada perilaku umat manusia; adakalanya baik adakalanya buruk, sehingga akhlak dalam disiplin ilmu adalah sesuatu yang mempelajari perbuatan baik dan buruk yang dilakukan umat manusia.

Pokok permasalahan dalam memahami makna antara moral dan nilai dengan akhlak terletak pada perbedaan sumber landasan. Moral dan nilai berasal dari pemikiran manusia

- 
6. Koentowidjoyo, *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 1991), hal. 247.
  7. Emile Durkheim, *Pendidikan Moral*, (Jakarta: Erlangga, 1961), hal. XI
  8. Kahar Masyur, *Membina Moral dan Ahlak*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal. 2.

tentang perbuatan baik dan buruk atau bersumber dari ilmu pengetahuan sedangkan akhlak bersumber dari wahyu Tuhan (Allah SWT) yang kebenarannya tidak diragukan lagi atau bersifat absolut.

Ilmu akhlak merupakan bagian dari ajaran agama Islam, yang berguna untuk membina kehidupan manusia dalam mencapai tujuan. Tujuan hidup menurut ajaran Islam adalah untuk mengabdikan kepada Tuhannya (Allah SWT)<sup>9</sup> sebagaimana firman Allah SWT: “*Tidak sekali-kali Aku (Allah) ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan kepada-Ku (Allah).*” (QS. Al Dzariyat, ayat 11).

Pengabdian manusia memerlukan pengorbanan secara material dan immaterial, pengorbanan material merupakan pengorbanan yang dapat dilihat, diukur dan dirasakan di alam nyata (dunia), sedangkan pengorbanan immaterial bersifat abstrak, tidak dapat dirasakan jika memiliki keteguhan keyakinan (kepercayaan) suatu doktrin agama. Untuk mencapai kedua pengorbanan pada tingkat pengabdian kepada Tuhan membutuhkan ketulusan hati nurani atau keikhlasan beramal (berbuat).

Keikhlasan pengabdian terhadap Tuhan (Allah SWT) dibutuhkan keyakinan (keimanan) melakukan perintah dan menjauhi larangan Tuhan (Allah SWT) dalam bentuk ibadah kepada-Nya serta memiliki sikap yang baik (akhlakul karimah) terhadap hubungan sesama manusia maupun pada penciptaan-Nya. Sering dikenal dengan tiga pilar kehidupan manusia, yaitu iman, islam dan ihsan.<sup>10</sup>

Tiga pilar tersebut akan terwujud dalam diri individu manusia, dan diproses lewat pendidikan agama (Islam). Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai bidang studi yang diajarkan di persekolahan memiliki tujuan pendidikan agama (Islam) yang menyentuh pada kebutuhan hidup manusia yakni membentuk *insan kamil* (manusia sempurna). Insan Kamil

---

9. Abdurrahman Al Nahlawi, *Ushul al-Tarbiyah al-Islamiyah, wa Asaalibiha*, (Damasykus Syuriyah: Darul Fikri, 1983), hal. 107.

10. Imam Bawawi, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*, (Surabaya: al-Ikhtlas, 1993), hal. 80.

menurut konsep Islami (Ajaran Islam) adalah manusia yang memiliki keseimbangan kebutuhan jasmani dan rohani semata-mata mencari ridha Allah, karena dengan ridha-Nya kebahagiaan dunia akhirat akan tercapai. Hal inilah yang menjadi titik sentral tujuan hidup manusia, sebagaimana Allah berfirman:

ومنهم من يقول ربنا اننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

Artinya: "Sebagian manusia memohon kepada Tuhannya (Allah), ya Tuhan kami berikanlah kehidupan di dunia yang baik (sejahtera), diakhirat yang baik dan terhindar dari ancaman api neraka.

Suatu hal yang menjadi problem akhlak pada peserta didik lembaga pendidikan formal (sekolahan atau madrasah) adalah terbatasnya alokasi waktu, sempitnya materi yang harus diajarkan dan terbatasnya sarana prasarana, serta orientasi pembelajaran pada *legal* formal (hanya sebatas mencari ijazah atau sertifikat), sehingga kurang serius dalam pembinaan akhlak, yang berakibat pada banyaknya alumni sekolah/madrasah belum mencapai tujuan pendidikan agama (Islam) yang diinginkan yakni *Insan Kamil li Ridha ilallah*.<sup>11</sup>

Menurut Emile Durkheim sekolah merupakan tempat yang ideal untuk membentuk moralitas peserta didik. Pesantren, sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam sering dipandang sebelah mata perannya dalam membangun moralitas bangsa ini, apalagi dalam kondisi normal. Namun jika muncul kenakalan, dekadensi moral dan tawuran antar pelajar, masyarakat baru sadar terhadap eksistensi dan peran pondok pesantren.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistim persekolahan umum. Santri belajar 24 jam, baik belajar secara tekstual maupun kontekstual dalam satu lingkungan sehingga mudah terkontrol oleh pengaruh (kyai). Motivasi para santri belajar di pesantren di samping untuk menuntut ilmu pengetahuan agama dan umum

11. Muhaimin, *Konsep Pendidikan Islam*, (Solo: Romdhoni Press, 1993), hal. 23.

juga berkeinginan menjadi orang yang memiliki sikap pribadi yang baik (*akhlakul karimah*).

Dilihat dari segi kurikulum yang disajikan mayoritas pesantren menekankan pada kajian *ubudiyah ala syafi'iyah* (kitab-kitab fikih) disertai tata cara (*kaifiyah*) ibadah yang *tuma'ninah*, *khusyu*, *tawadhu* dan *tadarru*, agar peribadatannya diterima di sisi Allah, secara tidak langsung kajian kitab fiqih ala syafi'iyah memuat pendidikan akhlak, di samping kajian kitab-kitab lain seperti kitab tafsir, hadis, aqidah dan tarikh.

Ada hal yang spesifik dalam pembelajaran kitab, yakni memaknai kitab dengan sistem *ngabsahi* (memaknai suatu kata) melalui cara multidimensi. Ilmu alat (*nawhu-shorof*) menjadi cara membaca dan menentukan struktur kalimat dalam mencari arti dan maksud yang tertera. Penggunaan bahasa daerah menjadi ciri khas dalam menanamkan sikap tawadhu melalui kata-kata. Dalam pengertian lain, pembelajaran kitab kuning mengajak pada para santri untuk bersikap aktif, kreatif, dan menyenangkan.<sup>12</sup> Sebagaimana model pembelajaran yang era sekarang dikenal dengan sistim PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan).

Pola asrama dalam pesantren banyak ditiru oleh pendidikan lain, dengan istilah *boarding school*. Pola ini dikemas agar para peserta didik dapat berinteraksi dengan sesama. Memahami karakter individu membutuhkan pembiasaan yang terus menerus, begitu sikap menghargai dan menghormati sesama dalam berbagai strata sosial dibutuhkan latihan secara kontinu. Kemandirian tidak akan terwujud jika tidak dimulai sejak kecil, semua itu didesain dalam bingkai asrama atau pesantren dengan tatanan nilai yang jelas melalui tata tertib pesantren, sehingga dapat dibuktikan bahwa pesantren menjadi bengkel moral (karakter) individu yang senantiasa mematuhi nilai-nilai kemasayarakatan yang dijunjung tinggi bernuansa Islami (*akhlak karimah*).

---

12. Hiroko Hirokoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: P3M, 1987), hal. 120.



#### **D. Kesimpulan**

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pondok pesantren sebagai pendidikan yang pertama (*indigenous*) bagi pribumi masyarakat Indonesia tetap eksis dan selaras dengan perkembangan zaman.

Sistem pendidikan pesantren yang memiliki karakteristik tersendiri menjadi model pembelajaran pendidikan moral yang dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kemasyarakatan. Di era globalisasi yang cenderung pada kehidupan individualistik egoistik dan materialistic, pemikiran pendidikan Islam memulai mengorek eksistensi pesantren dalam pembinaan individu. Pola-pola pembelajaran pesantren masih efektif dalam pembentukan kepribadian muslim. Oleh karena itu, tidak diragukan bahwa pesantren menjadi bengkel moral.

*(Drs. Ahmad Zaeni, M.Ag)*

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al Nahlawi. 1983. *Ushul al-Tarbiyah al-Islamiyah, wa Asaalibiha*. Damasykus Syuriah: Darul Fikri.
- Al Malik Fajar. 1998. *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam*. Jakarta: LP3NI.
- Arief Furchan. 2004. *Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Edi Kusnanda. 2008. *Pesantren Sebagai Partner Pendidikan Tinggi Islam*, dalam Indan Madani. Brebes: LP3I.
- Emile Durkheim. 1961. *Pendidikan Moral*. Jakarta: Erlangga.
- H.A Tilaar. 1998. *Agenda Reformasi Pendidikan Nasional*. Magelang: Terra Indonesia.
- Hiroko Hirokoshi. 1987. *Kyai dan Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M.
- Imam Bawawi. 1993. *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*. Surabaya: al-Ikhlash.
- Kahar Masyur. 1994. *Membina Moral dan Ahlak*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koentowidjoyo. 1991. *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan.
- Muhaimin. 1993. *Konsep Pendidikan Islam*. Solo: Romdhoni Press.
- Sudjana. 2004. *Manajemen Program Pendidikan*. Bandung: Falah Production.

## TENTANG PENULIS DAN EDITOR

**Muhlisin** dilahirkan di Pati tahun 1970. Pendidikan S1 dan S2-nya diselesaikan di IAIN Walisongo Semarang. Sehari-hari bekerja sebagai dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Pekalongan dengan mengampu mata kuliah Perbandingan Pendidikan dan Perencanaan Sistem Pengajaran. PAI. Sejak tahun 2006-2010 dipercaya sebagai Puket II bidang Administrasi dan Keuangan. Kini Puket I bidang Akademik dan Ketua Dewan Pendidikan Kab. Pekalongan. Lelaki *low profile* ini aktif sebagai peserta dan pembicara dalam berbagai seminar nasional. Sejak tahun 2008 bersama beberapa sejawatnya mendirikan Lembaga Kajian dan Pengembangan Pendidikan Agama Islam (LKP2AI) STAIN Pekalongan dan menjadi direktornya. Beberapa tulisan dan hasil penelitiannya dapat dibaca pada Jurnal Forum Tarbiyah, Jurnal Religia, dan Jurnal Penelitian STAIN Pekalongan, Radar Pekalongan, dan lain-lain. Penulis saat ini sedang merampungkan disertasi tentang Pendidikan Nilai di SPs UPI Bandung.

**Sofyan Sauri** lahir di Cianjur, 20 April 1956. Pria *kalem* ini mengawali karir sebagai ustadz madrasah diniyah di kota kelahirannya. Sehari-hari bekerja sebagai dosen Sekolah Pascasarjana UPI Bandung. Ia aktif sebagai pembicara dalam berbagai seminar nasional tentang Pendidikan Nilai. Di antara karya-karya ilmiahnya adalah *Mata Kuliah Pengembangan Keperibadian Pendidikan Agama Islam*, (Buku) untuk Perguruan Tinggi Bandung: Alfabeta, 2004; *Pendidikan Berbahasa Santun*, (Buku) Bandung: Grapindo; *Nilai Pendidikan Agama Dalam Keluarga*, (Buku) Bandung: Grapindo; *Pengembangan Strategi Pendidikan Berbahasa Santun di Sekolah*, (Jurnal terakreditasi, Mimbar UPI, 2003); *Nilai-Nilai Kesantunan dalam Al Quran*, Jurnal terakreditasi Al Hadharah, Bahasa Arab Malang UM; *Pendidikan Nilai Kontemporer* (Buku) Bandung: UPI Press; *Pendidikan Etika* (Buku), dan lain-lainnya.

**Agus Maemun.** Sehari-hari bekerja sebagai dosen Fakultas Tarbiyah UIN Malang. Ia aktif sebagai peserta dan pembicara dalam berbagai seminar baik di tingkat lokal, regional maupun nasional. Berbagai tulisannya dapat dibaca pada beberapa jurnal di UIN Malang, Jurnal Forum Tarbiyah STAIN Pekalongan, dan lain-lain.

**Mutammam** adalah dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Pekalongan. Lelaki kelahiran Purwokerto ini aktif dalam kegiatan-kegiatan kependidikan dan kemasyarakatan di sekitar Jawa Tengah dengan menjadi fasilitator peningkatan mutu madrasah di Indonesia atas bantuan ADB (2010), anggota Panwaslu Kota Pekalongan (2010) dan peneliti pendidikan. Ia aktif menulis dalam berbagai media cetak dan jurnal ilmiah, seperti Jurnal Penelitian, Jurnal Forum Tarbiyah dan Jurnal Religia STAIN Pekalongan, Majalah Gema Pendidikan, dan lain-lain. Pada tahun 2006 mendapatkan bantuan penelitian kompetitif individual dari Depag RI Jakarta. Kini penulis sedang menyelesaikan pendidikan S3 di Universitas Diponegoro Semarang.

**Maskhur** adalah dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Pekalongan sejak 2004. Lelaki kelahiran Blado Batang ini aktif sebagai direktur eksekutif LKP2AI STAIN Pekalongan. Di antara karya tulis dan penelitiannya adalah: *Perjuangan Warga Keturunan Arab dalam Bidang Pendidikan pada Masa Orde Baru (1960-1998) (Studi Kasus Lembaga Pendidikan Al-Irsyad Pekalongan)*; *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pendidikan (Studi Tentang Partisipasi Pengusaha Batik di Kota Pekalongan dalam Penanganan Pendidikan Anak Tidak Mampu)*, dan lain-lain.

**Muh. Arwani** dilahirkan di Purwodadi pada 13 April 1964. Alumni Pesantren Modern Gontor ini menyelesaikan S1 di FIAI UII Yogyakarta pada tahun 1990 dan dilanjutkan ke S2 UIN Yogyakarta, lulus tahun 2005. Kini ia dosen FAI Universitas Cokroaminoto Yogyakarta. Di antara buku karyanya adalah *Denyut Nadi Santri Gontor 2004* (penulis) dan *Studi Islam Praktis* (editor, 2004). Ia aktif menulis di berbagai jurnal dan media massa yang terbit di Yogyakarta.

**Imam Hanafie al-Jauhari.** Lelaki kelahiran Blitar ini adalah dosen pertama Jurusan Tarbiyah STAIN Pekalongan yang mendapatkan gelar doktor dari Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta. Sehari-hari mengampu mata kuliah Filsafat Islam dan Tasawuf di STAIN Pekalongan. Ia aktif dalam penelitian yang diselenggarakan P3M STAIN Pekalongan. Bukunya tentang Filsafat Islam dan Tasawuf telah diterbitkan oleh STAIN Pekalongan Press.

**Maemonah.** Doktor kelahiran Kudus ini sehari-hari menjadi dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Pekalongan untuk mata kuliah TMPAI, Evaluasi Pendidikan, dan STPI. Aktif dalam berbagai diskusi di lingkungan STAIN Pekalongan dan penelitian yang dibiayai oleh DIPA/P3M STAIN Pekalongan.

**Sopiah.** Perempuan lincih ini telah menyelesaikan S3 (doktor) di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Aktif sebagai pembicara dalam berbagai kegiatan seminar lokal, regional maupun nasional. Pernah menjadi Ketua Prodi D2 STAIN Pekalongan (kini *almarhum*). Sehari-hari bekerja sebagai Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) Jurusan Tarbiyah STAIN Pekalongan. Ia aktif menulis di Jurnal Forum Tarbiyah dan Jurnal Penelitian STAIN Pekalongan.

**Moh. Slamet Untung** dilahirkan di Pemalang pada 21 April 1967. Lulusan S2 IAIN Walisongo ini bekerja sebagai dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Pekalongan. Di antara karya tulisnya: *Muhammad Sang Pendidik* (Rizki Putra); *Menelusuri Metode Pendidikan Ala Rasulullah* (Rizki Putra bekerjasama dengan Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang); dan *Pendidikan Budi Pekerti Model Pesantren (Konsep Pendidikan Alternatif Bagi Terapi Dekadensi Moral)* (Jurnal Forum Tarbiyah STAIN Pekalongan). Kini melanjutkan S3-nya di Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang. Ia aktif sebagai direktur Lembaga Riset Pendidikan (LRP) STAIN Pekalongan.

**Umum Budi Karyanto.** Lelaki kelahiran Randudongkal Pematang ini menyelesaikan pendidikan S2-nya dari UNS Surakarta dalam bidang linguistik (Bahasa Indonesia). Ia adalah satu-satunya ahli Bahasa Indonesia di STAIN Pekalongan yang aktif memberikan ceramah-ceramah tentang kebahasaan di sekolah-sekolah sekitar Pekalongan, Batang dan Pematang. Bukunya yang berjudul *Bahasa Indonesia* telah diterbitkan STAIN Pekalongan Press. Beberapa artikelnya dapat dibaca di Jurnal Penelitian dan Jurnal Forum Tarbiyah STAIN Pekalongan.

**Musfirotun Yusuf** adalah dosen di Jurusan Tarbiyah STAIN Pekalongan. Bukunya yang berjudul *Manajemen Pendidikan* telah diterbitkan STAIN Pekalongan Press. Meski tergolong *sepuh*, ia masih produktif menulis dalam berbagai jurnal yang ada di STAIN Pekalongan. Pernah menjabat Kepala PUSIM STAIN Pekalongan.

**Ahmad Zaeni.** Lelaki subur kelahiran Tegal ini aktif sebagai pendidik di berbagai perguruan tinggi di Jawa Tengah. Sehari-hari bekerja sebagai dosen STAIN Pekalongan dan mengampu mata kuliah TMPAI SMA/MA. Aktif menulis di Jurnal Forum Tarbiyah STAIN Pekalongan. Kini sedang menyelesaikan S3-nya di Pascasarjana UIN Bandung dengan konsentrasi kajian tentang Inovasi Pesantren.

**Dzakiron** dilahirkan di Pekalongan pada 14 September 1979. Ia adalah lulusan DII PAI STAIN Pekalongan. Sehari-hari bekerja sebagai Guru PAI SDN 01 Paninggaran Kab. Pekalongan. Sejak menjadi pelajar aktif di berbagai organisasi seperti OSIS, IPNU, Forum Komunikasi dan Study Remaja Muslim (FKSRM), Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) DII Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Kini ia menjadi Sekretaris Yayasan Dakwah, Sosial, dan Pendidikan TUNAS MULIA Kecamatan Paninggaran periode 2008-2011. Di antara karya tulis yang dipublikasikan: *Nasi Sisa dan Syukur Kita*, Majalah *Annida*, Jakarta; *Ebtanas: Perlukah Dihapus?*, Tabloid *NgeTrend*, Pekalongan; *Pendidikan Berbohong: Siapa yang Bertanggung Jawab?*, Majalah *Al-Mizan*, Pekalongan; *Tayangan Sinetron Anak: Mengundang Keprihatinan dan Tidak mendidik*, Majalah *Derap Guru Jawa Tengah*, Semarang.

**Ahmad Ta'rifin** dilahirkan di desa Karang Jati, Tarub Tegal. Lulusan madrasah ini melanjutkan S1 dan S2-nya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beberapa tulisannya dapat dibaca di Harian Media Indonesia, Republika, Pelita, Majalah Mimbar Ulama (MUI), Majalah Pesantren, Jurnal Forum Tarbiyah, Jurnal Penelitian STAIN Pekalongan, dan lain-lain. Buku yang lahir dari sentuhan tangannya antara lain: *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren* (penulis bersama Aenurrafiq Dawam, Listafariska Putra Jakarta); *Intelektualisme Pesantren* (kontributor, Diva Pustaka Jakarta); *Demokratisasi dan Paradigma Baru Pendidikan* (penulis, STAIN Pekalongan Press); *Sejarah Peradaban Islam* (penulis, Pustaka Asatruss Jakarta); *Pendidikan Paspur Masa Depan*; *Prioritas Pembangunan dalam Otonomi Daerah* (editor, Nuansa Madani Jakarta); *Reformulasi Pendidikan Islam* (penulis bersama Armai Arief, CRSD Jakarta); *Otonomi Daerah Demi Kesejahteraan Rakyat* (editor, Nuansa Madani Jakarta); *Jaringan Kerjasama Antar Umat Beragama* (editor, Titahandalusia Jakarta); *IAD: Pendekatan Nilai-Qur'ani* (penulis, STAIN Pekalongan Press), dan lain-lain. Sehari-hari bekerja sebagai dosen STAIN Pekalongan. Ia aktif di LKP2AI, Lembaga Riset Pendidikan (LRP) dan Lembaga Survey Validita STAIN Pekalongan.